



PROFIL DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

Penulis :

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.Sos., M.Si

Meiliyana, S.IP., MA

Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP

Alin Ruliati

Nur Anisa

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2024**

KATA PENGANTAR

Buku ini berisi informasi yang mengandung isu gender dan anak, dalam bentuk analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Hadirnya buku yang disusun secara berkala ini (2017, 2021, 2023 dan 2024) diharapkan bisa menjadi isu pemantik dan bahan awal bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan anak di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Kebijakan dan program pembangunan masa kini dihadapkan pada tuntutan ramah anak dan perempuan dalam setiap tahapannya.

Singkatnya seluruh pemangku kepentingan harus mengutamakan perspektif gender dan kondisi terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan yang dilahirkan, terutama ditengah perjuangan kita memasuki revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Akhir kata, semoga hadirnya buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

Lampung Tengah, Desember 2024
Bupati Lampung Tengah,

H. Musa Ahmad, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUANG LINGKUP	1
C. SISTEMATIKA.....	2
BAB II KONSEP DAN METODE SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.....	3
A. KONSEP DAN METODE PENGUMPULAN DATA.....	3
B. WAKTU PENYUSUNAN.....	3
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	3
D. SUMBER DATA.....	5
E. PENGELOMPOKKAN DATA	5
F. ANALISIS DATA	6
BAB III PENYAJIAN DATA TERPILAH.....	8
A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI.....	8
1) PENDUDUK BEDASARKAN JENIS KELAMIN	8
2) PENDUDUK BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN	11
B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN	13
1) PENELITI.....	13
2) GURU DAN TENAGA PENDIDIK	15
3) ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA	18
C. DATA GENDER BIDANG KESEHATAN.....	26
1) LAYANAN KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN	26
2) KADER POSYANDU.....	35
3) TENAGA KESEHATAN	38
4) KELUARGA BERENCANA.....	41
D. DATA GENDER BIDANG EKONOMI.....	46
1) LINGKUNGAN HIDUP	46
2) PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.....	48
3) PERIKANAN DAN PETERNAKAN	50
E. DATA GENDER BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK	57
1) KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	57
2) SUMBER DAYA APARATUR NEGARA.....	58
3) PERANGKAT DESA.....	79
4) LEMBAGA KEMASYARAKATAN	99
5) POLITIK.....	106

F. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM	108
G. DATA GENDER BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN.....	110
1) RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	110
2) LEMBAGA SOSIAL.....	113
H. DATA TERPILAH ANAK	113
1) HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	114
2) KLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	115
3) KLUSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.....	123
4) KLUSTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	128
5) KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS	148
BAB V PENUTUP.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. JUMLAH PENDUDUK.....	8
GRAFIK 2. KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN	9
GRAFIK 3. INDEKS PARITAS GENDER PENDUDUK.....	10
GRAFIK 4. DISPARITAS GENDER PENDUDUK	10
GRAFIK 5. KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN UMUR	11
GRAFIK 6. INDEKS PARITAS GENDER BERDASARKAN UMUR.....	12
GRAFIK 7. DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERDASARKAN UMUR	13
GRAFIK 8. INDEKS PARITAS DAN DISPARITAS GENDER PENELITIAN	15
GRAFIK 9. PERSEBARAN GURU	16
GRAFIK 10. INDEKS PARITAS GURU	17
GRAFIK 11. DISPARITAS GENDER GURU	17
GRAFIK 12. PELATIH OLAHRAGA	18
GRAFIK 13. INDEKS PARITAS PELATIH OLAHRAGA	19
GRAFIK 14. DISPARITAS GENDER PELATIH OLAHRAGA	20
GRAFIK 15. JUMLAH ATLET	21
GRAFIK 16. INDEKS PARITAS ATLET	22
GRAFIK 17. DISPARITAS GENDER ATLET	22
GRAFIK 18. PRESTASI ATLET	24
GRAFIK 19. INDEKS PARITAS ATLET BERPRESTASI.....	25
GRAFIK 20. DISPARITAS GENDER ATLET BERPRESTASI.....	25
GRAFIK 21. KUNJUNGAN (K1 DAN K4) IBU HAMIL	27
GRAFIK 22. PEMBERIAN FE 1 DAN FE 3 PADA IBU HAMIL.....	29
GRAFIK 23. IMUNISASI TETANUS TEXOID PADA IBU HAMIL	30
GRAFIK 24. IBU MELAHIRKAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN	31
GRAFIK 25. PELAYANAN TERHADAP IBU NIFAS.....	32
GRAFIK 26. IBU NIFAS MENDAPAT VITAMIN A	33
GRAFIK 27. PELAYANAN TERHADAP KOMPLIKASI MATERNAL.....	34
GRAFIK 28. PENYEBARAN KADER POSYANDU	37
GRAFIK 29. INDEKS PARITAS KADER POSYANDU	38
GRAFIK 30. DISPARITAS GENDER KADER POSYANDU.....	38

GRAFIK 31.PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN	39
GRAFIK 32.INDEKS PARITAS TENAGA KESEHATAN	40
GRAFIK 33.DISPARITAS GENDER TENAGA KESEHATAN	40
GRAFIK 34.PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	41
GRAFIK 35. INDEKS PARITAS PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	42
GRAFIK 36. DISPARITAS GENDER PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	43
GRAFIK 37. PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU	44
GRAFIK 38. INDEKS PARITAS GENDER PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU.....	45
GRAFIK 39. DISPARITAS GENDER PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU	45
GRAFIK 40. KADER LINGKUNGAN HIDUP	47
GRAFIK 41. INDEKS PARITAS GENDER DAN DISPARITAS GENDER KADER LINGKUNGAN HIDUP	47
GRAFIK 42. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.....	48
GRAFIK 43. INDEKS PARITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI	49
GRAFIK 44. DISPARITAS GENDER PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI	50
GRAFIK 45. KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN	51
GRAFIK 46. INDEKS PARITAS KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN	52
GRAFIK 47. DISPARITAS KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN.....	52
GRAFIK 48. PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PERIKANAN	53
GRAFIK 49. INDEKS PARITAS PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PERIKANAN	54
GRAFIK 50. DISPARITAS PETUGAS PENYULUH LAPANGAN PERIKANAN	54
GRAFIK 51. PETERNAK.....	55
GRAFIK 52. INDEKS PARITAS PETERNAK.....	56
GRAFIK 53.DISPARITAS GENDER PETERNAK.....	57
GRAFIK 54. PNS BERDASARKAN GOLONGAN	58
GRAFIK 55. INDEKS PARITAS PNS BERDASARKAN GOLONGAN	59
GRAFIK 56. DISPARTIAS GENDER PNS BERDASARKAN GOLONGAN	59
GRAFIK 57. PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I.....	60
GRAFIK 58. INDEKS PARITAS PNS GOLONGAN I	61
GRAFIK 59.DISPARITAS GENDER PNS GOLONGAN I	61
GRAFIK 60. PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II.....	62
GRAFIK 61. INDEKS PARITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II	63
GRAFIK 62. DISPARITAS GENDER PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II.....	63

GRAFIK 63. PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.....	64
GRAFIK 64. INDEKS PARITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III	65
GRAFIK 65. DISPARITAS GENDER PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III.....	66
GRAFIK 66. PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV	67
GRAFIK 67. INDEKS PARITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV	68
GRAFIK 68. DISPARITAS GENDER PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV	68
GRAFIK 69. PEJABAT ESELON DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	69
GRAFIK 70. PEJABAT ESELON II.....	70
GRAFIK 71. INDEKS PARITAS DAN DISPARITAS GENDER PEJABAT ESELON II	70
GRAFIK 72. PEJABAT ESELON III.....	71
GRAFIK 73. INDEKS PARITAS PEJABAT ESELON III	72
GRAFIK 74. DISPARITAS GENDER PEJABAT ESELON III	72
GRAFIK 75. PEJABAT ESELON IV	73
GRAFIK 76. INDEKS PARITAS PEJABAT ESELON IV	74
GRAFIK 77. DISPARITAS GENDER PEJABAT ESELON IV	74
GRAFIK 78. JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	75
GRAFIK 79. INDEKS PARITAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM.....	76
GRAFIK 80. DISPARITAS GENDER JABATAN FUNGSIONAL UMUM.....	77
GRAFIK 81. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	77
GRAFIK 82. INDEKS PARITAS FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	78
GRAFIK 83. DISPARITAS GENDER FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	79
GRAFIK 84. PERSEBARAN KEPALA DESA BERDASARKAN JENIS KELAMIN	80
GRAFIK 85. INDEKS PARITAS KEPALA DESA.....	81
GRAFIK 86. DISPARITAS GENDER KEPALA DESA.....	81
GRAFIK 87. SEKRETARIS DESA	82
GRAFIK 88. INDEKS PARITAS SEKRETARIS DESA.....	83
GRAFIK 89. DISPARITAS GENDER SEKRETARIS DESA.....	83
GRAFIK 90. KEPALA URUSAN (KAUR) DESA.....	84
GRAFIK 91. INDEKS PARITAS KEPALA URUSAN (KAUR) DESA.....	85
GRAFIK 92. DISPARITAS GENDER KEPALA URUSAN (KAUR) DESA.....	85
GRAFIK 93. KEPALA SEKSI.....	86
GRAFIK 94. INDEKS PARITAS KEPALA SEKSI.....	87

GRAFIK 95. DISPARITAS GENDER KEPALA SEKSI.....	87
GRAFIK 96. KEPALA DUSUN.....	88
GRAFIK 97. INDEKS PARITAS GENDER KEPALA DUSUN	89
GRAFIK 98. DISPARITAS GENDER KEPALA DUSUN.....	89
GRAFIK 99. KETUA RUKUN TETANGGA	90
GRAFIK 100. INDEKS PARITAS KETUA RUKUN TETANGGA	91
GRAFIK 101. DISPARITAS GENDER KETUA RUKUN TETANGGA	91
GRAFIK 102. PENDAMPING DESA (TA)	92
GRAFIK 103. INDEKS PARITAS PENDAMPING DESA (TA).....	93
GRAFIK 104. DISPARITAS GENDER PENDAMPING DESA (TA).....	93
GRAFIK 105. PENDAMPING DESA PD/TI.....	94
GRAFIK 106. INDEKS PARITAS PENDAMPING DESA PD/TI.....	95
GRAFIK 107. DISPARITAS GENDER PENDAMPING DESA PD/TI.....	96
GRAFIK 108. PENDAMPING DESA LOKAL	97
GRAFIK 109. INDEKS PARITAS PENDAMPING DESA LOKAL	98
GRAFIK 110. DISPARITAS GENDER PENDAMPING DESA LOKAL	98
GRAFIK 111. KADER PKK.....	100
GRAFIK 112. INDEKS PARITAS KADER PKK.....	101
GRAFIK 113. DISPARITAS GENDER KADER PKK.....	101
GRAFIK 114. ANGGOTA KARANG TARUNA.....	102
GRAFIK 115. INDEKS PARITAS ANGGOTA KARANG TARUNA	103
GRAFIK 116. DISPARITAS GENDER ANGGOTA KARANG TARUNA.....	103
GRAFIK 117. ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA	104
GRAFIK 118. INDEKS PARITAS ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA	105
GRAFIK 119. DISPARITAS GENDER ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA	106
GRAFIK 120. INDEKS PARITAS GENDER ANGGOTA DPRD TAHUN 2024-2029.....	107
GRAFIK 121. DISPARITAS GENDER ANGGOTA DPRD TAHUN 2024-2029	107
GRAFIK 122. KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	108
GRAFIK 123. KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	109
GRAFIK 124. BANTUAN PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.....	111
GRAFIK 125. INDEKS PARITAS BANTUAN PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.....	112
GRAFIK 126. DISPARITAS GENDER BANTUAN PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.....	112
GRAFIK 127. INDEKS PARITAS USIA PENGANTIAN DIBAWAH 19 TAHUN.....	117

GRAFIK 128. DISPARITAS GENDER USIA PENGANTIAN DIBAWAH 19 TAHUN.....	118
GRAFIK 129. INDEKS PARITAS USIA PENGANTIAN 19 – 21 TAHUN	120
GRAFIK 130. DISPARITAS GENDER USIA PENGANTIAN 19 – 21 TAHUN	120
GRAFIK 131. PERSEBARAN USIA PENGANTIN LEBIH DARI 21 TAHUN	121
GRAFIK 132. INDEKS PARITAS PERSEBARAN USIA PENGANTIN LEBIH DARI 21 TAHUN.....	122
GRAFIK 133. DISPARITAS GENDER PERSEBARAN USIA PENGANTIN LEBIH DARI 21 TAHUN..	123
GRAFIK 134. GIZI BURUK	124
GRAFIK 135. BALITA KURANG GIZI	125
GRAFIK 136. BALITA LEBIH GIZI	126
GRAFIK 137. BALITA GIZI BURUK MENDAPATKAN PERAWATAN	127
GRAFIK 138. KEMATIAN BAYI	128
GRAFIK 139. SEBARAN ANAK BERSEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	129
GRAFIK 140. INDEKS PARITAS ANAK SEKOLAH.....	130
GRAFIK 141. DISPARITAS GENDER ANAK SEKOLAH.....	130
GRAFIK 142. PESERTA DIDIK JENJANG KELOMPOK BERMAIN.....	131
GRAFIK 143. INDEKS PARITAS PESERTA DIDIK JENJANG KELOMPOK BERMAIN.....	132
GRAFIK 144. DISPARITAS GENDER PESERTA DIDIK JENJANG KELOMPOK BERMAIN.....	133
GRAFIK 145. PESERTA DIDIK JENJANG KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK	134
GRAFIK 146. INDEKS PARITAS PESERTA DIDIK JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	135
GRAFIK 147. DISPARITAS GENDER PESERTA DIDIK JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	135
GRAFIK 148. PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR	136
GRAFIK 149. INDEKS PARITAS PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR.....	137
GRAFIK 150. DISPARITAS GENDER PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR.....	138
GRAFIK 151. PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	139
GRAFIK 152. INDEKS PARITAS PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ...	140
GRAFIK 153. DISPARITAS GENDER PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	140
GRAFIK 154. PESERTA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS).....	141
GRAFIK 155. INDEKS PARITAS PESERTA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS).....	142
GRAFIK 156. DISPARITAS GENDER PESERTA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS).....	142
GRAFIK 157. PESERTA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.....	143
GRAFIK 158. INDEKS PARITAS PESERTA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	144
GRAFIK 159. DISPARITAS GENDER DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT	144

GRAFIK 160. PESERTA KURSUS.....	145
GRAFIK 161. INDEKS PARITAS KEGIATAN KURSUS	146
GRAFIK 162. DISPARITAS GENDER KEGIATAN KURSUS	146
GRAFIK 163. PESERTA TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN (TPA)	147
GRAFIK 164. INDEKS PARITAS DAN DISPARITAS GENDER PADA TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN.	148
GRAFIK 165. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	149
GRAFIK 166. PERKARA ANAK PADA PENGADILAN.....	150
GRAFIK 167. PERKARA ANAK PADA KEJAKSAAN	151
GRAFIK 168. KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	152
GRAFIK 169. INDEKS PARITAS DAN DISPARITAS GENDER KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	153

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	PENELITI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	14
GAMBAR 2.	KESEHATAN YANG TERCANTUM DALAM 4 GOALS	26
GAMBAR 3.	KONDISI KEMATIAN PADA IBU	35
GAMBAR 4.	KOMPOSISI KADER POSYANDU TAHUN 2024.....	36
GAMBAR 5.	ANGGOTA DPRD 2019-2024 TAHUN 2022	107
GAMBAR 6.	PERSEBARAN USIA PENGANTIAN DIBAWAH 19 TAHUN	116
GAMBAR 7.	PERSEBARAN USIA PENGANTIN 19 - 21 TAHUN	119

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	REGULASI DAN KEBIJAKAN DAERAH	58
TABEL 2.	LEMBAGA SOSIAL KESEJAHTERAAN	113
TABEL 3.	CAKUPAN AKTA KELAHIRAN USIA ANAK 0-18 TAHUN 2024	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender.

Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai hasil ratifikasi *Convention on the Right on the Child* (CRC) yang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Dalam rangka melaksanakan Permen PPA No 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah membentuk tim penyusunan data terpilah gender dan anak tahun 2024.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian analisis data gender dan anak ini, meliputi konsep dan definisi data terpilah termasuk anak, statistik gender dan anak. Dalam

implementasinya meliputi seluruh aspek kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data terpilah, serta saran pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender dan anak di Kabupaten Lampung Tengah.

C. SISTEMATIKA

Laporan ini ditujukan terutama bagi penyelenggaraan sistem data gender dan anak serta pemanfaat lainnya. Adapun sistematikanyadimulai dengan menguraikan latar belakang dan ruang lingkup, bagian berikutnya adalah pokok-pokok kelembagaan sistem data gender dan anak, selanjutnya adalah implementasinya berupa pengumpulan dan penyajian data terpilah, serta pemanfaatan data terpilah dan analisis gender.

BAB II

KONSEP DAN METODE SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

A. KONSEP DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Prinsipnya konsep dan metode yang dipakai harus menghindari bias gender. Bias gender disini diartikan sebagai pendapat, pandangan, perlakuan terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Konsep bahwa kepala keluarga itu laki-laki adalah konsep yang bias gender. Memandang kepala keluarga sebagai responden atas nama keluarganya itu juga dianggap metode yang bias gender. Karena sebagai perempuan dan sebagai laki-laki bisa berbeda dalam kebutuhan memandang keadaan sesuatu, dalam kebutuhan, kesempatan, tantangan. Ini berarti konsep dan definisi serta metode pengumpulan data yang digunakan harus dikembangkan agar dapat “menangkap” perbedaan-perbedaan itu.

Konsep dan metode pengumpulan data yang bias gender membuka kemungkinan adanya *underreporting* atau bisa juga informasi yang dicari tidak terungkap (hidden statistics). Misalnya isu berkaitan dengan konsep “kekerasan terhadap perempuan” bagi sebagian orang/budaya kita dianggap sebagai bagian menjadi perempuan. Sementara dikebudayaan lain kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan.

Dari perspektif gender, data agregate juga disebut bias gender karena mengabaikan kenyataan masyarakat itu beragam, antara lain terdiri dari perempuan dan laki-laki.

Metode pengumpulan data terpilah dapat dilakukan melalui berbagai cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan data harus selalu dengan lensa gender, misalnya dalam perumusan masalah (ada mengandung isu gender, rencana penelitian (informan dan sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilah menurut jenis kelamin dan umur dan harus selalu memandangnya dari perspektif gender, artinya sejak semula pemilahan data menurut jenis kelamin dan umur adalah keharusan.

B. WAKTU PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2024 ini dilakukan dalam kurun waktu Februari– Desember 2024.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian berperspektif gender dan anak ini antara lain: sensus, survei, wawancara mendalam, pencatatan dan pelaporan,

- 1) Sensus adalah pencacahan lengkap dari unit amatan. Dalam sensus, pengintegrasian isu gender dimulai sejak perumusan tujuan dan penyusunan kuesioner. Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.
- 2) Survei adalah pencacahan yang dilakukan melalui sampel dari unit amatan. Dalam survei, pengintegrasian isu gender dimulai sejak merumuskan tujuan penelitian dan penyusunan kuesioner. Didukung oleh pilihan variabel dan sub-variabel yang bisa mendapatkan data dan informasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki. Untuk pendalaman isu gender, dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang cocok/relevan, lebih bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam.
- 3) Wawancara mendalam merupakan bentuk penelitian yang fokus pertanyaannya ditujukan pada responden individu untuk mendorong responden lebih 'terbuka' menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa dipengaruhi, dan tidak merasa terintimidasi. Keterampilan interviewer (yang mewawancarai) diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan kondusif, menciptakan kepercayaan, sehingga responden bisa mengungkapkan jawabannya dengan leluasa. Wawancara mendalam merupakan metode yang paling baik untuk 'menggali' data dan informasi yang detail, sensitif, dan kontroversial (seperti halnya dengan isu yang berkaitan dengan gender).
- 4) Pencatatan dan pelaporan. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat dikumpulkan melalui formulir yang sudah ada yang dikumpulkan/dilaksanakan/dicatat secara rutin oleh kementerian/lembaga dan daerah, misalnya administrasi kepegawaian. Jika tidak ada data terpilah menurut jenis kelamin, bisa ditambahkan satu kolom untuk jenis kelamin pada formulir yang sudah ada. Dalam Pelaporan data dan informasi yang dipisahkan dengan jelas untuk masing-masing jenis kelamin, dianalisa dengan menambah variabel-variabel/sub-sub variabel misalnya (1) tingkat pendidikan, (2) disiplin ilmu, (3) tingkat eselon, (4) lama kerja, dst. Jika ada kesenjangan gender, disebutkan juga apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kesenjangan; bisa juga ditambahkan bagaimana mengatasinya.
- 5) Penelitian/kajian, keduanya bisa mendapatkannya data langsung dan responden, tetapi juga melalui review publikasi/laporan yang sudah ada (dari data sekunder). Tetapi dalam menjalankan kedua metode ini tetap dari perspektif gender (lihat bagian survei).
- 6) Metode observasi merupakan cara yang efektif untuk melengkapi data yang sudah ada. Agar terfokus pada data dan informasi yang dicari dan tidak bias gender, pengamatan dilengkapi dengan panduan sebagai instrumen. Data dan informasi tentang kejadian atau tingkah laku digambarkan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan Jadi mengumpulkan data dengan metode observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi peneliti melakukan observasi harus tidak subjektif dan impresionistik dan tidak bias (termasuk bias gender).

- 7) Data terpilah juga bisa diambil dari FGD. Misalnya (1) jumlah partisipasi peserta perempuan dan peserta laki-laki; (2) data yang berkaitan dengan opini perempuan dan opini laki-laki (jika ada perbedaan) terhadap isu yang menjadi fokus; (3) data yang memperlihatkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki peserta FGD terhadap pilihan fokus.
- 8) Dokumen review. Pengumpulan data terpilah juga dapat dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dihasilkan, seperti: (1) produk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, MoU, dll) apakah peraturan perundang-undangan tersebut responsif terhadap isu gender dan permasalahan hak anak. Demikian halnya dengan produk-produk lainnya seperti bahan ajar, kurikulum, dan KIE. Cara mudah melakukan gender review dokumen adalah dengan mempersiapkan check list yang berisi beberapa variabel/sub-sub variabelnya/indikator yang dipakai untuk mengukur misalnya sampai seberapa jauh dokumen itu (1) responsif gender; (2) memberi kesetaraan gender; (3) menghasilkan kesetaraan gender; dan (4) memberi pemberdayaan.

Untuk kepentingan pengumpulan data pada penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 4 dan 5, yaitu pencatatan dan pelaporan serta penelitian/kajian.

D. SUMBER DATA

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Tengah, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Tengah.

E. PENGELOMPOKAN DATA

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosialekonomi, status kesehatan,

status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, kecacatan. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan diantara kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2006) mendefinisikan Statistik Gender sebagai statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan. Konsep dan definisi tersebut diatas sejalan dengan Platform Tindak Lanjut Kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing (Beijing Platform for Action, 1995); dan meminta layanan statistik ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan internasional menghasilkan statistik dan informasi: (1) yang berkaitan dengan individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut jenis kelamin dan umur; dan (2) yang mencerminkan masalah/isu yang berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, para 206(a)). Di Indonesia mengenai data terpilah ini tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan kesetaraan gender, serta penjaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seluruh sektor pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur. Selanjutnya data terpilah itu harus dianalisa dengan variabel-variabel yang relevan dan spesifik sesuai dengan kebutuhan.

Jenis data gender dalam penelitian ini dikelompokkan dalam:

- a) Data gender bidang demografi
- b) Data gender bidang pendidikan
- c) Data gender bidang ekonomi
- d) Data gender bidang pemerintahan dan politik
- e) Data gender bidang hukum dan HAM
- f) Data gender bidang sosial kemasyarakatan

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi:

- a) Hak sipil dan kebebasan
- b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- e) Perlindungan khusus.

F. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 secara umum menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

Analisis kuantitatif deskriptif digunakan dalam menghitung indeks paritas dan indeks disparitas gender (dikutip dari Sukei, 2008).

$$\text{Indeks Paritas} = \frac{\text{Capaian Kinerja P}}{\text{Capain Kinerja L}}$$

$$\text{Disparitas} = \% \text{ Capaian Kinerja P} - \% \text{ Capaian Kinerja L}$$

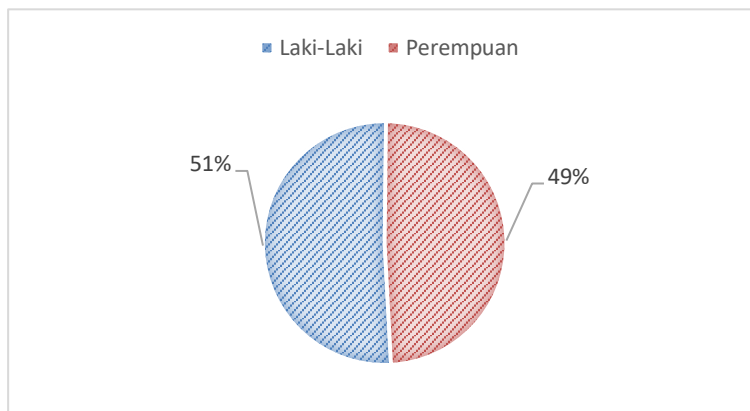
BAB III PENYAJIAN DATA TERPILAH

A. DATA GENDER BIDANG DEMOGRAFI

1) Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2023). Berdasarkan data, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 adalah 1.373.775 jiwa yang terdiri dari 700.663 penduduk berjenis kelamin laki-laki (51,00 %) dan 673.110 berjenis kelamin perempuan (49,00%).

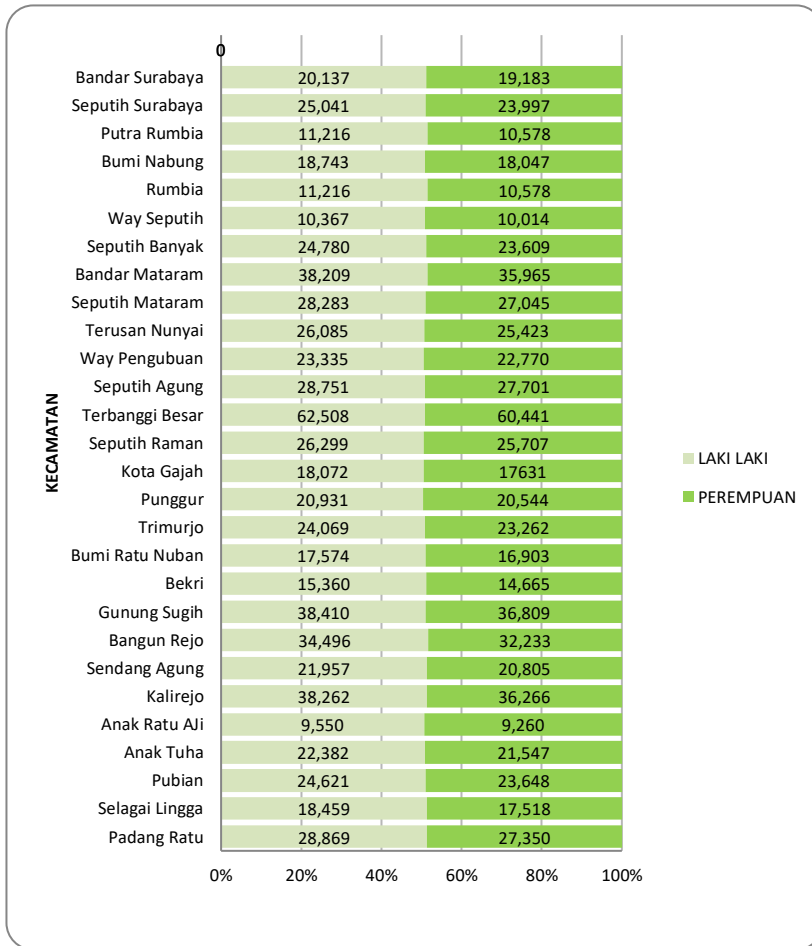
Grafik 1. Jumlah Penduduk



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menunjukkan distribusi jumlah penduduk di 28 kecamatan berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Terbanggi Besar, dengan total 1.373.775 jiwa, yang terdiri dari 702.991 jiwa laki-laki dan 675.450 jiwa perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Bumi Nabung.

Grafik 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kecamatan



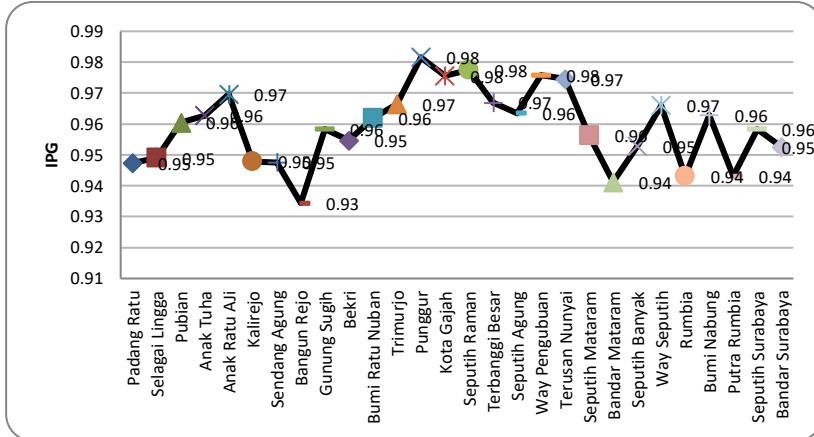
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam sebaran penduduk di setiap kecamatan grafik kedua menggambarkan disparitas gender di mana rata-rata kinerja perempuan di bawah laki-laki, dengan IDG rata-rata sebesar -2,16. Kecamatan dengan Disparitas gender paling rendah adalah Anak Ratu Aji (-3,39), menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam kinerja gender. Namun, terdapat beberapa kecamatan seperti Kecamatan Terbanggi Besar dan kecamatan Gunung Sugih yang memiliki indeks lebih baik, dengan nilai mendekati -1, yang menunjukkan kinerja yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan. Data gender seperti ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Indeks paritas gender di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa kinerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki di sebagian besar kecamatan. Nilai indeks rata-rata sebesar 0,96 mengindikasikan bahwa tingkat keseimbangan gender belum tercapai sepenuhnya. Kecamatan seperti Padang Ratu

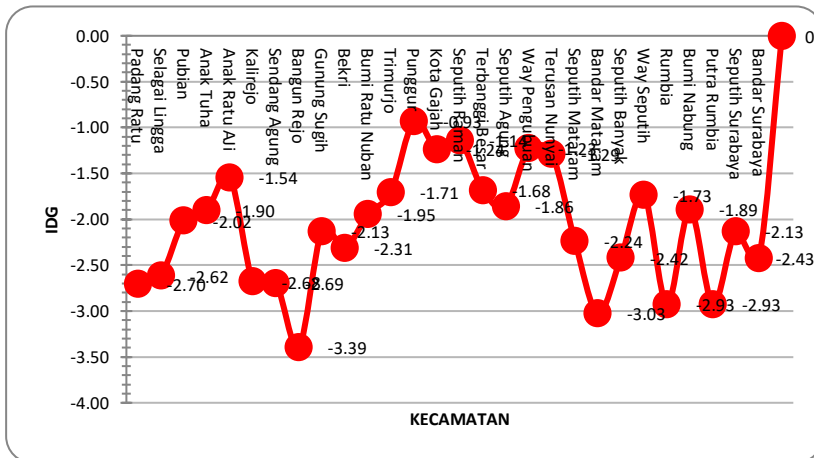
dan Bandar Mataram memiliki indeks paritas gender di bawah 0,95, menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam komposisi dan kinerja penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, kecamatan dengan indeks mendekati atau di atas rata-rata, seperti Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Gunung Sugih, mengindikasikan kinerja yang lebih seimbang. Data ini penting untuk digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan gender melalui kebijakan strategis.

Grafik 3. Indeks Paritas Gender Penduduk



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 4. Disparitas Gender Penduduk

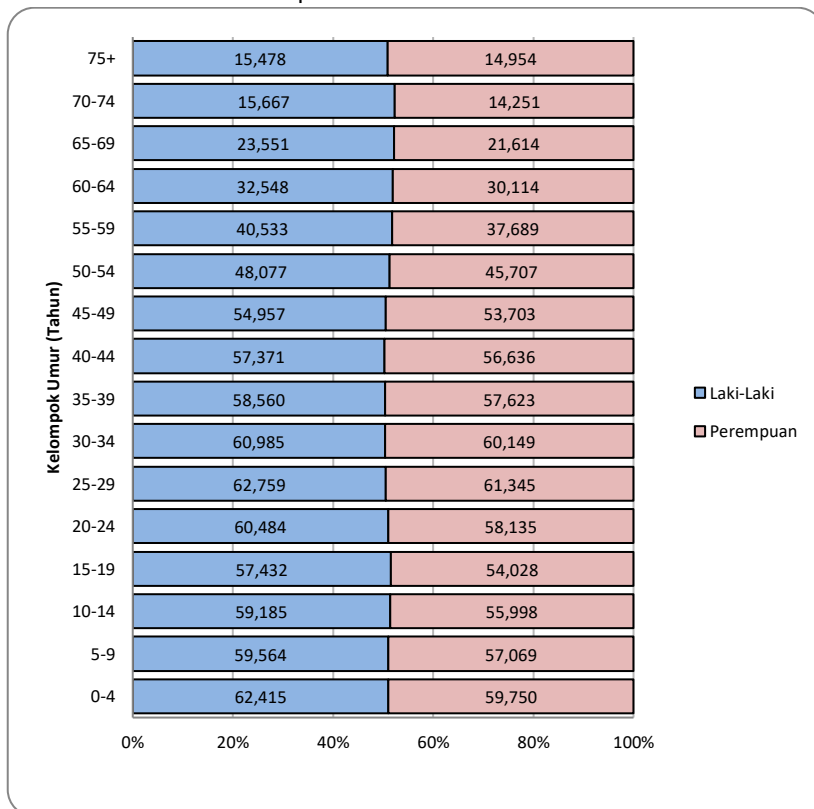


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pemerintah daerah dan stakeholder harus memprioritaskan pengurangan kesenjangan gender melalui intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur kontribusi perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. Melalui IDG, dapat terlihat bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor produktif berpotensi mempersempit kesenjangan gender, yang menjadi langkah penting dalam pembangunan daerah (KPPPA, 2020). Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum, tetapi juga merata antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan berbasis gender yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan akan membantu mengurangi ketidakadilan yang sering kali muncul akibat implementasi kebijakan yang bersifat netral gender.

2) Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Grafik 5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur

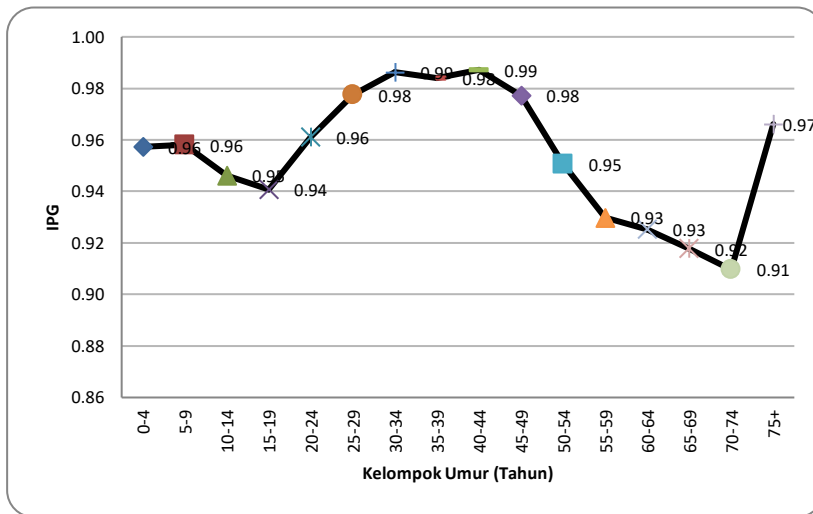


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah laki-laki sebanyak 769.566

orang dan perempuan 738.765 orang. Terdapat 3 kelompok usia dengan jumlah tertinggi, pertama rentan umur 25-29 tahun dengan jumlah laki-laki 62.759 orang dan perempuan 61.345 orang. Peringkat kedua, rentan umur 30-34 tahun dengan jumlah laki-laki 60.985 orang dan perempuan 60.149 orang. Ketiga, rentan usia 0-4 tahun dengan jumlah laki-laki 62.415 orang dan perempuan 59.750 orang. Sementara, tiga rentan usia dengan jumlah terendah, pertama usia rentan >75 tahun dengan jumlah laki-laki 15.478 orang dan perempuan 14.954 orang. Kedua, rentan usia 70-74 tahun dengan jumlah laki-laki 15.667 orang dan perempuan 14.251 orang. Ketiga, rentan usia 65-69 tahun dengan jumlah laki-laki 23.551 orang dan perempuan 21.614 orang.

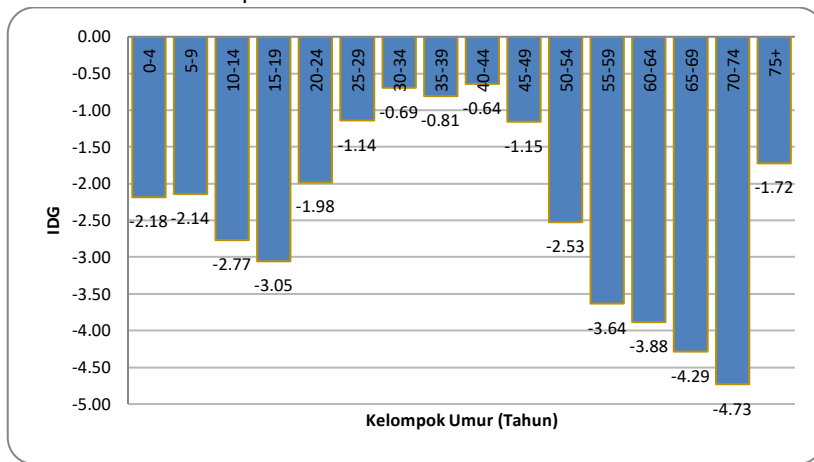
Grafik 6. Indeks Paritas Gender Berdasarkan Umur



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, indeks paritas antara laki-laki dan perempuan pada semua kelompok usia sebesar (0.96). Berdasarkan indek paritas gender, terlihat kinerja perempuan di semua kelompok usia dapat dikatakan seimbang dengan kinerja laki-laki dan perempuan berada di angka 0.93-0.99. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grifik 7. Disparitas Gender Penduduk Berdasarkan Umur



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, disparitas gender jumlah penduduk menurut usia sebesar (-2,04). Kelompok usia 70-74 tahun memiliki IDG tertinggi dengan angka (-4,73), disusul kelompok usia 65-69 tahun (-4,29), dan kelompok usia 60-64 tahun (-3,88). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

B. DATA GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Aini et al., 2018).

Pendidikan juga merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik dan masyarakat pada umumnya (Ilma, 2015).

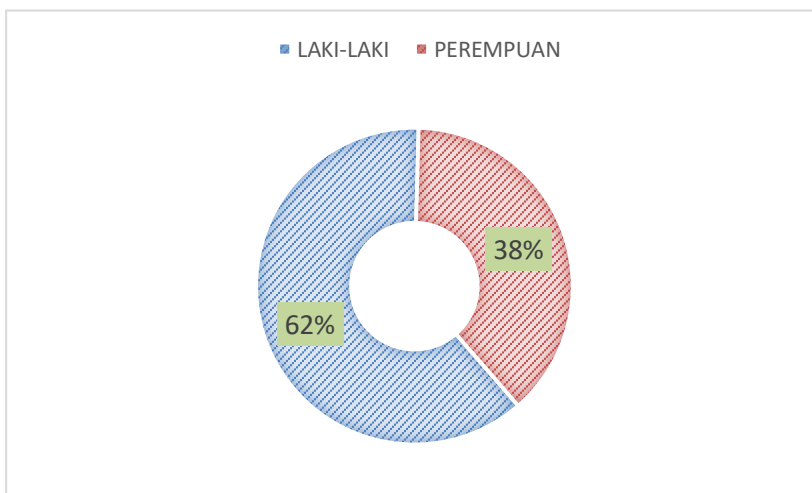
1) Peneliti

Grafik berikut ini menunjukkan distribusi jumlah peneliti di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin, dengan jumlah peneliti laki-laki mencapai 68 orang dan perempuan 42 orang. Dominasi laki-laki dalam jumlah peneliti ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang masih terlihat jelas, dengan laki-laki lebih banyak berperan dalam bidang penelitian dibandingkan perempuan. Kesenjangan jumlah peneliti ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

perbedaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, atau kesempatan kerja di bidang penelitian yang cenderung lebih terbuka bagi laki-laki. Muniroh et al. (2019), yang menyebutkan bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam memasuki dunia penelitian, termasuk stereotip gender yang membatasi ruang gerak mereka. Selain itu, laporan UNESCO (2021) menunjukkan bahwa meskipun perempuan semakin banyak yang berpartisipasi dalam pendidikan tinggi, representasi mereka dalam bidang penelitian tetap lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam posisi-posisi yang memerlukan peran manajerial atau pengambilan keputusan. Kesenjangan ini juga dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang menganggap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh perempuan, yang pada gilirannya membatasi waktu dan energi mereka untuk terlibat dalam kegiatan penelitian.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan partisipasi gender dalam bidang penelitian, tetapi juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam penelitian. Salah satunya adalah analisis kebijakan pemerintah daerah, yang mungkin belum cukup mendukung kesetaraan gender dalam kesempatan penelitian. Selain itu, penting untuk meneliti budaya kerja yang ada di lembaga penelitian atau akademik, yang mungkin masih berpihak pada laki-laki. Agar ketimpangan ini bisa dikurangi, diperlukan upaya-upaya yang lebih konkret, seperti peningkatan pelatihan khusus untuk perempuan, penyediaan mentor di bidang penelitian, serta kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah daerah dan lembaga akademik dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam penelitian, dengan memberikan lebih banyak kesempatan dan fasilitas yang memadai.

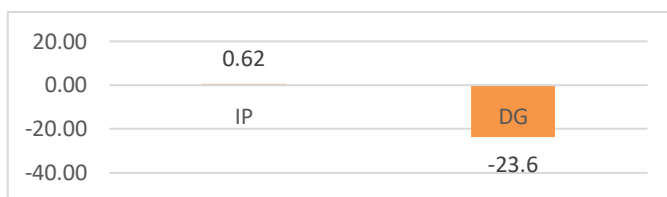
Gambar 1. Peneliti di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menampilkan indeks paritas (0,62) dan disparitas gender (-23,6) yang terakumulasi dari penelitian di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024.

Grafik 8. Indeks Paristas dan Disparitas Gender Peneliti



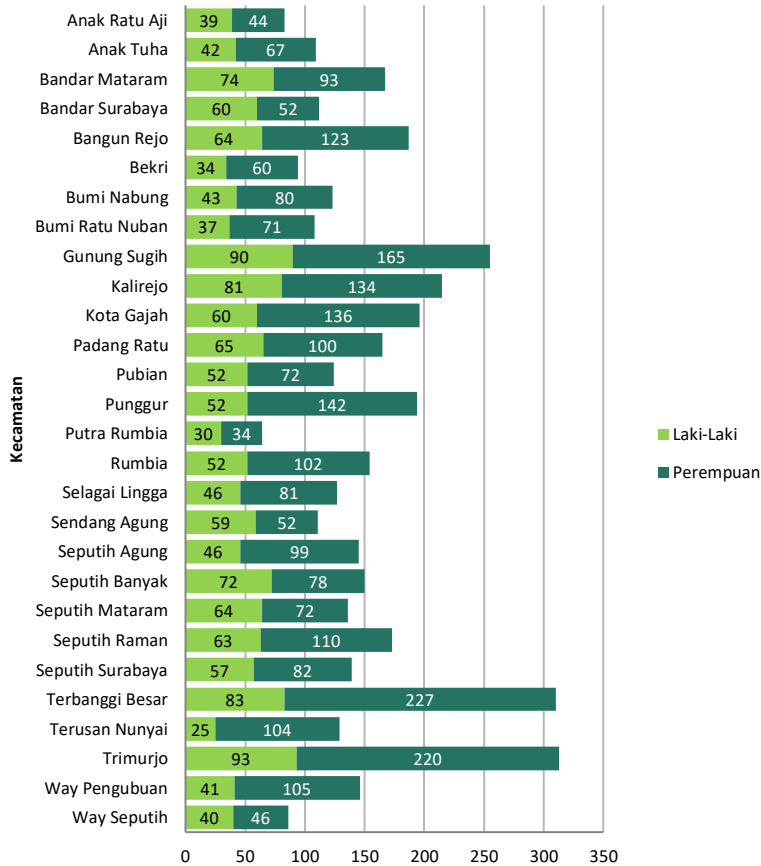
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

2) Guru dan Tenaga Pendidik

Sepriyanti (2012) dan Priantini (2017) menegaskan bahwa tenaga pendidik yang berkualitas merupakan faktor penting dalam kesuksesan proses pendidikan pada siswa. Guru sebagai tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan, profesi guru telah mendapat pengakuan oleh Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003 yang menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Grafik berikut ini menunjukkan jumlah keseluruhan guru adalah 4315 orang, dengan jumlah jumlah guru laki-laki adalah 1564 orang dan jumlah guru perempuan adalah 2751. Terdapat tiga kecamatan dengan jumlah tertinggi dan terendah guru di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah tertinggi pertama adalah kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah perempuan sebanyak 227 orang dan laki-laki hanya 83 orang. Kedua, kecamatan Trimurjo dengan jumlah perempuan sebanyak 220 orang dan laki-laki hanya 93 orang.

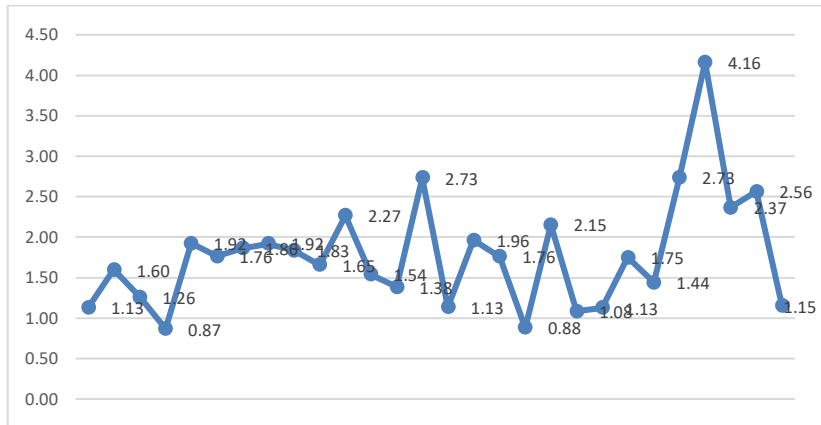
Grafik 9. Persebaran Guru



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Ketiga, kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah perempuan 165 orang dan laki-laki 90 orang. Sementara, terendah pertama adalah kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah perempuan 34 orang dan laki-laki 30 orang. Kedua, kecamatan Bekri dengan jumlah perempuan sebanyak 60 orang dan laki-laki 34 orang. Ketiga, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah perempuan sebanyak 44 orang dan laki-laki 39 orang. Dengan demikian, terlihat bahwa di kecamatan dengan jumlah perempuan tertinggi, perbedaan dengan jumlah laki-laki sangat signifikan, sedangkan kecamatan dengan jumlah perempuan terendah, jumlah kedua gender relatif seimbang.

Grafik 10. Indeks Paritas Guru

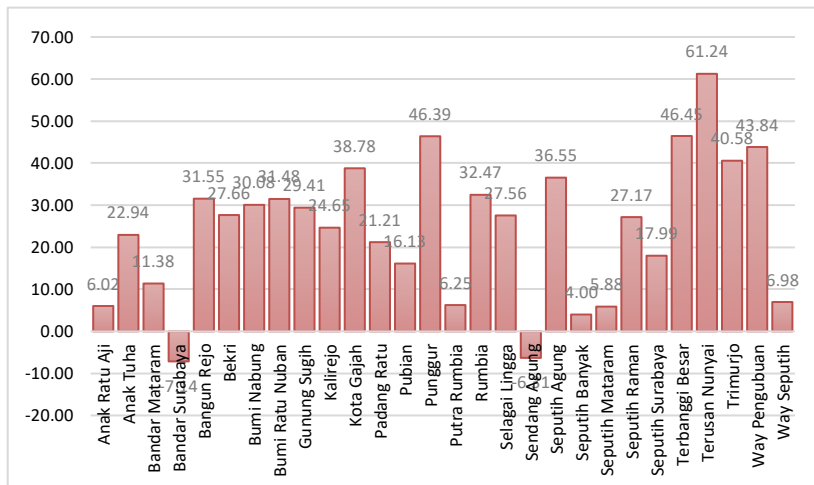


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas Guru secara keseluruhan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,52. Indeks paritas tertinggi dimiliki oleh Terusan Nunyai (4,16), disusul oleh Terbanggi Besar (2,73) dan Punggur (2,73). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Perhitungan diparitas gender pada guru secara keseluruhan sebesar -31,49. Keteringgalan mencolok terjadi di Kecamatan Bandar Surabaya dengan persentase -7,14. Kedua, Sendang Agung mencatat penurunan sebesar -6,31. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 11. Disparitas Gender Guru

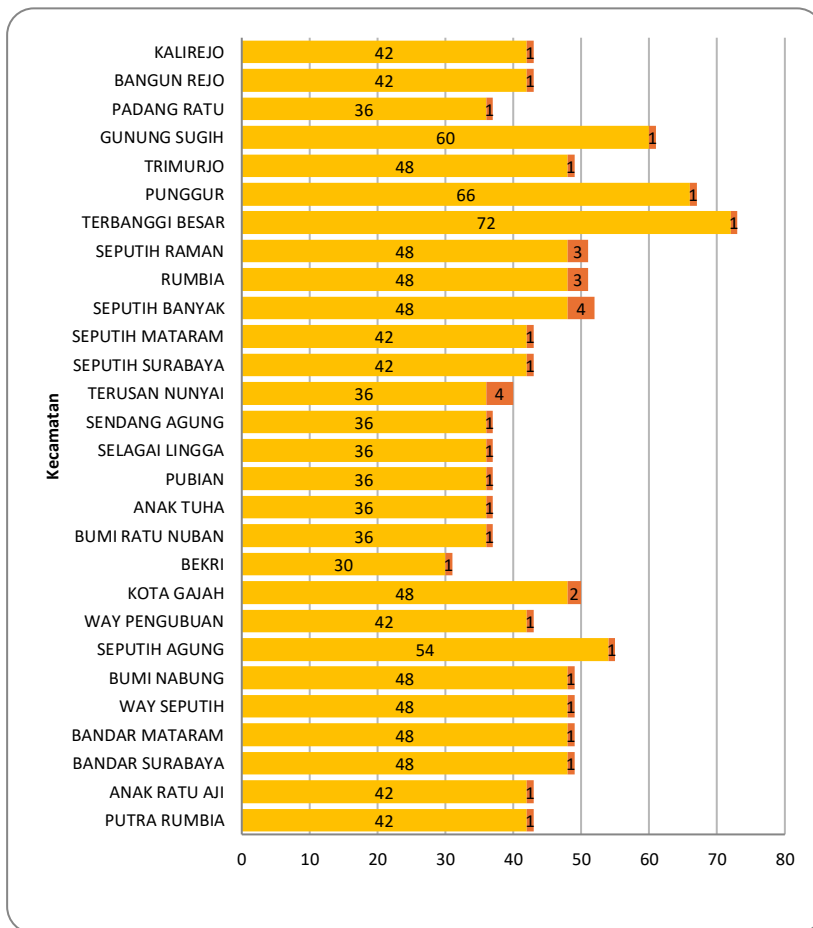


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

3) Atlit dan Pelatih Olahraga

Grafik berikut ini merupakan perbandingan jumlah pelatih laki-laki dan perempuan di berbagai kecamatan yang menunjukkan bahwa jumlah pelatih laki-laki secara umum lebih dominan dibandingkan pelatih perempuan di hampir semua kecamatan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bar yang lebih panjang untuk pelatih laki-laki dibandingkan dengan pelatih perempuan di sebagian besar kecamatan. Kecamatan Kalirejo menunjukkan jumlah pelatih laki-laki sebanyak 66 orang, sementara pelatih perempuan hanya 42 orang. Begitu juga dengan kecamatan lainnya seperti Terbanggi Besar dan Punggur, di mana jumlah pelatih laki-laki lebih tinggi. Pada beberapa kecamatan seperti Bekri, terdapat jumlah pelatih perempuan yang lebih banyak (48 perempuan berbanding 30 laki-laki), namun ini merupakan kasus yang lebih jarang ditemukan.

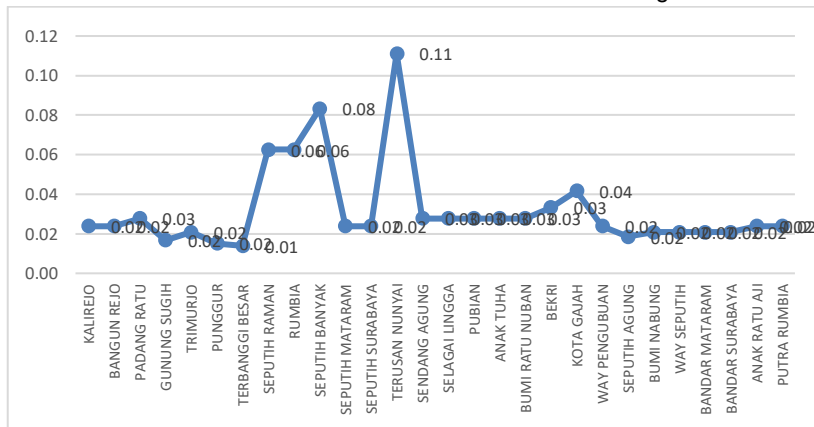
Grafik 12. Pelatih Olahraga



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Ketimpangan jumlah pelatih laki-laki dan perempuan ini dapat mencerminkan adanya kesenjangan dalam partisipasi perempuan dalam bidang pelatihan atau kepelatihan olahraga. Mungkin ada faktor-faktor seperti stereotip gender yang menganggap bahwa pekerjaan pelatihan lebih cocok dilakukan oleh laki-laki, atau kurangnya kesempatan atau dorongan bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang ini. Selain itu, peran ganda yang diemban oleh perempuan, seperti tanggung jawab keluarga, dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih karier sebagai pelatih atau tenaga pendidik di bidang olahraga. Keberadaan lebih banyak pelatih laki-laki daripada perempuan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor budaya, di mana dalam beberapa komunitas, perempuan lebih terfokus pada pekerjaan domestik atau lebih sedikit yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang yang lebih publik seperti pelatihan olahraga. Untuk mengurangi ketimpangan ini, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang olahraga, misalnya melalui program pelatihan dan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

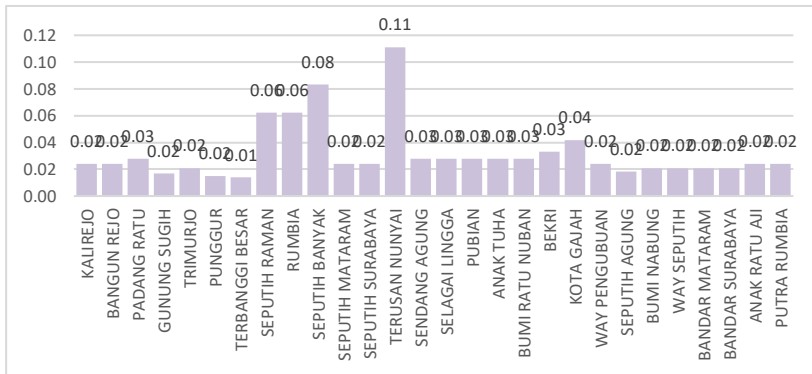
Grafik 13. Indeks Paritas Pelatih Olahraga



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pelatih laki-laki dan perempuan daerah Kabupaten Lampung, data menunjukkan terdapat 1.299 pelatih, dengan komposisi pelatih perempuan sebanyak 39 orang pelatih laki-laki sebanyak 1260 orang. Dengan Indeks Paritas 0,03 dan disparitas gender -94, Kedua indeks ini mencerminkan ketimpangan yang sangat signifikan dalam distribusi gender pada profesi pelatih di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Grafik 14. Disparitas Gender Pelatih Olahraga

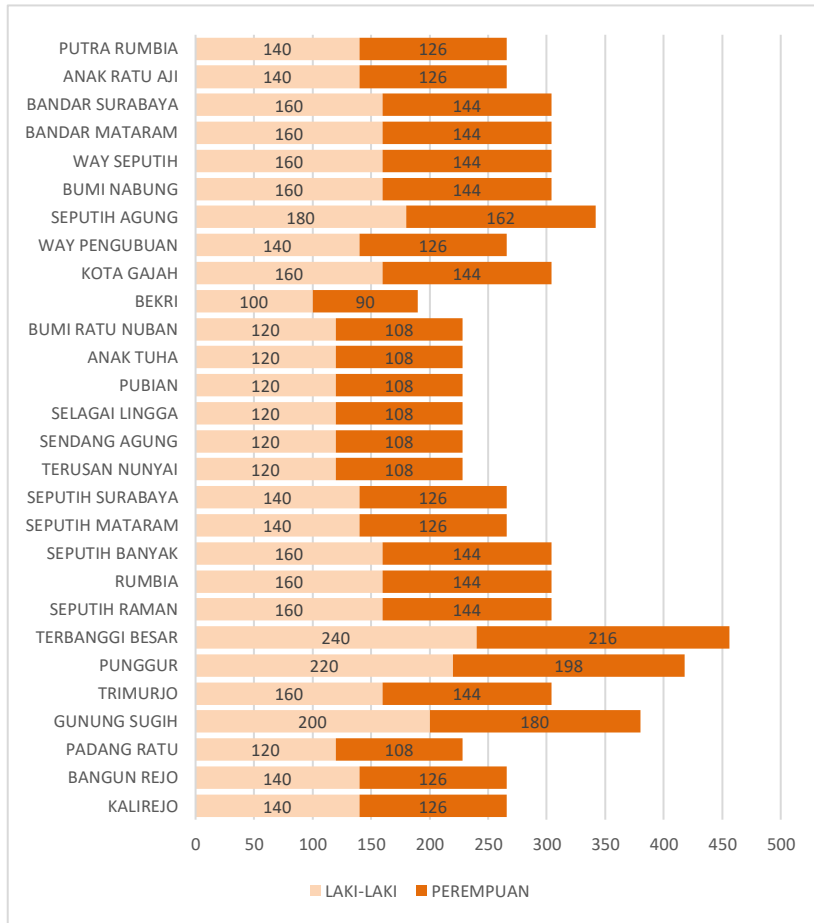


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, disparitas gender sebesar -94,0 menunjukkan bahwa kesenjangan gender sangat tinggi. Nilai negatif menunjukkan posisi perempuan yang jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam peran pelatih. Kesenjangan sebesar ini memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di bidang kepelatihan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik berikut ini menggambarkan perbandingan jumlah atlet laki-laki dan perempuan di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Secara keseluruhan, atlet perempuan mendominasi di sebagian besar kecamatan, meskipun ada beberapa kecamatan yang menunjukkan ketidakseimbangan jumlahnya, di beberapa kecamatan seperti Terbanggi Besar, Seputih Raman, dan Gunung Sugih, atlet perempuan terlihat lebih banyak dibandingkan atlet laki-laki, di Terbanggi Besar, jumlah atlet perempuan tercatat sebanyak 240, sementara atlet laki-laki hanya 220. Hal serupa juga terlihat di Seputih Raman, yang menunjukkan angka lebih tinggi untuk atlet perempuan, yakni 160 perempuan dan 108 laki-laki. Perbedaan jumlah atlet laki-laki dan perempuan ini menunjukkan adanya keberagaman dalam minat dan partisipasi masyarakat terhadap olahraga.

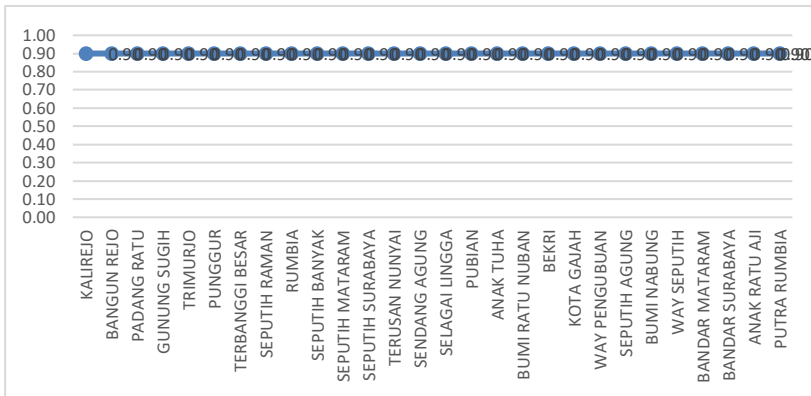
Grafik 15. Jumlah Atlet



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Ketidakseimbangan ini mencerminkan variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga. Di beberapa kecamatan, perempuan lebih aktif dalam berolahraga, yang bisa disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dalam olahraga. Sementara di beberapa kecamatan lainnya, minat laki-laki dalam olahraga masih lebih tinggi. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya lokal, akses terhadap fasilitas olahraga, dan peluang pelatihan yang ada. Melihat data diatas, penting untuk terus mendorong keberagaman dan partisipasi lebih besar bagi perempuan dalam olahraga di berbagai tingkat. Program-program yang mendukung pengembangan atlet perempuan harus terus diperkuat agar tercipta kesetaraan dalam kesempatan berolahraga.

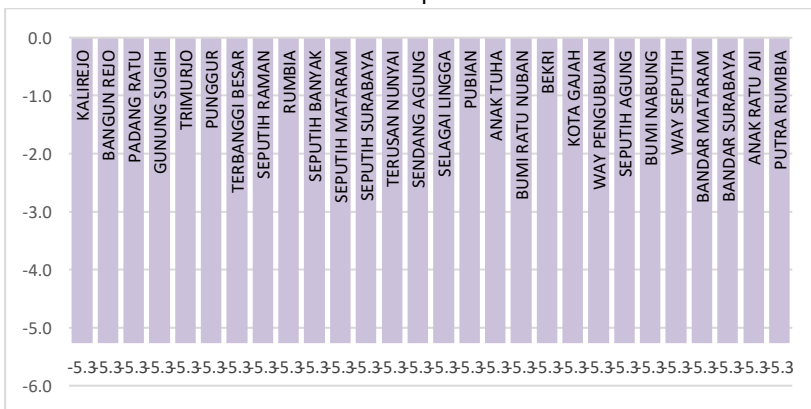
Grafik 16. Indeks Paritas Atlet



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan indeks paritas di berbagai wilayah, yang memiliki nilai konsisten pada angka 0,90 di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Indeks paritas ini menggambarkan kesetaraan atau keselarasan suatu indikator tertentu (seperti akses layanan, distribusi sumber daya, atau pencapaian program) antar wilayah. Konsistensi nilai pada 0,90 menandakan bahwa setiap wilayah telah mencapai tingkat yang hampir setara atau serupa dalam aspek yang diukur oleh indeks ini. Hal ini bisa mencerminkan keberhasilan kebijakan yang diterapkan secara merata, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan menuju indeks kesetaraan sempurna. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 17. Disparitas Gender Atlet



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan disparitas gender untuk berbagai wilayah, yang memiliki nilai konsisten sebesar -5,3 di seluruh wilayah yang terdaftar. Indeks disparitas ini mengindikasikan tingkat ketimpangan atau perbedaan antara suatu pencapaian aktual dengan target yang telah ditetapkan, atau antara wilayah-wilayah yang diukur dalam suatu konteks tertentu. Nilai yang seragam di angka -5,3 menunjukkan bahwa

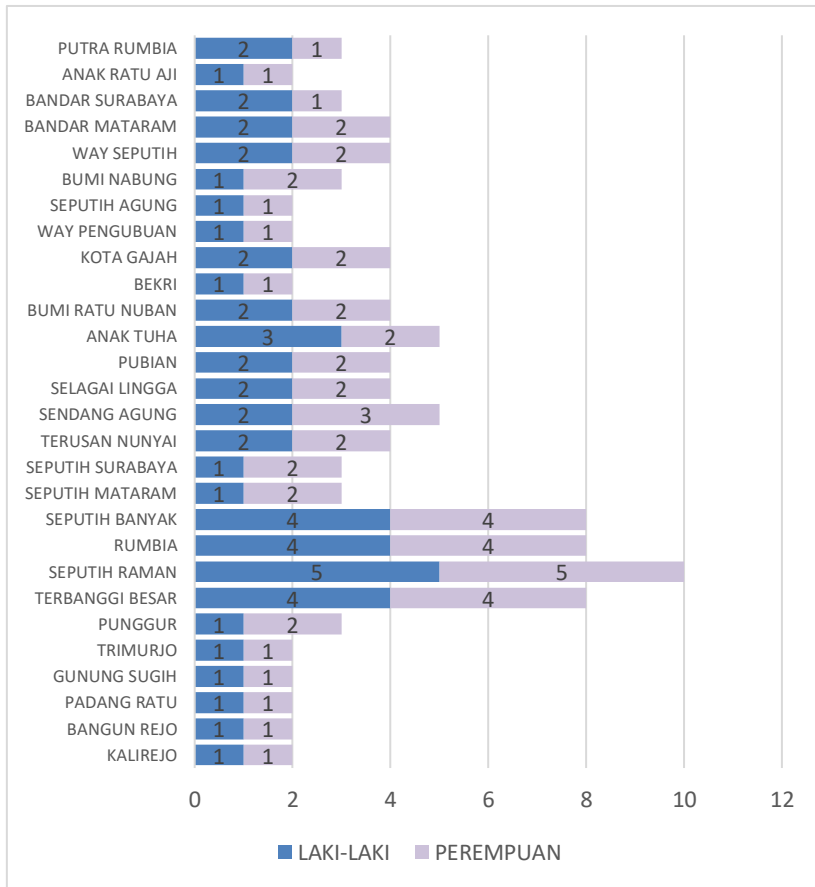
ketimpangan di setiap wilayah memiliki pola yang sama, baik dalam hal akses sumber daya, pelayanan, atau pencapaian lainnya. Meski ketimpangan ini konsisten di seluruh wilayah, nilai negatif memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki kondisi secara menyeluruh, dengan fokus pada strategi yang dapat mengurangi disparitas menuju tingkat yang lebih ideal. Selengkapannya dapat dilihat pada grafik di atas.

Atlet-atlet di bawah pembinaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mampu berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Data menunjukkan terdapat 108 atlet berprestasi selama tahun 2024, dengan komposisi altit perempuan sebanyak 55 orang (50,93%) dan atlit laki-laki sebanyak 53 orang (49,07%).

Secara umum, perbandingan antara atlet laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa atlet perempuan lebih dominan di sebagian besar kecamatan dalam hal prestasi. Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Raman, dan Seputih Mataram, atlet perempuan menunjukkan prestasi yang lebih banyak dibandingkan atlet laki-laki. Kecamatan Seputih Raman, jumlah atlet perempuan berprestasi mencapai lima orang, sementara atlet laki-laki hanya empat. Kondisi serupa juga terlihat di Terbanggi Besar, dengan perbedaan yang tidak jauh signifikan, namun atlet perempuan lebih banyak berprestasi.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Seputih Agung dan Bekri memiliki jumlah atlet laki-laki dan perempuan yang berprestasi relatif seimbang, meskipun masih ada kecamatan lain yang menunjukkan dominasi atlet perempuan, misalnya di Kecamatan Bumi Nabung dan Bandar Mataram. Hal ini menandakan bahwa prestasi atlet perempuan mulai meningkat, terutama di beberapa daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Kecamatan Kalirejo, Bangun Rejo, dan Gunung Sugih menunjukkan jumlah atlet berprestasi yang sedikit lebih rendah, baik untuk atlet laki-laki maupun perempuan, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut mungkin memiliki keterbatasan dalam mengembangkan bakat olahraga. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun masih ada ketimpangan di beberapa daerah, peluang untuk atlet perempuan berprestasi semakin meningkat di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.

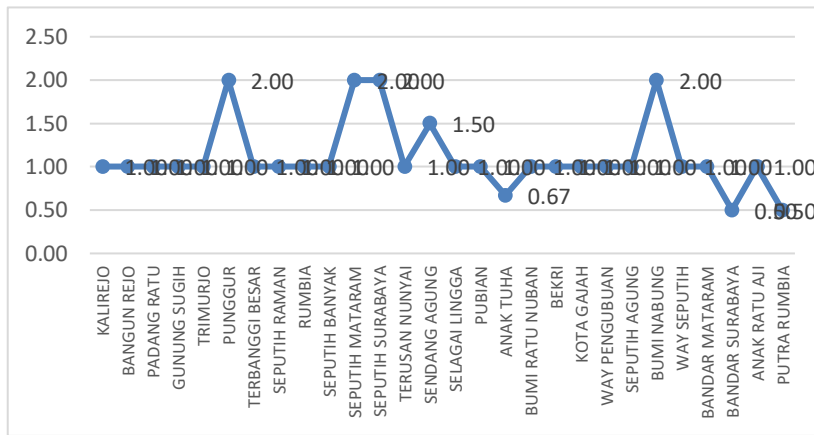
Grafik 18. Prestasi Atlet



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menunjukkan indeks paritas di berbagai wilayah, yang memiliki nilai konsisten pada angka 0,90 di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Indeks paritas ini menggambarkan kesetaraan atau keselarasan suatu indikator tertentu (seperti akses layanan, distribusi sumber daya, atau pencapaian program) antar wilayah. Konsistensi nilai pada 0,90 menandakan bahwa setiap wilayah telah mencapai tingkat yang hampir setara atau serupa dalam aspek yang diukur oleh indeks ini. Hal ini bisa mencerminkan keberhasilan kebijakan yang diterapkan secara merata, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan menuju indeks kesetaraan sempurna.

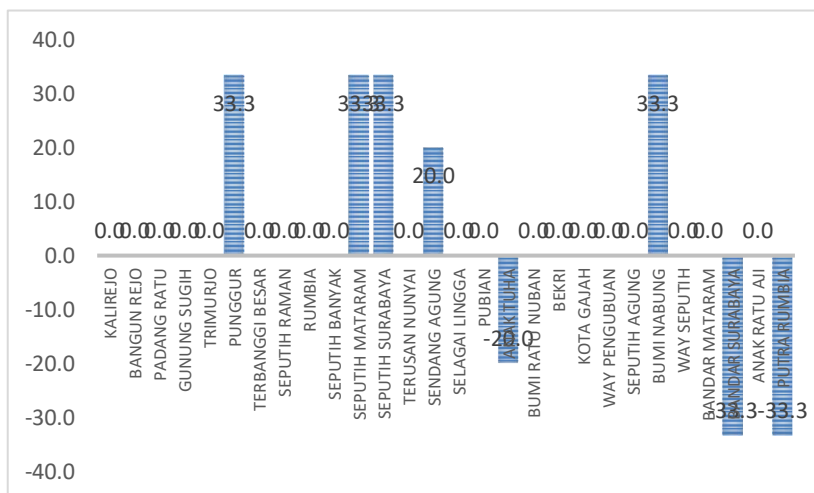
Grafik 19. Indeks Paritas Atlet Berprestasi



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender sebesar 1.9 persen yang menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara jumlah atlet laki-laki dan perempuan yang berprestasi di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. DG yang mendekati nol ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender di bidang prestasi olahraga hampir tidak signifikan. DG yang positif dengan nilai rendah menunjukkan bahwa kedua gender memiliki peluang yang hampir seimbang untuk berprestasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan olahraga yang memberikan ruang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka.

Grafik 20. Disparitas Gender Atlet Berprestasi



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

C. DATA GENDER BIDANG KESEHATAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs sendiri dicanangkan pada 25 September 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030. Tahun 2030 ada 17 *goals*, 169 target dan 240 indikator pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang (Ermalena, 2017).

Gambar 2. Kesehatan yang Tercantum dalam 4 *Goals*



Sumber: Ermalena, 2017.

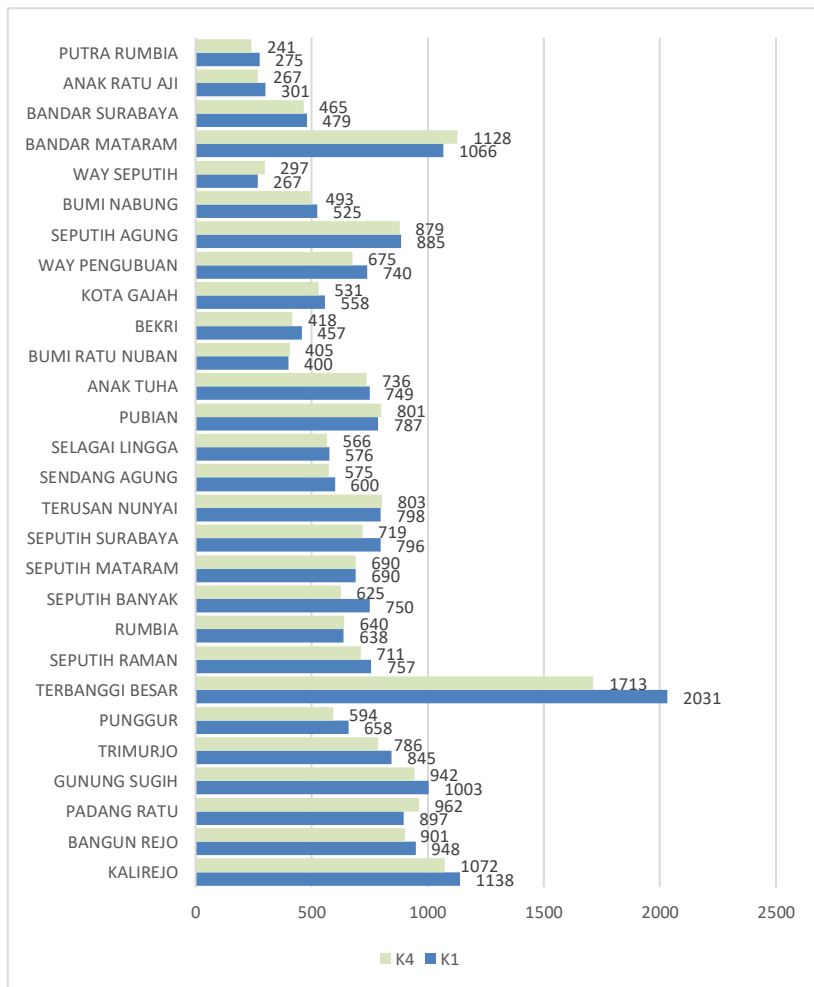
Khusus untuk bidang kesehatan, ada empat 4 goals, 19 target dan 31 indikator pada SGD's yang termasuk dalam bidang ini. Pada *goals* ketiga yaitu kesehatan yang baik (good health and well-being) ada tiga urusan yang belum selesai dari program MDGs sebelumnya yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKBa), dan angka kematian neonatal (AKN); mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber pada air dan penyakit menular lainnya; serta akses kesehatan reproduksi (termasuk Keluarga Berencana dan ASFR). Angka-angka kesehatan yang akan ditampilkan berikut ini dapat menjadi gambaran bagaimana pencapaian target-target SDGs di Kabupaten Lampung Tengah.

1) Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil dan Melahirkan

Analisis data kunjungan ibu hamil K1 dan K4 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kecamatan-kecamatan yang ada. Kecamatan Terbanggi Besar mencatat angka kunjungan tertinggi, yaitu mencapai 2.031, menandakan adanya kesadaran dan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan bagi ibu hamil di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Way Seputih

mencatat angka terendah, yaitu hanya 267 kunjungan. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas dalam aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Nuraini (2020) mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan ibu hamil. Selain itu, Sari et al. (2019) juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kunjungan antenatal care. Temuan-temuan tersebut dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan ibu hamil di Kecamatan Way Seputih.

Grafik 21. Kunjungan (K1 dan K4) Ibu Hamil



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas menunjukkan jumlah kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 19.635 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah 1713 orang. Kedua,

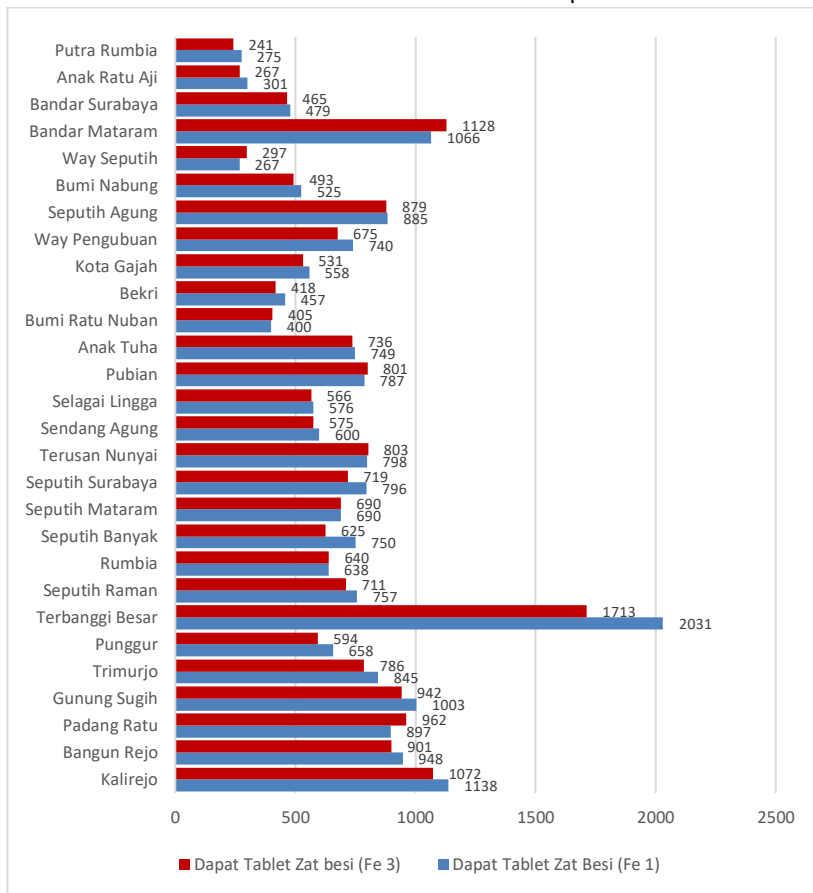
kecamatan Bandar Mataram dengan jumlah 1128 orang. Ketiga, Kalirejo dengan jumlah 1072 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah kunjungan ibu hamil K4, pertama kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah 241 orang. Kedua, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah 267 orang. Ketiga, Way Seputih dengan jumlah 297 orang.

Selain kunjungan ke fasilitas kesehatan, imunisasi tetanus toxoid juga merupakan layanan yang penting untuk ibu hamil. Data imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan variasi yang mencolok antar kecamatan. Kecamatan Seputih Raman mencatat angka tertinggi dengan 730 imunisasi, diikuti oleh Terbanggi Besar yang mencapai 726. Selanjutnya, Kecamatan Kalirejo juga menunjukkan angka yang relatif baik dengan 607 imunisasi, saat ini kondisi yang sangat kontras terlihat di Kecamatan Bekri dan Putra Rumbia, yang masing-masing mencatat angka nol untuk imunisasi tetanus toxoid. Kecamatan Seputih Agung mencatat angka terendah, yaitu hanya 9 imunisasi. Perbedaan yang signifikan antara kecamatan dengan angka tertinggi dan terendah ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses dan kesadaran akan pentingnya imunisasi bagi ibu hamil. Lestari dan Adi (2021) menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan kesadaran masyarakat berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi dalam program imunisasi. Yulianto (2020) menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang tepat tentang manfaat imunisasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan ibu hamil. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih strategis untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas imunisasi tetanus toxoid, terutama di kecamatan dengan angka rendah (selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini).

Selain kunjungan ke pusat layanan Kesehatan (K1 dan K4), terdapat juga data data pemberian tablet zat besi (Fe 1). Kecamatan dengan jumlah kunjungan ibu hamil paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah tablet zat besi (Fe 1) sebesar 2031 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 1713. Peringkat kedua, yaitu Bandar Mataram dengan jumlah tablet zat besi (Fe 1) sebesar 1066 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 1128. Ketiga, Kalirejo dengan tablet zat besi (Fe 1) sebesar 1072 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 1138.

Adapun jumlah kunjungan ibu hamil paling rendah adalah kecamatan Putra Rumbia dengan tablet zat besi (Fe 1) sebesar 275 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 241. Kedua, kecamatan Way Seputih dengan tablet zat besi (Fe 1) sebesar 267 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 297. Ketiga, kecamatan Anak Ratu Aji dengan tablet zat besi (Fe 1) sebesar 301 dan tablet zat besi (Fe 3) sebesar 267.

Grafik 22. Pemberian Fe 1 dan Fe 3 pada Ibu Hamil

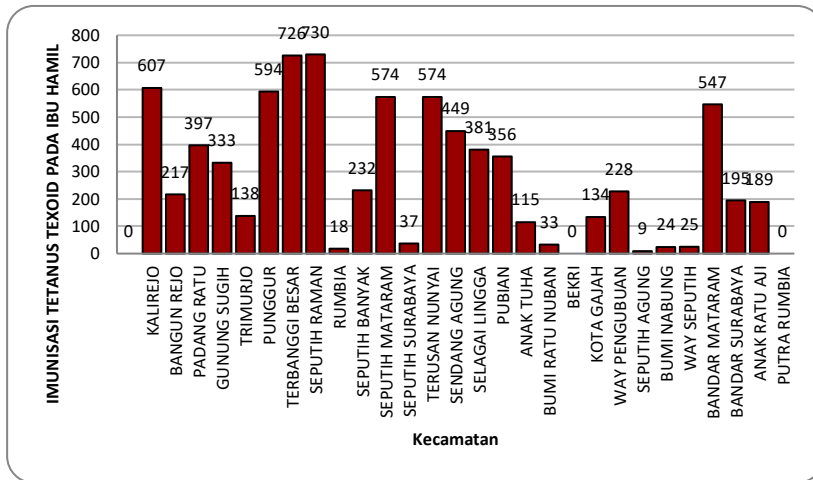


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Data tersebut menunjukkan variasi dalam cakupan konsumsi tablet besi yang merupakan bagian penting dari intervensi kesehatan untuk mencegah anemia selama kehamilan. Maryanto (2021) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe berpengaruh signifikan terhadap kejadian anemia. Sjahriani & Faridah (2019) juga berpendapat bahwa di Indonesia masih terdapat ibu hamil yang tidak patuh mengonsumsi tablet Fe, sehingga memiliki risiko anemi 3,7 kali lebih tinggi daripada yang patuh. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, pola makan, dan jumlah kunjungan antenatal care (ANC) (Sjahriani & Faridah, 2019).

Selain pemberian tablet Zat Besi (Fe), ibu hamil juga dilengkapi dengan imunisasi tetanus toxoid. Adapun manfaat pemberian vaksin Tetanus Toksoid (TT) antara lain memberikan perlindungan dari penyakit tetanus neonatorum pada bayi yang baru lahir. Tetanus neonatorum ialah penyakit tetanus yang menyerang bayi usia kurang dari 1 bulan yang disebabkan oleh bakteri yang mengeluarkan racun dan menyerang sistem saraf pusat (clostridium tetani). Cakupan imunisasi TT sebagai berikut.

Grafik 23. Imunisasi Tetanus Texoid pada Ibu Hamil

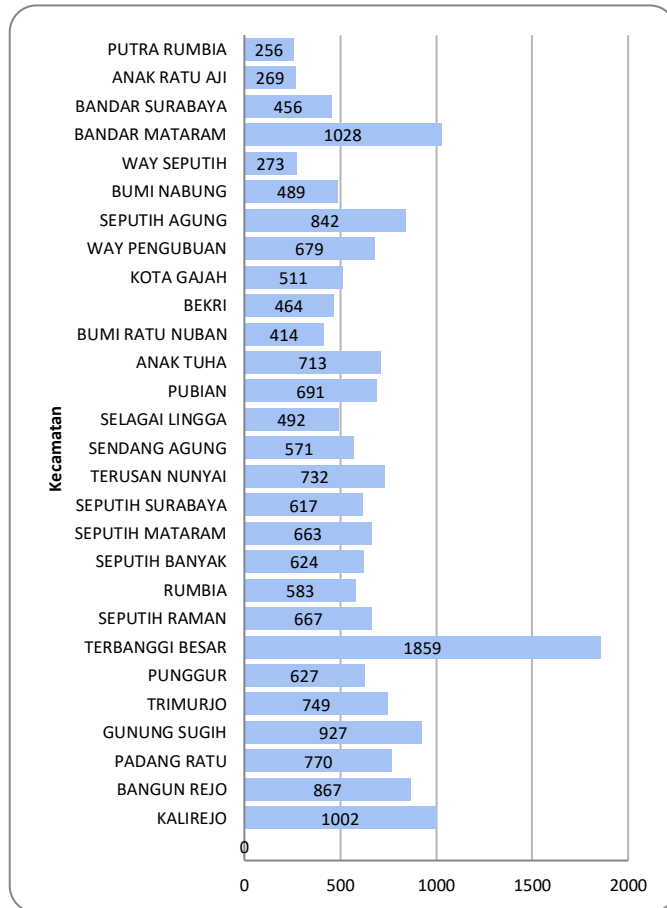


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Perbedaan ini mencerminkan adanya disparitas akses layanan kesehatan yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Farida Kusumaningrum dan Prastuti Soewondo (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan asuransi kesehatan sangat berkorelasi dengan peningkatan pemanfaatan tenaga kesehatan dalam proses persalinan, dengan kemungkinan pemanfaatan meningkat hingga 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan individu tanpa asuransi kesehatan. Faktor ini, bersama dengan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai, dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Perbedaan signifikan antara kecamatan di Lampung Tengah ini mencerminkan perlunya penguatan program kesehatan berbasis wilayah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, serta dukungan infrastruktur kesehatan yang lebih merata.

Grafik berikut menunjukkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat perbedaan signifikan antara kecamatan Terbanggi Besar sebagai data tertinggi (1.859 persalinan) dan Way Seputih sebagai data terendah (273 persalinan).

Grafik 24. Ibu Melahirkan Ditolong Tenaga Kesehatan



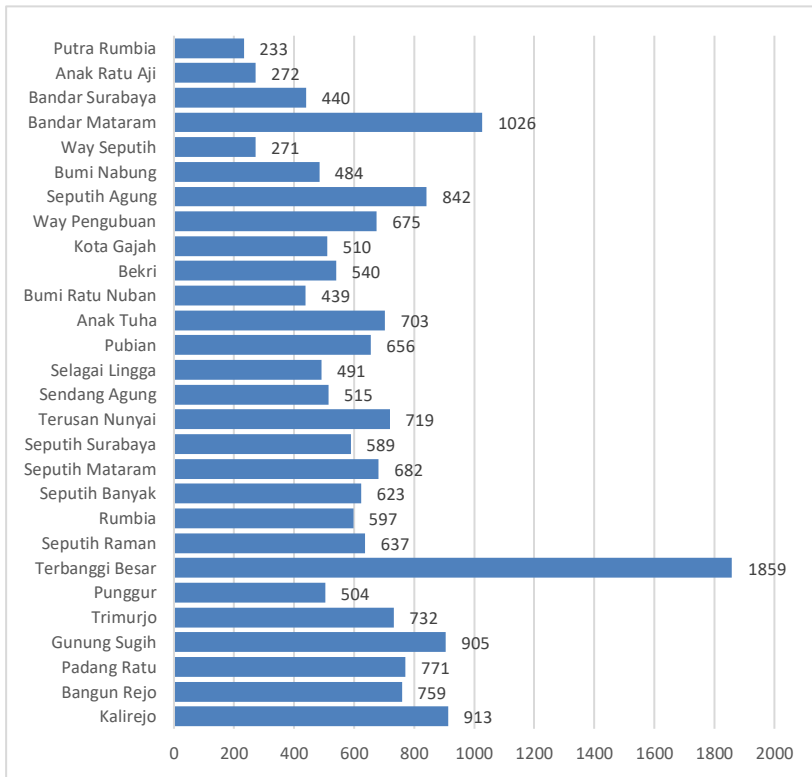
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Data ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam akses pelayanan kesehatan di Fasyankes, yang dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, jumlah tenaga kesehatan, serta aksesibilitas masyarakat di masing-masing wilayah. Kementerian Kesehatan RI (2014) menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan ibu adalah cakupan persalinan di Fasyankes, yang dihubungkan dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Farida dan Rahmadi (2019) menunjukkan bahwa di daerah dengan ketersediaan Fasyankes yang memadai, pemanfaatan tenaga kesehatan untuk persalinan lebih tinggi, dibandingkan dengan daerah yang memiliki hambatan geografis atau ekonomi. Hal ini mendukung pentingnya penguatan infrastruktur kesehatan yang merata di setiap wilayah. Data ini relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan kesehatan ibu di Lampung Tengah.

Pelayanan lain untuk ibu melahirkan adalah pelayanan ibu nifas di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah pelayanan ibu nifas paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah 1859 orang. Peringkat

kedua, yaitu Bandar Mataram dengan jumlah 1026 orang. Ketiga, Kalirejo dengan jumlah 913 orang. Adapun jumlah pelayanan ibu nifas paling rendah adalah kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah 233 orang. Kedua, Way Seputih dengan jumlah 271 orang. Ketiga, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah 272. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

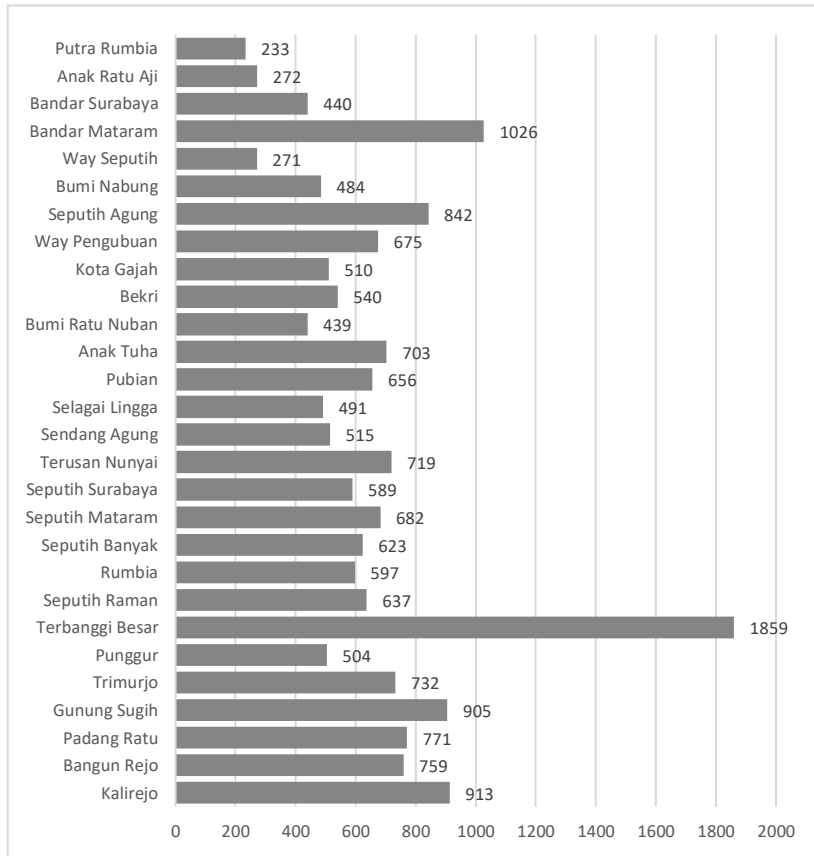
Grafik 25. Pelayanan Terhadap Ibu Nifas



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Aisyah & Wahyono (2021) berpendapat bahwa mutu layanan kesehatan meliputi aspek fisik, reliabilitas, interaksi personal, pemecahan masalah, dan kebijakan, serta memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan ibu nifas. Hal tersebut juga relevan dalam memahami bagaimana peningkatan mutu layanan dapat meningkatkan angka kunjungan ibu nifas di berbagai kecamatan.

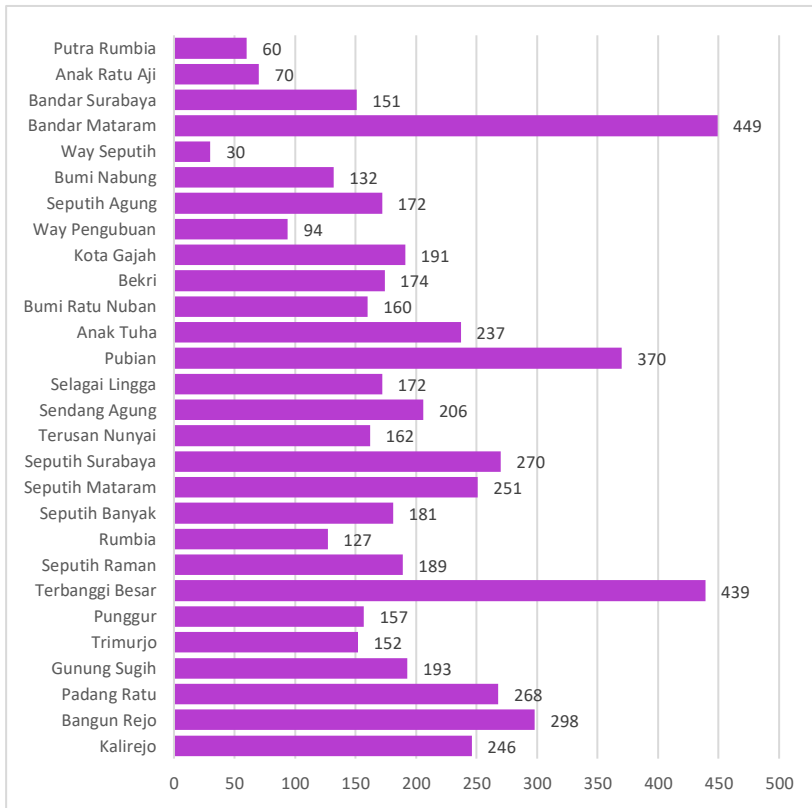
Grafik 26. Ibu Nifas mendapat Vitamin A



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Layanan lain untuk ibu melahirkan adalah ibu nifas yang mendapat vitamin A di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah ibu nifas yang mendapat vitamin A paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah 1859 orang. Peringkat kedua, yaitu Bandar Mataram dengan jumlah 1026 orang. Ketiga, Kalirejo dengan jumlah 913 orang. Adapun jumlah ibu nifas yang mendapat vitamin A material paling rendah adalah kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah 233 orang. Kedua, Way Seputih dengan jumlah 271 orang. Ketiga, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah 272 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 27. Pelayanan terhadap Komplikasi Maternal

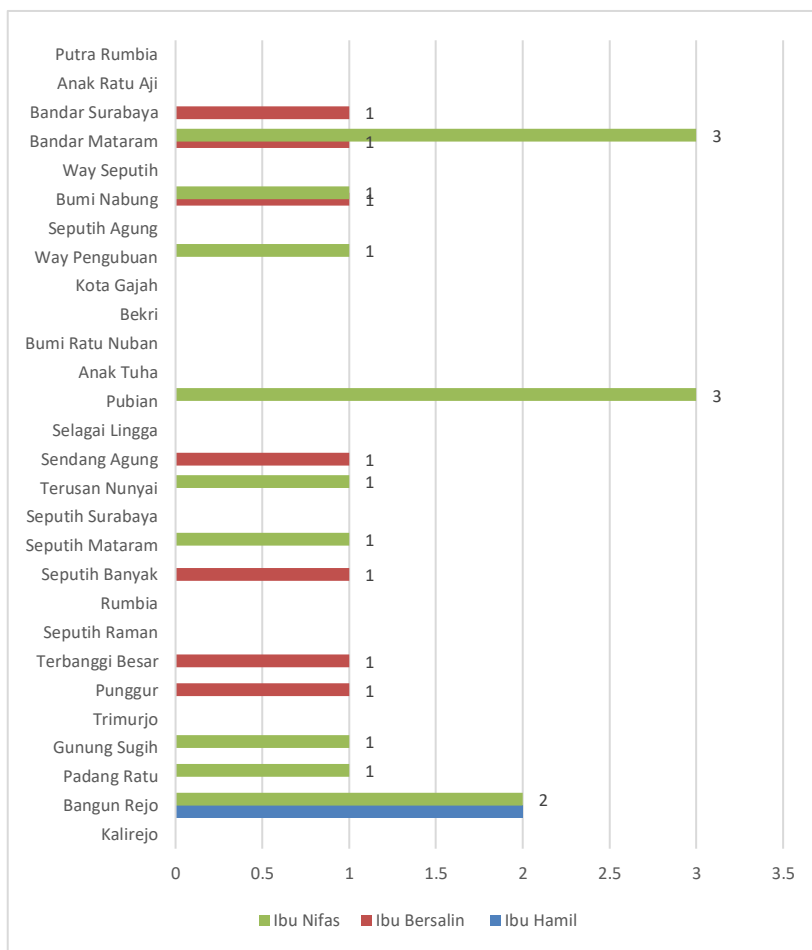


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas merupakan data jumlah pelayanan komplikasi material di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah pelayanan komplikasi material paling tinggi adalah Bandar Mataram dengan jumlah 449 orang. Peringkat kedua, yaitu Terbanggi Besar dengan jumlah 439 orang. Ketiga, Pubian dengan jumlah 370 orang. Adapun jumlah pelayanan komplikasi material paling rendah adalah kecamatan Way Seputih dengan jumlah 30 orang. Kedua, Putra Rumbia dengan jumlah 60 orang. Ketiga, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah 70 orang.

Komplikasi maternal, kekurangan asupan gizi dan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil yang tidak sesuai dengan standar minimal pelayanan dapat menyebabkan kasus kematian. Kasus kematian pada ini nifas, ibu bersalin dan ibu melahirkan juga masih terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 26 kasus. Kasus kematian ibu paling tinggi di Bangun Rejo (4 kasus) dan Bandar Mataram (4 kasus). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3. Kondisi Kematian pada Ibu

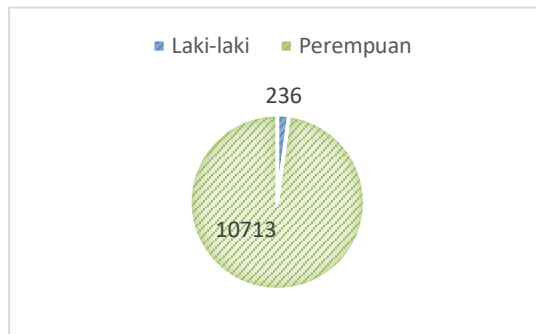


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

2) Kader Posyandu

Grafik di bawah ini menunjukkan dominasi kader perempuan di seluruh kecamatan, yang mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam kegiatan posyandu lebih signifikan dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan kecenderungan sosial budaya, di mana perempuan lebih sering terlibat dalam program kesehatan dan pelayanan masyarakat.

Gambar 4. Komposisi Kader Posyandu Tahun 2024

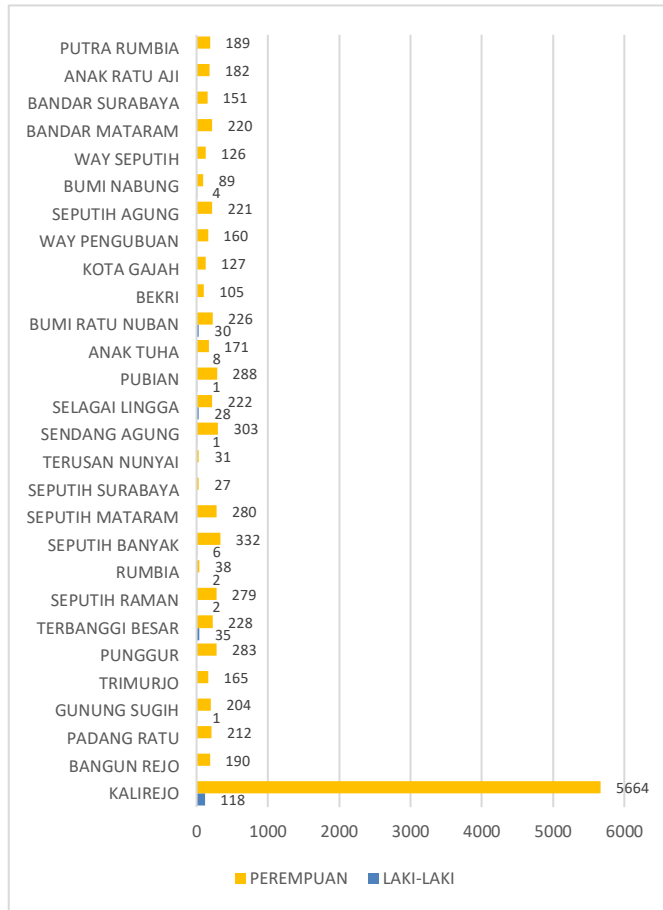


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Kesenjangan gender ini terlihat jelas di setiap kecamatan, terutama di kecamatan Bayung Rejo, yang mencatat jumlah kader perempuan tertinggi dengan 5664 orang, sementara jumlah kader laki-laki hanya 118 orang sehingga dapat menunjukkan adanya konsistensi dalam program pemberdayaan masyarakat, alokasi anggaran, atau dukungan pemerintah daerah terhadap aktivitas posyandu. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah kader yang rendah, terutama kader laki-laki, mungkin menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi program, minimnya pelatihan kader, atau persepsi masyarakat terhadap keterlibatan laki-laki dalam kegiatan posyandu. Hal ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan kebijakan lokal yang mendukung keberlanjutan posyandu. Purwanti et al. (2020) mengatakan untuk menekankan bahwa keberhasilan posyandu tidak hanya ditentukan oleh jumlah kader, tetapi juga oleh kualitas pelatihan yang diterima kader dan kemampuannya dalam menjalankan peran edukasi, monitoring kesehatan, serta pemberian layanan dasar di masyarakat.

Menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posyandu sering dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial sebagai pengasuh keluarga, sementara rendahnya partisipasi laki-laki sering disebabkan oleh pekerjaan utama mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi laki-laki melalui pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, guna mendukung keberlanjutan program kesehatan masyarakat Munawaroh et al. (2021).

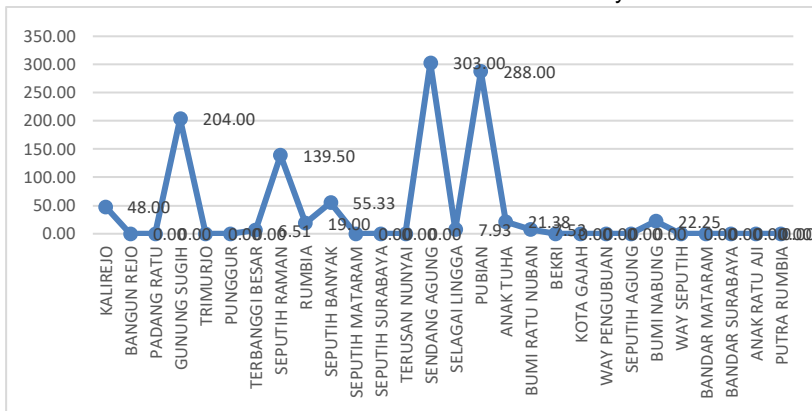
Grafik 28. Penyebaran Kader Posyandu



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

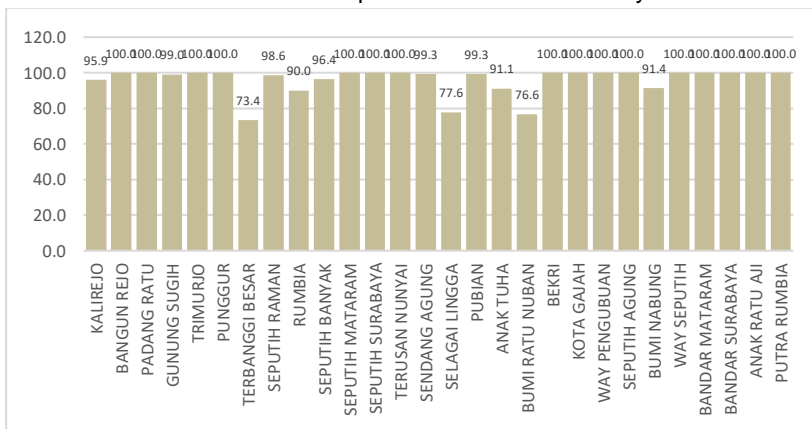
Grafik dibawah ini menampilkan indeks paritas (45,39) dan disparitas gender (95,7) yang terakumulasi dari kader Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Indeks Paritas menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan yang cukup besar antara jumlah kader laki-laki dan perempuan. Hal ini menyoroti dominasi gender tertentu dalam partisipasi sebagai kader, yang mungkin disebabkan oleh persepsi sosial bahwa kegiatan Posyandu lebih cocok untuk satu gender, seringkali perempuan. Padahal, keberadaan kader laki-laki dapat mendukung keberagaman pandangan dan peran dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Grafik 29. Indeks Paritas Kader Posyandu



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 30. Disparitas Gender Kader Posyandu



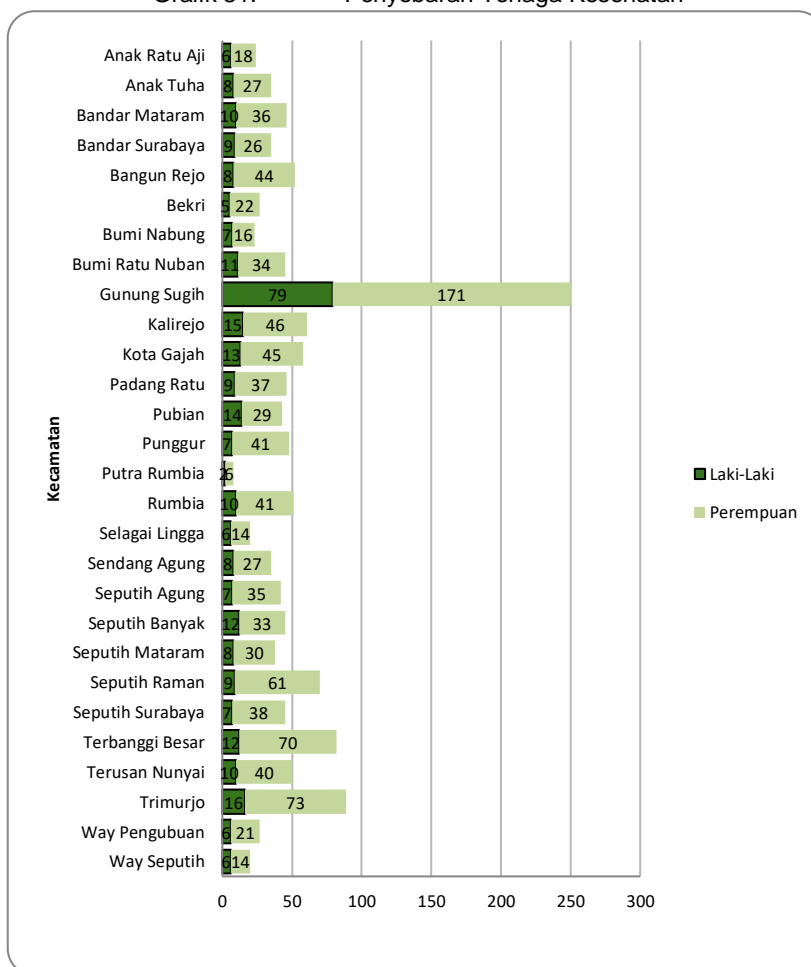
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

3) Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Lampung Tengah adalah 1415 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 320 orang, sedangkan jumlah perempuan 1095 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah perempuan 171 dan laki-laki 79 orang. Kedua, kecamatan Trimurjo dengan jumlah perempuan 73 orang dan laki-laki 16 orang. Ketiga, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah perempuan 70 orang dan laki-laki 12 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah perempuan 6 orang dan laki-laki 2 orang. Kedua, kecamatan Way Seputih dengan jumlah perempuan 14 orang dan laki-laki 6 orang. Ketiga, kecamatan Bumi Nabung dengan jumlah perempuan 16 orang dan laki-laki 7 orang. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendominasi di bidang tenaga kesehatan di sebagian besar kecamatan, sementara laki-laki cenderung lebih sedikit terwakili (lihat grafik di halaman selanjutnya).

Menurut Boniol, Mathieu, *et al.* (2019), tenaga kesehatan di seluruh dunia cenderung didominasi oleh perempuan, terutama pada peran-peran seperti perawat dan bidan. Namun, dominasi tersebut sering kali tidak diimbangi dengan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan atau peran strategis dalam sektor kesehatan. Selain itu, faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan dapat mempengaruhi preferensi gender dalam profesi tertentu. Distribusi yang tidak merata ini dapat berdampak pada sistem pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan, terutama terkait dengan ketersediaan dan persepsi peran laki-laki dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam tenaga kesehatan.

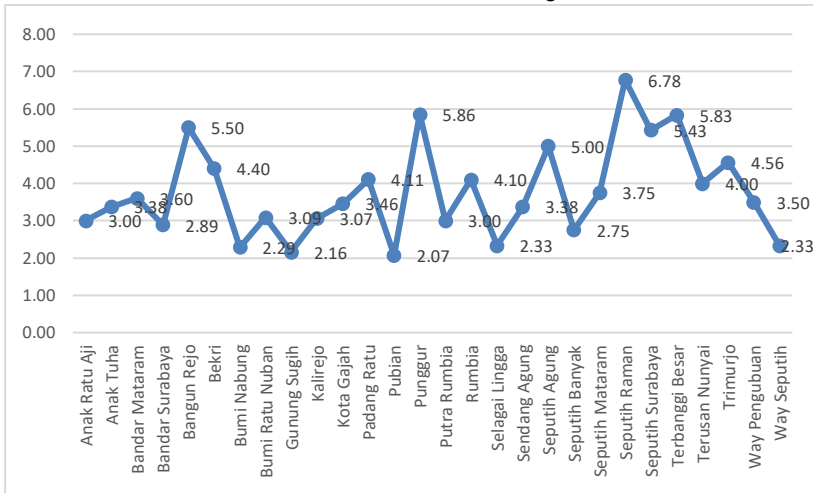
Grafik 31. Penyebaran Tenaga Kesehatan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara umum, indeks paritas nakes di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1,43. Indeks paritas tertinggi dimiliki oleh Seputih Raman (6,78). Tertinggi kedua, kecamatan Punggur (5,86) dan terakhir dimiliki oleh Terbanggi Besar (5,83). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

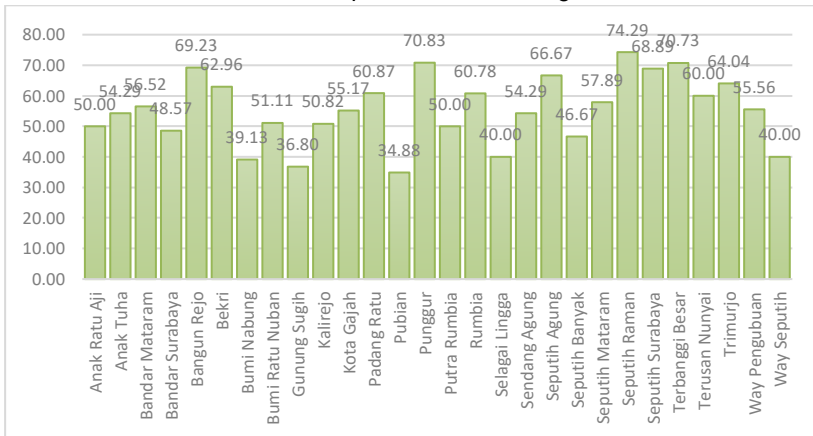
Grafik 32. Indeks Paritas Tenaga Kesehatan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Untuk data indeks disparitas gender pada Nakes secara keseluruhan berjumlah 17,75. Disparitas gender paling tinggi terjadi di Kecamatan Seputih Raman 74,29, disusul oleh kecamatan Punggur 70,83, dan terakhir kecamatan Terbanggi Besar 70,73. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebelumnya.

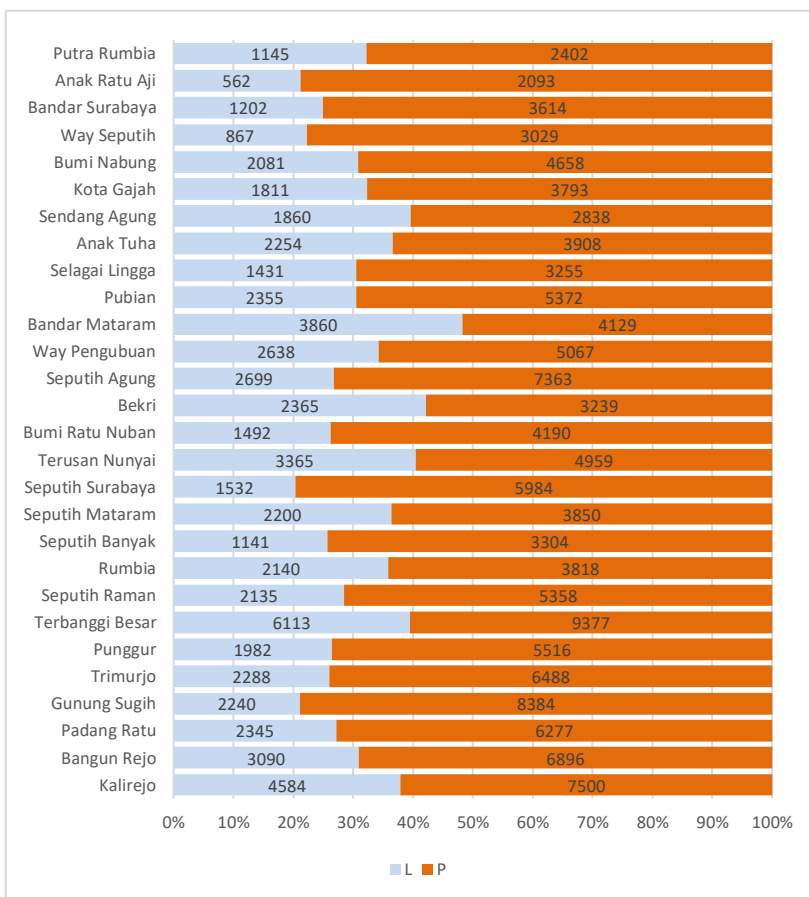
Grafik 33. Disparitas Gender Tenaga Kesehatan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

4) Keluarga Berencana

Grafik 34. Peserta Keluarga Berencana Aktif



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

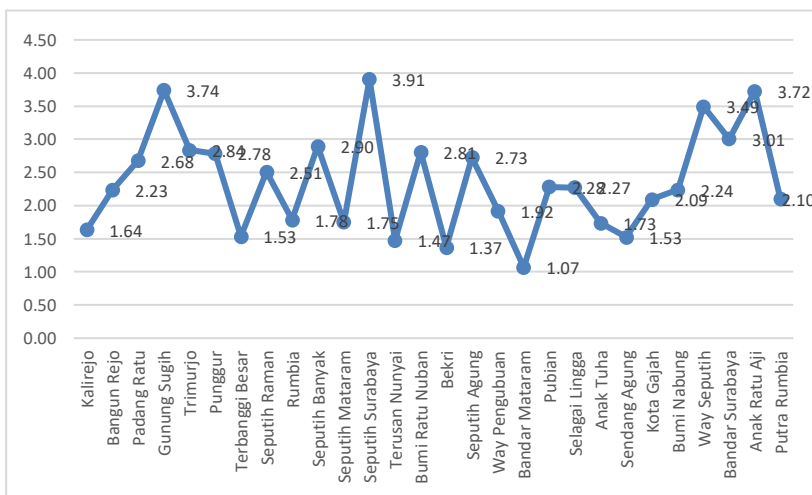
Grafik di atas menunjukkan jumlah peserta KB Aktif di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 200438 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 63777 orang dan perempuan 136661 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 6113 orang dan perempuan 9377 orang. Kedua, kecamatan Kalirejo dengan jumlah laki-laki 4584 orang dan perempuan 7500 orang. Ketiga, Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 2240 orang dan perempuan 8384 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah laki-laki 562 orang dan perempuan 2093 orang. Kedua, kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki 1145 orang dan perempuan 2402 orang. Ketiga, kecamatan Way Seputih dengan jumlah laki-laki 867 orang dan perempuan 3029 orang.

Saifullah dan Budiarti (2023), menyatakan bahwa deteminan utama dalam penggunaan kontrasepsi modern pada pria adalah pengetahuan, dukungan

pasangan, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukasi dan dukungan berbasis keluarga untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program KB, yang secara langsung dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan penurunan angka kelahiran.

Berdasarkan berikut, indeks paritas gender peserta KB aktif di kabupaten Lampung Tengah sebesar 2,14. Kecamatan Seputih Surabaya memiliki indeks paritas paling tinggi dengan angka (3,91). Disusul dengan kecamatan Gunung Sugih dengan angka (3,74) dan Anak Ratu Aji (3,74). Kecamatan dengan IPG terendah adalah Bandar Mataram (1,07), Bekri (1,37), dan Terusan Nunyai (1,47).

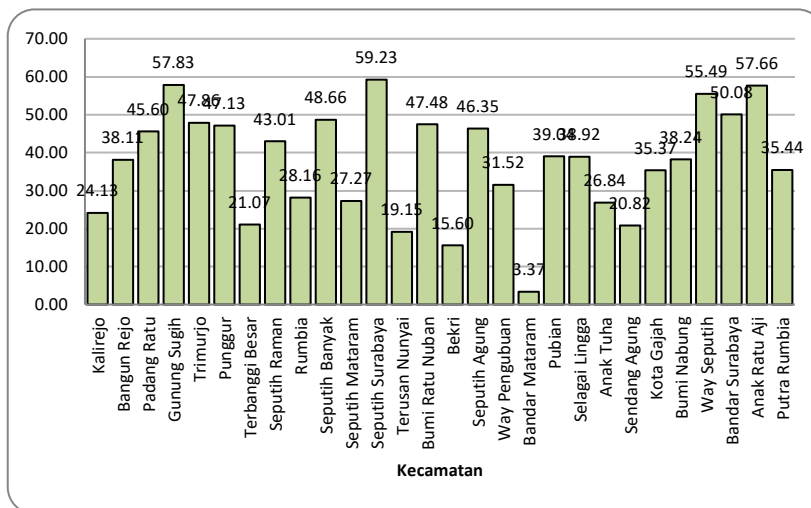
Grafik 35. Indeks Paritas Peserta Keluarga Berencana Aktif



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menunjukkan disparitas gender peserta KB aktif di berbagai kecamatan Kabupaten Lampung Tengah. Nilai indeks disparitas mengindikasikan tingkat ketimpangan gender dalam partisipasi KB aktif, di mana nilai yang lebih rendah mencerminkan kesetaraan yang lebih tinggi. Grafik ini menunjukkan variasi yang signifikan antar kecamatan, dengan beberapa wilayah memiliki disparitas yang cukup rendah sementara yang lain memperlihatkan ketimpangan yang lebih besar. Kecamatan dengan nilai indeks paritas tertinggi adalah Seputih Surabaya (59,23). Disusul kecamatan Gunung Sugih (57,83) dan Anak Ratu Aji (57,66). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

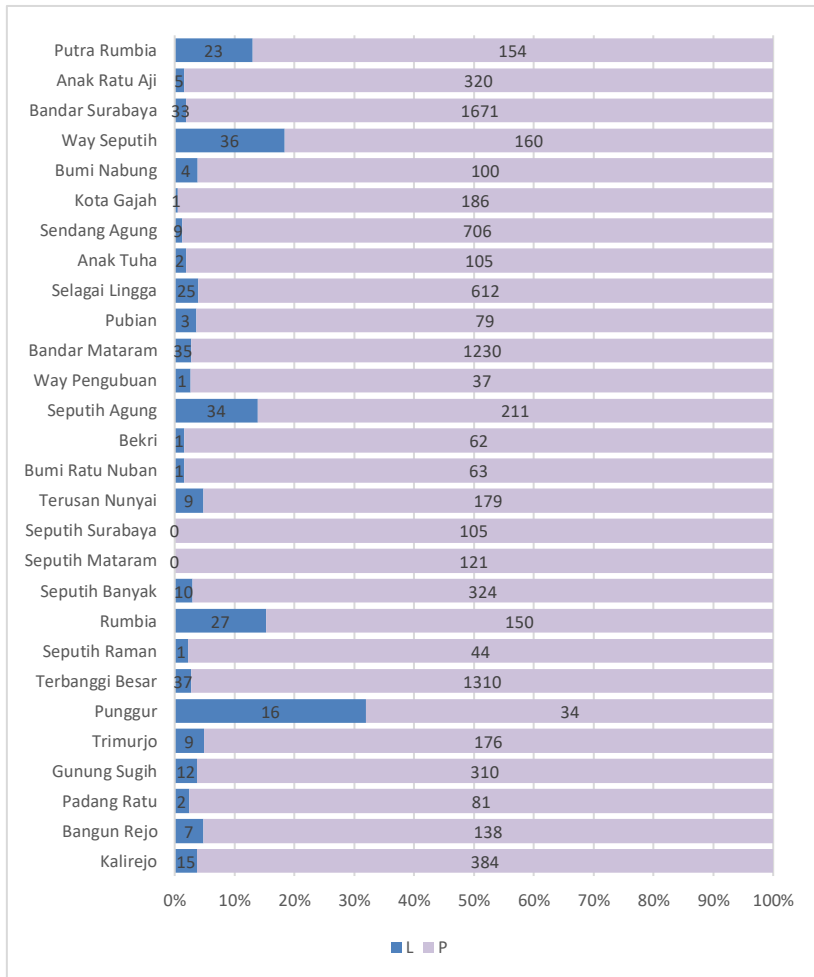
Grafik 36. Disparitas Gender Peserta Keluarga Berencana Aktif



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini merupakan data peserta KB baru 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah peserta KB baru paling tinggi adalah Bandar Surabaya dengan jumlah peserta KB baru laki-laki sebanyak 33 orang dan jumlah peserta KB baru Perempuan sebanyak 1671 orang. Peringkat kedua, yaitu Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 37 orang dan perempuan berjumlah 1310 orang. Ketiga, Bandar Mataram dengan jumlah laki-laki 35 orang dan perempuan 1230 orang. Adapun jumlah peserta KB baru paling rendah adalah kecamatan Way Pengubuan dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 37 orang. Kedua, kecamatan Seputih Raman dengan jumlah peserta KB baru laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 44 orang. Ketiga, kecamatan Punggur dengan jumlah peserta KB baru laki-laki 16 orang dan perempuan 34 orang.

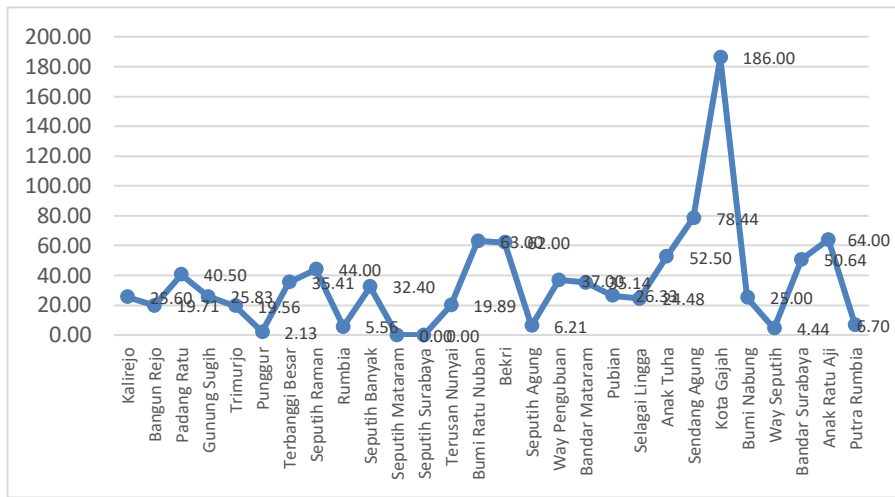
Grafik 37. Peserta Keluarga Berencana Baru



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas gender peserta KB baru di kabupaten Lampung Tengah sebesar 25,28. Kecamatan Seputih Kota Gajah memiliki indeks paritas paling tinggi dengan angka (186,00). Disusul dengan kecamatan Sendang Agung (78,44) dan Anak Ratu Aji (64,00). Kecamatan dengan IPG terendah adalah Punggur (2,13), Way Seputih (4,44), dan Rumbia (5,56). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

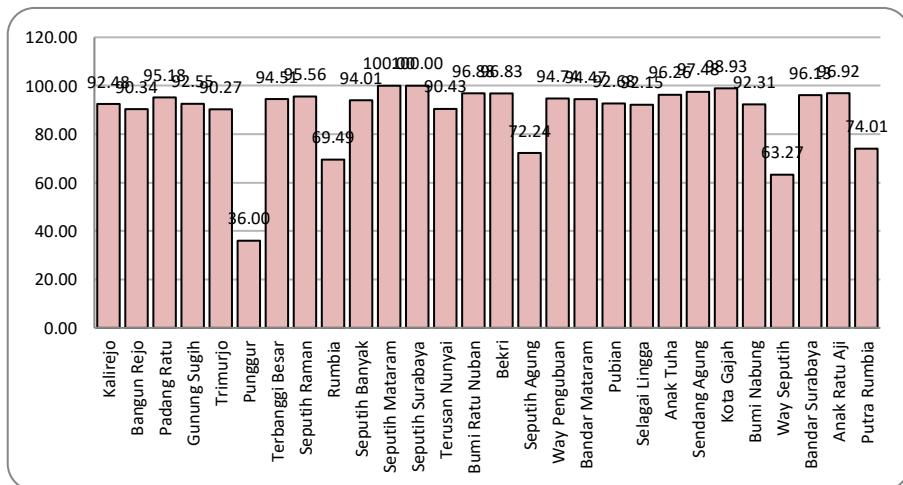
Grafik 38. Indeks Paritas Gender Peserta Keluarga Berencana Baru



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Sebagian besar kecamatan memiliki nilai disparitas gender yang tinggi, dengan rata-rata mendekati 100, menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam partisipasi program KB baru. Namun, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki nilai jauh lebih rendah dibandingkan lainnya, mengindikasikan perlunya perhatian khusus. Terdapat Tiga kecamatan dengan nilai IDG tertinggi adalah Kota Gajah (98,93), disusul Sendang Agung (97,48), dan Anak Ratu Aji (96,92). Sebaliknya, tiga kecamatan dengan nilai IDG terendah adalah Punggur (36,00), Way Seputih (63,27), dan Rumbia (69,49). Kecamatan-kecamatan dengan IDG yang rendah perlu mendapatkan perhatian lebih agar partisipasi program KB dapat ditingkatkan secara merata di semua wilayah. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 39. Disparitas Gender Peserta Keluarga Berencana Baru



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

D. DATA GENDER BIDANG EKONOMI

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam temuan penelitiannya Siregar dan Wahyuniarti (2007) mengatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, *share* sektor pertanian dan sektor industri. Namun, variabel yang signifikan dan relatif besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin adalah sektor pendidikan.

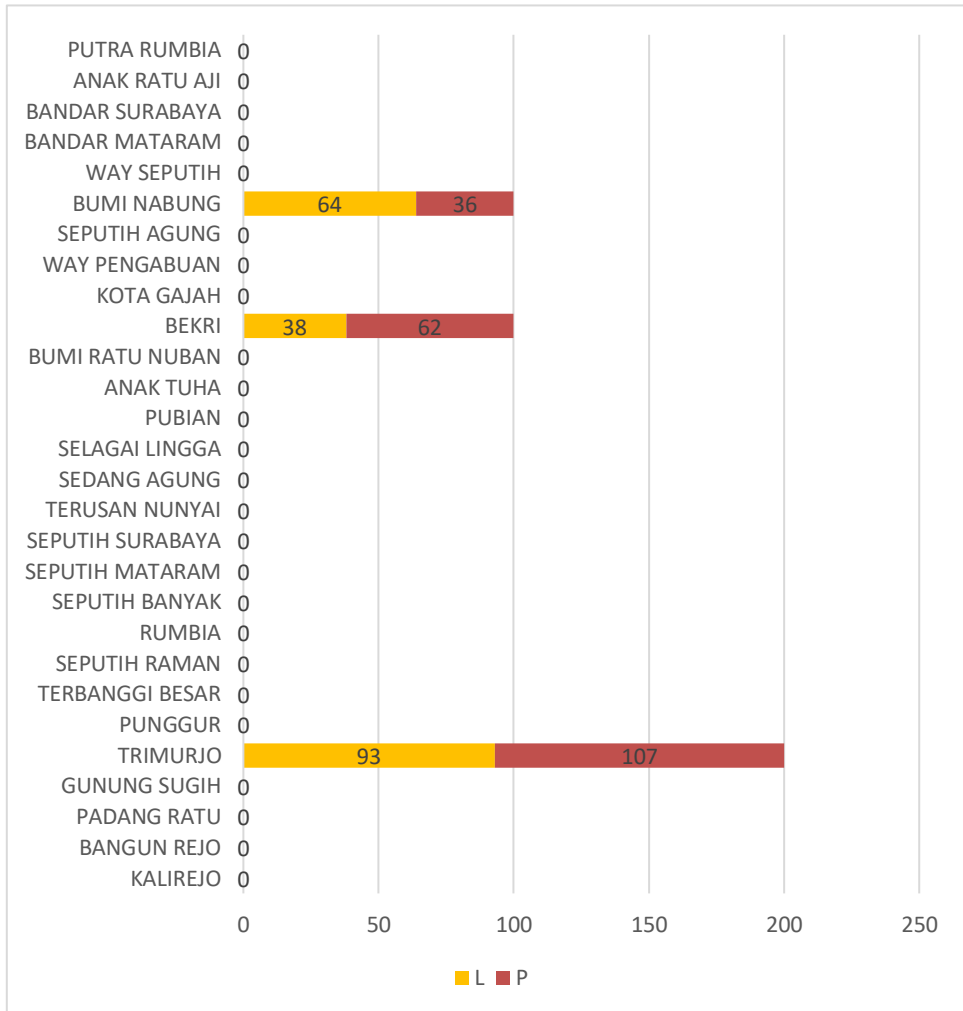
Masih menurut Siregar dan Wahyuniarti (2007) berdasarkan temuan penelitian yang mereka lakukan kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengurangi penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan syarat keharusan. Disamping itu diperlukan pula syarat kecukupan dengan mempercepat industrialisasi pertanian/perdesaan, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dan pengendalian secara efektif pertumbuhan penduduk terutama masyarakat miskin.

Data bidang ekonomi berikut ini, akan memberikan gambaran kepada kita kinerja perempuan dan laki-laki pada setiap sub sektornya.

1) Lingkungan Hidup

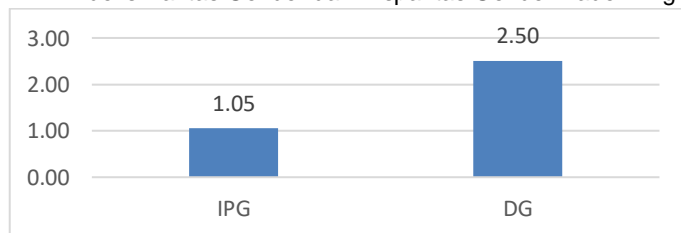
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 400 kader lingkungan hidup yang hanya terkonsentrasi pada tiga kecamatan. Trimurjo memiliki jumlah laki-laki dan perempuan tertinggi dalam persebaran kader lingkungan hidup yaitu 93 laki-laki dan 107 perempuan dengan total 200 orang. Peringkat kedua, wilayah Bumi Ratu Nuban yang menunjukkan angka lebih kecil, yaitu 38 laki-laki dan 62 perempuan dengan total 100 orang. Wilayah Bumi Nabung juga memiliki total 100 orang, namun dengan jumlah laki-laki 64 orang dan perempuan 36 orang.

Grafik 40. Kader Lingkungan Hidup



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 41. Indeks Paritas Gender dan Disparitas Gender Kader Lingkungan Hidup

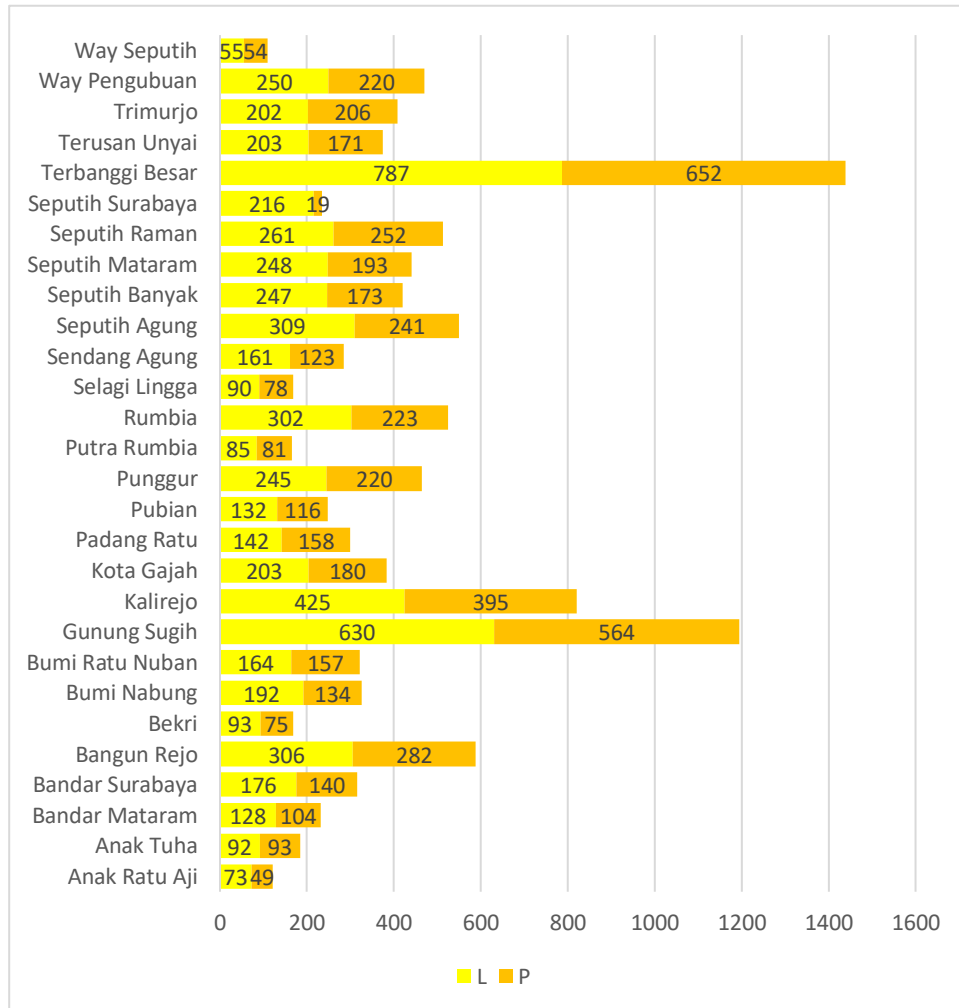


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan data tersebut, indeks paritas gender kader lingkungan hidup adalah 1.05 sedangkan disparitas gender membentang sebesar 2,5 persen dengan keunggulan pada kinerja perempuan.

2) Penanaman Modal Dalam Negeri

Grafik 42. Penanaman Modal Dalam Negeri

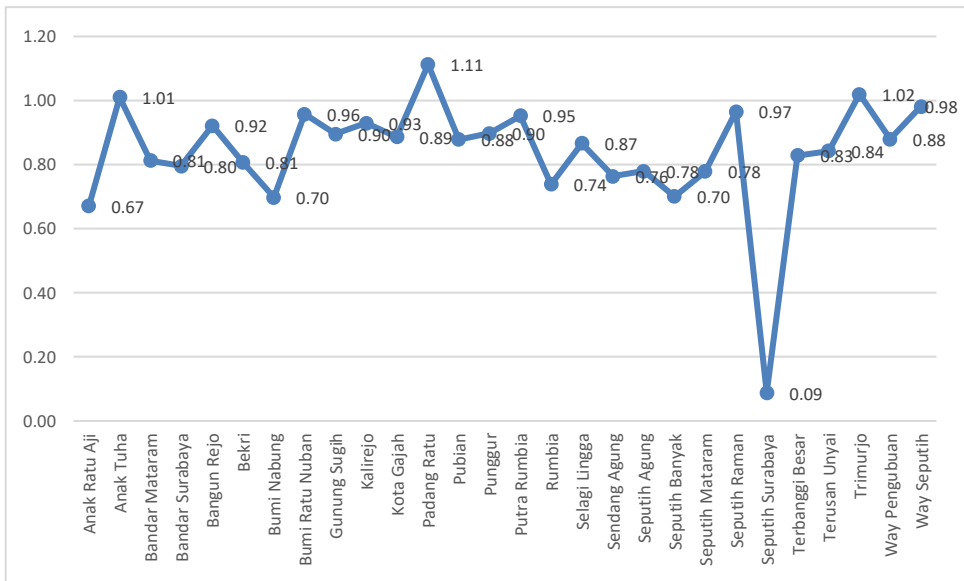


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas merupakan data jumlah PMDN di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah PMDN paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki sebanyak 787 orang dan perempuan sebanyak 652 orang. Peringkat kedua, yaitu Gunung Sugih dengan

jumlah laki-laki 630 orang dan perempuan berjumlah 564 orang. Ketiga, Kalirejo dengan jumlah laki-laki 425 orang dan perempuan 395 orang. Adapun jumlah PMDN paling rendah adalah kecamatan Way Seputih dengan jumlah laki-laki sebanyak 55 orang dan perempuan 54 orang. Kedua, kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan 49 orang. Ketiga, kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki 85 orang dan perempuan 81 orang.

Grafik 43. Indeks Paritas Penanaman Modal Dalam Negeri

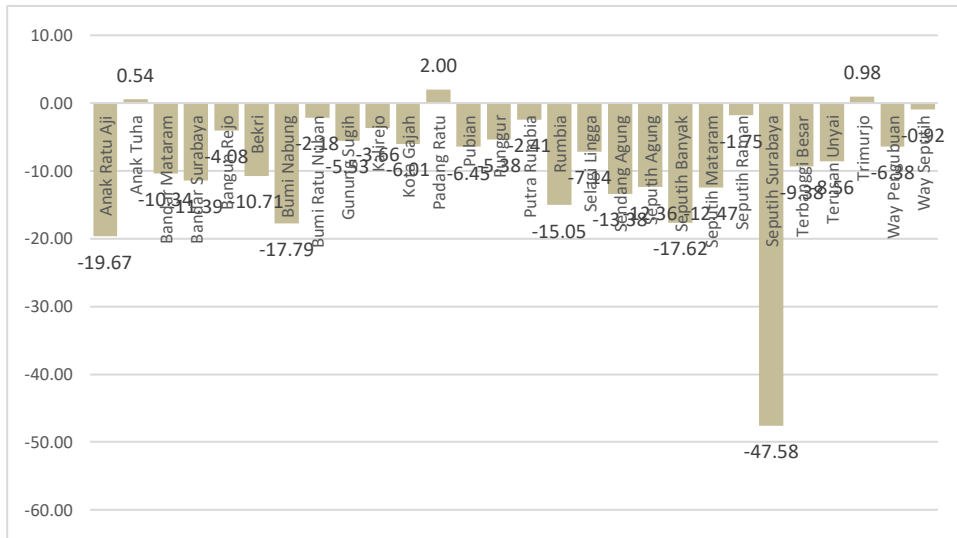


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, grafik indeks paritas di atas dalam PMDN sebesar 0,86, artinya terapat perbandingan tingkat kesetaraan gender dengan nilai lebih mendekati 1. Selain itu, grafik di atas juga menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan. Kecamatan Padang Ratu adalah kecamatan dengan nilai IPG tertinggi sebesar (1,11), disusul dengan Trimurjo (1,02), dan Anak Tuha (1,01). Adapun kecamatan yang memiliki IPG terendah adalah Seputih Surabaya (0,09), Anak Ratu Aji (0,67), Bumi Nabung (0,70) dan Seputih Banyak (0,70). Selengkapnya dapat dilihat grafik di atas.

Berdasarkan grafik di bawah ini, disparatis gender PMDN secara keseluruhan sebesar -7,41, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Padang Ratu (2,00). Kecamatan Trimurjo (0,98), dan Anak Tuha (0,54). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 44. Disparitas Gender Penanaman Modal Dalam Negeri

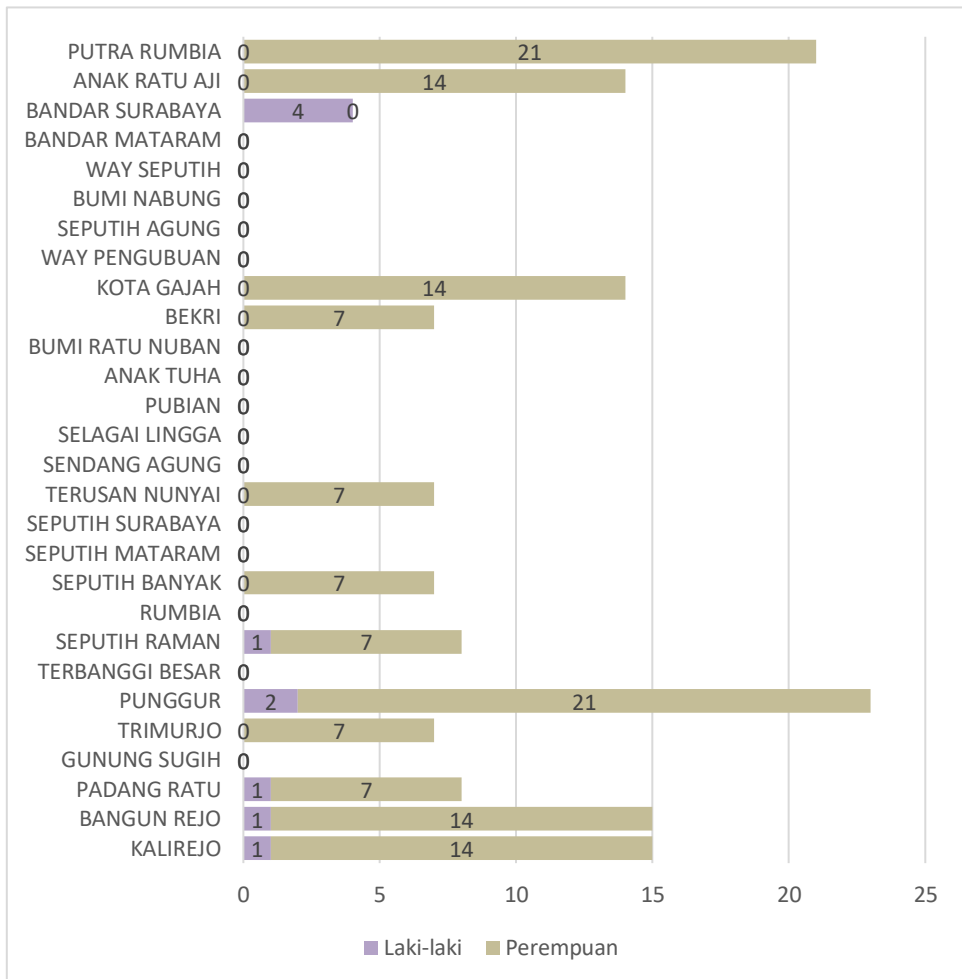


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

3) Perikanan dan Peternakan

Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 150 kelompok. Dengan komposisi kelompok berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 kelompok (6,67 persen) dan kelompok perempuan sebanyak 140 kelompok (93,33 persen). Kelompok nelayan pengolah dan pemasar hasil ikan ini tidak menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Wilayah dengan persebaran paling banyak adalah Punggur (23 kelompok), Putra Rumbia (21 kelompok), Kalirejo dan Bangun Rejo (15 kelompok). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

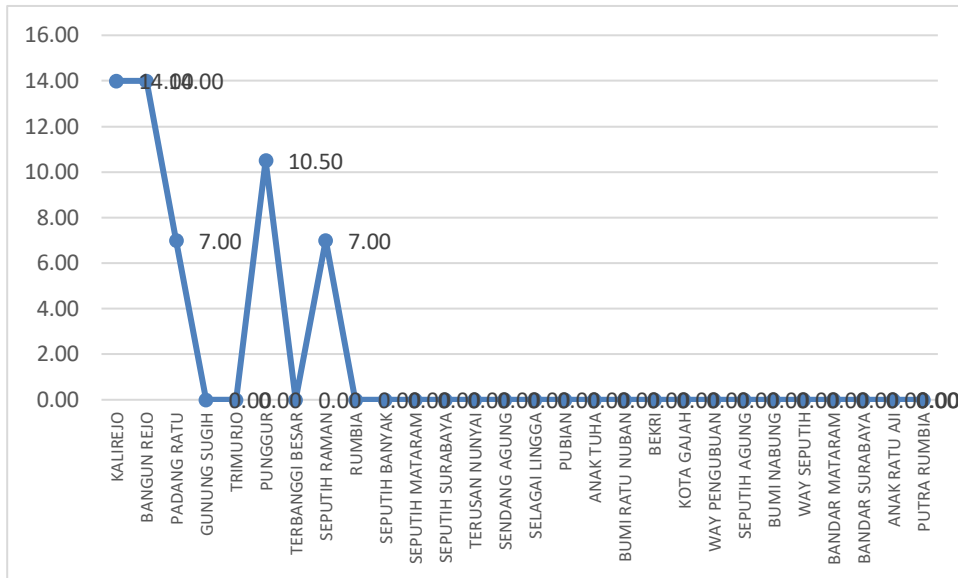
Grafik 45. Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

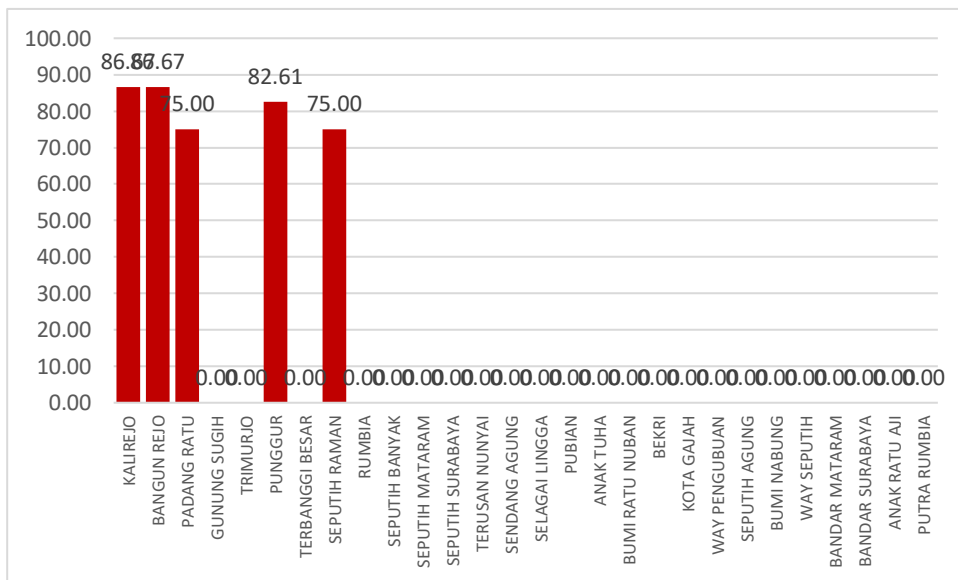
Indeks paritas gender secara keseluruhan sebesar 14,00 dengan kinerja perempuan lebih tinggi dari kinerja laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari tiap-tiap kecamatan, indeks paritas ini tidak berimbang, dikarenakan tidak lengkapnya data. Keunggulan perempuan pada sektor ini, dapat menjadi alternatif lapangan usaha, dalam bentuk UMKM yang dapat di dukung secara maksimal oleh pemangku kepentingan yang terlibat. Selengkapnya, indeks paritas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 46. Indeks Paritas Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 47. Disparitas Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan



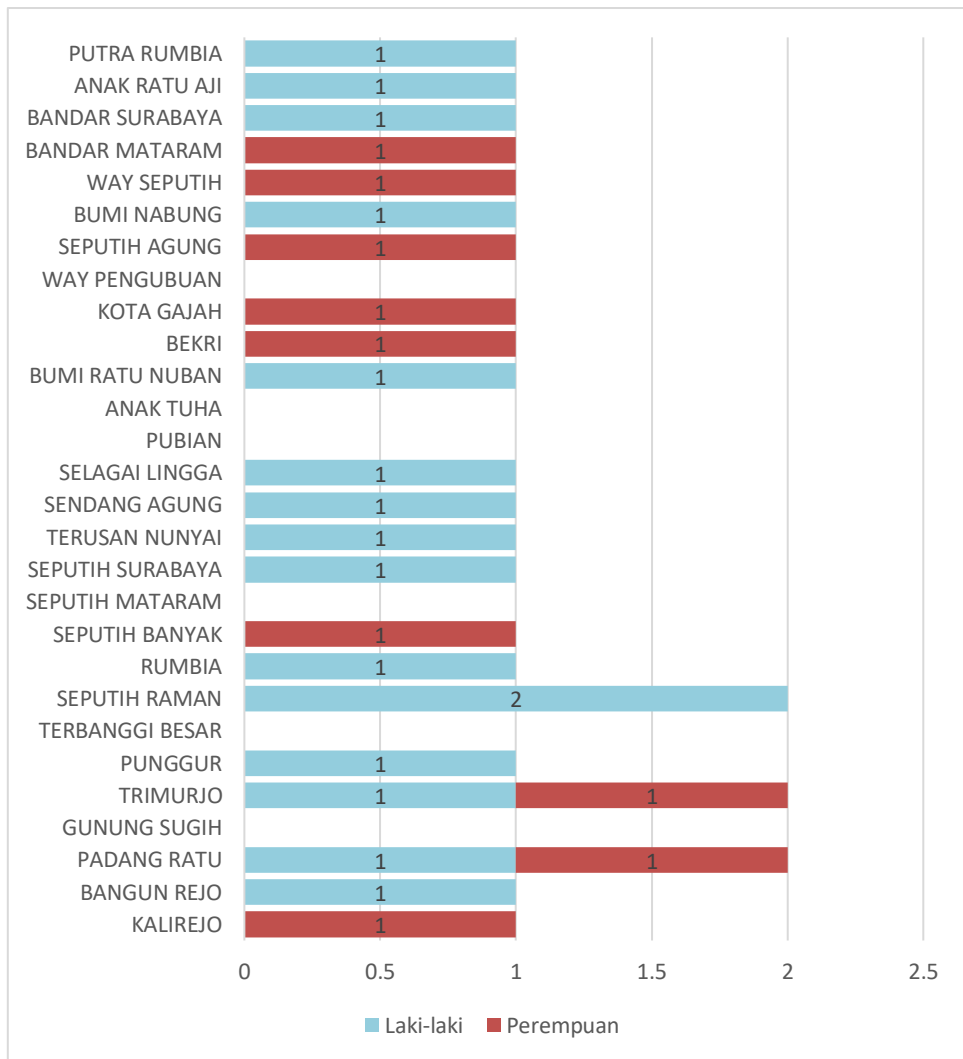
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan kesenjangan kinerja antara laki laki dan perempuan. Secara keseluruhan, disparitas gender kelompok pengolah dan pemasar ikan di

Kabupaten Lampung Tengah sebesar 86,67 persen dengan arti perempuan unggul senilai angka tersebut dibandingkan laki-laki.

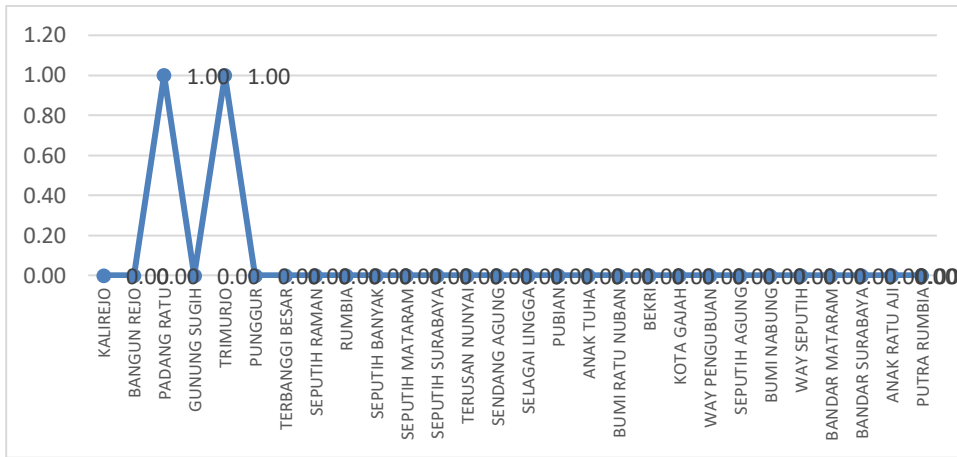
Para pelaku usaha pengolah dan pemasaran hasil perikanan juga didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Di Kabupaten Lampung Selatan terdapa 25 PPL dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang (64 persen) dan perempuan sebanyak 9 orang (36 persen). PPL ini hampir merata ada disetiap kecamatan dengan jumlah satu orang, hanya Padang Ratu, Trimurjo dan Seputih Mataram saja yang memiliki dua orang penyuluh. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 48. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

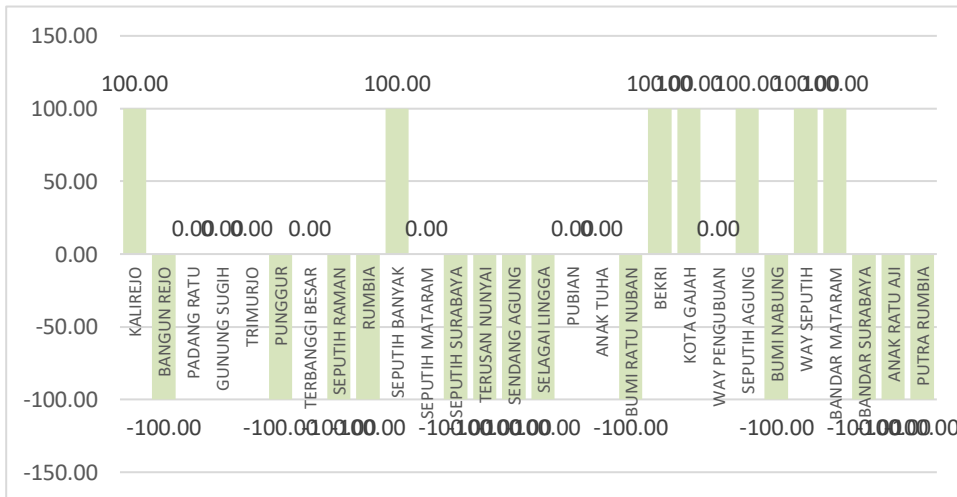
Grafik 49. Indeks Paritas Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan indeks paritas petugas penyuluh lapangan perikanan yang ada di Kabupten Lampung Tengah sebesar 0,56 yang artinya ada kesenjangan kinerja perempuan dan laki-laki, dengan kinerja perempuan lebih rendah. Kinerja berimbang ada di Kecamatan Padang Ratu dan Trimurjo.

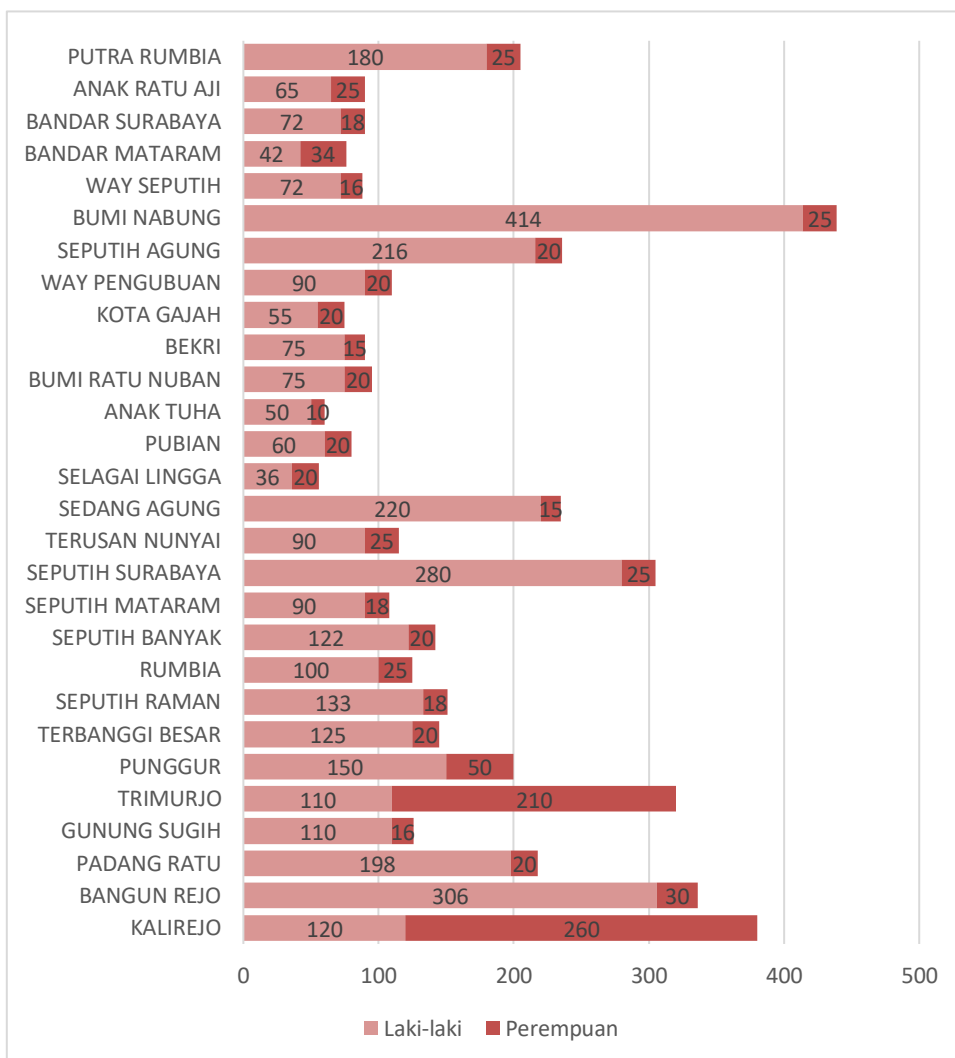
Grafik 50. Disparitas Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan disparitas gender petugas penyuluh lapangan perikanan yang ada di Kabupten Lampung Tengah sebesar -28,00 persen yang artinya kinerja perempuan tertinggal sejauh angka tersebut dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 51. Peternak

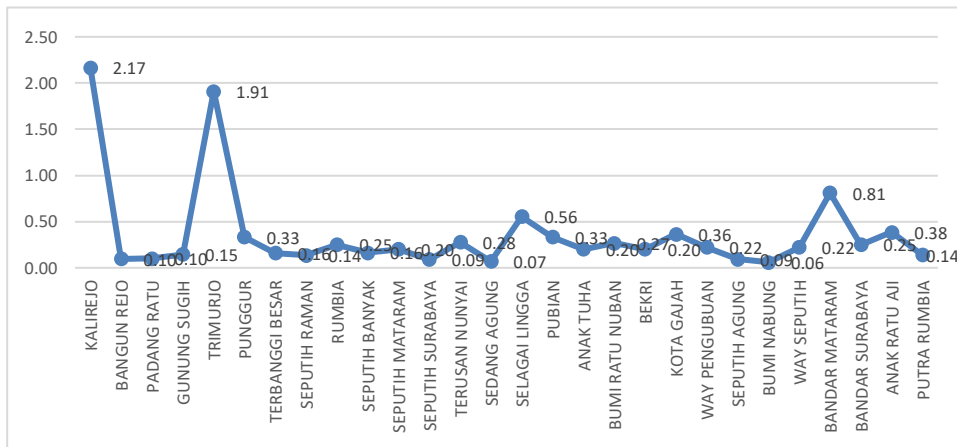


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan distribusi peternak di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan Way Seputih, yang memiliki 414 laki-laki dan 25 perempuan, dengan total 439 orang. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Padang Ratu, dengan hanya 36 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 16 perempuan. Secara keseluruhan, terdapat ketimpangan jumlah gender di sebagian besar wilayah, di mana laki-laki mendominasi, seperti di kecamatan Kalirejo dan kecamatan Way Seputih. Namun, di beberapa kecamatan seperti Seputih Banyak dan Terusan Nunyai, perbedaan gender terlihat lebih seimbang.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu pusat pengembangan sektor peternakan di Provinsi Lampung, terutama dalam produksi unggas dan sapi potong. Wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Way Seputih, kemungkinan besar memainkan peran penting dalam mendukung sektor ini melalui tenaga kerja. Ulama et al. (2022) menunjukkan bahwa Lampung Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan sapi potong, didukung oleh ketersediaan lahan pakan dan tenaga kerja yang memadai. Ketimpangan gender di daerah ini dapat berimplikasi pada distribusi peran kerja, di mana laki-laki cenderung lebih aktif dalam sektor pertanian dan peternakan.

Grafik 52. Indeks Paritas Peternak

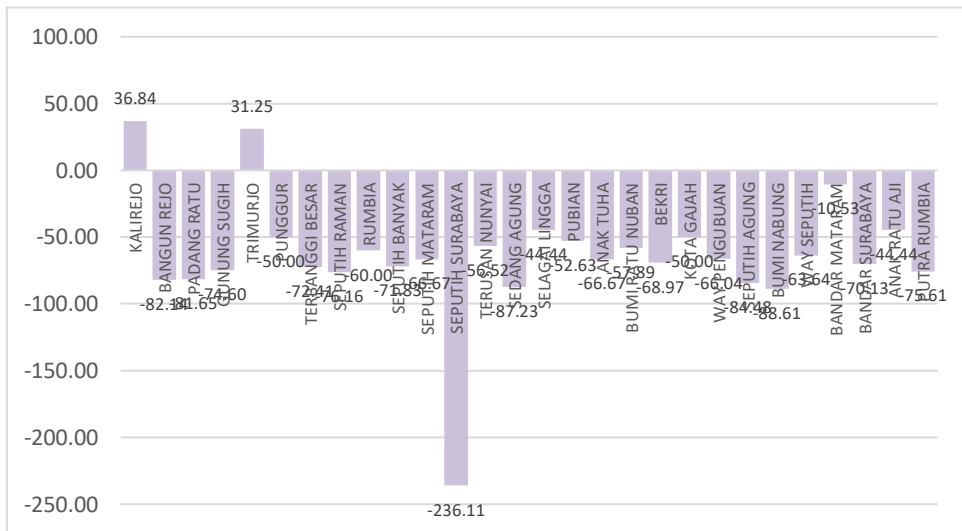


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan ketimpangan yang signifikan di beberapa kecamatan terkait sektor peternakan. Kecamatan Kalirejo mencatat indeks tertinggi sebesar 2,17, diikuti oleh kecamatan Trimurjo dengan 1,91, yang mengindikasikan distribusi tidak merata dalam akses ke sumber daya atau tenaga kerja di sektor ini. Sebaliknya, sebagian besar kecamatan lainnya memiliki indeks di bawah 1, menunjukkan kondisi yang lebih seimbang. Ketimpangan ini dapat menjadi tantangan dalam mengoptimalkan potensi peternakan di kecamatan tersebut, terutama di kecamatan dengan indeks tinggi yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan akses dan peluang. Selengkapnya dilihat pada grafik di atas.

Disparitas gender di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan ketimpangan signifikan. Kecamatan Kalirejo (36,84) dan kecamatan Gunung Sugih (31,25) memiliki indeks positif tertinggi, menunjukkan dominasi salah satu gender, sedangkan Seputih mencatat disparitas terdalam (-236,11). Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kesetaraan gender, terutama dalam akses ekonomi di sektor peternakan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 53. Disparitas Gender Peternak



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

E. DATA GENDER BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK

1) Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk kegiatan dengan tema perlindungan perempuan dan media sosialisasi. Namun ada beberapa kecamatan yang belum melaksanakan kegiatan PUG atau menyebarkan media sosialisasi, antara lain Putra Rumbia, Anak Ratu Aji, Bandar Surabaya, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Bekri, Senadng Agung, Seputih Surabaya, Seputih Banyak, Seputih Raman, Terbanggi Besar, Punggur, Padang Ratu, Bangun Rejo dan Kalirejo. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, dan perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

Tabel 1. Regulasi dan Kebijakan Daerah

Kecamatan	Bentuk Kegiatan
Gunung Sugih	Jambore Perempuan
Trimurjo	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO
Bumi Ratu Nuban	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO
Bekri	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO

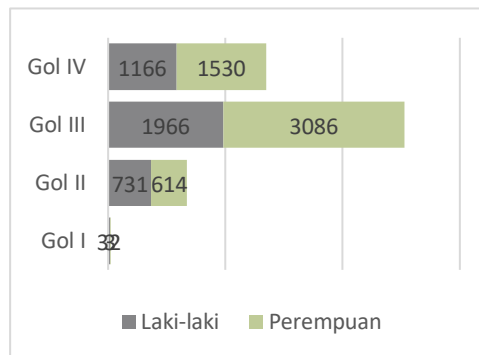
Sumber: diolah dari data sekunder

2) Sumber Daya Aparatur Negara

Marlina (2023) menyatakan bahwa meskipun keterwakilan perempuan dalam birokrasi publik meningkat, terdapat beberapa kendala seperti stereotip gender dan hambatan struktural masih signifikan. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif untuk menesejajarkan keterwakilan perempuan dan birokrasi publik.

Profil sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai dari profil pejabat yang ada di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Grafik di bawah ini merangkum data 9.127 PNS yang terdiri dari 5.232 perempuan (57,32%) dan 3.895 orang laki-laki (42,67%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

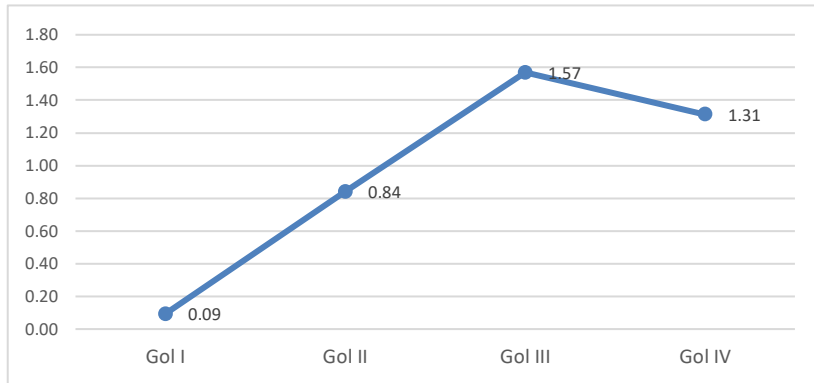
Grafik 54. PNS Berdasarkan Golongan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di bawah ini memberikan gambaran indeks paritas ASN berdasarkan golongan dan ruang di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Secara keseluruhan IP bernilai 1,34 yang artinya ada kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

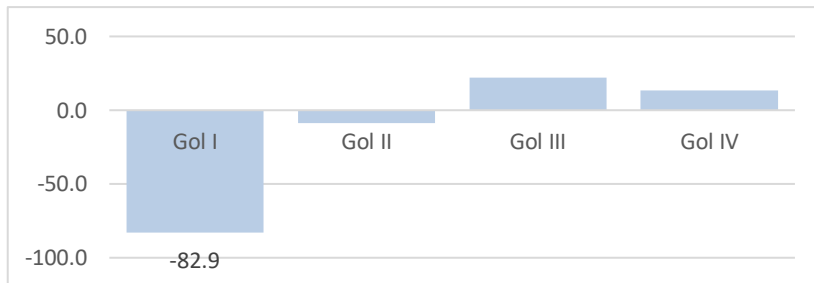
Grafik 55. Indeks Paritas PNS Berdasarkan Golongan



Sumber: diolah dari data sekunder

Dalam hal disparitas gender, secara keseluruhan terdapat perbedaan kinerja 14,7 persen dengan antara kinerja perempuan lebih tinggi senilai tersebut. Selengkapnya disparitas gender tiap golongan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

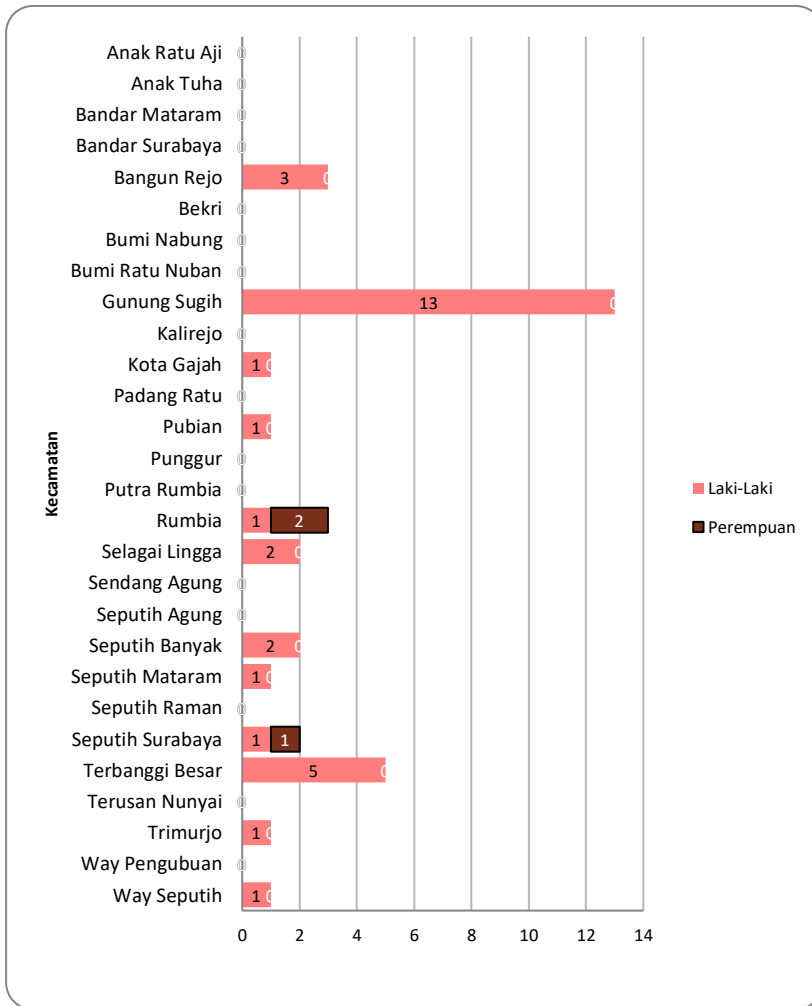
Grafik 56. Dispartias Gender PNS Berdasarkan Golongan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan I di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 34 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 3 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 13 orang dan tanpa representasi perempuan. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 5 orang dan tanpa keterlibatan perempuan. Ketiga, Bangun Rejo dengan jumlah laki-laki 3 orang dan tanpa keterlibatan perempuan. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Dari 18 Kecamatan yang memiliki PNS, keterwakilan perempuan sangat minim bahkan tidak ada di beberapa kecamatan.

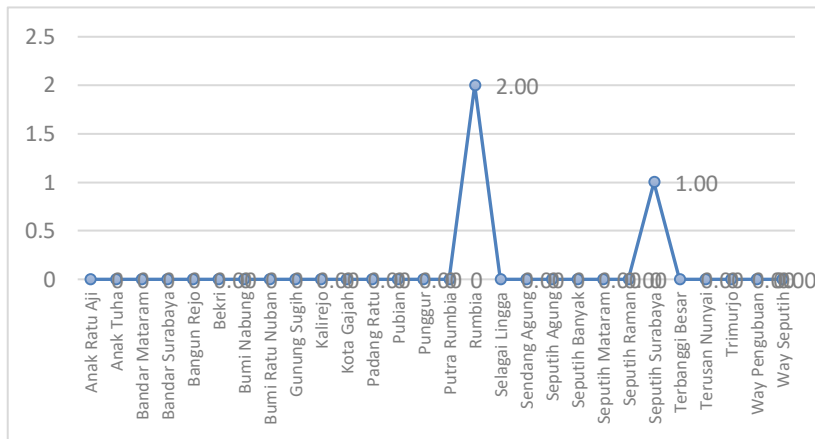
Grafik 57. Pegawai Negeri Sipil Golongan I



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

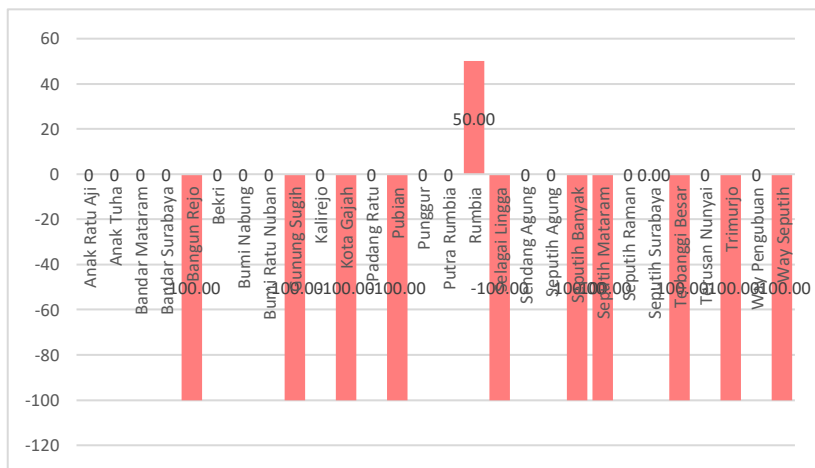
Secara keseluruhan, indeks paritas terhadap kinerja PNS Golongan I, memperlihatkan angka 0,09. Artinya, terjadi kesenjangan kinerja perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan jauh lebih tertinggal. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 58. Indeks Paritas PNS Golongan I



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

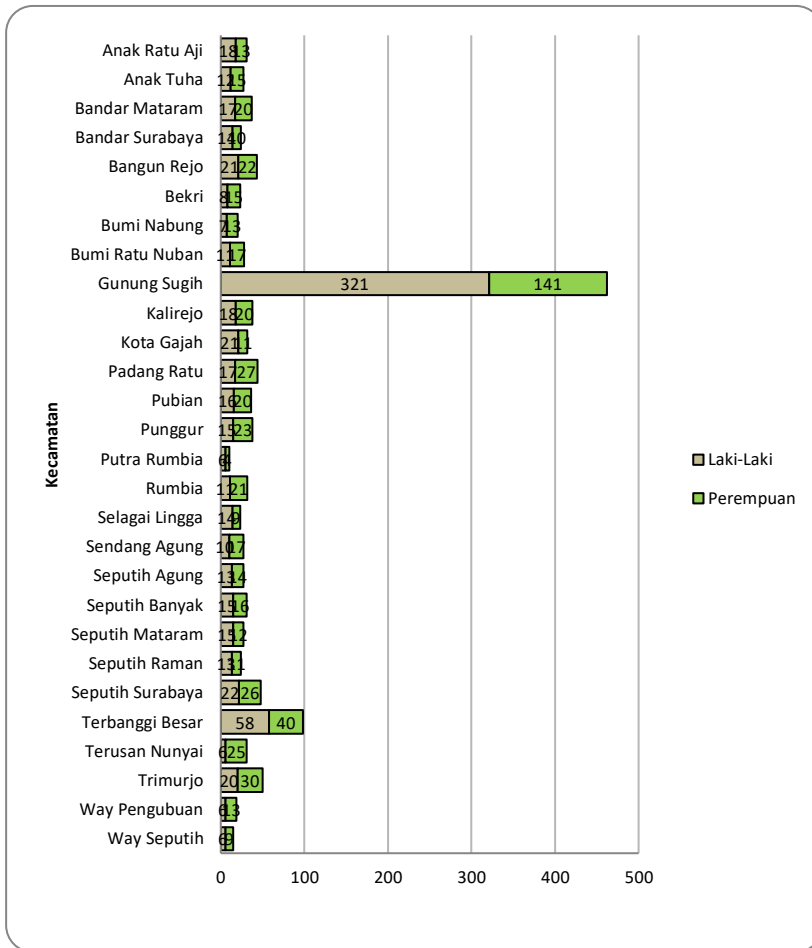
Grafik 59. Disparitas Gender PNS Golongan I



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Sedangkan pada perhitungan disparitas gender menghasilkan angka -85,29, artinya kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

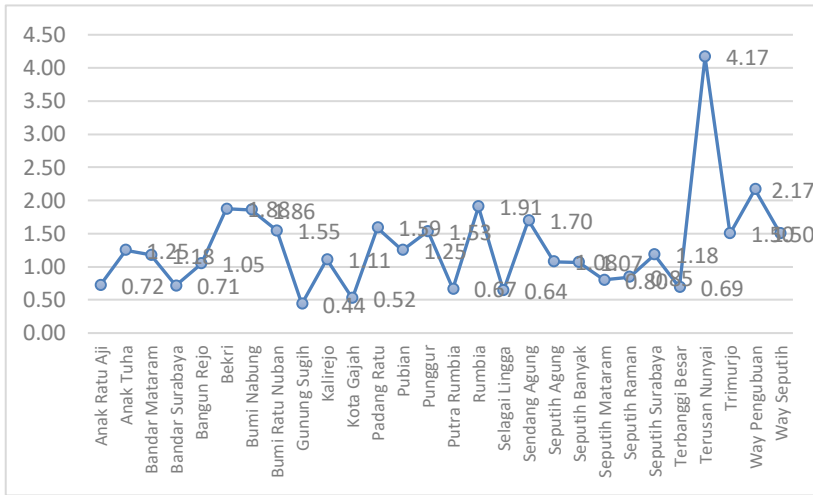
Grafik 60. Pegawai Negeri Sipil Golongan II



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan II di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 1345 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 731 orang dan perempuan 614 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 321 orang dan perempuan 141 orang. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 58 orang dan perempuan 40 orang. Ketiga, Trimurjo dengan jumlah laki-laki 20 orang dan perempuan 30 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki 6 orang dan perempuan 4 orang. Kedua, kecamatan Way Pengubuan dengan jumlah laki-laki 6 orang dan perempuan 13 orang. Ketiga, kecamatan Way Seputih dengan jumlah laki-laki 6 orang dan perempuan 9 orang. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender di beberapa kecamatan, seperti di Gunung Sugih yang mendominasi adalah laki-laki, sedangkan di kecamatan Padang Ratu, Way Pengubuan, dan Way Seputih yang mendominasi adalah perempuan.

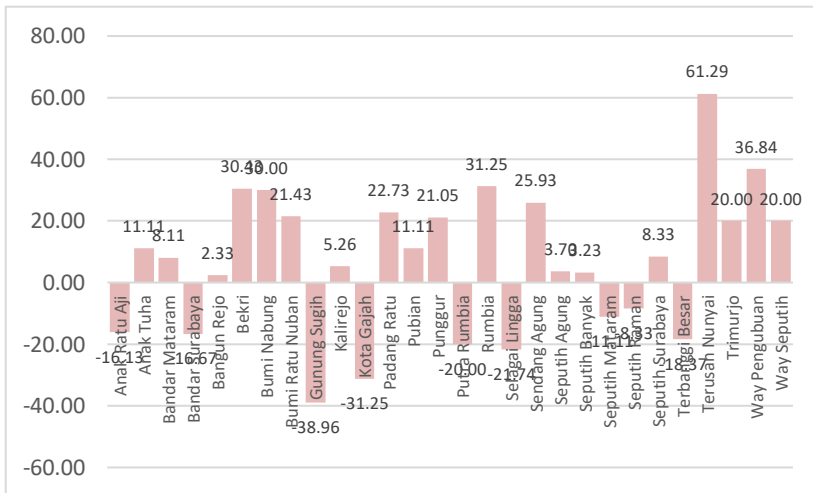
Grifik 61. Indeks Paritas Pegawai Negeri Sipil Golongan II



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan indeks paritas secara keseluruhan PNS Golongan II sebesar 0,84, yang artinya terdapat ketimpangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal. Kinerja perempuan tertinggal ada di Kecamatan Terusan Nunyai (4,17). Kinerja perempuan juga tercatat tinggi di Kecamatan Way Pengubuan (2,17) dan Rumbia (1,91). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grifik 62. Disparitas Gender Pegawai Negeri Sipil Golongan II

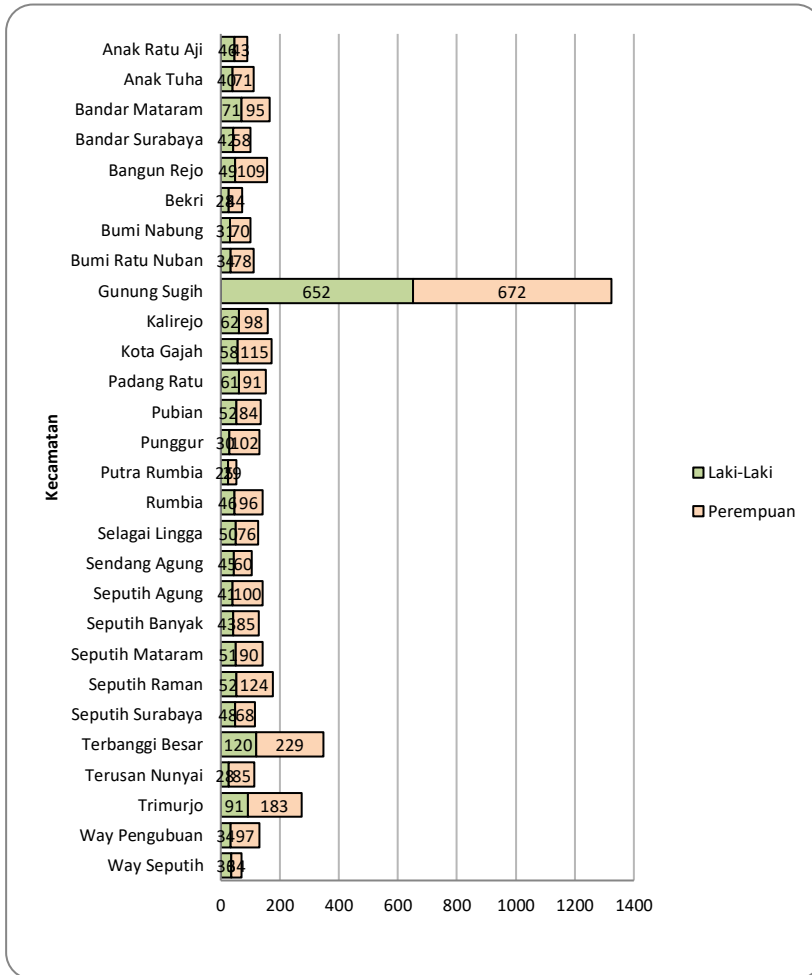


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, disparitas gender selisih kinerja perempuan dan laki-laki pada bidang PNS Golongan II sebesar -8,70. Artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul di Kecamatan Terusan Nunyai

(61,29). Kecamatan Way Pengubuan (36,84) dan Rumbia (31,25). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 63. Pegawai Negeri Sipil Golongan III

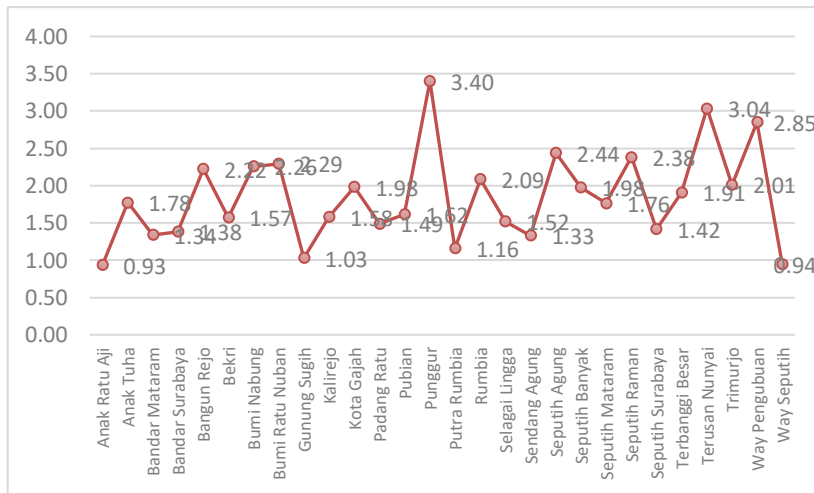


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan III di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 5052 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1966 orang dan perempuan 3086 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 652 orang dan perempuan 672 orang. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 120 orang dan perempuan 229 orang. Ketiga, Trimurjo dengan jumlah laki-laki 91 orang dan perempuan 183 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki 25 orang dan perempuan 29 orang. Kedua, kecamatan Bekri dengan jumlah laki-laki 28 orang dan perempuan 24 orang. Ketiga, kecamatan Way Seputih dengan jumlah laki-laki 34

orang dan perempuan 36 orang. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa perempuan mendominasi di sebagian besar kecamatan, terutama di wilayah dengan jumlah PNS tinggi seperti Gunung Sugih, Terbanggi Besar, dan Trimuju. Namun, kecamatan Bekri menunjukkan dominasi laki-laki meskipun jumlah total yang kecil. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam golongan III yang seringkali mencakup jabatan administratif atau fungsional.

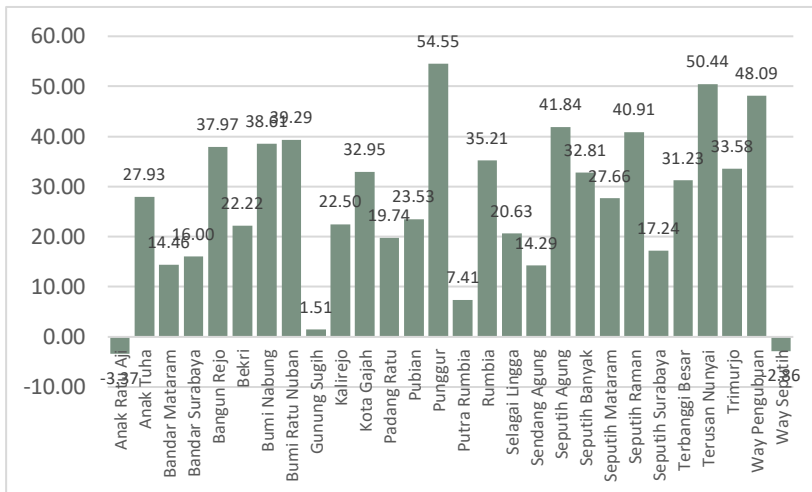
Grafik 64. Indeks Paritas Pegawai Negeri Sipil Golongan III



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan indeks paritas secara keseluruhan PNS Golongan III sebesar 1,57 yang artinya terdapat ketimpangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal. Kinerja perempuan tertinggal ada di Punggur (3,40). Kinerja perempuan juga tercatat tinggi di Kecamatan Terusan Nunyai (3,04) dan Way Pengubuan (2,85). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 65. Disparitas Gender Pegawai Negeri Sipil Golongan III

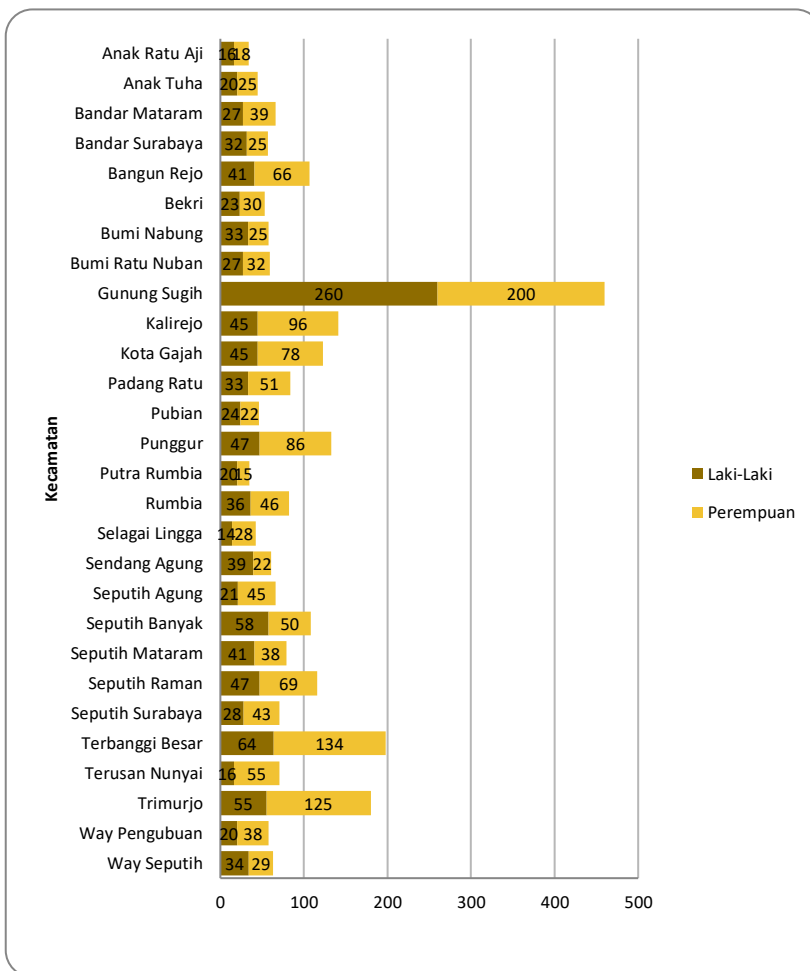


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, disparitas gender kinerja perempuan dan laki-laki pada bidang PNS Golongan III sebesar 22,17. Artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul di Punggur (54,55). Kecamatan Terusan Nunyai (50,44) dan Way Pengubuan (48,09). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik berikut ini menunjukkan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan IV di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 2696 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1166 orang dan perempuan 1530 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 260 orang dan perempuan 200 orang. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 64 orang dan perempuan 134 orang. Ketiga, Trimurjo dengan jumlah laki-laki 55 orang dan perempuan 125 orang. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah laki-laki 16 orang dan perempuan 18 orang. Kedua, kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki 20 orang dan perempuan 15 orang. Ketiga, kecamatan Selagai Lingga dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan 28 orang.

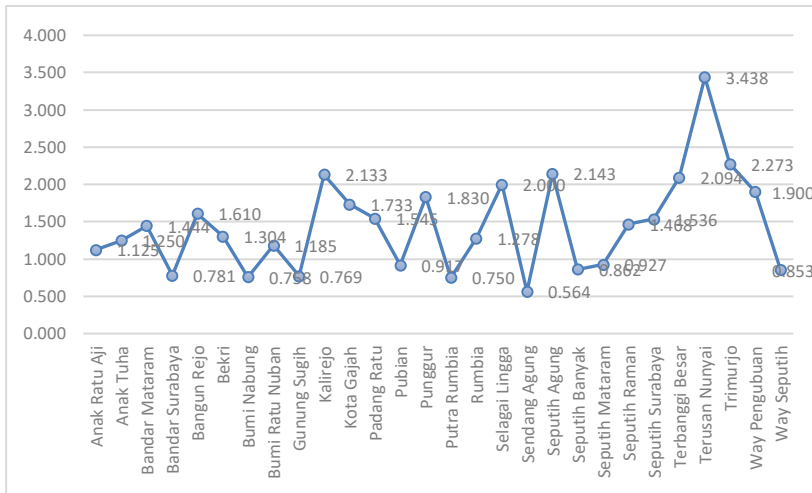
Grafik 66. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan indeks paritas secara keseluruhan PNS Golongan IV sebesar 1,312 yang artinya terdapat ketimpangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal. Kinerja perempuan tertinggal ada di Terusan Nunyai (3,438). Kinerja perempuan juga tercatat tinggi di Kecamatan Trimurjo (2,273) dan Seputih Agung (2,143). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

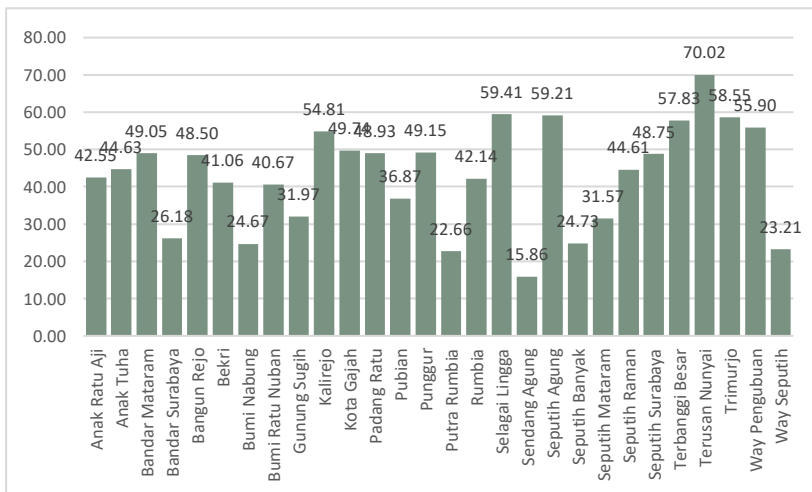
Grafik 67. Indeks Paritas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, disparitas gender kinerja perempuan dan laki-laki pada bidang PNS Golongan III sebesar 43,98. Artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul di Terusan Nunyai (70,02). Kecamatan Selagai Lingga (59,41) dan Seputih Agung (59,21). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

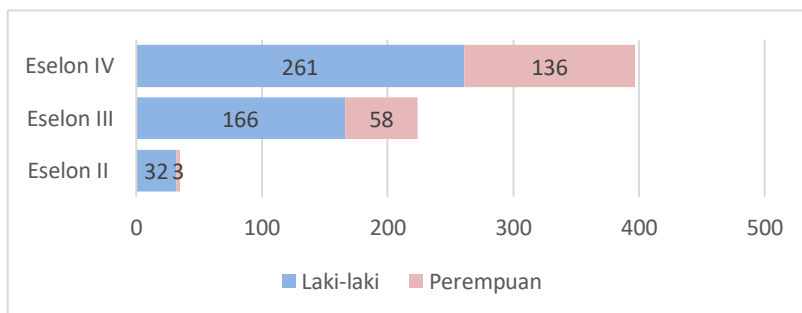
Grafik 68. Disparitas Gender Pegawai Negeri Sipil Golongan IV



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Menurut PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan instansi pemerintahan bagi PNS. Sehingga dapat dipahami bahwa pejabat eselon adalah pejabat PNS atau ASN yang berada pada tingkatan jabatan struktural di satuan instansi pemerintahan. Untuk diketahui, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS atau ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara/pemerintahan.

Grafik 69. Pejabat Eselon di Kabupaten Lampung Tengah



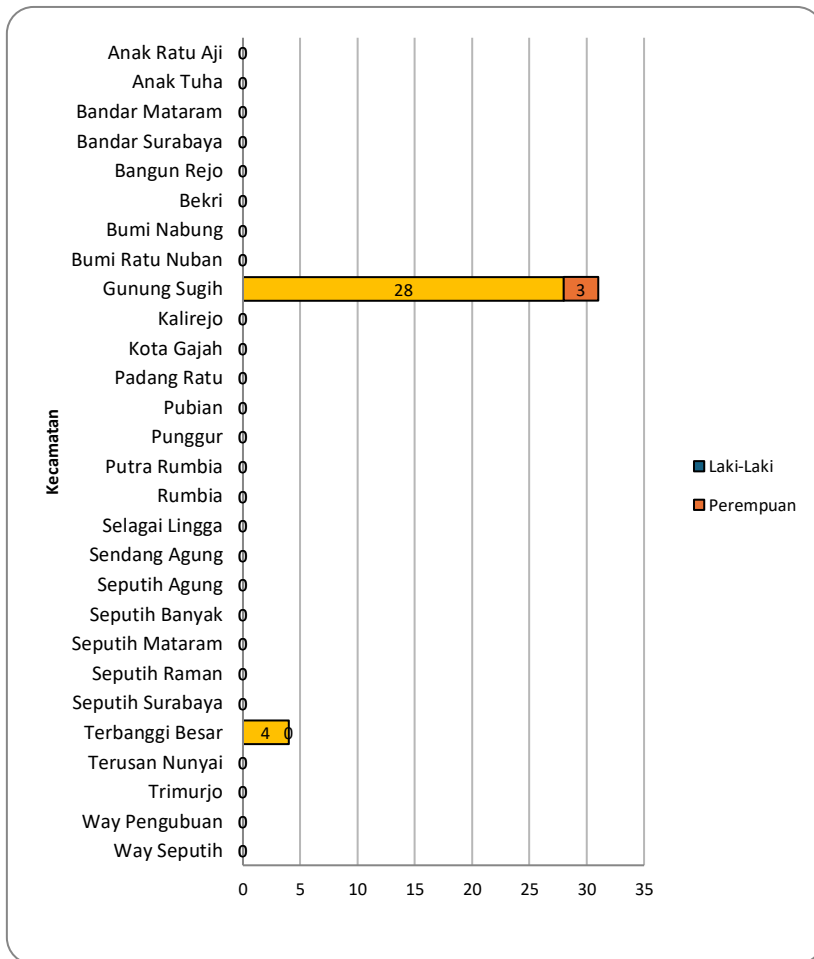
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan terdapat 656 pejabat eselon (II, III dan IV) di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah. Dari data tersebut, pejabat laki-laki sebanyak 70 persen (459 orang) dan perempuan sebanyak 30 persen (197 orang). Dari data tersebut indeks paritas sebesar 0,32 dan disparitas gender sebesar 54,19 persen dengan kinerja perempuan tertinggal dibandingkan dengan kinerja laki-laki.

Adapun jumlah PNS Eselon II di Kabupaten Lampung Tengah 35 orang dengan komposisi PNS Eselon II berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang. PNS Eselon II paling banyak terdapat di Kecamatan Gunung Sugih. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

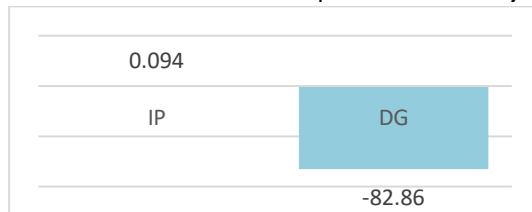
Untuk indeks paritas pejabat eselon II di Kabupten Lampung Tengah sebesar 0,094 yang artinya ada kesenjangan yang sangat signifikan antara kinerja laki-laki dan perempuan dengan kinerja perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Implikasi pada keseimbangan gender (disparitas gender) juga terlihat dari perbedaan kinerja sebesar 82,86 persen kinerja perempuan tertinggal sejauh angka tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.

Grafik 70. Pejabat Eselon II



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 71. Indeks Paritas dan Disparitas Gender Pejabat Eselon II

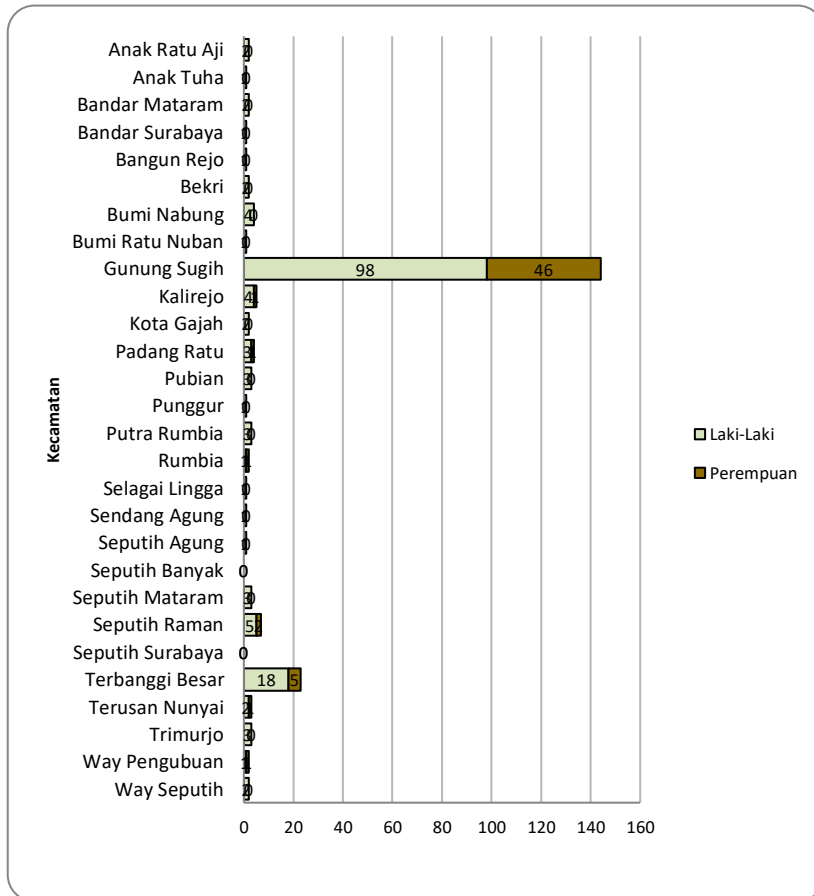


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, jumlah PNS Eselon III di Kabupaten Lampung Tengah 224 orang dengan komposisi PNS Eselon III berjenis kelamin laki-laki sebanyak 166 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang. Di beberapa kecamatan, jumlah laki-laki terlihat mendominasi, seperti kecamatan Gunung Sugih menunjukkan jumlah

laki-laki yang sangat tinggi, yaitu 98 orang, sedangkan jumlah perempuan 46 orang. Selain itu, di kecamatan Terbanggi Besar juga menunjukkan dominasi laki-laki yang berjumlah 18 orang, sedangkan perempuannya hanya berjumlah 5 orang. Hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan gender yang signifikan.

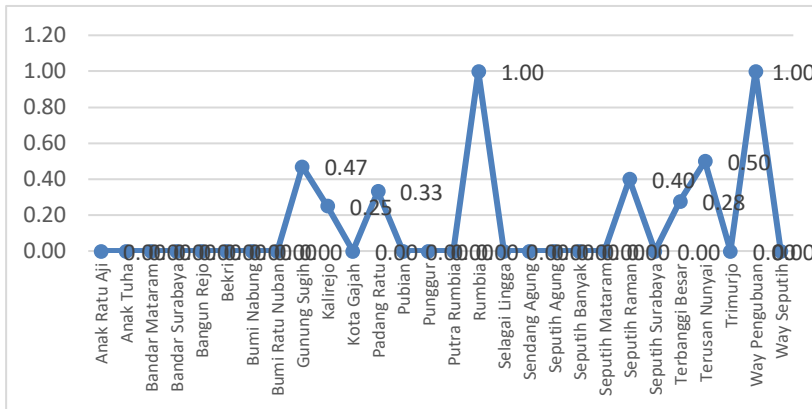
Grafik 72. Pejabat Eselon III



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas secara keseluruhan pada pejabat eselon III di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,349. Sebagian besar daerah tidak memiliki pejabat setingkat eselon III, sehingga tidak bisa diukur indeks paritasnya. Indeks paritas tertinggi ada di Rumbia dan Way Pengubuan dengan angka 1 artinya kinerja gender perempuan dan laki-laki seimbang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

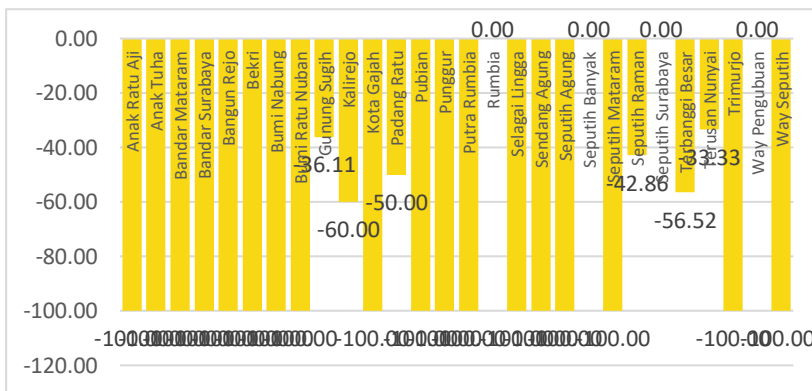
Grafik 73. Indeks Paritas Pejabat Eselon III



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender secara keseluruhan sebesar 48,1 persen dimana kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Sebagian besar kecamatan tertinggal secara mutlak (100 persen) yang artinya tidak ada sama sekali kinerja gender perempuan dalam hal pejabat eselon III. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 74. Disparitas Gender Pejabat Eselon III

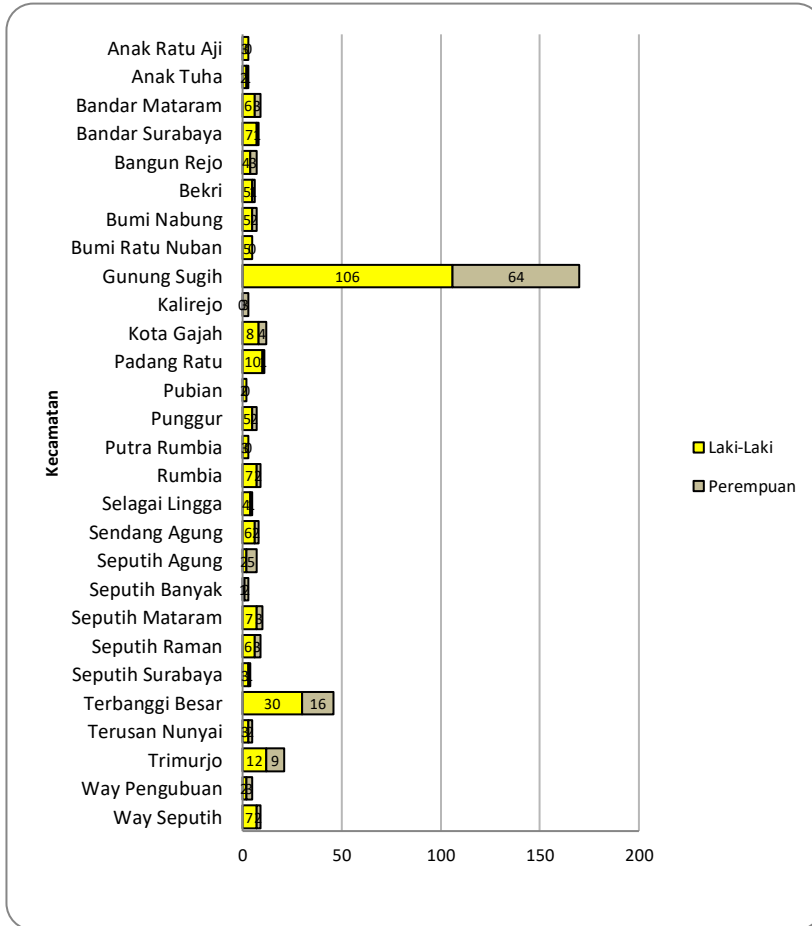


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Jmlah PNS Eselon IV di Kabupaten Lampung Tengah ialah 397 orang, dengan jumlah PNS Eselon IV laki-laki adalah 261 orang dan perempuan 136 orang. Terdapat tiga kecamatan dengan jumlah tertinggi dan terendah. Jumlah Eselon IV tertinggi pertama, kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah laki-laki 106 orang dan jumlah perempuan 64 orang. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 30 orang dan perempuan 16 orang. Ketiga, kecamatan Trimurjo dengan jumlah laki-laki 12 orang dan jumlah perempuan 9 orang. Sedangkan, tiga kecamatan dengan jumlah terendah yaitu pertama, kecamatan Kalirejo dengan jumlah perempuan 3 orang dan

tidak tercatat jumlah laki-laki. Kedua, kecamatan Pubian dengan jumlah laki-laki 2 orang dan tidak ada perempuan. Ketiga, kecamatan seputih banyak dengan jumlah laki-laki 1 orang dan jumlah perempuan 2 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

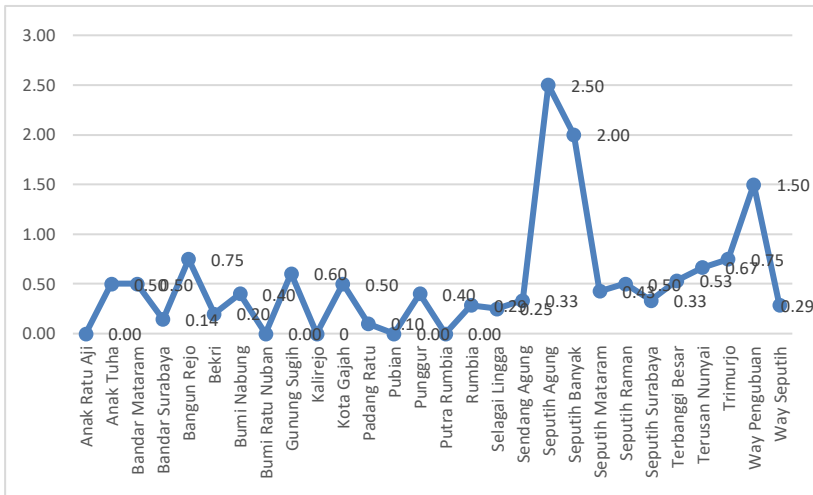
Grafik 75. Pejabat Eselon IV



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas PNS Eselon IV untuk masing-masing kecamatan sebesar 0,321. Indeks paritas tertinggi dimiliki oleh Kalirejo 100%, disusul oleh Seputih Agung (42,86) dan Seputih Banyak (33,33). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

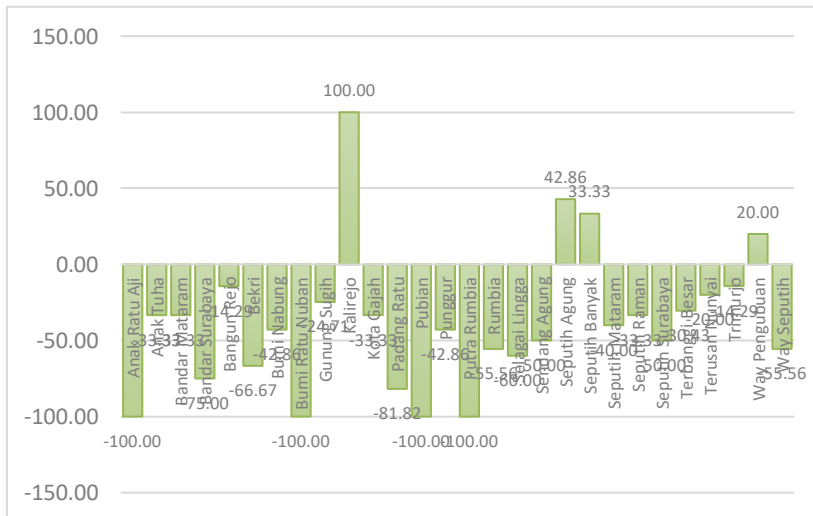
Grifik 76. Indeks Paritas Pejabat Eselon IV



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Perhitungan indeks diparitas pada PNS Eselon IV secara keseluruhan sebesar - 54,19. Ketertinggalan mencolok terjadi di Kecamatan Padang Ratu dengan persentase -81,82. Kedua, Bandar Mataram mencatat penurunan sebesar -75,00. Ketiga, Bumi Ratu Nuban dengan persentase penurunan -66,67. Selain itu, IDG antara perempuan dan laki-laki terpaut 100% di Kecamatan Anak Ratu Aji, Bumi Ratu Nuban, Pubian, dan Putra Rumbia. Artinya kinerja perempuan sebagai PNS Eselon IV di daerah tersebut tidak ada.

Grifik 77. Disparitas Gender Pejabat Eselon IV

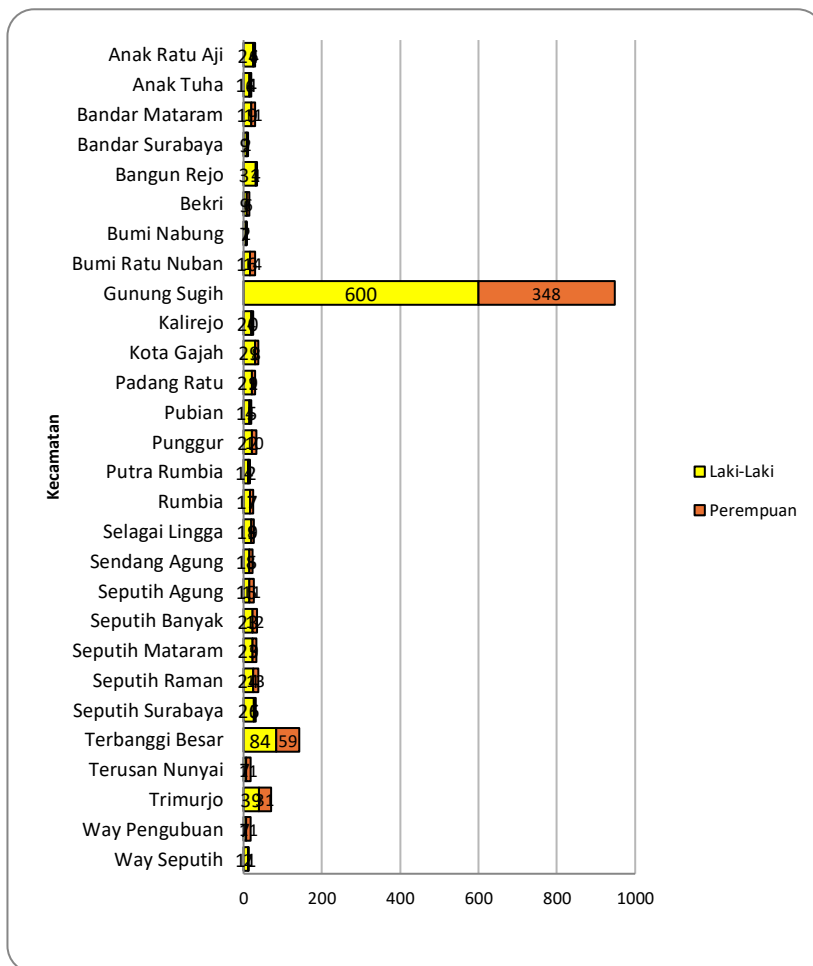


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Dalam struktur kelembagaan publik, selain jabatan struktur, ada jabatan fungsional. Misalnya fungsional guru, fungsional tenaga kesehatan, fungsional umum dan fungsional lainnya.

Grafik di bawah menunjukkan bahwa jumlah jabatan fungsional umum (JFU) di Kabupaten Lampung Tengah adalah 1786 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1158 orang, sedangkan jumlah perempuan 625 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah perempuan 348 dan laki-laki 600 orang. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah perempuan 59 orang dan laki-laki 84 orang. Ketiga, kecamatan Trimurjo dengan jumlah perempuan 31 orang dan laki-laki 39 orang.

Grafik 78. Jabatan Fungsional Umum di Kabupaten Lampung Tengah



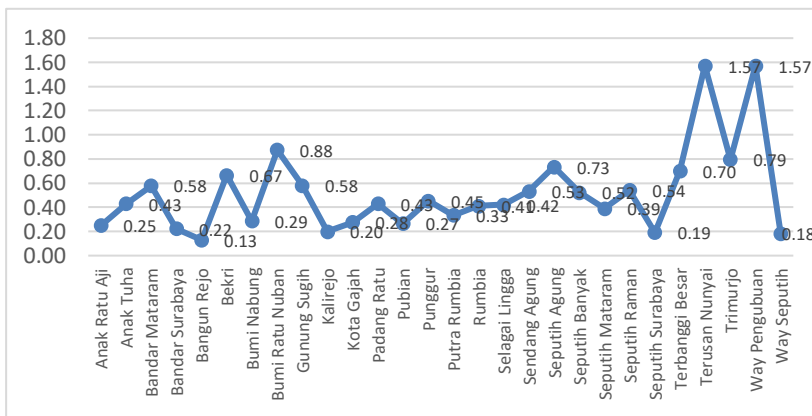
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah terendah, pertama kecamatan Bumi Nabung dengan jumlah perempuan 2 orang dan laki-laki 7 orang. Kedua, kecamatan

Way Seputih dengan jumlah perempuan 2 orang dan laki-laki 11 orang. Ketiga, kecamatan Bekri dengan jumlah perempuan 6 orang dan laki-laki 9 orang. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa Gunung Sugih menjadi kecamatan dengan partisipasi JFU yang sangat dominan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan.

Secara umum, indeks paritas JFU di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 3,42. Indeks paritas tertinggi dimiliki oleh Terusan Nunyai dan Way Pengubuan dengan masing-masing representasi sebesar 1,57. Tertinggi kedua, Bumi Ratu Nuban 0,88, dan terakhir dimiliki oleh Trimurjo 0,79. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

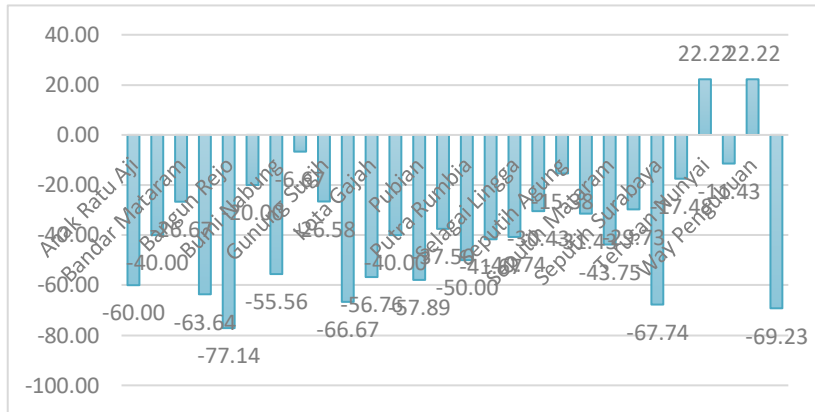
Grafik 79. Indeks Paritas Jabatan Fungsional Umum



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan disparitas gender, secara keseluruhan selisih kinerja perempuan dan laki-laki pada JFU sebesar -29,89, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul di kecamatan Way Pengubuan (22,22) dan kecamatan Terusan Nunyai (22,22). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

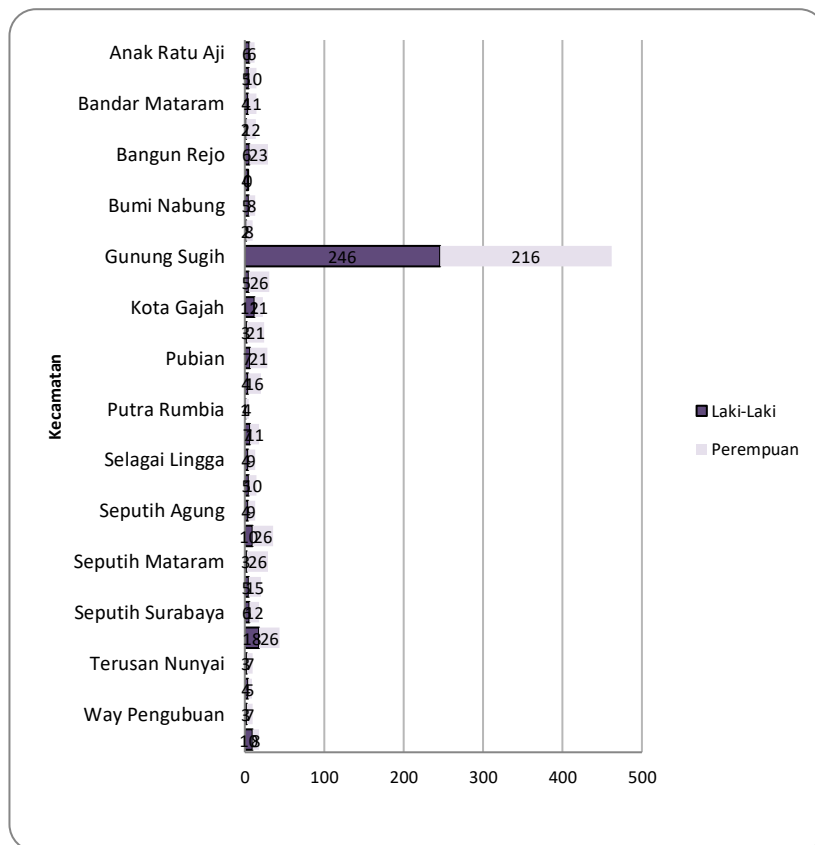
Grifik 80. Disparitas Gender Jabatan Fungsional Umum



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grifik berikut ini memberikan gambaran persebaran jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Lampung Tengah.

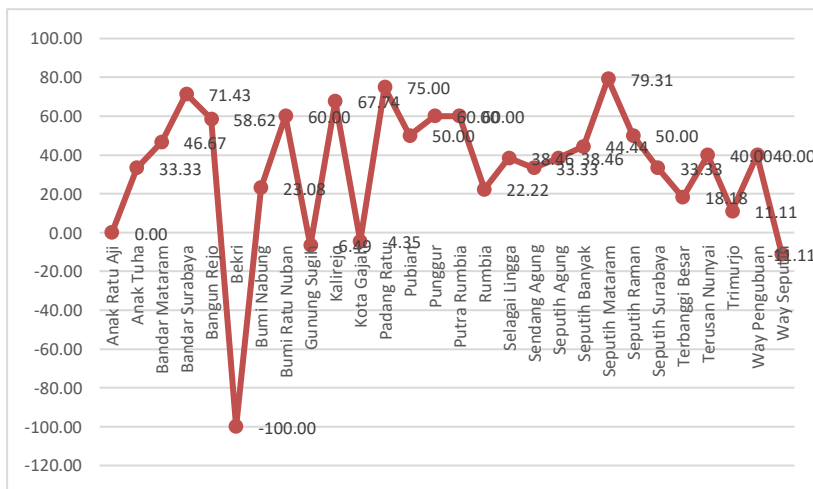
Grifik 81. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, jumlah jabatan fungsional tertentu (JFT) lainnya di Kabupaten Lampung Tengah adalah 958 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 394 orang dan perempuan 564 orang. Gunung Sugih menjadi kecamatan dengan jumlah tertinggi, yaitu laki-laki sebanyak 246 orang dan perempuan 216 orang. Kecamatan tersebut merupakan satu-satunya kecamatan dengan partisipasi laki-laki yang mendominasi secara signifikan dibandingkan dengan perempuan. Kalirejo, Bangun Rejo dan Padang Ratu merupakan kecamatan yang jumlahnya cenderung lebih banyak laki-laki daripada perempuan, yaitu di Kalirejo jumlah perempuan 6 orang dan laki-laki 5 orang, Bangun Rejo jumlah perempuan 23 orang dan laki-laki 6 orang. Sementara itu, terdapat juga kecamatan yang jumlahnya seimbang antara laki-laki dan perempuan, seperti kecamatan Anak Ratu Aji dengan jumlah perempuan 6 orang dan laki-laki 6 orang, dan kecamatan Way Pngubuan dengan jumlah perempuan 3 orang dan laki-laki 3 orang. Dengan demikian, grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan, perempuan cenderung lebih terwakili dibandingkan laki-laki, kecuali di kecamatan tertentu, seperti Gunung Sugih.

Grafik 82. Indeks Paritas Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Lampung Tengah

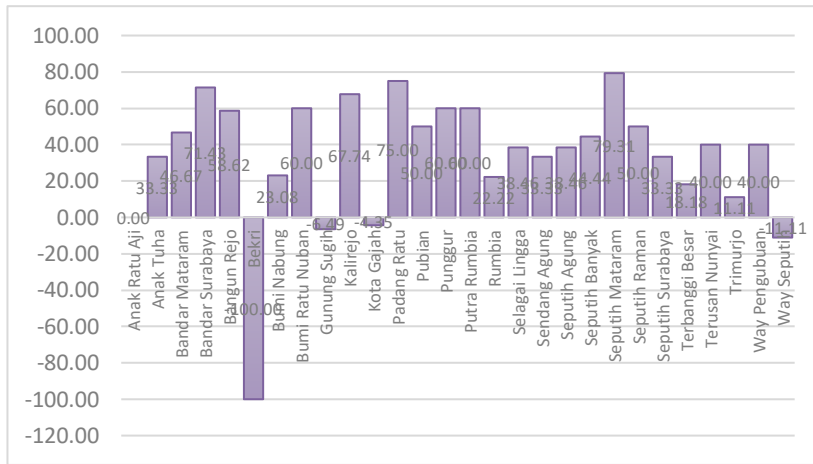


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara umum, indeks paritas JFT lainnya di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1,76. Indeks paritas tertinggi dimiliki oleh Padang Ratu (75,00). Tertinggi kedua, kecamatan Bandar Mataram (71,43) dan terakhir dimiliki oleh Bumi Ratu Nuban (60,00). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Perhitungan disparitas gender pada JFT lainnya secara keseluruhan sebesar 27,51. Ketertinggalan mencolok terjadi di Kecamatan Bekri (100), disusul oleh Gunung Sugih (6,49), dan ketiga Kota Gajah (4,35). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 83. Disparitas Gender Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Lampung Tengah

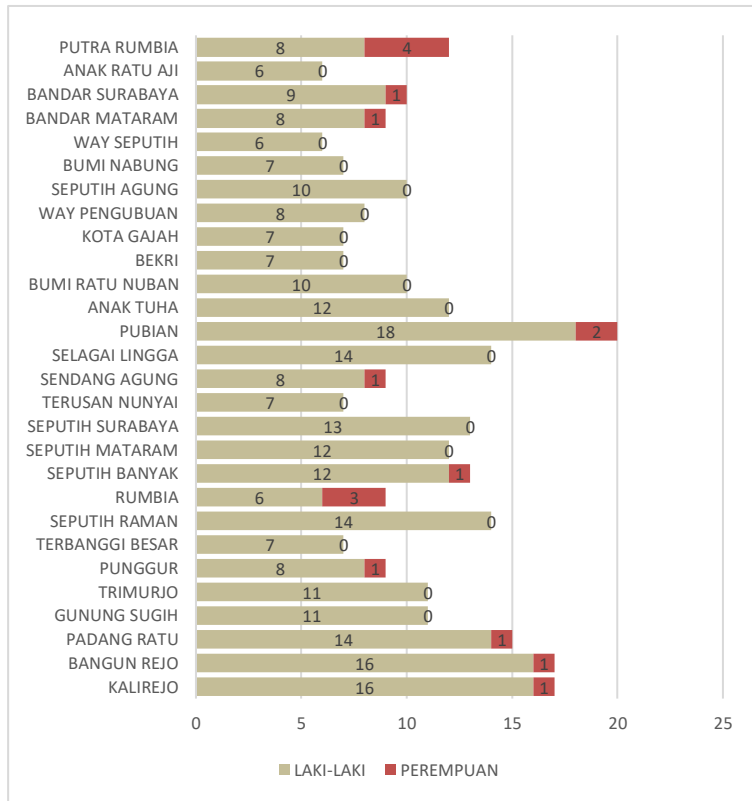


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

3) Perangkat Desa

Dalam catatan penelitian, terdapat 302 desa yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah kepala desa paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah laki-laki sebanyak 18 orang dan Perempuan sebanyak 2 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dan Bangun Rejo dengan jumlah laki-laki 16 orang dan perempuan berjumlah 1 orang di masing-masing kecamatan. Ketiga, Padang Ratu dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan 1 orang. Adapun jumlah kepala desa paling rendah adalah kecamatan Way Seputih dan Anak Ratu Aji dengan jumlah laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 0 orang di masing-masing kecamatan. Kedua, kecamatan Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Bekri, Kota Gajah, dan Bumi Nabung dengan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan 0 orang di masing-masing kecamatan. Ketiga, kecamatan Way Pengubuan dengan jumlah laki-laki 8 orang dan perempuan 0 orang.

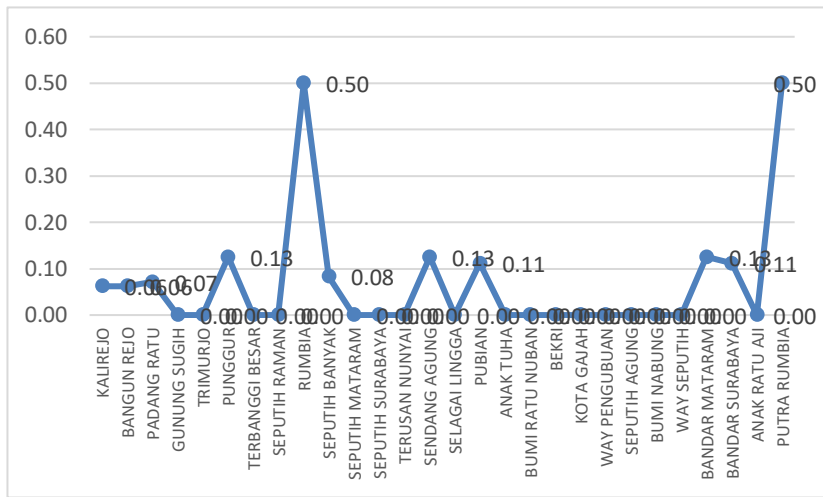
Grafik 84. Persebaran Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, komposisi gender perempuan dan laki-laki sebagai kepala desa menghasilkan indeks paritas sebesar 0,06. Artinya terjadi ketimpangan sangat jauh antara kinerja perempuan dan laki-laki, dimana perempuan jauh tertinggal. Keteringgalan kinerja perempuan yang cukup jauh ada di kecamatan Rumbia (0,50) dan Putra Rumbia (0,50) disusul kecamatan Punggur, Sendang Agung, Bandar Mataram yang masing-masing kecamatan memiliki angka (0,13). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

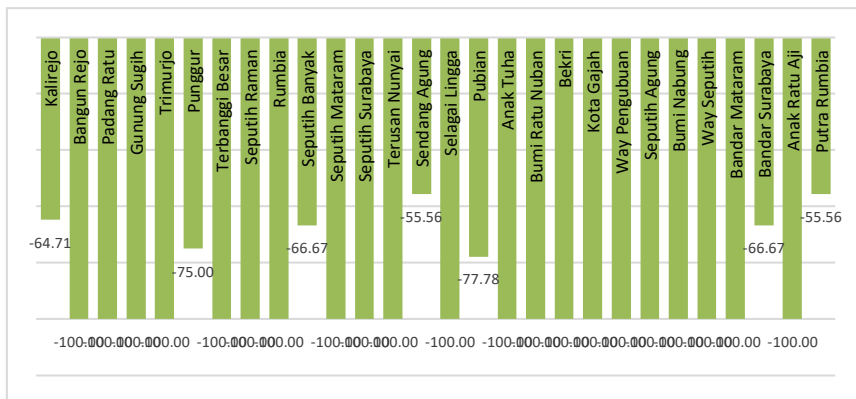
Grafik 85. Indeks Paritas Kepala Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Perhitungan disparitas gender pada kinerja kepala desa perempuan dan laki-laki secara keseluruhan sebesar -88,7, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Ketertinggalan kinerja perempuan yang cukup jauh ada di kecamatan Rumbia (-33,3) dan Putra Rumbia (-33,3) disusul kecamatan Punggur, Sendang Agung, Bandar Mataran yang masing-masing kecamatan memiliki angka (-77,8). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 86. Disparitas Gender Kepala Desa

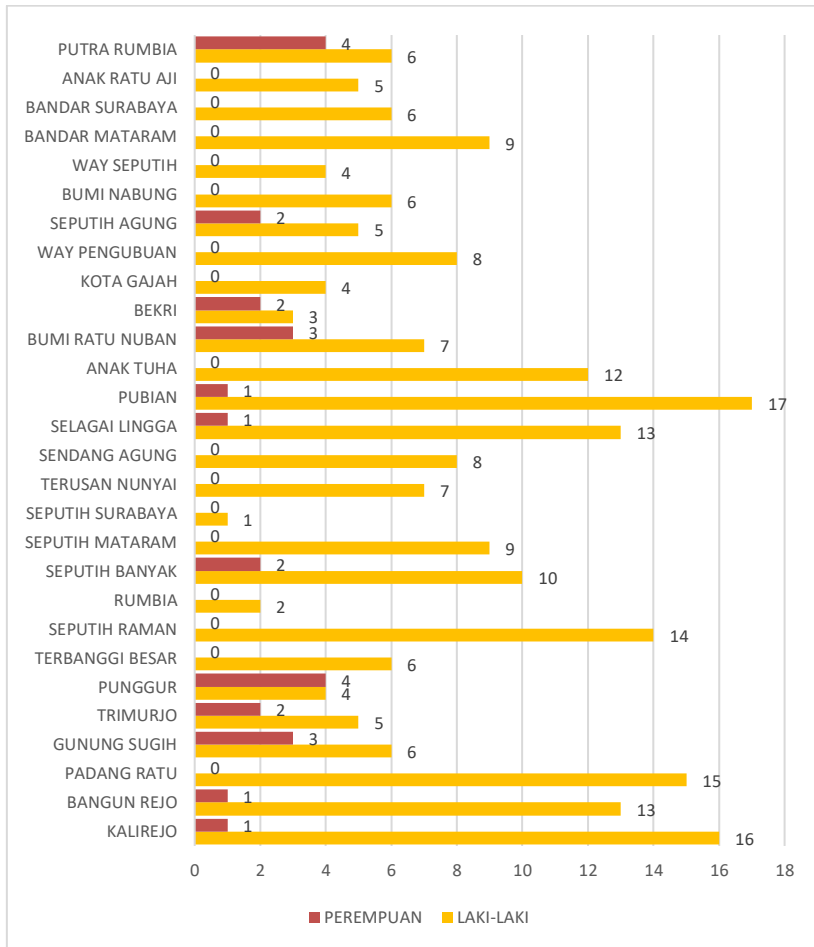


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di bawah merupakan data sekdes di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah sekdes paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah laki-laki sebanyak 17 orang dan Perempuan sebanyak 1 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki

16 orang dan perempuan berjumlah 1 orang. Ketiga, Padang Ratu dengan jumlah laki-laki 15 orang dan perempuan 0 orang. Adapun jumlah sekdes paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, kecamatan Rumbia dengan jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, Kota Gajah dan Way Seputih dengan jumlah laki-laki 4 orang dan perempuan 0 orang.

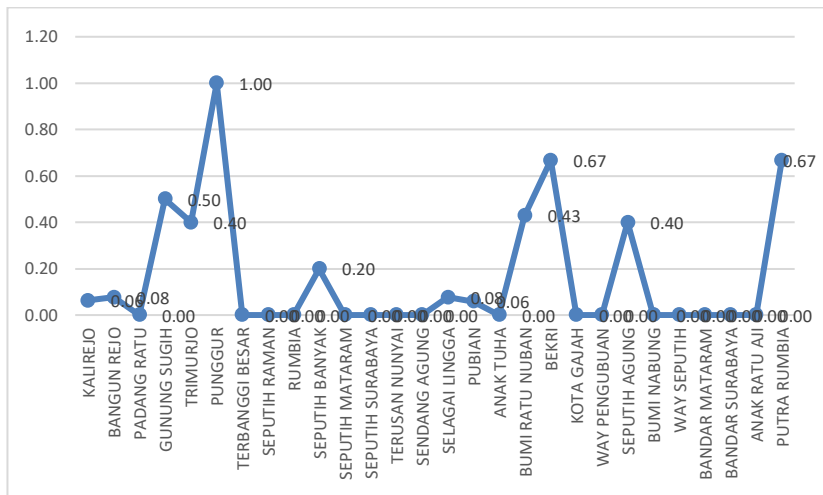
Grafik 87. Sekretaris Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, indeks paritas sekretaris desa sebesar 0,12 yang artinya kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Punggur memiliki indeks paritas paling tinggi (1) yang berarti kinerja perempuan dan laki-laki seimbang. Kemudian, kecamatan Bekri (0,67) dan kecamatan Putra Rumbia (0,67). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 88. Indeks Paritas Sekretaris Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan disparitas gender, secara keseluruhan berada pada angka -78,9, yang artinya kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut jika dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Ketertinggalan tertinggi adalah di Kecamatan Padang Ratu, Terbanggi Besar, Seputih Raman, Rumbia, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Terusan Nunyai, Sendang Agung, Anak Tuha, Kota Gajah, Way Pengubuan, Bumi Nabung, Way Seputih, Bandar Surabaya, Anak Ratu Aji sebesar -100, dikarenakan di kecamatan tersebut tidak ada sekdes berjenis kelamin perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

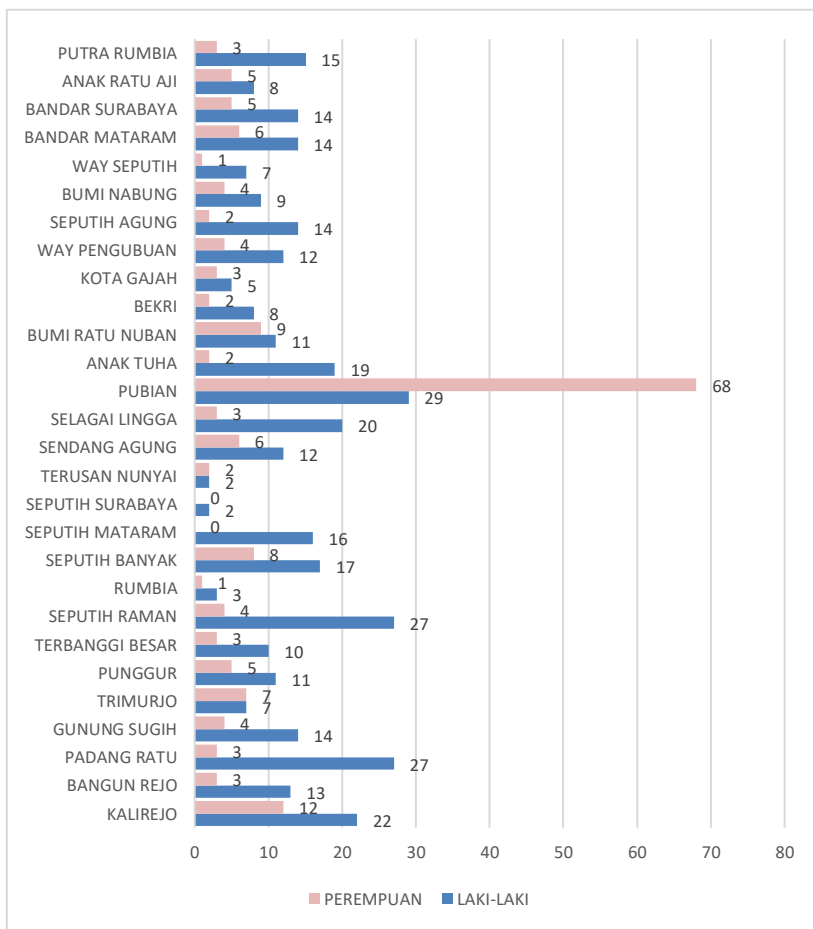
Grafik 89. Disparitas Gender Sekretaris Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini merupakan data kepala urusan di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah kaur paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah laki-laki sebanyak 29 orang dan Perempuan sebanyak 68 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 22 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Ketiga, Seputih Raman dengan jumlah laki-laki 27 orang dan perempuan 4 orang. Adapun jumlah kaur paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 2 orang. Ketiga, Rumbia dengan jumlah laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang.

Grafik 90. Kepala Urusan (Kaur) Desa

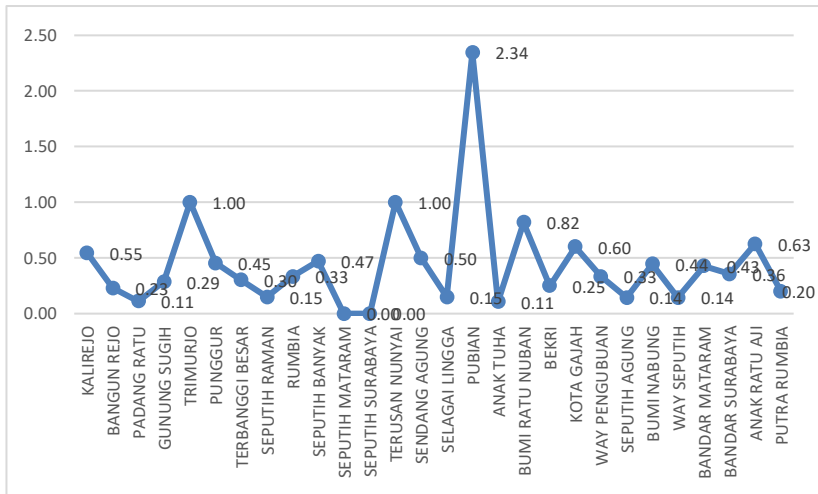


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Data tersebut menghasilkan indeks paritas sebesar 0,48, artinya ada kesenjangan kinerja antara kaur perempuan dan laki-laki, dengan kinerja kaur perempuan tertinggal di belakang laki-laki. Kinerja tertinggal tinggi di kecamatan Pubian (2,34). Kinerja seimbang antara kaur perempuan dan laki-laki terdapat di kecamatan Trimurjo

dan Terusan Nunyai dengan indeks paritas sebesar 1. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

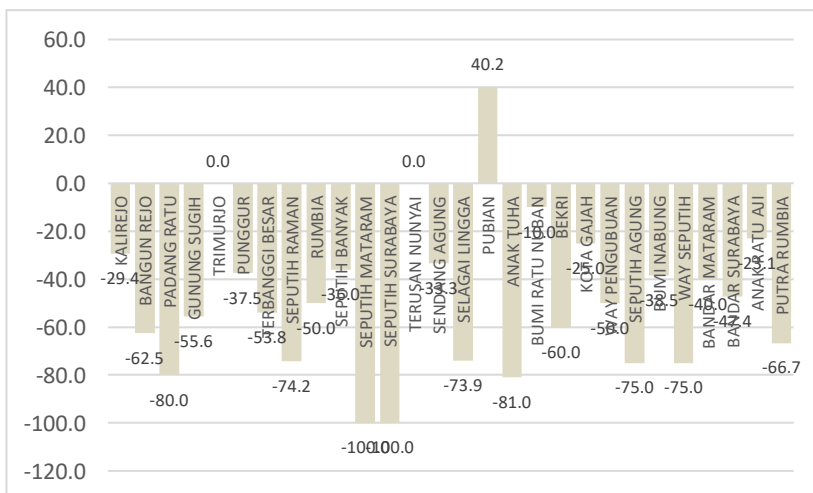
Grafik 91. Indeks Paritas Kepala Urusan (Kaur) Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender, secara keseluruhan selisih kinerja kaur perempuan dan laki-laki sebesar -35,5, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Pubian (40,2). Sedangkan, ketertinggalan kinerja kaur perempuan yang cukup rendah terjadi di Kecamatan Bumi Ratu Nuban (10,0), dan Anak Ratu Aji (23,1). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

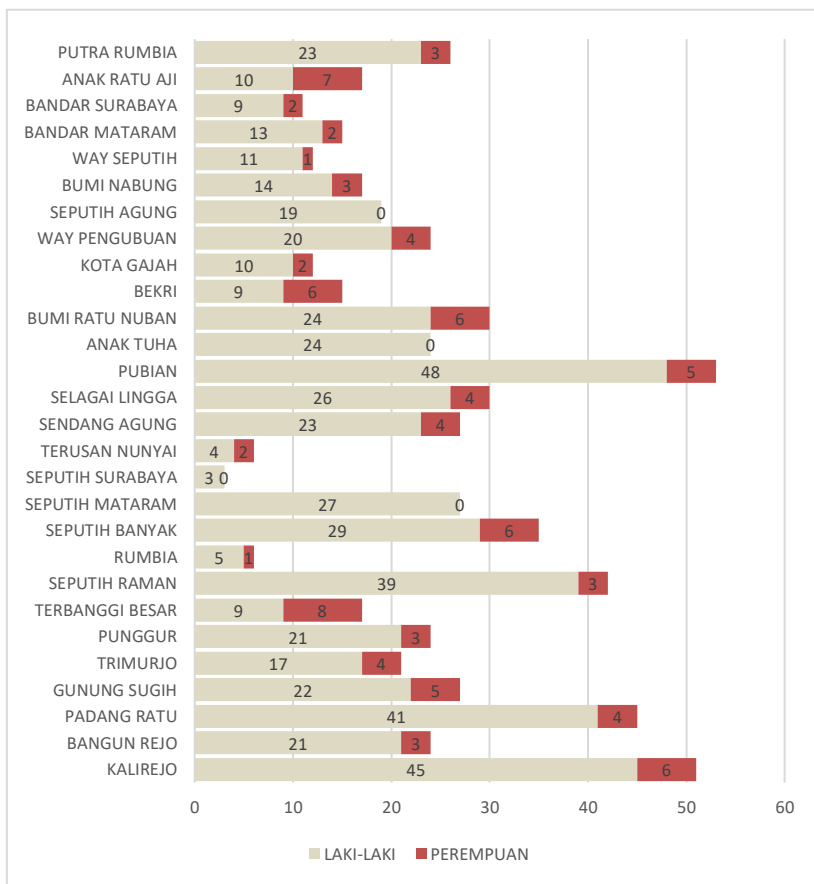
Grafik 92. Disparitas Gender Kepala Urusan (Kaur) Desa



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas merupakan data kepala seksi di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah kepala seksi paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah laki-laki sebanyak 48 orang dan Perempuan sebanyak 5 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 45 orang dan perempuan berjumlah 6 orang. Ketiga, Padang Ratu dengan jumlah laki-laki 41 orang dan perempuan 4 orang. Adapun jumlah kepala seksi paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Rumbia dengan jumlah laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 1 orang. Ketiga, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki 4 orang dan perempuan 2 orang.

Grafik 93. Kepala Seksi

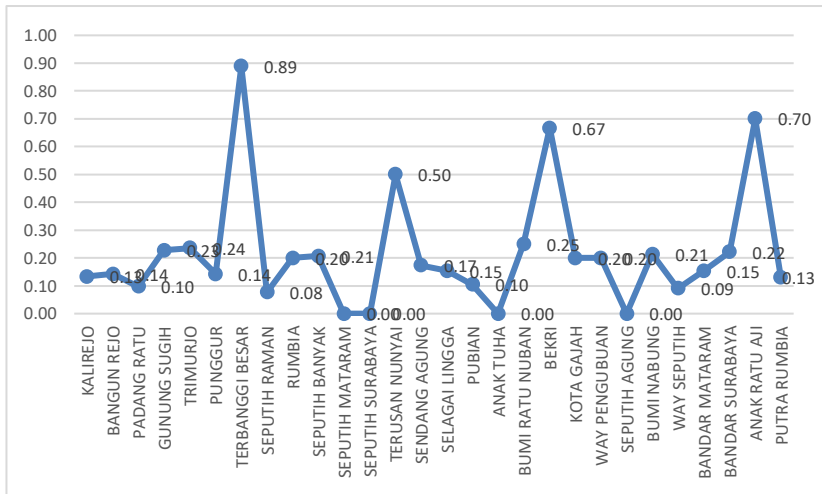


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja kepala seksi perempuan dan laki-laki sebesar (0,17), yang artinya ada kesenjangan antara kinerja perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Terbanggi Besar memiliki indeks paritas paling tinggi

(0,89). Kemudian, kecamatan Anak Ratu Aji (0,70) dan kecamatan Bekri (0,67). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

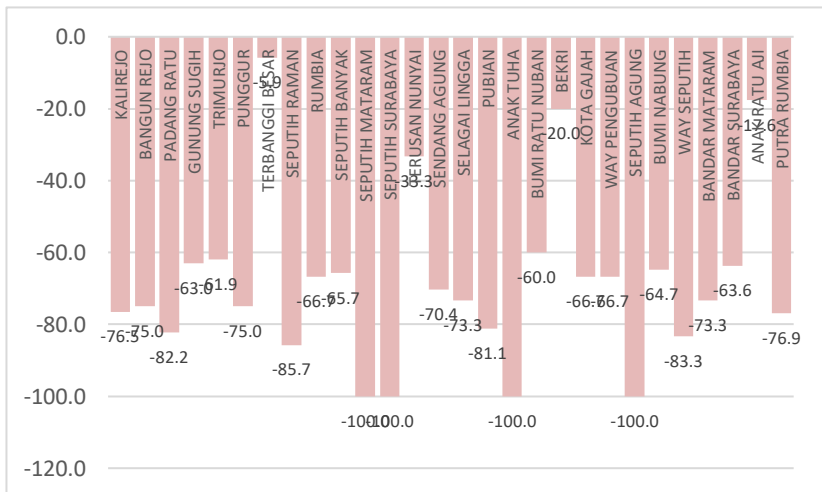
Grafik 94. Indeks Paritas Kepala Seksi



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan disparitas gender, secara keseluruhan berada pada angka $-71,5$, yang artinya kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut jika dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Ketertinggalan kinerja perempuan yang cukup rendah terjadi di Kecamatan Terbanggi Besar ($-5,9$). Kecamatan Anak Ratu Aji ($-17,6$) dan Kecamatan Bekri ($-20,0$). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

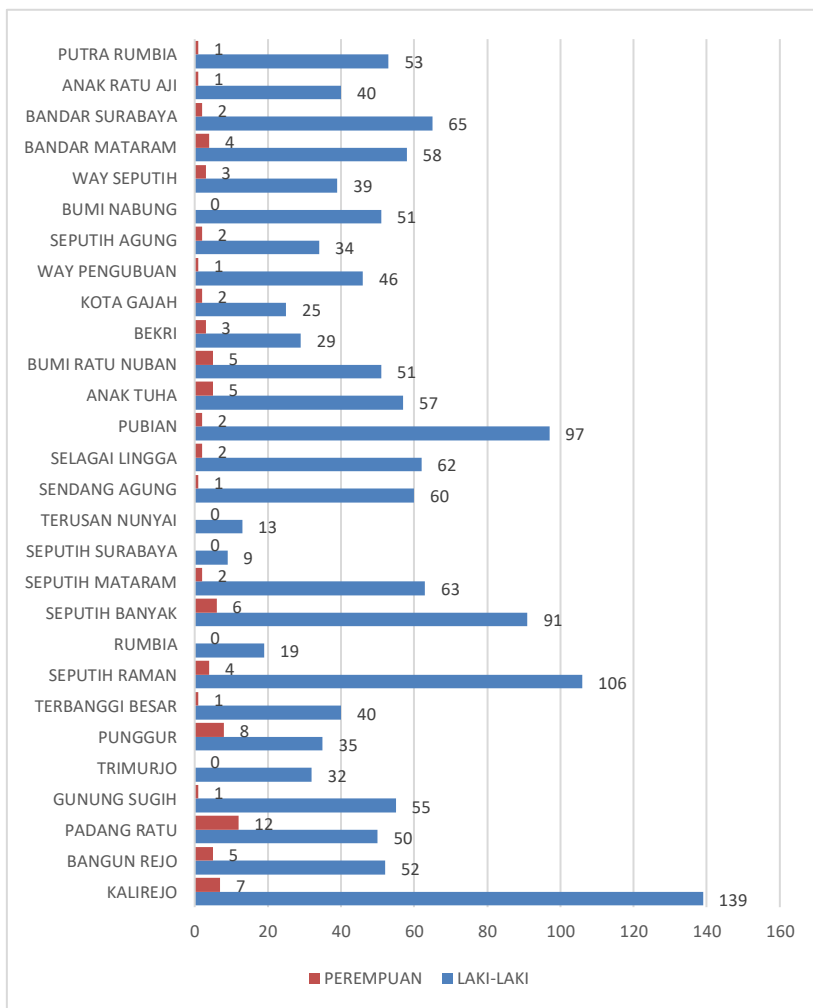
Grafik 95. Disparitas Gender Kepala Seksi



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di bawah ini merupakan data kepala dusun di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah kepala dusun paling tinggi adalah Kalirejo dengan jumlah laki-laki sebanyak 139 orang dan Perempuan sebanyak 7 orang. Peringkat kedua, yaitu Seputih Raman dengan jumlah laki-laki 106 orang dan perempuan berjumlah 4 orang. Ketiga, Pubian dengan jumlah laki-laki 97 orang dan perempuan 2 orang. Adapun jumlah kepala dusun paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, Rumbia dengan jumlah laki-laki 19 orang dan perempuan 0 orang.

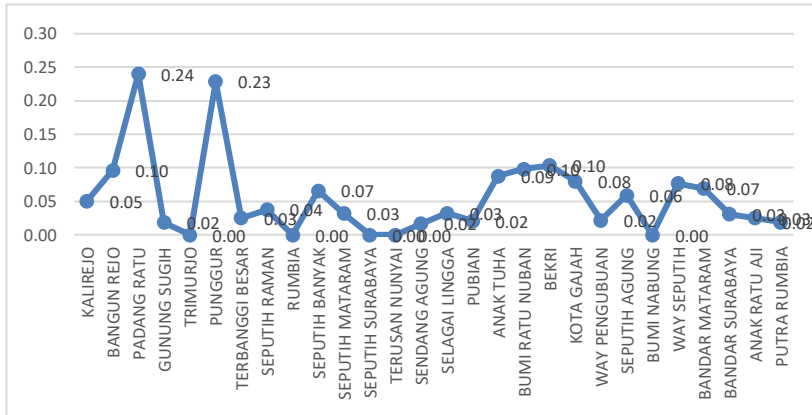
Grafik 96. Kepala Dusun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja kepala dusun perempuan dan laki-laki sebesar (0,05), yang artinya ada kesenjangan antara kinerja perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Padang Ratu memiliki indeks paritas paling tinggi (0,24). Kemudian, kecamatan Punggur (0,23) dan kecamatan Bangun Rejo, Bumi Ratu Nuban, dan Bekri yang masing-masing memiliki angka (0,10). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

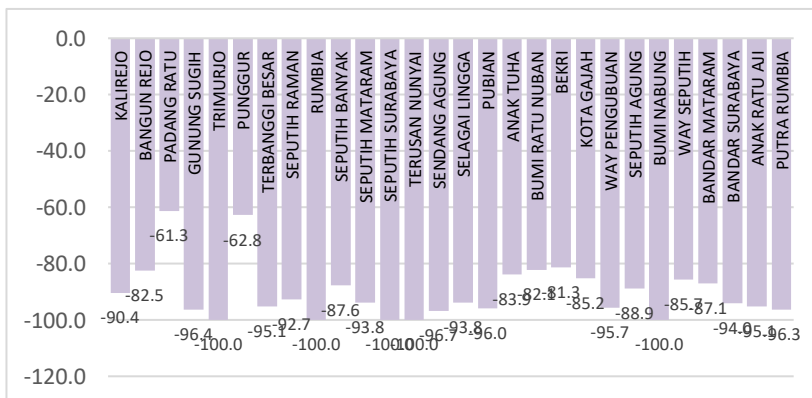
Grafik 97. Indeks Paritas Gender Kepala Dusun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan disparitas gender, secara keseluruhan berada pada angka $-89,7$, yang artinya kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut jika dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Ketertinggalan kinerja perempuan yang cukup rendah terjadi di Kecamatan Padang Ratu ($-61,3$). Kecamatan Punggur ($-62,8$) dan Kecamatan Bekri ($-81,3$). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

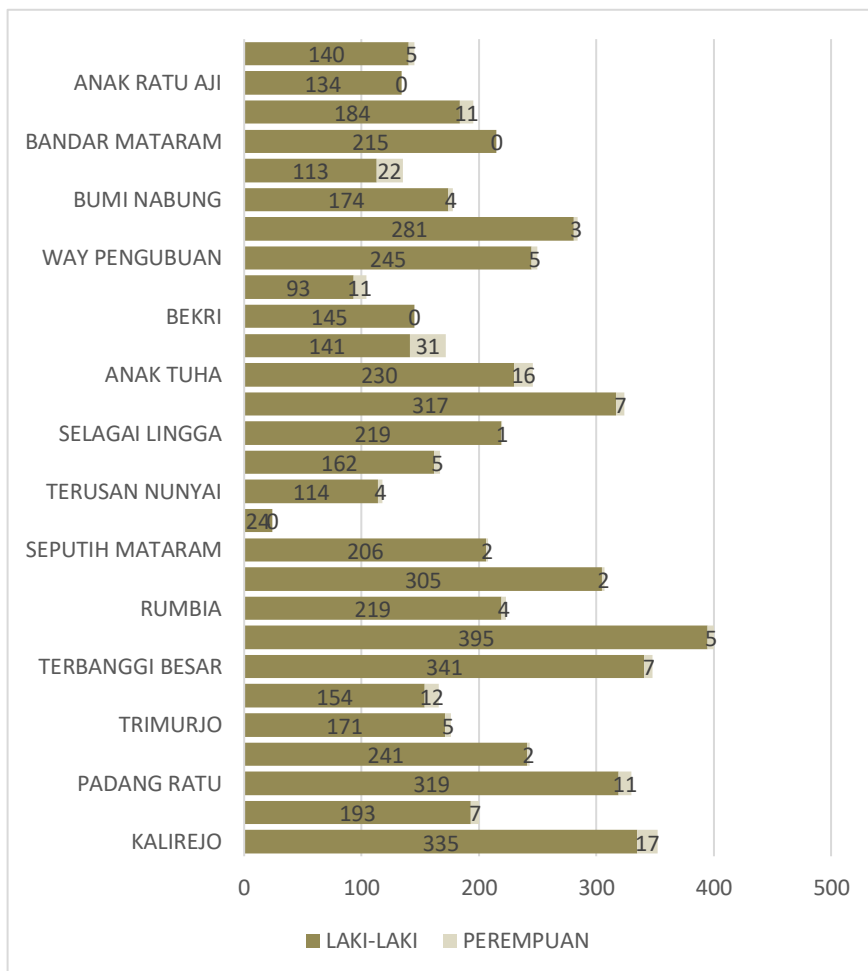
Grafik 98. Disparitas Gender Kepala Dusun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah 6009 wilayah. Kecamatan dengan jumlah ketua RT paling tinggi adalah Seputih Raman dengan jumlah RT laki-laki sebanyak 395 orang dan jumlah RT Perempuan sebanyak 5 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 335 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Ketiga, Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki 341 orang dan perempuan 7 orang. Adapun jumlah RT paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, kecamatan Kota Gajah dengan jumlah ketua RT laki-laki sebanyak 93 orang dan perempuan 11 orang. Ketiga, kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah ketua RT laki-laki 114 orang dan perempuan 4 orang.

Grafik 99. Ketua Rukun Tetangga

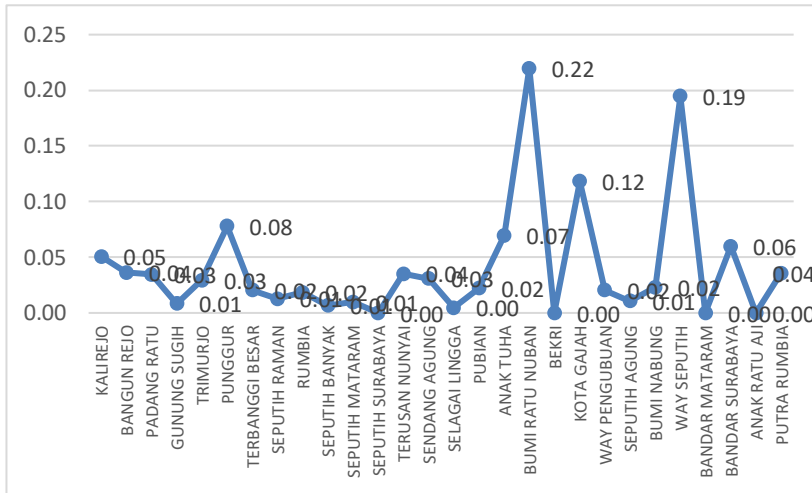


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan jumlah ketua RT berjenis kelamin laki-laki adalah 5.810 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 199 orang. Komposisi tersebut

menghasilkan indeks paritas sebesar 0,03 artinya kinerja perempuan dalam hal ketua RT lebih rendah dari pada kinerja laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

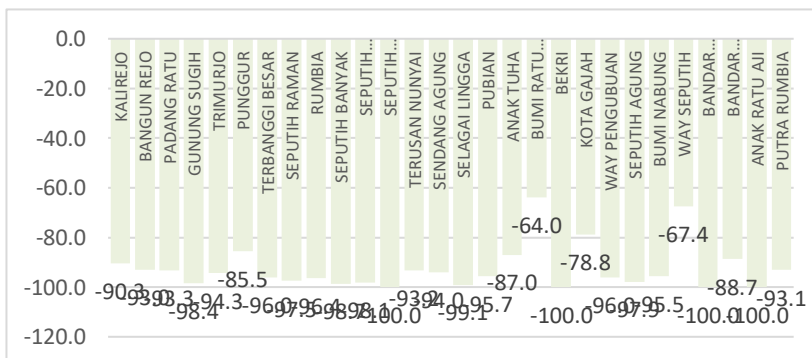
Grafik 100. Indeks Paritas Ketua Rukun Tetangga



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Komposisi ketua Rukun Tetangga laki-laki dan perempuan menghasilkan paritas gender sebesar -93,4 persen, artinya kinerja perempuan dalam hal ketua RT tertinggal sebesar angka tersebut dibandingkan kinerja laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

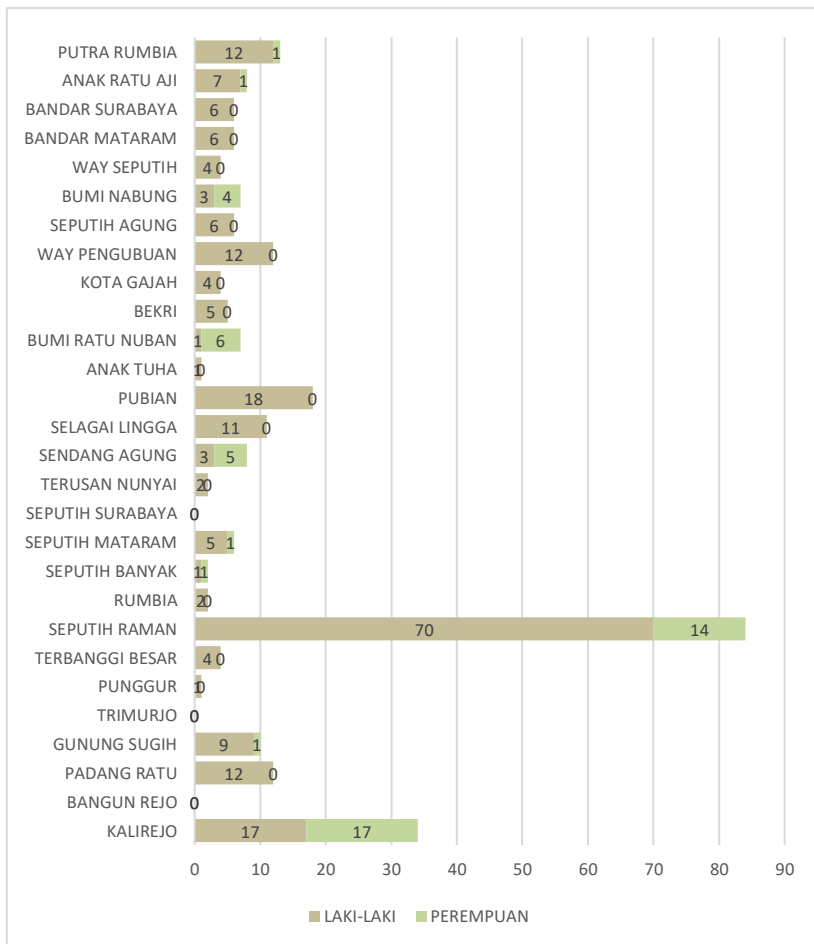
Grafik 101. Disparitas Gender Ketua Rukun Tetangga



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini merupakan data pendamping desa (TA) di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah pendamping desa (TA) paling tinggi adalah Seputih Raman dengan jumlah laki-laki sebanyak 70 orang dan Perempuan sebanyak 14 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 17 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Ketiga, Pubian dengan jumlah laki-laki 18 orang dan perempuan 0 orang. Adapun jumlah pendamping desa (TA) paling rendah adalah kecamatan Trimurjo, Seputih Surabaya, dan Bangun Rejo dengan jumlah laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Punggur dan Anak Tuha dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 0 orang di masing-masing kecamatan. Ketiga, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki 2 orang dan perempuan 0 orang.

Grafik 102. Pendamping Desa (TA)

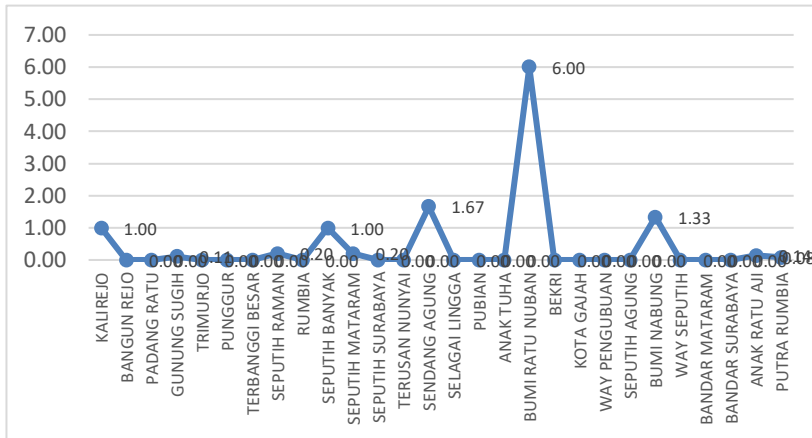


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja pendamping desa perempuan dan laki-laki sebesar (0,23), yang artinya ada kesenjangan antara kinerja

perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Bumi Ratu Nuban memiliki indeks paritas paling tinggi (6,00). Kemudian, kecamatan Seputih Agung (1,67) dan kecamatan Bumi Nabung (1,33). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

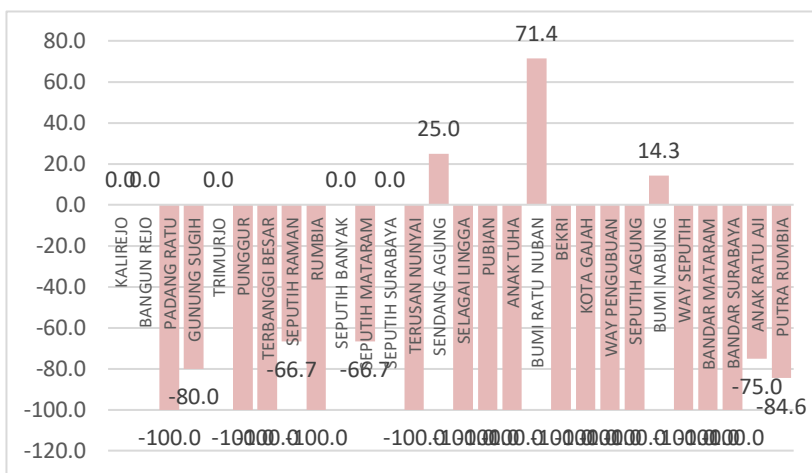
Grafik 103. Indeks Paritas Pendamping Desa (TA)



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan indeks disparitas, secara keseluruhan selisih kinerja pendamping desa perempuan dan laki-laki sebesar -62,6, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban (71,4). Kedua, Sendang Agung (25,0) dan Bumi Nabung (14,3). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

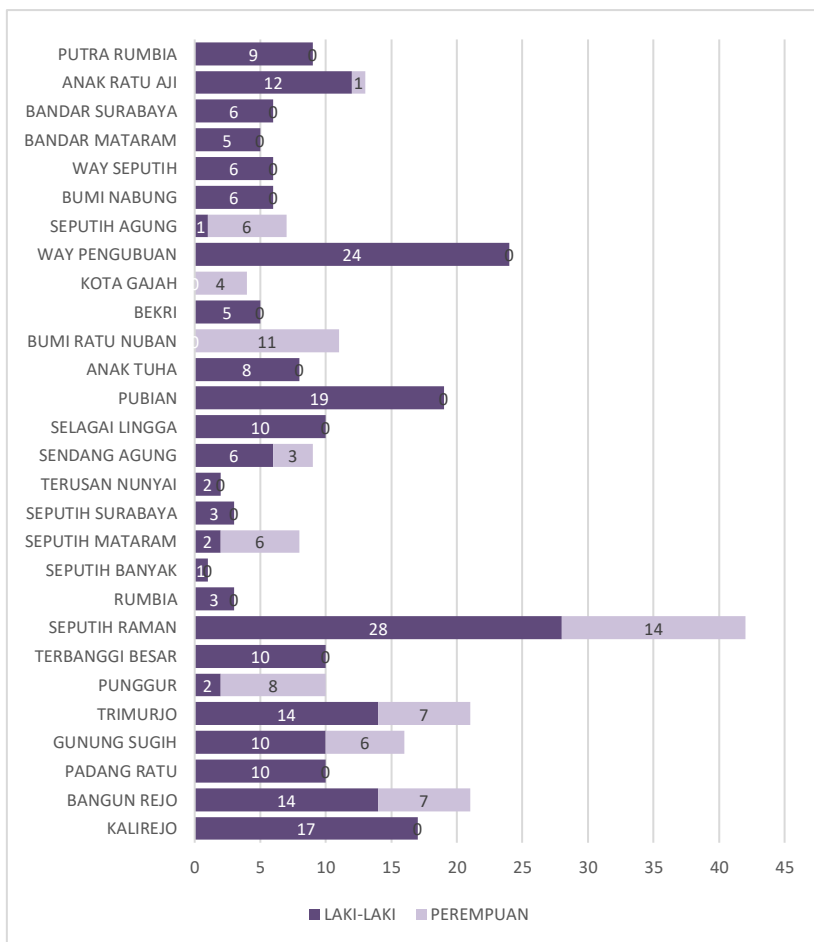
Grafik 104. Disparitas Gender Pendamping Desa (TA)



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini merupakan data pendamping desa PD/TI di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah pendamping desa PD/TI paling tinggi adalah Seputih Raman dengan jumlah laki-laki sebanyak 28 orang dan Perempuan sebanyak 14 orang. Peringkat kedua, yaitu Way Pengubuan dengan jumlah laki-laki 24 orang dan perempuan berjumlah 0 orang. Ketiga, Bangun Rejo dan Trimurjo dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan 7 orang. Adapun jumlah pendamping desa PD/TI paling rendah adalah kecamatan Seputih Banyak dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki 3 orang dan perempuan 0 orang.

Grafik 105. Pendamping Desa PD/TI

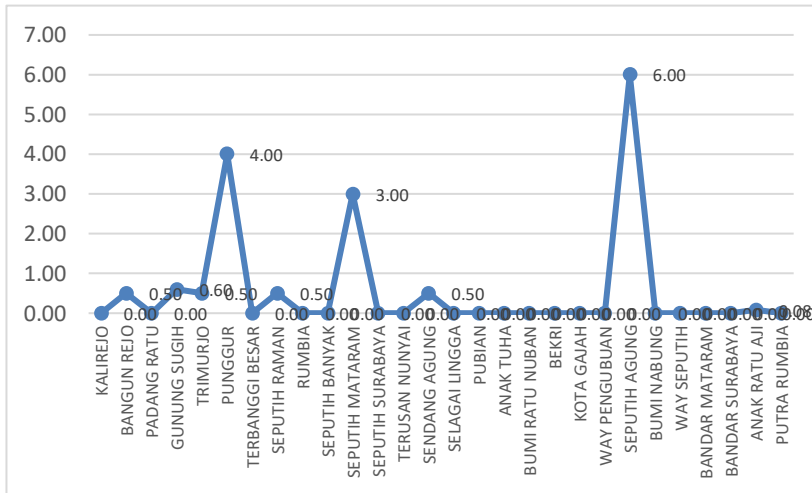


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja pendamping desa PD/TI perempuan dan laki-laki sebesar (0,31), yang artinya ada kesenjangan antara kinerja

perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Seputih Agung memiliki indeks paritas paling tinggi (6,00). Kemudian, kecamatan Punggur (4,00) dan kecamatan Seputih Mataram (3,00). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

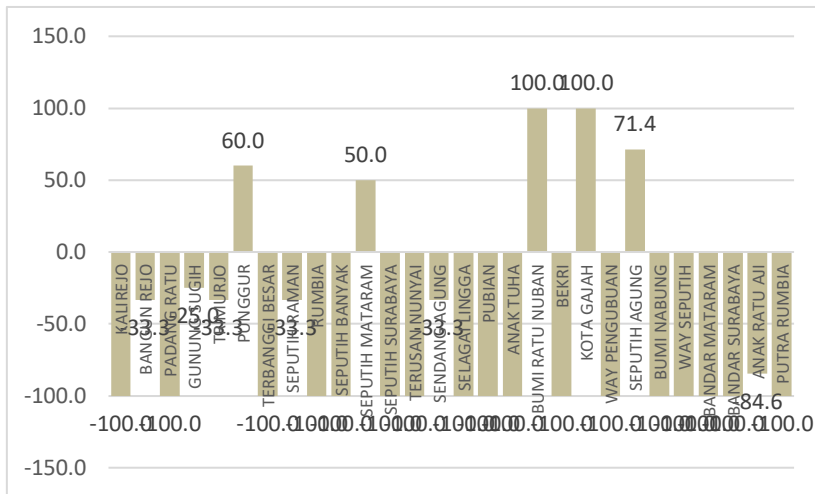
Grafik 106. Indeks Paritas Pendamping Desa PD/TI



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan disparitas gender, secara keseluruhan selisih kinerja kaur perempuan dan laki-laki sebesar -52,3, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban (100) dan Kota Gajah (100). Kedua, Seputih Agung (71,4) dan Punggur (60,0). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

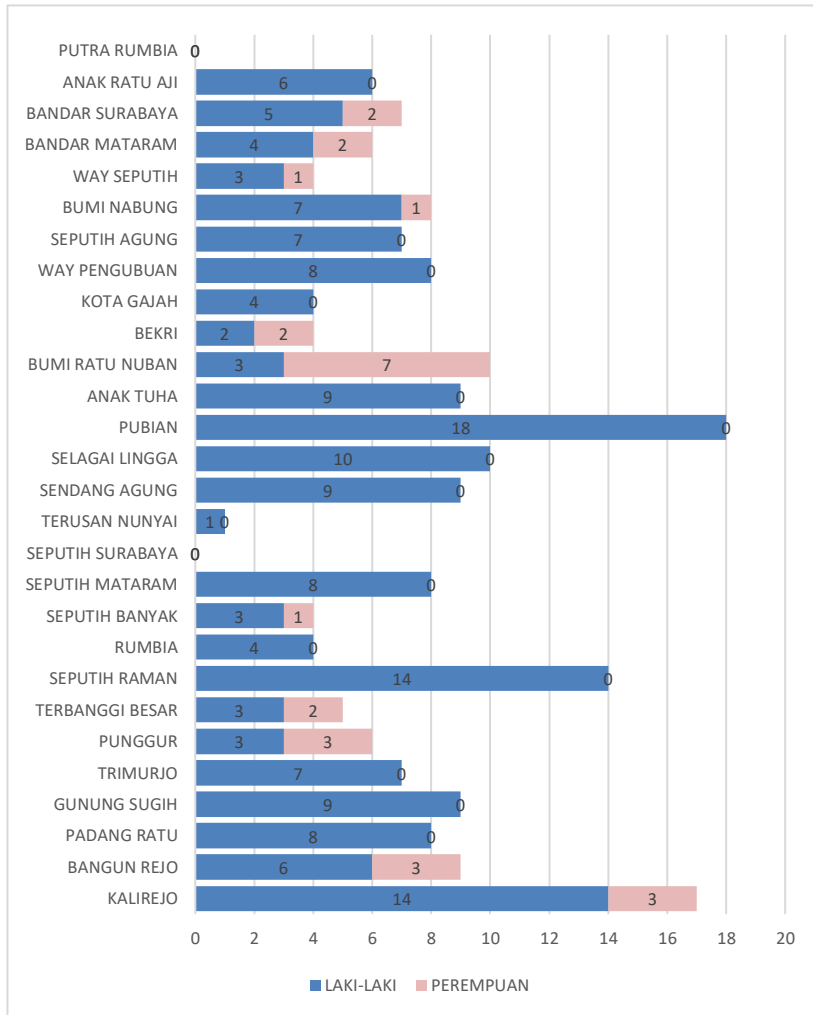
Grafik 107. Disparitas Gender Pendamping Desa PD/TI



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pendamping lokal desa 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 202 orang. Kecamatan dengan jumlah pendamping lokal desa paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah laki-laki sebanyak 18 orang dan Perempuan sebanyak 0 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Ketiga, Seputih Raman dengan jumlah laki-laki 14 orang dan perempuan 0 orang. Adapun jumlah pendamping lokal desa paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, Bekri dengan jumlah laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang.

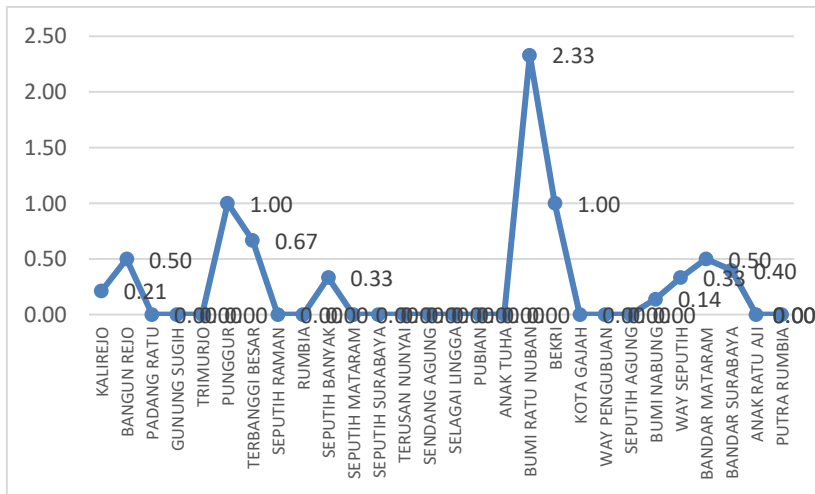
Grafik 108. Pendamping Desa Lokal



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Rahmawati & Susanto (2023) menyatakan bahwa pendamping laki-laki lebih mendominasi jumlah tenaga pendamping di berbagai wilayah, sedangkan terlibat perempuan masih terbatas. Keterlibatan perempuan seringkali menghadapi hambatan budaya dan sosial yang membatasi peran mereka, meskipun kontribusi mereka signifikan dalam aspek pemberdayaan sosial masyarakat desa.

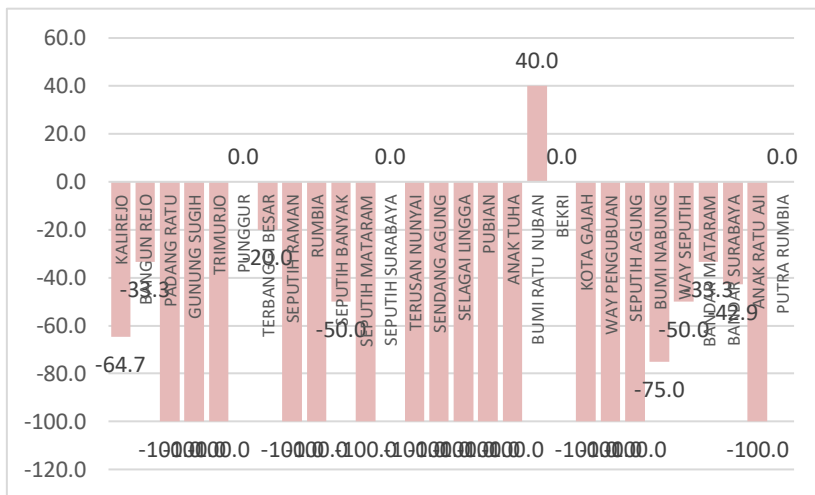
Grafik 109. Indeks Paritas Pendamping Desa Lokal



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja pendamping desa lokal perempuan dan laki-laki sebesar (0,15), yang artinya ada kesenjangan antara kinerja perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki. Pada grafik di bawah ini, terlihat kecamatan Bumi Ratu Nuban memiliki indeks paritas paling tinggi (2,33). Kemudian, kecamatan Punggur (1,00) dan kecamatan Bangun Rejo (0,50), serta Bandar Mataram (0,50). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 110. Disparitas Gender Pendamping Desa Lokal



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

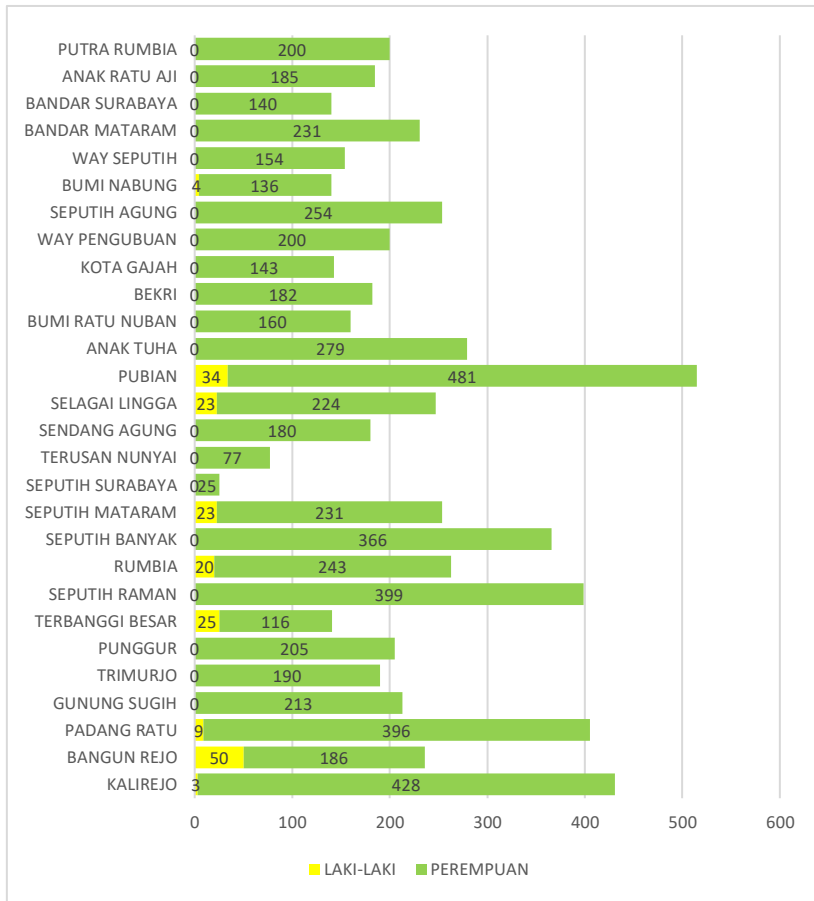
Berdasarkan disparitas gender (grafik di atas), secara keseluruhan selisih kinerja kaur perempuan dan laki-laki sebesar -73,3 artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban (40,0). Sedangkan, ketertinggalan kinerja kaur perempuan yang cukup rendah terjadi di Kecamatan Terbanggi Besar (-20,0), dan Bandar Mataram (33,3).

4) Lembaga Kemasyarakatan

PKK memiliki kepanjangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal itu termuat dalam Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presedian Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan definisi PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Jumlah kader PKK di Kabupaten Lampung Tengah adalah 6.415 orang, dengan komposisi kader laki-laki sebanyak 191 orang dan kader perempuan sebanyak 6.224 orang. Kecamatan dengan jumlah anggota PKK paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah anggota PKK laki-laki sebanyak 34 orang dan Perempuan sebanyak 481 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 3 orang dan perempuan berjumlah 428 orang. Ketiga, Padang Ratu dengan jumlah laki-laki 9 orang dan perempuan 396 orang. Adapun jumlah anggota PKK paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 25 orang. Kedua, kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah anggota PKK laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 77 orang. Ketiga, kecamatan Bandar Surabaya dengan jumlah anggota PKK laki-laki 0 orang dan perempuan 140 orang.

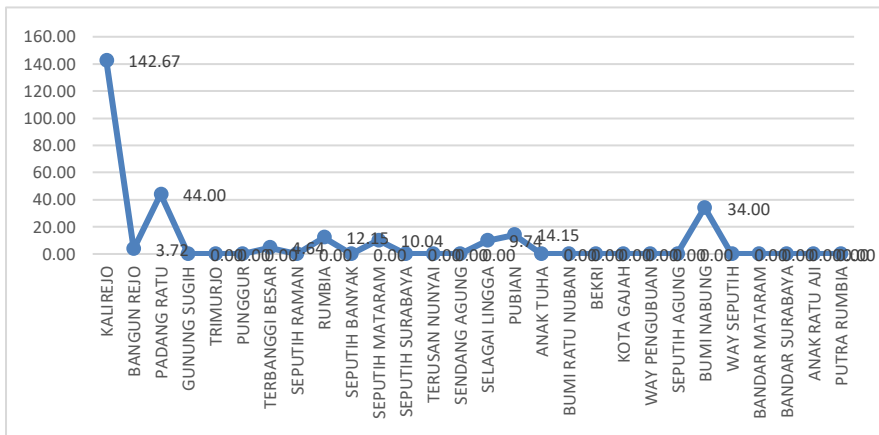
Grafik 111. Kader PKK



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan indeks paritas kader PKK sebesar 32,59 artinya kinerja perempuan dalam hal ketua RT lebih tinggi dari pada kinerja laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

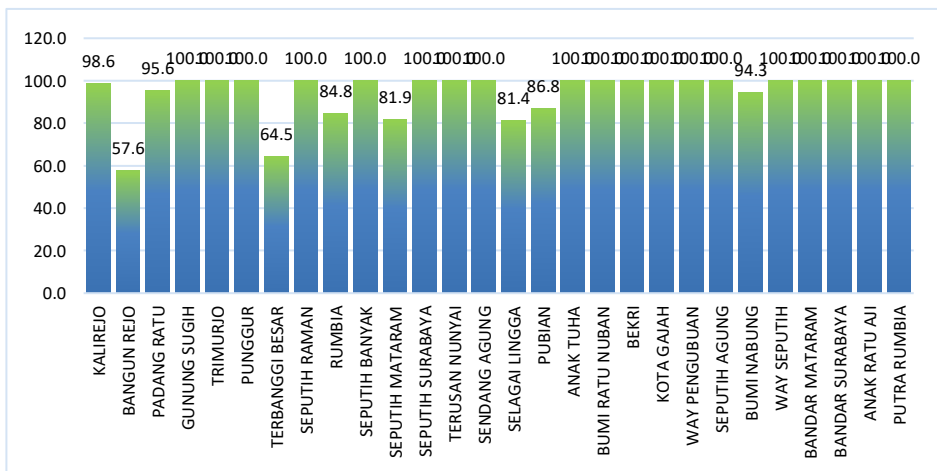
Grafik 112. Indeks Paritas Kader PKK



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender yaitu selisih kinerja kader PKK laki-laki dan perempuan sebesar 94 persen, artinya kinerja perempuan lebih tinggi. Kinerja perempuan lebih unggul diseluruh wilayah.

Grafik 113. Disparitas Gender Kader PKK

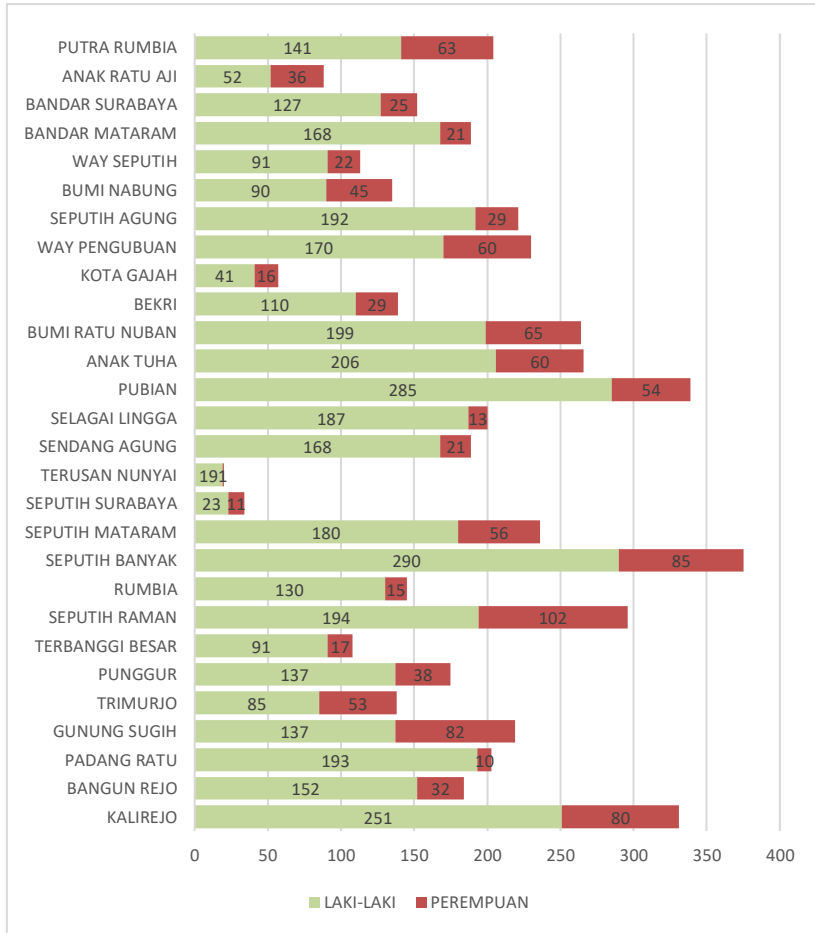


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di bawah ini merupakan data anggota Karang Taruna di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah anggota Karang Taruna paling tinggi adalah Seputih Banyak dengan jumlah anggota Karang Taruna laki-laki sebanyak 290 orang dan Perempuan sebanyak 85 orang. Peringkat kedua, yaitu Pubian dengan jumlah laki-laki 285 orang dan perempuan berjumlah 54 orang. Ketiga, Kalirejo dengan jumlah laki-laki 251 orang dan perempuan 80 orang. Adapun jumlah anggota Karang Taruna paling rendah

adalah kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan 1 orang. Kedua, kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 23 orang dan perempuan 11 orang. Ketiga, kecamatan Kota Gajah dengan jumlah anggota Karang Taruna laki-laki 41 orang dan perempuan 16 orang.

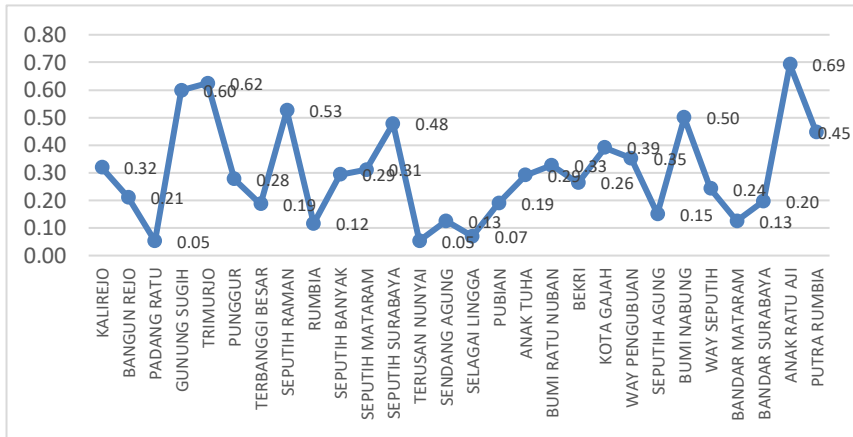
Grafik 114. Anggota Karang Taruna



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

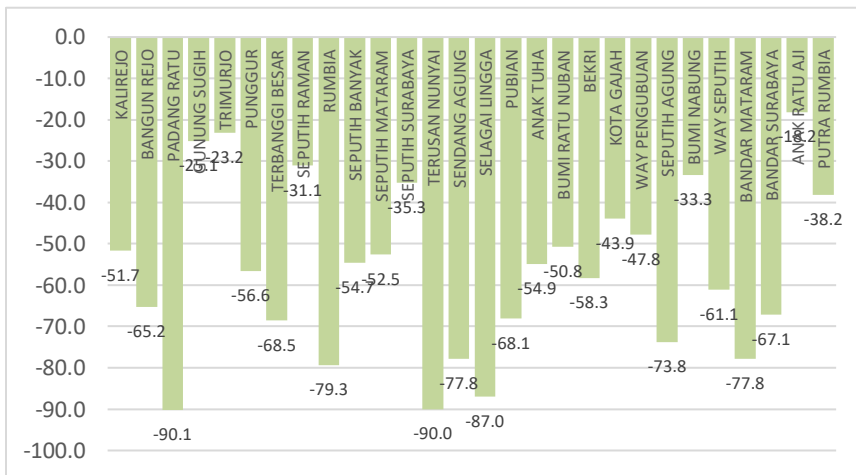
Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan kinerja anggota karang taruna perempuan tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dengan angka 0,28. Kecamatan dengan kinerja perempuan mendekati kinerja laki-laki adalah Kecamatan Anak Ratu Aji (0,69). Kecamatan Trimurjo (0,62) dan Kecamatan Gunung Sugih (0,60). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 115. Indeks Paritas Anggota Karang Taruna



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

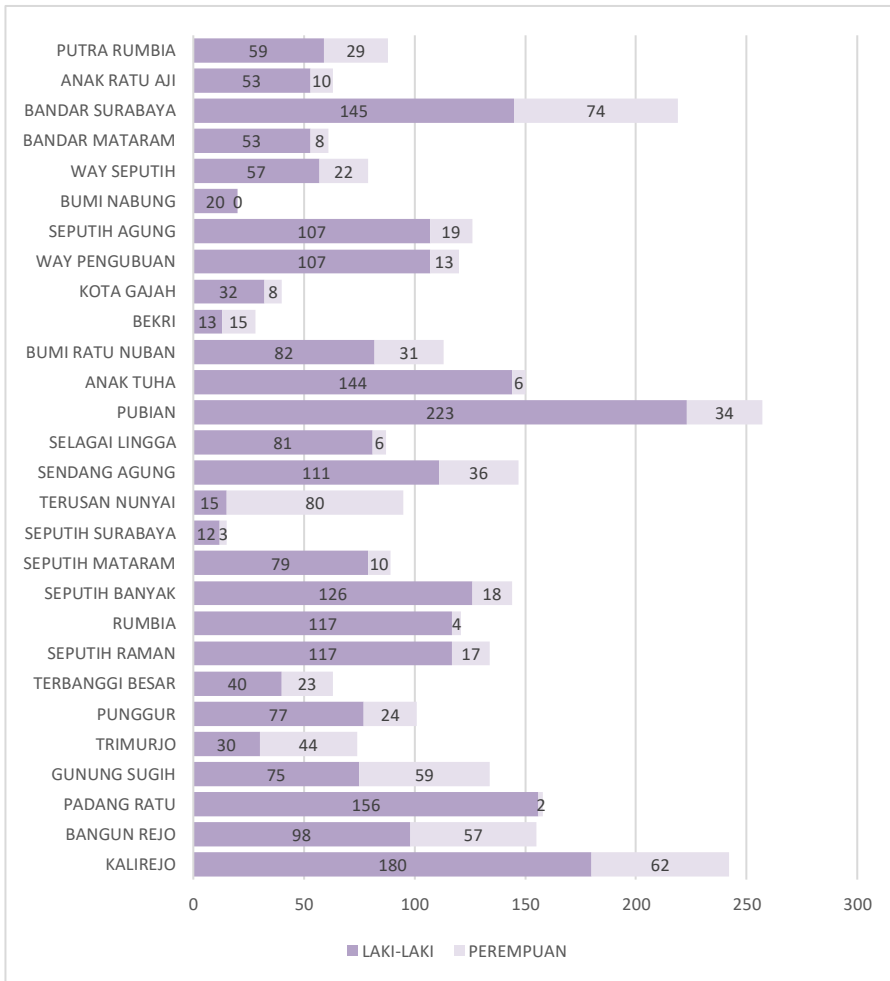
Grafik 116. Disparitas Gender Anggota Karang Taruna



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan indeks disparitas gender anggota karang taruna. Perhitungan secara keseluruhan sebesar (-56,5), artinya kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut. Keteringgalan kinerja perempuan yang cukup rendah terjadi di Kecamatan Anak Ratu Aji (-18,2). Kecamatan Trimurjo (-23,2) dan Kecamatan Gunung Sugih (-25,1).

Grafik 117. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Lainnya



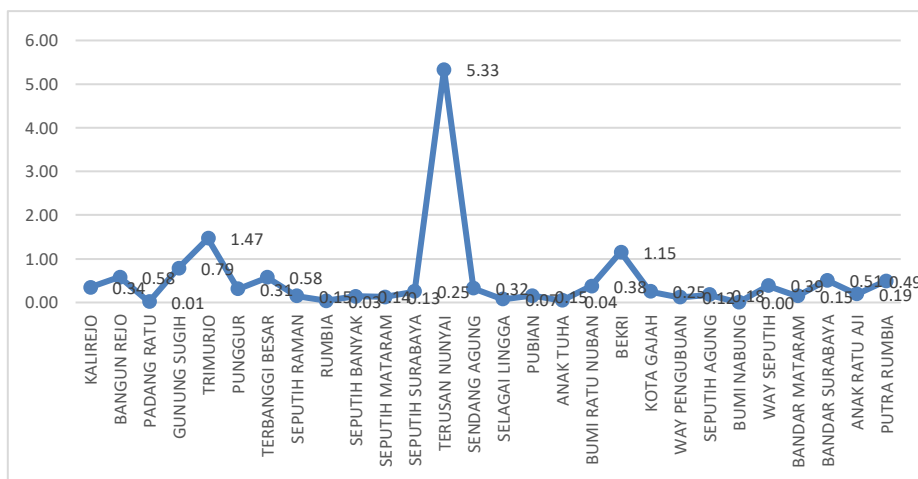
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas merupakan data anggota lembaga kemasyarakatan lainnya di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan jenis kelamin. Kecamatan dengan jumlah anggota lembaga kemasyarakatan lainnya paling tinggi adalah Pubian dengan jumlah anggota lembaga kemasyarakatan lainnya laki-laki sebanyak 223 orang dan Perempuan sebanyak 34 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 180 orang dan perempuan berjumlah 62 orang. Ketiga, Bandar Surabaya dengan jumlah laki-laki 145 orang dan perempuan 74 orang. Adapun jumlah anggota lembaga kemasyarakatan lainnya paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 3 orang. Kedua, kecamatan Bumi Nabung dengan jumlah laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, kecamatan Bekri dengan jumlah laki-laki 13 orang dan perempuan 15 orang.

Kahpi, *et al.*, (2021), berpendapat bahwa hambatan utama partisipasi perempuan dalam lembaga masyarakat dan politik di Indonesia adalah struktur sosial yang patriarki, membatasi ruang perempuan untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik dan kepemimpinan turut menambah keadaan menjadi tidak baik. Namun, kebijakan afirmatif seperti kuota gender dan dukungan organisasi masyarakat menjadi faktor pendorong yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Pada perhitungan indeks paritas secara keseluruhan anggota lembaga kemasyarakatan lainnya sebesar 0,30 yang artinya terdapat ketimpangan kinerja antara perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan tertinggal. Kinerja perempuan tertinggal ada di Kecamatan Terusan Nunyai (5,33). Kinerja perempuan juga tercatat tinggi di Kecamatan Trimurjo (1,47) dan Bekri (1,15). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

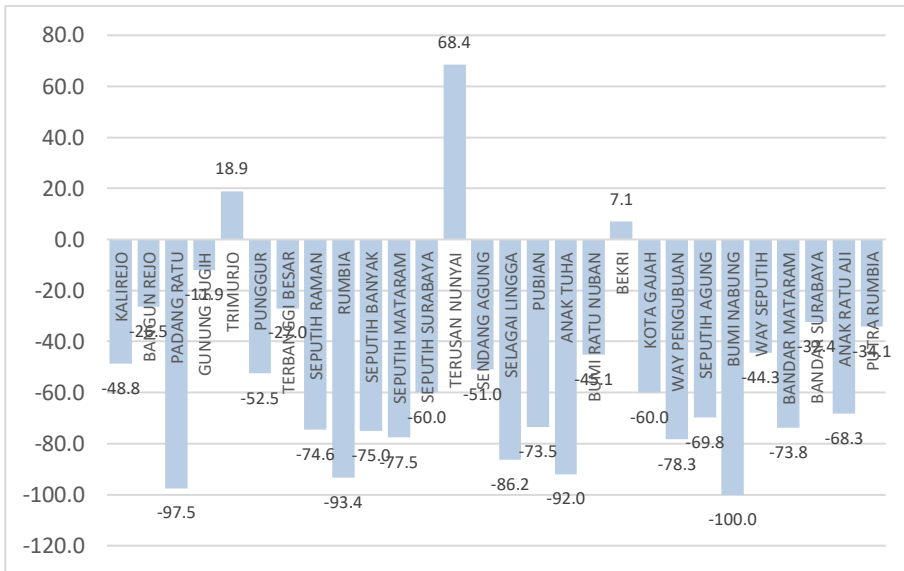
Grafik 118. Indeks Paritas Anggota Lembaga Kemasyarakatan Lainnya



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan indeks disparitas, secara keseluruhan selisih kinerja perempuan dan laki-laki pada bidang anggota lembaga kemasyarakatan lainnya sebesar -54,3, artinya kinerja perempuan tertinggal sejumlah angka tersebut. Kinerja perempuan lebih unggul ada di Kecamatan Terusan Nunyai (68,4). Kecamatan Trimurjo (18,9), dan Bekri (7,1). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 119. Disparitas Gender Anggota Lembaga Kemasyarakatan Lainnya



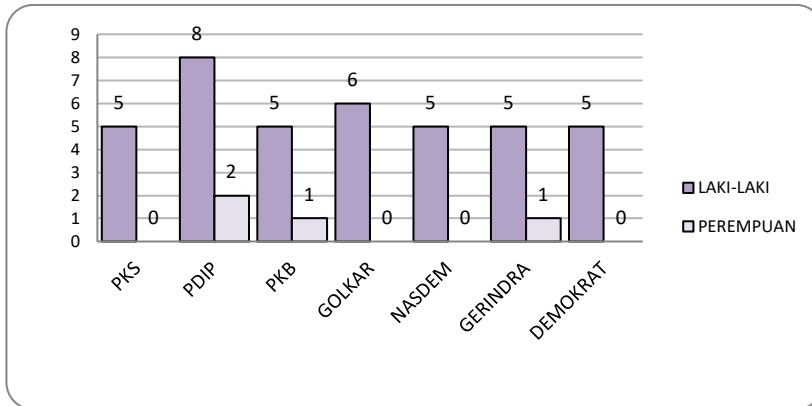
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

5) Politik

Menurut penelitian Hilman (2018) potensi kuota gender untuk meningkatkan perwakilan parlemen perempuan diyakini telah berkontribusi pada peningkatan yang stabil dalam porsi kursi parlemen perempuan, ada variasi yang signifikan di seluruh wilayah dan negara. Kearifan konvensional menyatakan bahwa faktor budaya adalah kendala utama pada potensi kuota gender untuk memberikan lebih banyak kursi bagi kandidat perempuan. Pengalaman Indonesia menyarankan sebaliknya. Meskipun faktor budaya tetap menjadi penghalang bagi masuknya perempuan Indonesia ke kantor terpilih, faktor budaya tidak menjelaskan naik turunnya representasi deskriptif (numerik) perempuan di parlemen selama dua siklus pemilu terakhir. Temuan-temuan dari studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor institusional, terutama perubahan pada sistem pemungutan suara dan konsekuensi untuk pendanaan kampanye, menghadirkan tantangan yang lebih berat bagi kemajuan perempuan dalam politik partai dan politik parlementer Indonesia. Dengan demikian, *affirmative action* ini harus dibarengi dengan pengurangan faktor-faktor penghambat yang ada.

Pemilu Legislatif 2024 memilih 43 anggota partai politik untuk duduk kursi legislatif. Meski telah menerapkan kebijakan *affirmative action* namun hanya 9,3 % (4 orang) anggota parlemen perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Partai politik yang berhasil mendudukkan anggota perempuannya adalah PDI-P, PKB, dan Gerindra.

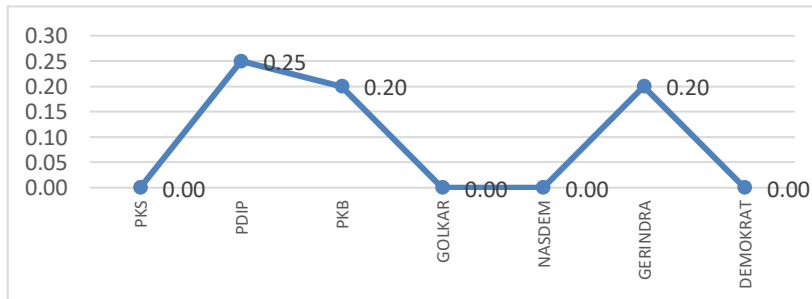
Gambar 5. Anggota DPRD 2019-2024 Tahun 2022



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

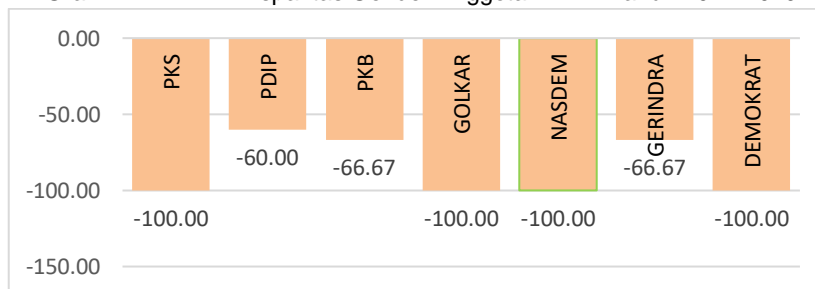
Perhitungan indeks paritas gender menunjukkan seluruh kinerja Anggota DPRD perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan Anggota DPRD laki-laki. Secara umum, indeks paritas 0,10 artinya kinerja Anggota DPRD perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan anggota DPRD laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 120. Indeks Paritas Gender Anggota DPRD Tahun 2024-2029



Sumber: diolah dari data sekunder , 2024.

Grafik 121. Disparitas Gender Anggota DPRD Tahun 2024-2029



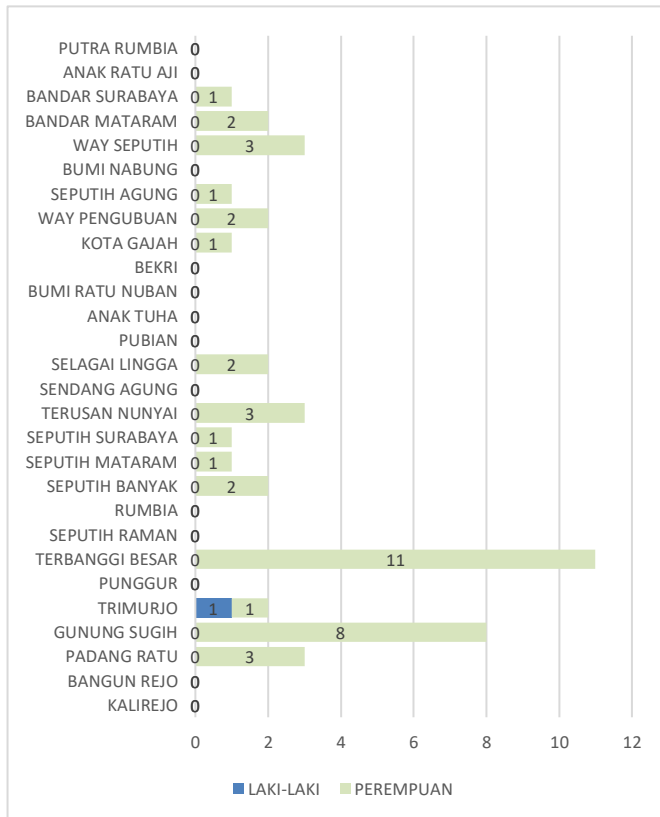
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas menunjukkan disparitas gender Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang secara umum berada pada angka 81,4 % kinerja perempuan tertinggal dari kinerja laki-laki.

F. DATA GENDER BIDANG HUKUM DAN HAM

Menurut WHO dalam Huda (2008:86) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*).

Grafik 122. Korban Kekerasan terhadap Perempuan



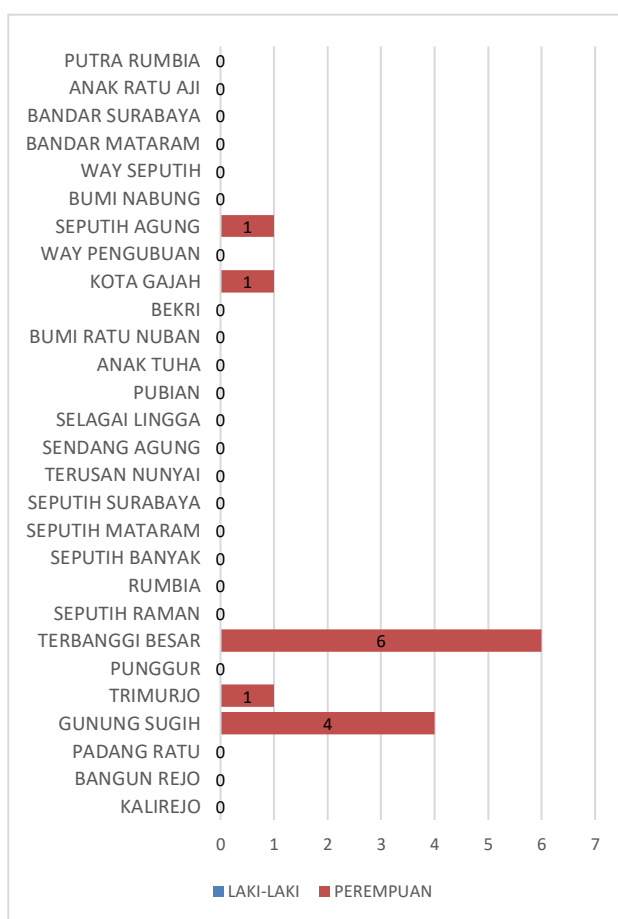
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas menunjukkan jumlah korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 43 orang, dengan jumlah laki-laki

sebanyak 1 orang dan perempuan 42 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah perempuan 11 orang dan tanpa representasi laki-laki. Kedua, kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah perempuan 8 orang dan tanpa adanya korban laki-laki. Ketiga, Padang Ratu, Terusan Nunyai, dan Way Seputih dengan jumlah perempuan 3 orang di masing-masing kecamatan dan laki-laki 0 orang.

Grafik berikut menunjukkan jumlah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan jenis kelamin di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Data tersebut mengungkapkan bahwa perempuan menjadi korban KDRT dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kecamatan dengan jumlah jumlah korban KDRT paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah korban perempuan sebanyak 6 orang dan laki-laki 0 orang. Peringkat kedua, yaitu Gunung Sugih dengan jumlah korban perempuan 4 orang dan laki-laki 0 orang. Ketiga, Trimurjo, Kota Gajah, dan Seputih Agung dengan jumlah korban perempuan 1 orang dan laki-laki 0 orang di masing-masing kecamatan.

Grafik 123. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Setiawan (2024), berpendapat bahwa perempuan cenderung menjadi korban utama KDRT karena berbagai faktor, seperti ketimpangan gender, budaya patriarki, dan ketergantungan ekonomi pada pasangan. Setiawan juga mengatakan bahwa lembaga perlindungan perempuan, pendampingan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam menurunkan angka KDRT.

G. DATA GENDER BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

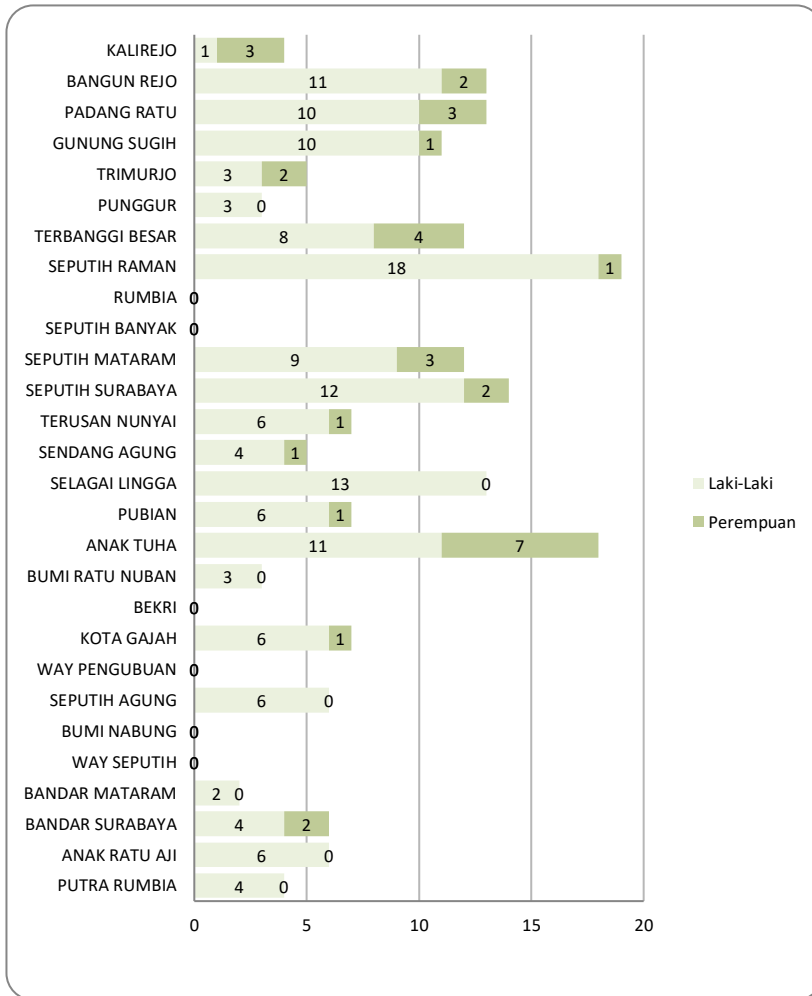
1) Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni juga menjadi isu bidang sosial kemasyarakatan. Rumah selayaknya mampu mengakomodir kebutuhan ruang pribadi dan ruang publik seluruh anggota keluarganya. Rumah tidak layak huni juga dapat mempengaruhi pola komunikasi nonverbal proksemik yang terjadi dalam sebuah rumah yang tidak layak huni.

Penelitian Octavianti (2016) menunjukkan bahwa konsep ruang yang terbentuk dalam sebuah rumah tidak layak huni terbagi menjadi empat kategori yaitu (1) ruang privat untuk setiap penghuni (private space for everyperson), (2) ruang privat untuk keluarga kecil (private space for nuclear family), (3) ruang publik untuk keluarga kecil (public space for nuclear family), dan (4) ruang publik untuk keluarga besar (public space for extended family). Karakteristik ruang di rumah tidak layak huni berkontribusi pada proses komunikasi yang terjadi di antara sesama anggota keluarga. Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi keluarga tersebut hanyalah pesan yang bersifat umum (Octavianti, 2016).

Penelitian Octavianti (2016) menyatakan bahwa konsep ruang yang terbentuk dalam sebuah rumah tidak layak huni terbagi menjadi empat kategori, yaitu ruang privat untuk setiap penghuni; ruang privat untuk keluarga kecil; ruang publik untuk keluarga kecil; ruang publik untuk keluarga besar. Karakteristik ruang di rumah tidak layak huni berkontribusi pada proses komunikasi yang terjadi di antara sesama anggota keluarga. Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi keluarga tersebut hanyalah pesan yang bersifat umum (Octavianti, 2016).

Grafik 124. Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni



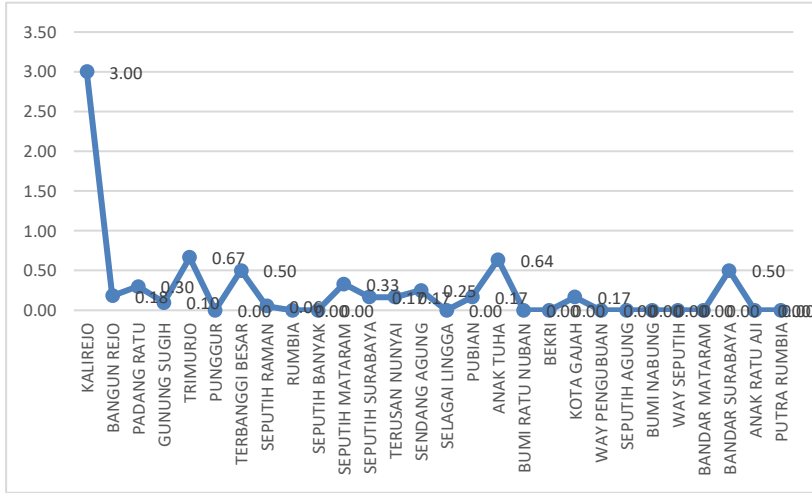
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada tahun ini, terdapat 190 rumah yang didanai, dengan komposisi pemilik rumah perempuan sebanyak 34 rumah dan pemilik rumah laki-laki sebanyak 156 rumah. Kecamatan dengan jumlah jumlah penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni melalui APBD paling tinggi adalah Seputih Raman dengan jumlah penerima laki-laki sebanyak 18 orang dan Perempuan sebanyak 1 orang. Peringkat kedua, yaitu Anak Tuha dengan jumlah laki-laki 11 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Ketiga, Seputih Surabaya dengan jumlah laki-laki 12 orang dan perempuan 2 orang. Adapun jumlah anggota lembaga kemasyarakatan lainnya paling rendah adalah kecamatan Rumbia, Seputih Banyak, Bekri, Bumi Nabung, Way Seputih, Way Pengubuan dengan jumlah laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 0 orang. Kedua, kecamatan Bandar Mataram dengan jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Punggur dengan

jumlah laki-laki 3 orang dan perempuan 0 orang. Sebaran selengkapnya rumah yang mendapat bantuan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

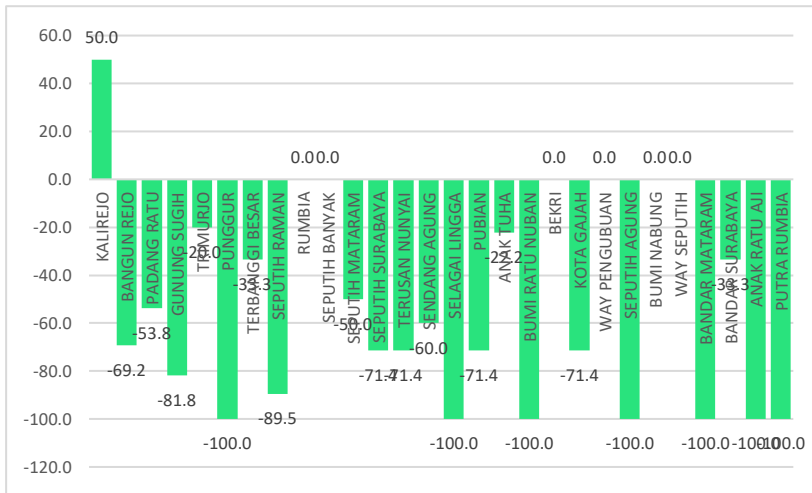
Pada perhitungan indeks paritas, secara keseluruhan penerima bantuan pemugaran rumah sebesar 0,22, dimana terjadi kesenjangan kinerja antara perempuan dan laki-laki. Kinerja perempuan tertinggal -64,2 (disparitas gender). Selengkapnya, indeks paritas dan disparitas gender dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 125. Indeks Paritas Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 126. Disparitas Gender Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

2) Lembaga Sosial

UNISDR dalam kajiannya pada tahun 2013 yang membahas mengenai kerawanan menyatakan bahwa kerawanan sosial adalah kerawanan yang berasal dari relasi sosial, institusi, dan sistem nilai-nilai budaya (Putri & Yuhan, 2019). Berikut ini ketersediaan institusi sosial sebagai alternatif pengamanan bagi kaum rentan.

Tabel 2. Lembaga Sosial Kesejahteraan

Jenis	Jumlah
Rumah Aman (Shelter)	1
Rumah Singgah	1
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)	0
Panti Asuhan Anak	50

Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Data pada tabel di atas menunjukkan distribusi fasilitas perlindungan berupa Rumah Aman (Shelter), Rumah Singgah, dan Panti Asuhan Anak di berbagai wilayah. Dari data, Kalirejo memiliki jumlah Panti Asuhan Anak tertinggi, yaitu sebanyak 6 unit, sedangkan wilayah seperti Way Seputih dan Putra Rumbia tidak memiliki fasilitas yang ditampilkan pada grafik. Rumah Aman dan Rumah Singgah masing-masing memiliki distribusi yang tidak merata, dengan beberapa wilayah seperti Gunung Sugih dan Trimuro hanya memiliki satu unit. Sebaliknya, Terbanggi Besar memiliki jumlah fasilitas yang relatif banyak, dengan lima unit Panti Asuhan Anak. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan penyediaan fasilitas di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Salama dan Hanna (2013) tentang perencanaan fasilitas perlindungan dalam mitigasi bencana dapat menjadi referensi untuk memastikan distribusi fasilitas lebih merata. Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas di wilayah dengan kebutuhan tinggi namun minim ketersediaan, sehingga mendukung pemerataan perlindungan sosial.

H. DATA TERPILAH ANAK

Untuk membedakan kinerja kelompok dewasa dan anak-anak, perlu ditetapkan definisi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan umur anak di Indonesia memiliki rujukan yang berbeda-beda (Khoiriah 2019), antara lain:

- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah mereka yang berusia kurang dari 19 tahun.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara eksplisit disebut anak jika berada dibawah usia 17 tahun, sebab setelah usia 17 tahun seseorang diperkenan memiliki surat izin mengemudi.
- Pasal 330 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Karena perbedaan kategorisasi inilah, definisi anak akan disesuaikan dengan tema/pokok bahasan yang akan dibahas.

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

1) Hak Sipil dan Kebebasan

Hal sipil dan kebebasan bagi anak meliputi hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak akses informasi yang layak serta hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Akte kelahiran merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki nasab kepada orang tuanya sesuai yang tercantum didalamnya. Di Kabupaten Lampung Tengah target hingga 31 Desember 2024 sebanyak 365.059 anak akan mendapatkan akte kelahiran. Hingga Januari 2024 jumlah anak yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 1.931 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Cakupan Akta Kelahiran Usia Anak 0-18 Tahun 2024

Kecamatan	Anak Usia 0-18 Tahun	Belum Memiliki	%
Kalirejo	20.755	10	0,05
Bangun Rejo	18.837	45	0,24
Padang Ratu	16.336	75	0,46
Gunung Sugih	21.868	93	0,43
Trimurjo	14.157	125	0,88
Punggur	10.884	31	0,28
Terbanggi Besar	35056	92	0,26
Seputih Raman	12.988	29	0,22
Rumbia	10.903	24	0,22
Seputih Banyak	13258	104	0,78
Seputih Mataram	14.502	94	0,65
Seputih Surabaya	13.697	124	0,91
Terusan Nunyai	15.593	53	0,34
Sedang Agung	9.604	32	0,33
Selagai Lingga	8.418	41	0,49
Pubian	15.486	71	0,46
Anak Tuha	13.617	53	0,39
Bumi Ratu Nuban	20.865	97	0,46
Bekri	14.298	97	0,68
Kota Gajah	10.569	106	1,00
Way Pengubuan	13.503	59	0,44
Seputih Agung	12.146	92	0,76
Bumi Nabung	9.344	97	1,04
Way Seputih	9.824	92	0,94
Bandar Mataram	5.470	43	0,79
Bandar Surabaya	11.507	92	0,80
Anak Ratu Aji	5.391	20	0,37
Putra Rumbia	6.391	40	0,63
Jumlah	3.656	1.931	52,82

Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

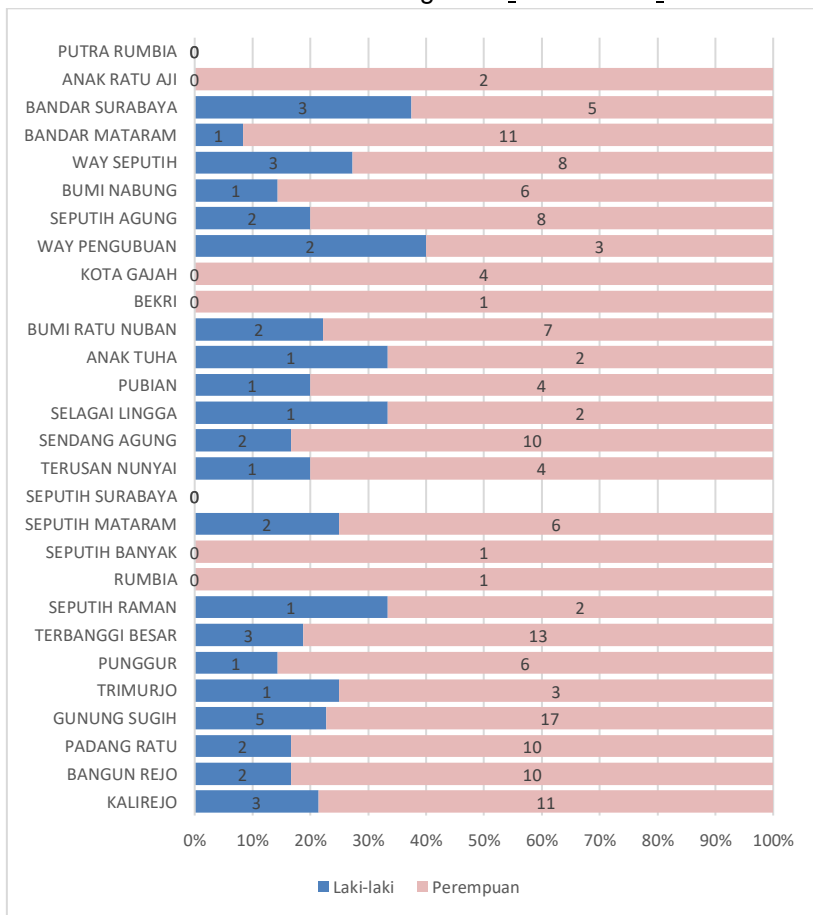
2) Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain meliputi perkawinan anak, tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, lembaga pengasuhan

alternatif terstandarisasi dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak.

Isu yang lain pada kluster kesehatan anak dan kesejahteraan adalah pernikahan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimum menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan di Indonesia adalah 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai batas minimum untuk memastikan kematangan fisik, psikologis, dan ekonomi bagi kedua belah pihak. Namun, rekomendasi internasional dari WHO menyarankan usia ideal pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20-24 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, guna membangun keluarga yang lebih sehat dan stabil.

Gambar 6. Persebaran Usia Pengantian_Dibawah 19_Tahun



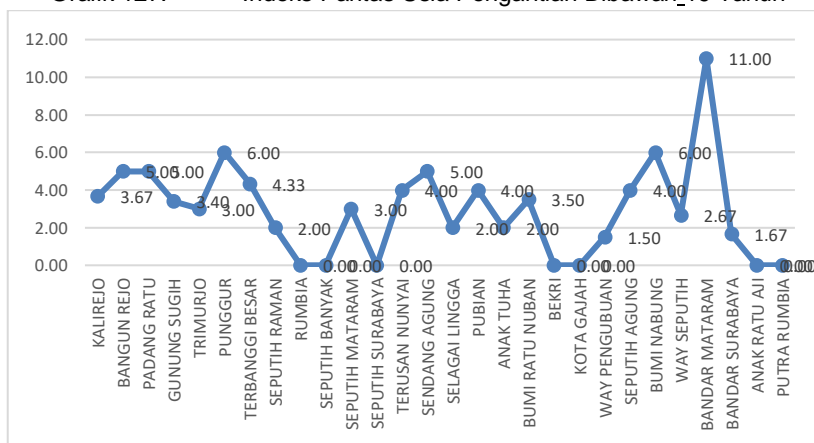
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Selama tahun 2023, terjadi 8.539 peristiwa pernikahan di Kabupaten Lampung Tengah. Grafik berikut menunjukkan jumlah mempelai laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun berdasarkan kecamatan di wilayah tertentu selama Januari-Desember 2023. Perempuan secara signifikan mendominasi jumlah pernikahan dini

dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan tren pernikahan dini yang lebih banyak melibatkan perempuan, yang sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Pernikahan dini, khususnya di kalangan perempuan, sering kali terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma budaya yang menganggap perempuan harus menikah muda. Grafik ini menggarisbawahi ketimpangan gender dalam fenomena ini, di mana perempuan lebih rentan menjadi korban pernikahan dini dibanding laki-laki.

Secara ringkas grafik indeks paritas berikut ini memberikan informasi di Kabupaten Lampung Tengah, tiga kecamatan dengan nilai indeks tertinggi adalah Bandar Mataram dengan indeks 6,00, diikuti oleh kecamatan Punggur dan kecamatan Bumi Nabung yang memiliki nilai indeks yang sama yaitu 5,00. Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan tingkat kesetaraan yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya di wilayah tersebut. Masih terdapat beberapa kecamatan dengan nilai indeks 0,00 yang mencerminkan adanya ketimpangan atau kebutuhan perhatian lebih untuk meningkatkan aksesibilitas atau pemerataan di wilayah. Secara keseluruhan, fluktuasi nilai indeks di Kabupaten Lampung Tengah menandakan perlunya kebijakan yang terfokus untuk mengurangi disparitas antar kecamatan.

Grafik 127. Indeks Paritas Usia Pengantian Dibawah_19 Tahun

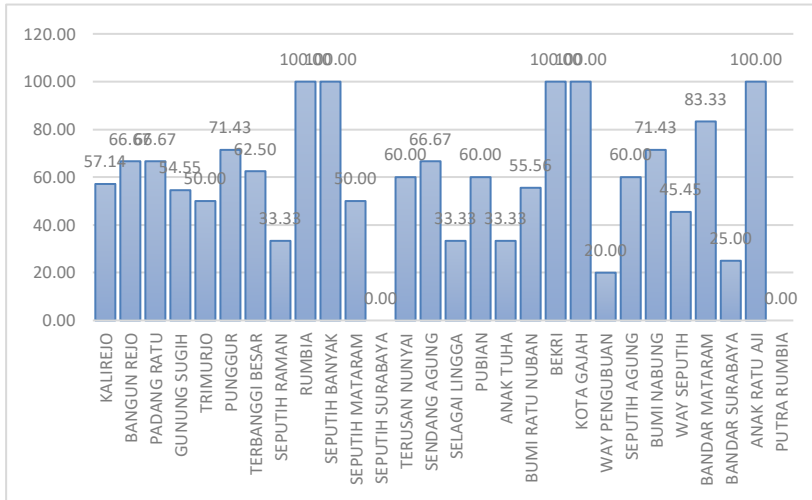


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menggambarkan kesenjangan pernikahan dibawah umur 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Disparitas gender paling tinggi terjadi di lima kecamatan yaitu kecamatan Rumbia, Seputih Banyak, Bekri, Kota Gajah dan AnakRatu Aji. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial yang kuat dan tekanan keluarga. Groot et al. (2018) mengatakan bahwa pernikahan anak memiliki dampak jangka panjang, termasuk gangguan kesehatan dan sosial yang signifikan, yang sering tidak disadari oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih holistik dalam program mitigasi pernikahan dini, termasuk

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan di daerah pedesaan.

Grafik 128. Disparitas Gender Usia Pengantian Dibawah 19 Tahun

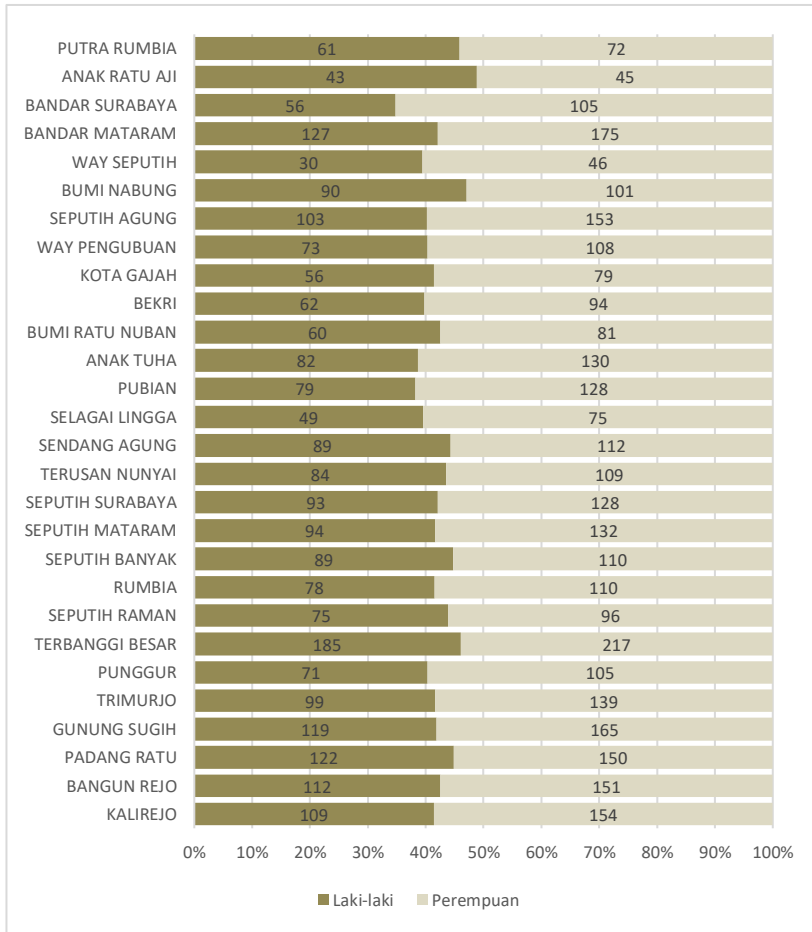


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas, tren pada seluruh kecamatan bahwa pengantin usia di bawah 19 tahun lebih banyak dari pengantin laki-laki dengan usia yang sama. Indeks paritas keseluruhan 3,39 yang berarti terdapat kesenjangan gender dengan kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan untuk disparitas gender sebesar 59,39 % perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut WHO, usia pengantin antara 19 - 21 tahun juga masih tergolong belum dewasa. Grafik berikut ini menunjukkan terdapat data perbedaan signifikan antara tiga wilayah dengan angka pernikahan usia muda tertinggi dan terendah. Wilayah dengan angka tertinggi, seperti Seputih Raman, Bumi Nabung, dan Bandar Surabaya, mencerminkan tingkat pernikahan yang lebih aktif di usia 19-21 tahun, kemungkinan dipengaruhi oleh budaya lokal atau kondisi sosial-ekonomi yang mendukung pernikahan muda. Sebaliknya, wilayah dengan angka terendah, seperti Sukadana, Selagai Lingga, dan Putra Rumbia, menunjukkan tren yang lebih rendah, yang dapat dikaitkan dengan faktor seperti prioritas pendidikan, pekerjaan, atau migrasi. Perbedaan ini mengindikasikan adanya keragaman dalam dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan pernikahan di berbagai wilayah.

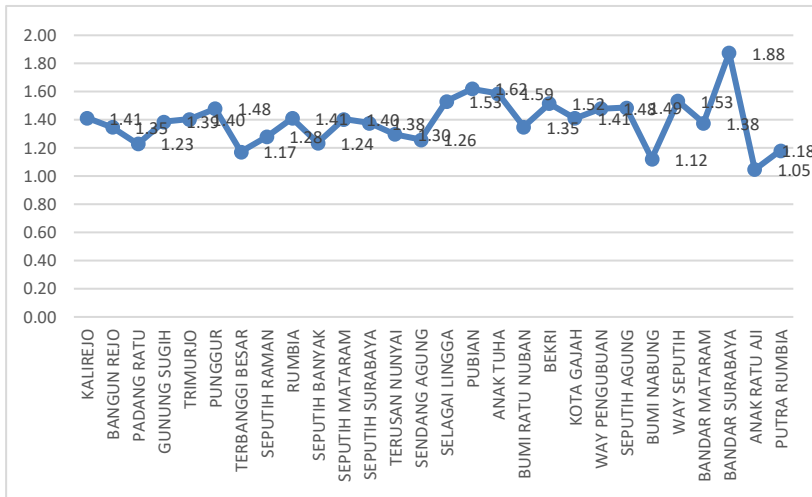
Gambar 7. Persebaran Usia Pengantin 19 - 21 Tahun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas gender pernikahan di usia 19-21 tahun di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 1,37. Angka ini memberikan informasi di Kabupaten Lampung Tengah, dengan nilai indeks tertinggi dalam kesenjangan pernikahan pada rentang usia 19-21 tahun antara laki-laki dan perempuan menunjukkan indeks paritas yang lebih tinggi, yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam pola pernikahan muda. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan di usia dini. Puspitasari et al. (2021) mengungkapkan bahwa faktor individu, orang tua, dan lingkungan memengaruhi perencanaan pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada remaja. Meskipun banyak remaja yang menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, tekanan sosial dan ekonomi di beberapa daerah menyebabkan pernikahan terjadi lebih awal, peningkatan usia pernikahan sering terpengaruh oleh tingkat pendidikan, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, dan faktor keluarga.

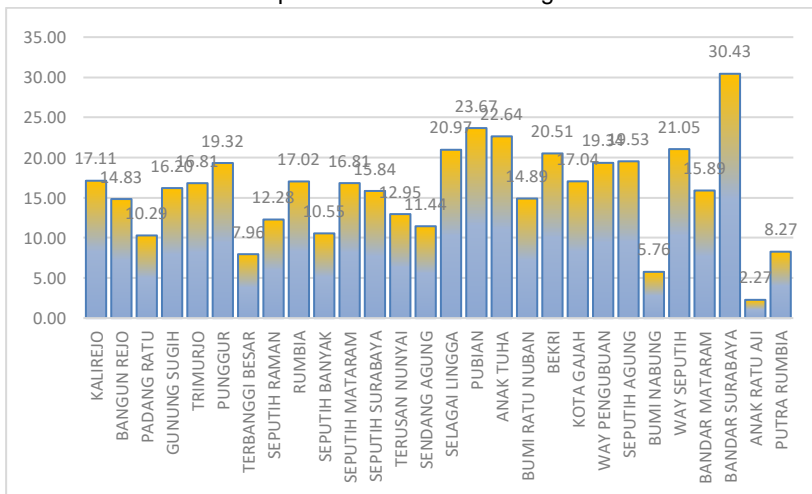
Grafik 129. Indeks Paritas Usia Pengantian 19 – 21 Tahun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender pada pernikahan usia 19-21 tahun pada grafik bawah memberikan gambaran umum lebar kesenjangan antra perempuan dan laki-laki di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 15,55. Namun, dalam kesenjangan per kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kesenjangan pernikahan di umur 19-21 tahun seperti di kecamatan, Bandar Surabaya (30, 43), Pubian (23, 43), Seputih Banyak (18,92), Anak Tuha (22, 64), Selagai Lingga (20,97). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 130. Disparitas Gender Usia Pengantian 19 – 21 Tahun

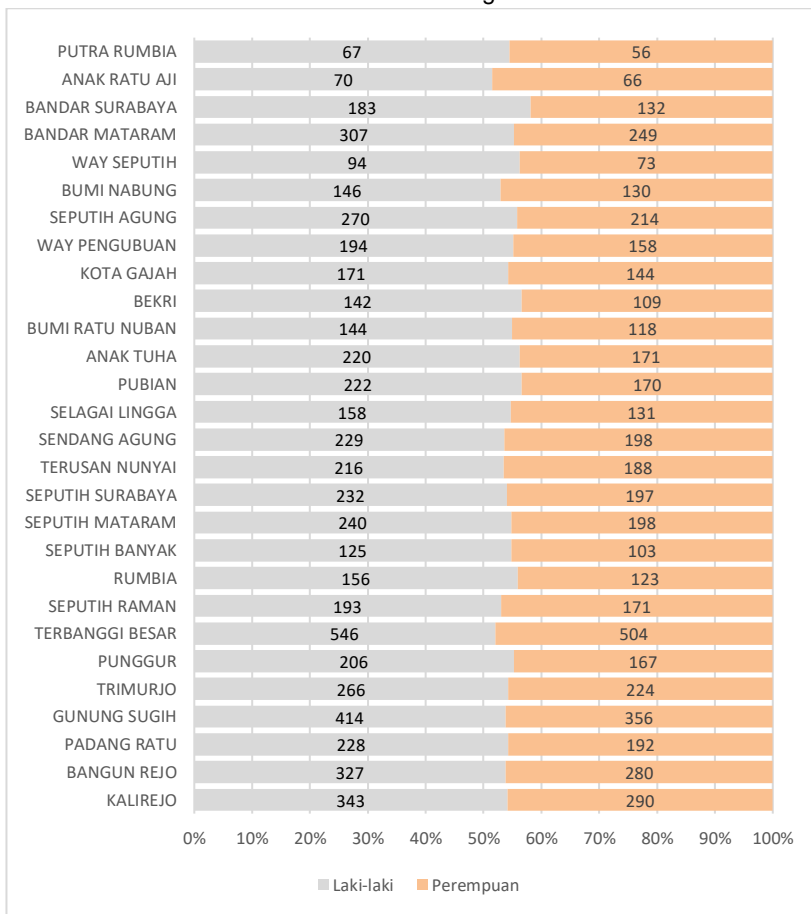


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut ini menunjukkan Pernikahan pada usia di atas 21 tahun umumnya dianggap sebagai usia yang ideal dan sesuai dengan kematangan emosional maupun

kesiapan sosial-ekonomi. Pada usia ini, individu cenderung telah menyelesaikan pendidikan dasar dan mulai memasuki dunia kerja, sehingga kesiapan untuk membangun rumah tangga lebih terjamin.

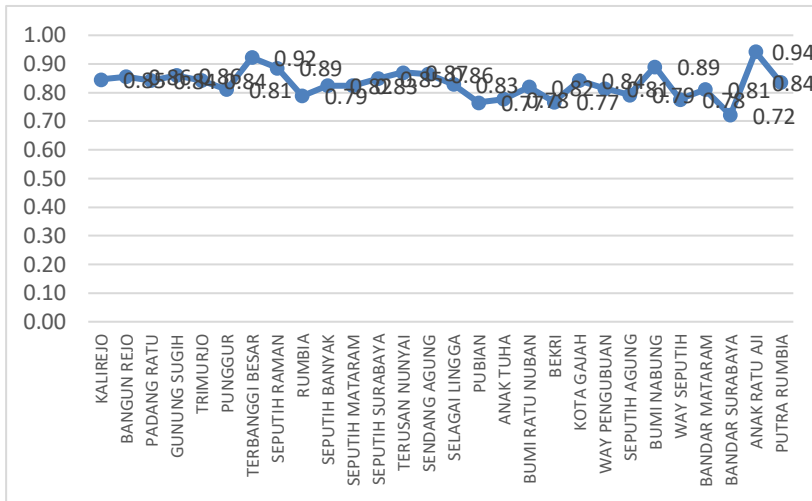
Grafik 131. Persebaran Usia Pengantin Lebih dari 21 Tahun



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pernikahan di berbagai wilayah. Wilayah seperti Seputih Raman, Bumi Nabung, dan Bandar Surabaya menunjukkan angka pernikahan tertinggi, yang mencerminkan norma sosial yang mendukung pernikahan di usia tersebut serta kemungkinan kemudahan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, wilayah seperti Putra Rumbia, Anak Ratu Aji, dan Selagai Lingga mencatat angka pernikahan yang rendah, yang dapat dikaitkan dengan keterbatasan populasi atau prioritas lain seperti pendidikan dan pekerjaan. Perbedaan ini menggarisbawahi pengaruh variabel sosial, budaya, dan ekonomi terhadap keputusan pernikahan di berbagai daerah.

Grafik 132. Indeks Paritas Persebaran Usia Pengantin Lebih dari 21 Tahun

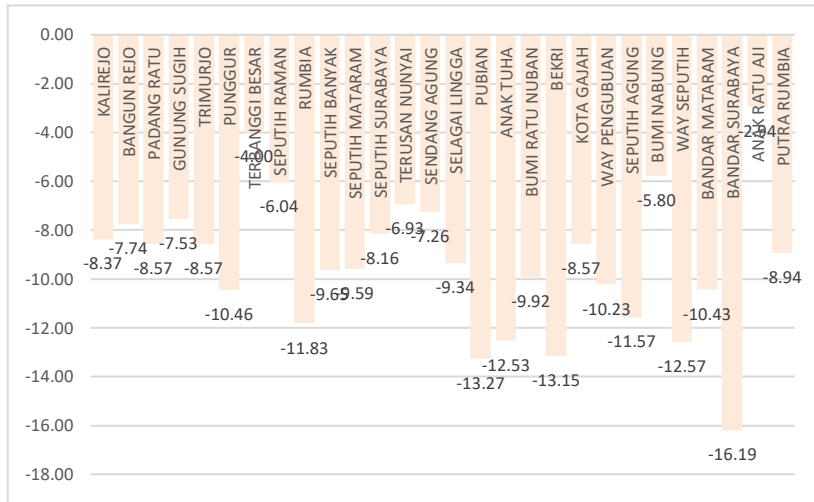


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Secara keseluruhan, perhitungan indeks paritas sebesar 0,84 dengan arti bahwa ada kesenjangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini dapat dilihat pada data pernikahan yang mencatat perbedaan antara usia laki-laki dan perempuan, dimana pernikahan pada usia lebih matang (di atas 21 tahun) cenderung lebih stabil secara sosial dan ekonomi, serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan reproduksi. Pernikahan pada usia 19-21 tahun cukup tinggi, yang berpotensi mempengaruhi kualitas kehidupan pasangan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia minimal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, guna menghindari pernikahan dini yang berisiko pada kesehatan dan psikologis anak.

Indeks disparitas gender di Kabupaten Lampung Tengah sebesar -8,89+ artinya pengantin laki laki lebih dominan dibandingkan dengan pengantin perempuan diusia 21 tahun keatas, dengan ini menjelsakna bahwa kesiapan mental dan usia yang sudah matang untuk memasuki fase ideal pernikahan.

Grafik 133. Disparitas Gender Persebaran Usia Pengantin Lebih dari 21 Tahun



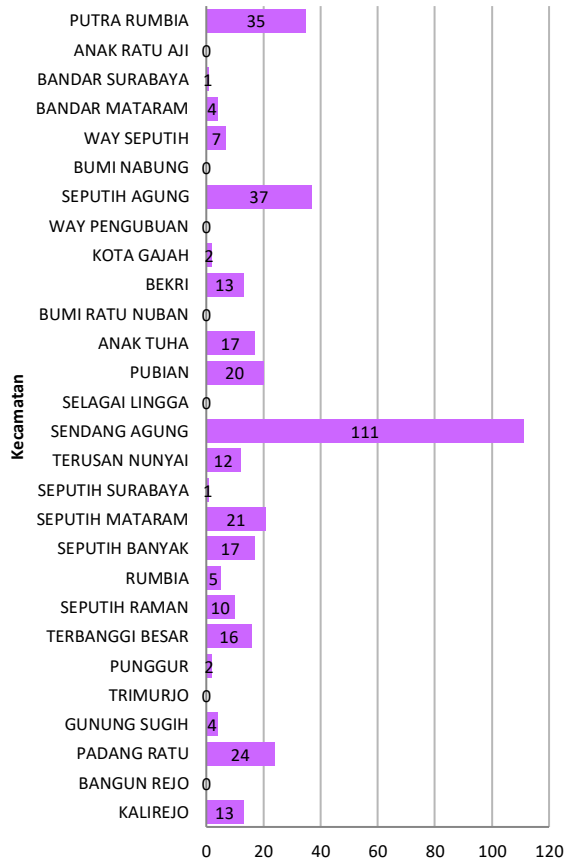
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

3) Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Isu pada kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak antara lain: persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi status gizi balita, cakupan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dan ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Grafik berikut ini menunjukkan jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat variasi yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Selagai Lingga mencatat jumlah balita gizi buruk tertinggi, yaitu sebanyak 111 balita, yang mencolok dibandingkan kecamatan lainnya. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki jumlah balita gizi buruk terendah atau bahkan nol, seperti Kecamatan Bangun Rejo, Terusan Nunyai, dan Bumi Ratu Nuban, masing-masing mencatat angka 0 kasus. Jika dibandingkan, Selagai Lingga memiliki angka balita gizi buruk yang sangat tinggi, yakni hampir 111 kali lebih banyak dibandingkan Bangun Rejo atau Terusan Nunyai yang tidak memiliki kasus sama sekali. Selain itu, kecamatan dengan jumlah cukup tinggi lainnya adalah Way Seputih dengan 37 balita dan Putra Rumbia dengan 35 balita, yang masih jauh lebih rendah dibandingkan Selagai Lingga.

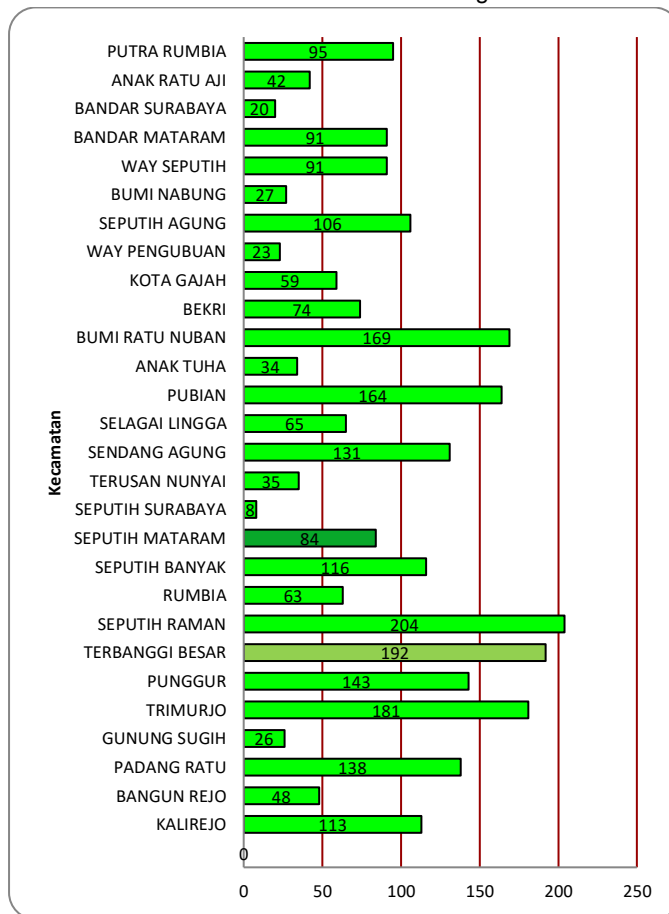
Grafik 134. Gizi Buruk



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Perbedaan ini menunjukkan kemungkinan adanya faktor-faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap gizi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan tingkat kemiskinan yang berkontribusi terhadap perbedaan jumlah balita gizi buruk antar kecamatan. Perlu ada intervensi khusus pada kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi untuk menurunkan angka tersebut.

Grafik 135. Balita Kurang Gizi



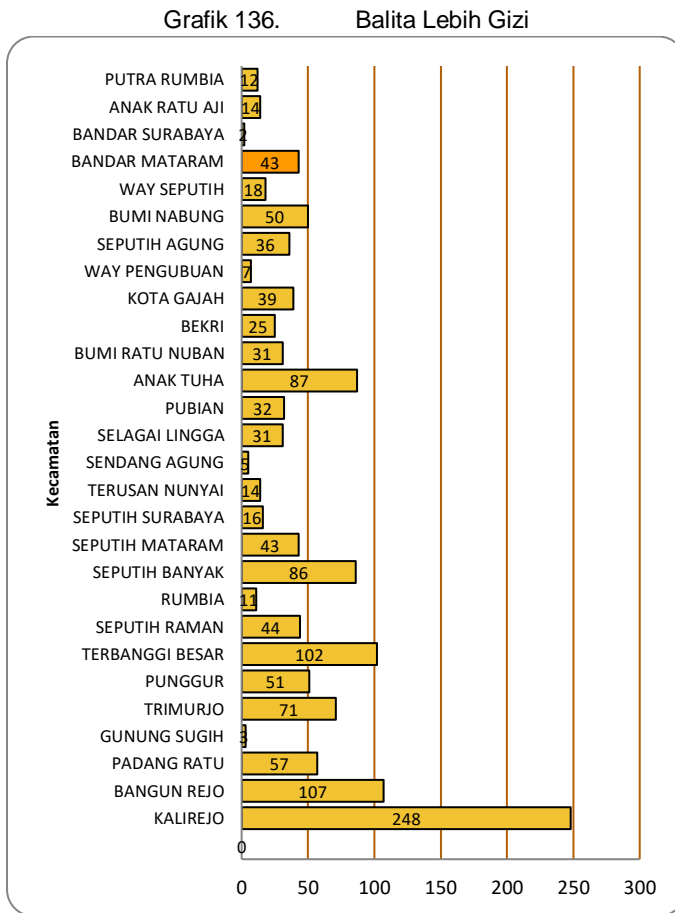
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas menunjukkan distribusi jumlah balita kurang gizi di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah balita kurang gizi tertinggi adalah Rumbia, dengan angka mencapai 204 kasus, diikuti oleh Sepuluh Rambah (192 kasus) dan Anak Tuha (169 kasus). Angka ini menunjukkan konsentrasi masalah gizi yang signifikan di wilayah tersebut. Sebaliknya, jumlah terendah tercatat di Kecamatan Sepuluh dengan hanya 8 kasus, serta di Bangun Rejo (26 kasus) dan Way Seputih (23 kasus). Perbandingan antara angka tertinggi dan terendah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Rumbia memiliki angka balita kurang gizi yang lebih dari 25 kali lipat dibandingkan Sepuluh, yang merupakan kecamatan dengan jumlah kasus terendah. Perbedaan besar ini dapat mencerminkan ketimpangan dalam akses ke fasilitas kesehatan, edukasi masyarakat tentang gizi, atau perbedaan tingkat sosial ekonomi antar kecamatan.

Data ini menggarisbawahi kebutuhan untuk memprioritaskan intervensi gizi di kecamatan dengan angka tertinggi, seperti Rumbia, sembari mempertahankan program yang berhasil di daerah dengan angka terendah. Hal ini dapat mencakup

program edukasi gizi, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Grafik berikut menunjukkan jumlah balita gizi lebih di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 1285 balita. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Kalirejo dengan jumlah balita 248. Kedua, kecamatan Bangun Rejo dengan jumlah 107 balita. Ketiga, Terbanggi Besar dengan jumlah 102 balita. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah balita gizi lebih terendah, pertama kecamatan Bandar Surabaya dengan jumlah 2 balita. Kedua, kecamatan Gunung Sugih dengan jumlah 3 balita. Ketiga, Sendang Agung dengan jumlah 5 balita.



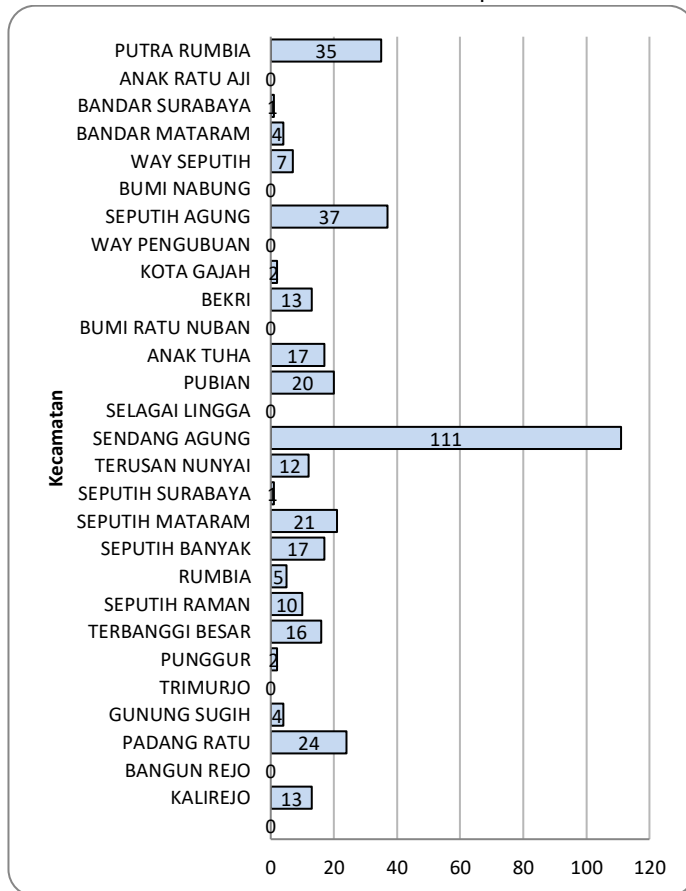
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik berikut menunjukkan jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah yang mendapatkan perawatan. Berdasarkan data, kecamatan dengan jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan tertinggi adalah Selagai Lingga, dengan 111 kasus. Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Bangun Rejo, Gunung Sugih, dan lainnya memiliki angka nol, menunjukkan tidak ada kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di daerah tersebut. Perbedaan ini menunjukkan

kesenjangan dalam akses atau implementasi perawatan kesehatan terhadap gizi buruk di tingkat kecamatan.

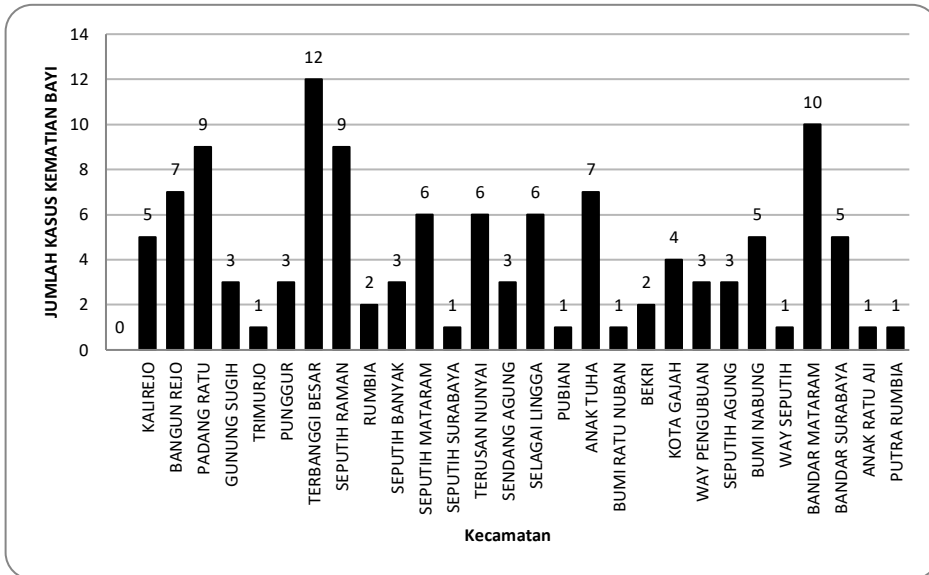
Penelitian sebelumnya yang relevan, seperti hasil *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021* oleh Kementerian Kesehatan RI, menyoroti bahwa prevalensi gizi buruk pada balita sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan ibu, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pengetahuan gizi, untuk menekan angka gizi buruk di Lampung Tengah, perlu ada pemerataan akses layanan kesehatan dan program edukasi bagi masyarakat, terutama di daerah dengan angka perawatan rendah.

Grafik 137. Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik 138. Kematian Bayi



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas menunjukkan jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 120 bayi. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah tertinggi, pertama kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah 12 bayi. Kedua, kecamatan Bandar Mataram dengan jumlah 10 bayi. Ketiga, Padang Ratu dan Seputih Raman dengan jumlah 9 bayi di masing-masing kecamatan. Sementara, tiga kecamatan dengan jumlah kasus kematian bayi terendah, pertama kecamatan Trimurjo, Seputih Surabaya, Pubian, Bumi Ratu Nuban, Way Seputih, Anak Ratu Aji, dan Putra Rumbia dengan jumlah 1 bayi di masing-masing kecamatan. Kedua, kecamatan Rumbia dan Bekri dengan jumlah 2 bayi di masing-masing kecamatan. Ketiga, Gunung Sugih, Punggur, Seputih Banyak, Sendang Agung, Way Pengubuan, Seputih Agung dengan jumlah 3 bayi di masing-masing kecamatan.

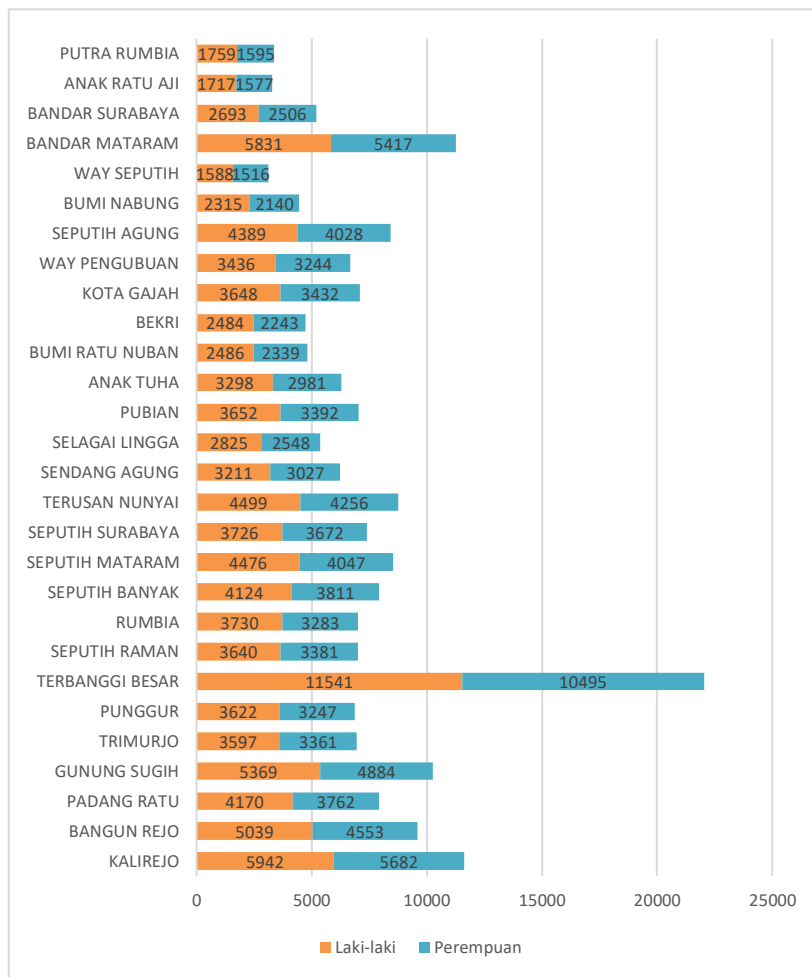
4) Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini dapat diwujudkan melalui pendidikan pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI), wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak (SRA), serta tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Keseluruhan grafik memberikan informasi penting tentang pola distribusi peserta didik di Kabupaten Lampung Tengah. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang adil dan menyeluruh. Kecamatan dengan jumlah peserta didik yang besar, seperti Terbanggi Besar memerlukan intervensi

pemerintah untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal, sebagaimana direkomendasikan oleh Sari et al. (2020), demi mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Grafik 139. Sebaran Anak Bersekolah di Kabupaten Lampung Tengah

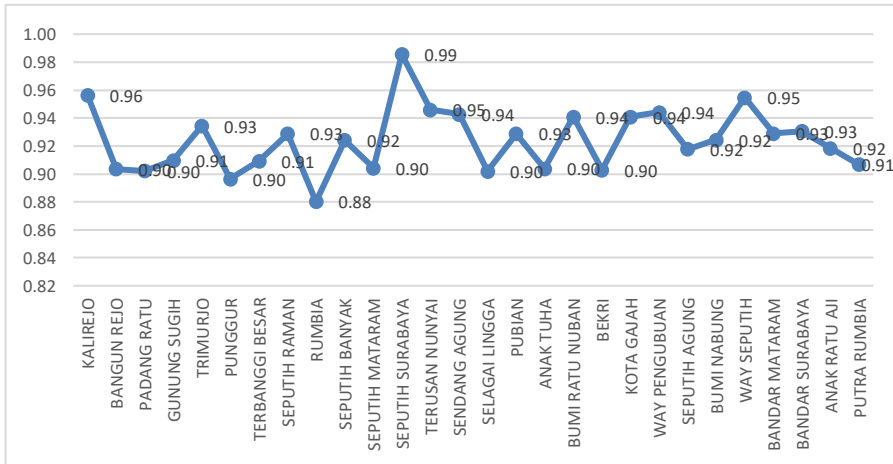


Grafik diatas menunjukkan visualisasi data tentang peserta didik berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terbanggi Besar memiliki jumlah peserta didik paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dengan total 11.541 siswa laki-laki dan 10.495 siswa perempuan, daerah ini menjadi pusat konsentrasi pendidikan di kabupaten tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Kalirejo menunjukkan pola distribusi yang hampir merata, dengan jumlah perempuan (5.942) sedikit lebih banyak daripada laki-laki (5.682). Distribusi peserta didik antara laki-laki dan perempuan tidak sama di seluruh kecamatan. Misalnya, di Kecamatan Gunung Sugih dan Seputih Agung, jumlah peserta didik perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, menunjukkan partisipasi perempuan yang kuat dalam pendidikan. Sementara itu, Kecamatan Way Pengubuan dan Terusan Nunyai memiliki lebih banyak peserta didik

laki-laki, menggambarkan adanya perbedaan pola distribusi berdasarkan jenis kelamin.

Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

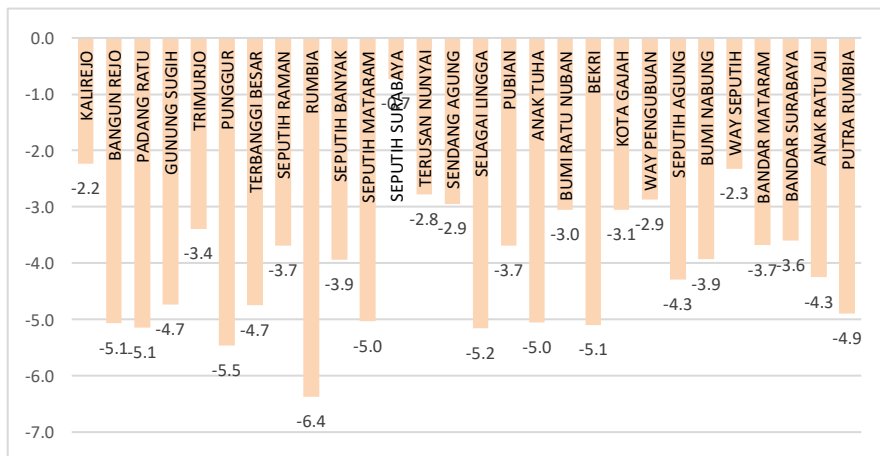
Grafik 140. Indeks Paritas Anak Sekolah



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas seluruh anak sebagai peserta didik di Kabupaten Lampung Tengah keseluruhan sebesar 0.92, angka ini menunjukkan ada kesenjangan kinerja antara peserta didik perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih rendah yaitu 0.92. Untuk disparitas gender terjadi kesenjangan sebesar -4,0. Pada grafik sebelumnya tergambar IP pada seluruh kecamatan dari 0.88 (Rumbia) hingga 0.99 (Seputih Surabaya).

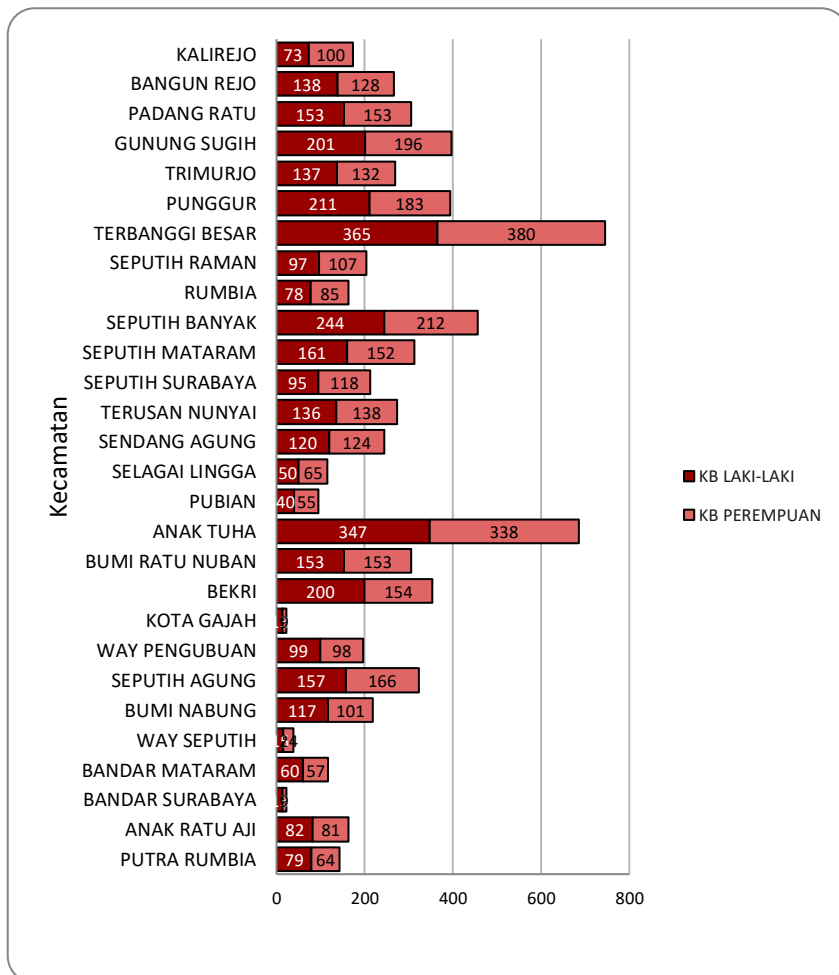
Grafik 141. Disparitas Gender Anak Sekolah



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut menunjukkan jumlah peserta didik jenjang Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, terdapat perbedaan yang mencolok antara kecamatan dengan jumlah peserta didik tertinggi dan terendah. Kecamatan Terbanggi Besar mencatat angka tertinggi dengan total 745 peserta didik, yang terdiri dari 365 laki-laki dan 380 perempuan. Sebaliknya, Kecamatan Kota Gajah memiliki jumlah peserta didik paling rendah, yaitu 22 peserta didik, dengan rincian 13 laki-laki dan 9 perempuan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam akses pendidikan anak usia dini yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, jumlah populasi, dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

Grafik 142. Peserta Didik Jenjang Kelompok Bermain

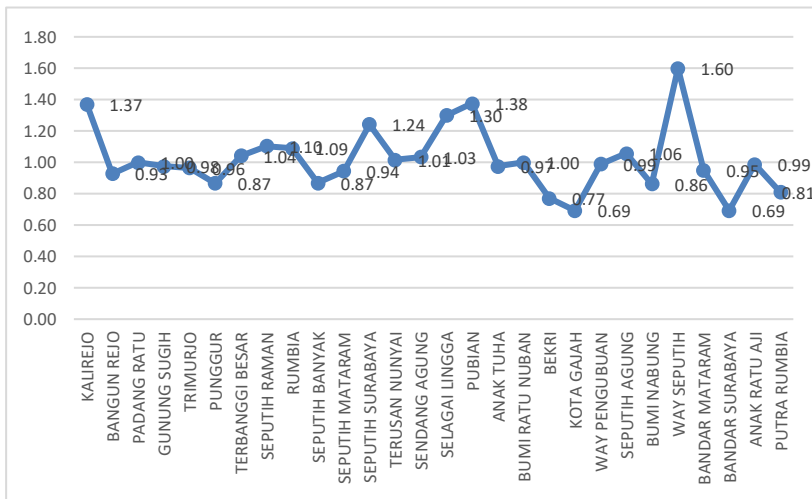


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Nurhayati (2021) mengungkapkan bahwa kesenjangan dalam akses pendidikan anak usia dini sering kali berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur

pendidikan di suatu wilayah. Daerah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki partisipasi pendidikan anak usia dini yang lebih tinggi. Partisipasi anak perempuan dalam pendidikan anak usia dini biasanya lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, sebagaimana terlihat dalam sebagian besar kecamatan pada grafik ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah untuk mengatasi ketimpangan ini perbedaan jumlah peserta didik jenjang KB di berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah mencerminkan kebutuhan akan intervensi kebijakan yang tepat untuk menjamin pemerataan akses pendidikan anak usia dini.

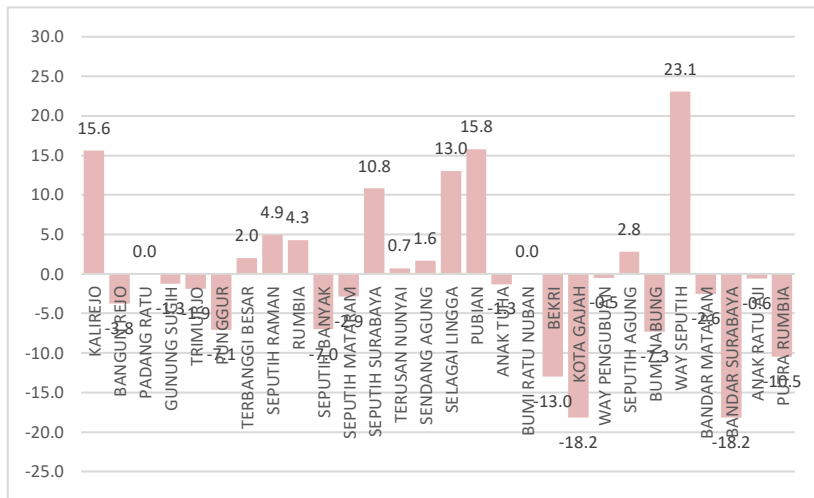
Grafik 143. Indeks Paritas Peserta Didik Jenjang Kelompok Bermain



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas seluruh anak sebagai peserta didik jenjang kelompok bermain di Kabupaten Lampung Tengah keseluruhan sebesar 0.99, angka ini menunjukkan tidak ada kesenjangan kinerja berarti antara peserta didik perempuan dan laki-laki. Untuk disparitas gender terjadi kesenjangan sebesar -0,7, artinya kinerja perempuan lebih rendah. Pada grafik di atas tergambar indeks paritas pada seluruh kecamatan dari 0.69 (Kota Gajah dan Bandar Surabaya) hingga 1.60 (Way Seputih). Grafik selanjutnya memberikan gambaran disparitas gender pada jenjang kelompok bermain.

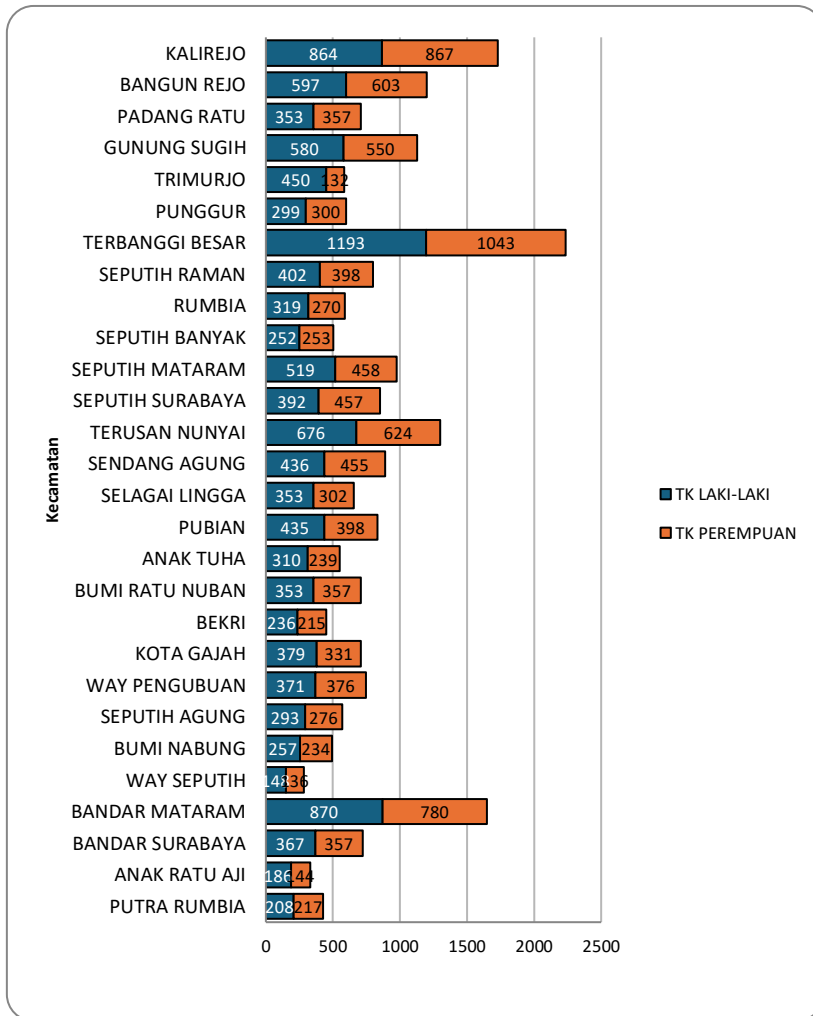
Grafik 144. Disparitas Gender Peserta Didik Jenjang Kelompok Bermain



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik berikut menunjukkan jumlah peserta didik jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan gender. Kecamatan Terbanggi Besar mencatat angka tertinggi dengan total 2.236 peserta didik, terdiri dari 1.193 perempuan dan 1.043 laki-laki. Sebaliknya, Kecamatan Bumi Nabung memiliki jumlah peserta didik terendah, yaitu 471 peserta didik, dengan rincian 234 perempuan dan 237 laki-laki. Perbedaan signifikan ini menunjukkan ketimpangan partisipasi pendidikan pada jenjang TK, yang dapat dipengaruhi oleh faktor demografis, ketersediaan fasilitas pendidikan, serta tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dini. Rahayu (2021) menyoroti bahwa kecenderungan jumlah peserta didik perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada pendidikan TK sering kali disebabkan oleh stereotip gender.

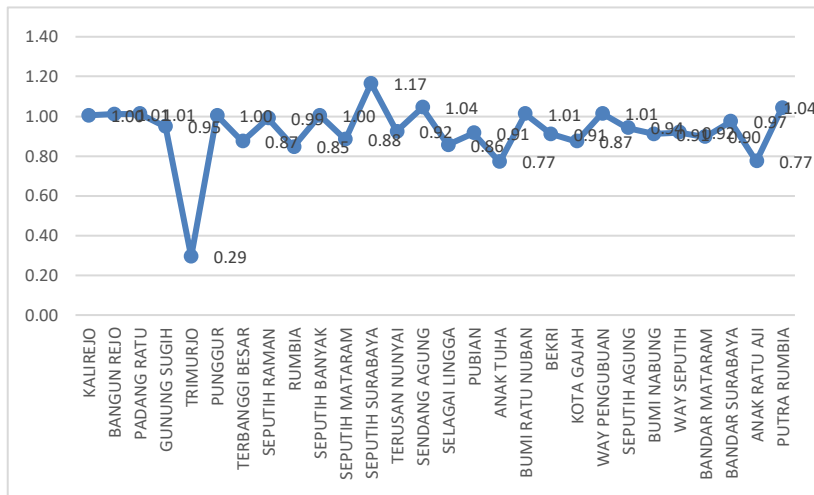
Grafik 145. Peserta Didik Jenjang Kelompok Taman Kanak-kanak



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Anak perempuan dianggap lebih cocok untuk kegiatan belajar di usia dini, sementara anak laki-laki cenderung diajak terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Selain itu, akses pendidikan lebih baik di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan turut memengaruhi ketimpangan jumlah peserta didik. Data ini menggarisbawahi pentingnya intervensi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan TK secara merata di seluruh kecamatan. Hal ini termasuk mengatasi hambatan sosial dan geografis yang memengaruhi akses pendidikan anak usia dini.

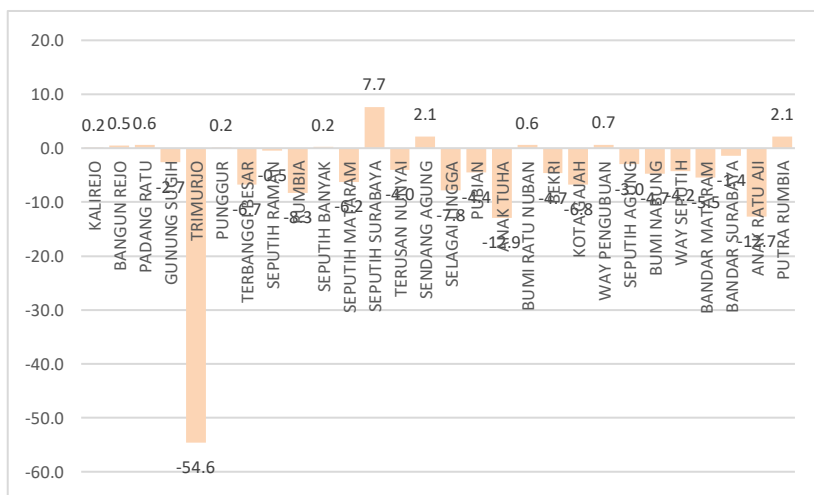
Grafik 146. Indeks Paritas Peserta Didik Jenjang Taman Kanak-kanak



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas seluruh anak sebagai peserta didik jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Lampung Tengah keseluruhan sebesar 0.92, angka ini menunjukkan ada kesenjangan kinerja antara peserta didik perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih rendah yaitu 0.92. Untuk disparitas gender terjadi kesenjangan sebesar -4,2. Pada grafik di atas tergambar indeks paritas pada seluruh kecamatan dari 0.29 (Trimurjo) hingga 1.17 (Seputih Surabaya).

Grafik 147. Disparitas Gender Peserta Didik Jenjang Taman Kanak-kanak



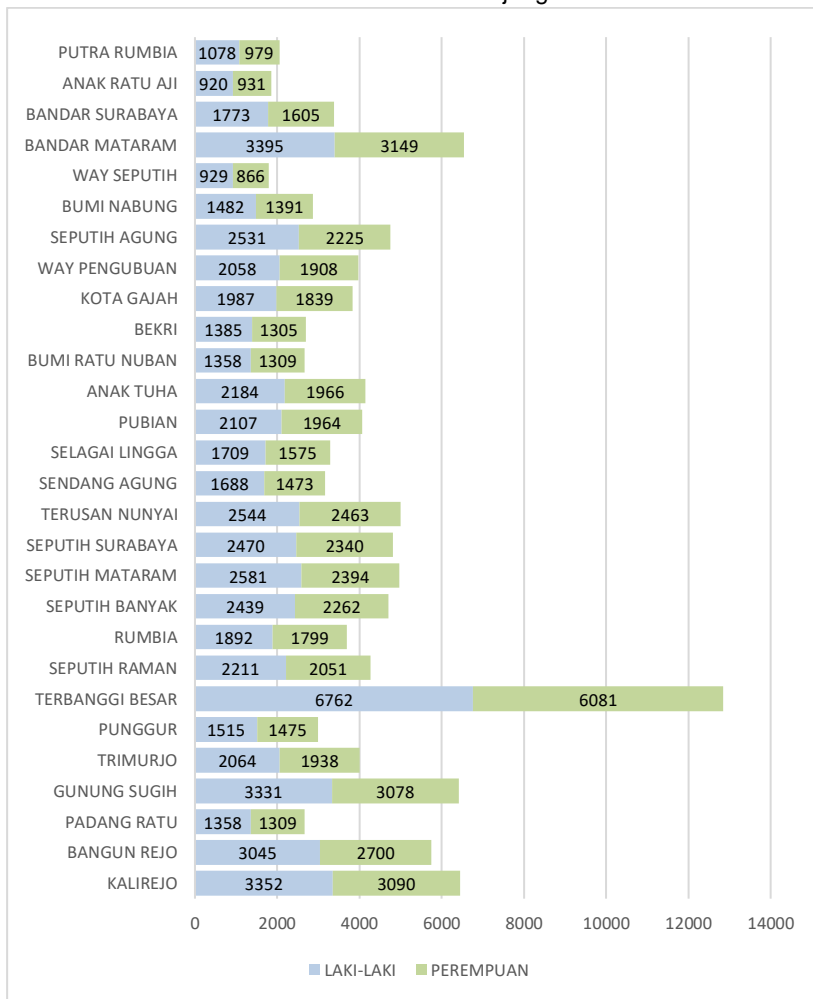
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik di atas memberikan gambaran disparitas gender pada jenjang taman kanak-kanak. Secara keseluruhan, kesenjangan gender pada tingkat sekolah ini sebesar -

4,2 artinya perempuan tertinggal sebesar 4,2 persen. Dengan ketertinggalan terendah di Trimurjo (54,5 persen) dan capaian anak perempuan tertinggi di Seputih Surabaya (unggul 7,7 persen).

Grafik berikut ini menunjukkan jumlah peserta didik tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan distribusi yang menarik antara siswa laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan. Kecamatan Terbangi Besar memiliki jumlah siswa perempuan tertinggi sebesar 6.762, dengan siswa laki-laki sebanyak 6.081, menjadikannya wilayah dengan total peserta didik terbanyak. Sebaliknya, Kecamatan Anak Ratu Aji mencatat jumlah siswa terendah, yaitu 920 laki-laki dan 931 perempuan.

Grafik 148. Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar



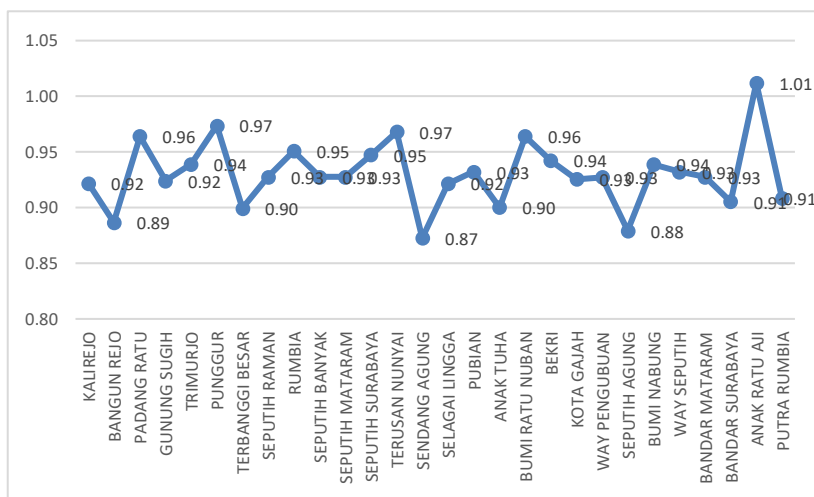
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses pendidikan dan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Namun, data ini menunjukkan kecenderungan positif, di mana jumlah siswa perempuan lebih banyak di hampir semua kecamatan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan di wilayah tersebut.

Perbandingan antara Kecamatan Terbangi Besar dan Anak Ratu Aji menunjukkan selisih jumlah peserta didik yang signifikan. Kecamatan Terbangi Besar memiliki total siswa sekitar 12.843, sementara Anak Ratu Aji hanya 1.851. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor demografis seperti jumlah penduduk, keberadaan fasilitas pendidikan, atau distribusi penduduk yang tidak merata. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor ini secara mendalam.

Grafik 149. Indeks Paritas Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indeks paritas peserta didik jenjang Sekolah Dasar secara umum 0.92, angka ini menunjukkan ada kesenjangan kinerja antara peserta didik perempuan dan laki-laki dengan kinerja perempuan lebih rendah.

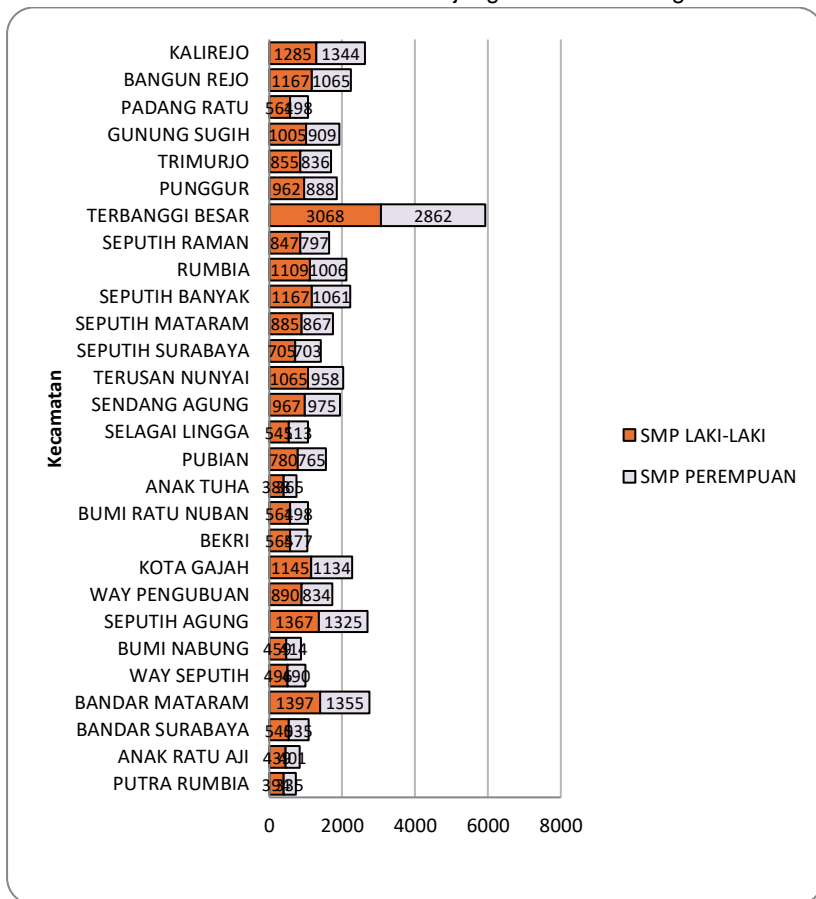
Grafik 150. Disparitas Gender Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Disparitas gender terbesar terjadi di Sendang Agung dimana kinerja perempuan tertinggal sebesar 6,8 persen. Secara keseluruhan kesenjangan kinerja bidang ini menunjukkan perempuan tertinggal sebesar 3,9 persen dibandingkan laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Grafik 151. Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama

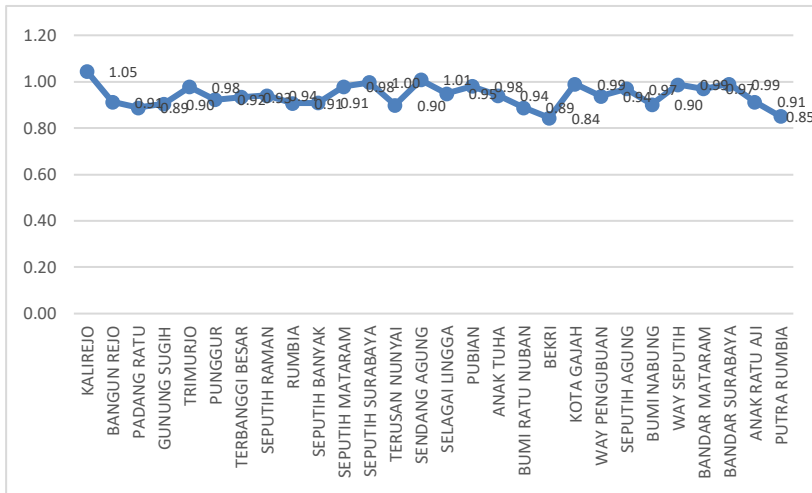


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas merupakan data jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang SMP di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang SMP paling tinggi adalah Terbanggi Besar dengan jumlah laki-laki sebanyak 3068 orang dan Perempuan sebanyak 2862 orang. Peringkat kedua, yaitu Bandar Mataram dengan jumlah laki-laki 1397 orang dan perempuan berjumlah 1355 orang. Ketiga, Seputih Agung dengan jumlah laki-laki 1367 orang dan perempuan 1325 orang. Adapun jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang SMP paling rendah adalah kecamatan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki sebanyak 394 orang dan perempuan 335 orang. Kedua, Anak Tuha dengan jumlah laki-laki 388 orang dan perempuan 365 orang. Ketiga, Anak Ratu Aji dengan jumlah laki-laki 439 orang dan perempuan 401 orang.

Secara umum, indeks paritas keseluruhan peserta didik jenjang SMP sebesar 0.95. Angka ini dipandang moderat (kinerja seimbang) antara perempuan dan laki-laki. Kecamatan dengan indeks paritas perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki antara lain Kalirejo (1,05), Kotagajah (0,99) dan Way Seputih (0,99). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

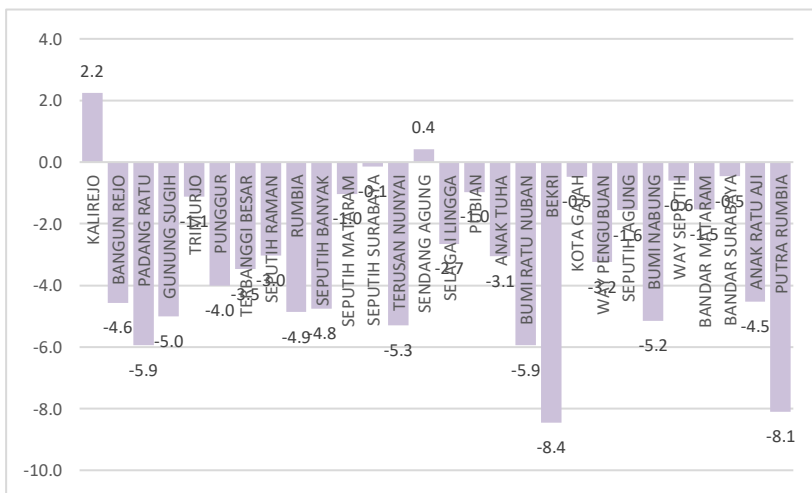
Grafik 152. Indeks Paritas Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik selanjutnya menunjukkan data kesenjangan gender (disparitas gender) yang secara keseluruhan terjadi kesenjangan sebesar 2,8 persen dengan arah kesenjangan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki sebesar angka tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa kecamatan dengan kinerja perempuan lebih unggul dengan tingkat perbedaan sebesar 2,2 persen (Kalirejo) dan 0,4 persen (Sendang Agung). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 153. Disparitas Gender Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama

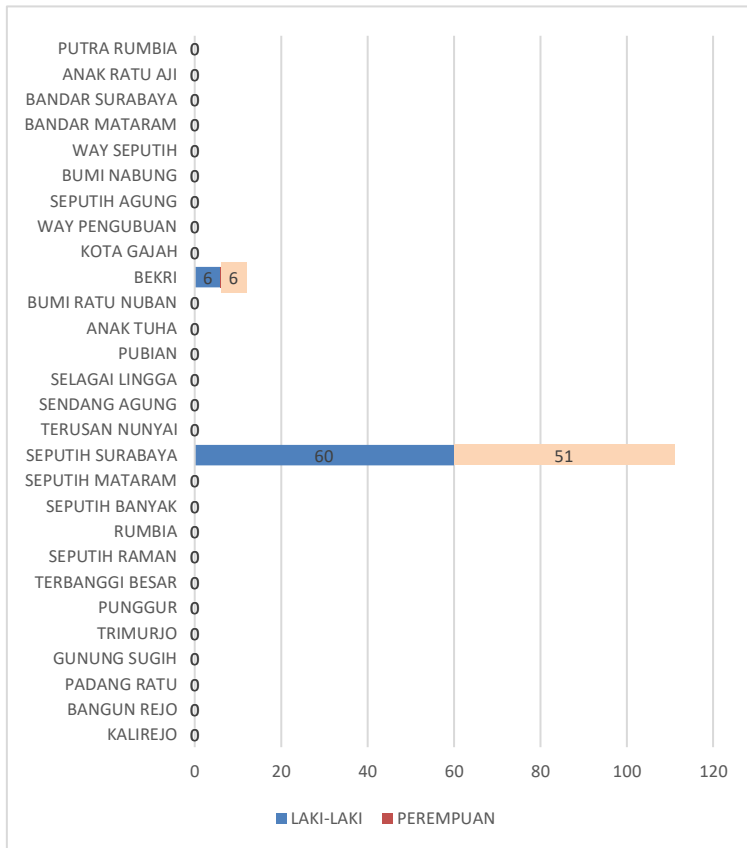


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Selain sekolah formal, terdapat satuan Pendidikan sejenis diluar sekolah. Grafik berikut ini menunjukkan data jumlah peserta didik berdasarkan gender pada program

SPS (Satuan Pendidikan Sejenis) di Kabupaten Lampung Tengah. Dari grafik terlihat dominasi perempuan dalam partisipasi program ini di Kecamatan Seputih Surabaya, dengan 51 perempuan dan 60 laki-laki, menjadikannya kecamatan dengan jumlah peserta tertinggi. Di sisi lain, mayoritas kecamatan lainnya, seperti Kalirejo, Bangun Rejo, dan Trimurjo, tidak mencatat adanya peserta baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan tantangan dalam cakupan akses pendidikan jenis ini di wilayah tersebut.

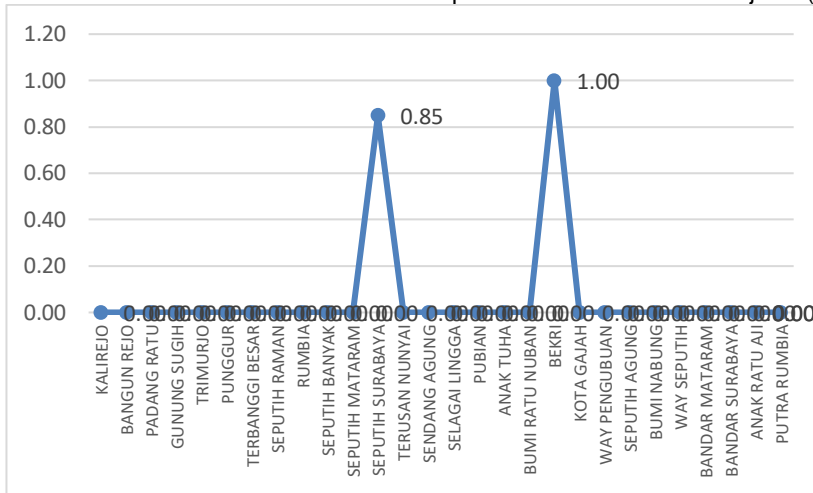
Grafik 154. Peserta pada Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Perbandingan ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi peserta berdasarkan gender dan wilayah. Dalam penelitian, kesenjangan gender dalam pendidikan nonformal sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas, perbedaan budaya, dan prioritas peran gender dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pemerataan partisipasi, intervensi pemerintah atau lembaga pendidikan diperlukan, seperti penyediaan infrastruktur, program sosialisasi, dan pemberian dukungan kepada masyarakat di daerah yang kurang terlayani.

Grafik 155. Indeks Paritas Peserta pada Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

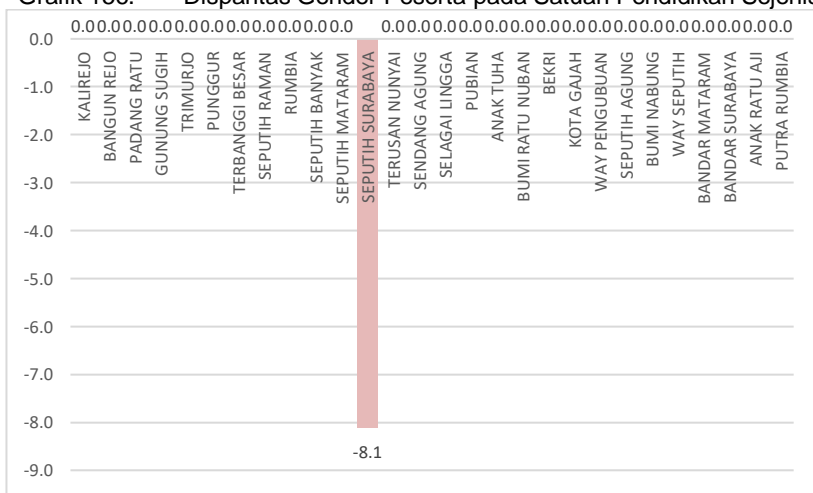


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Secara keseluruhan hanya ada dua kecamatan yang memiliki penduduk sebagai peserta pendidikan sejenis, yaitu Seputih Surabaya dan Bekri. Pada Seputih Surabaya indeks paritas sebesar 0.85 artinya kinerja perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki. Untuk kecamatan lain, yaitu Bekri kinerja seimbang. Secara keseluruhan, indeks paritas sebesar 0.86 artinya kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada angka disparitas gender, terjadi kesenjangan sebesar -7.3 persen dimana kinerja perempuan tertinggal sebesar angka tersebut dibandingkan laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

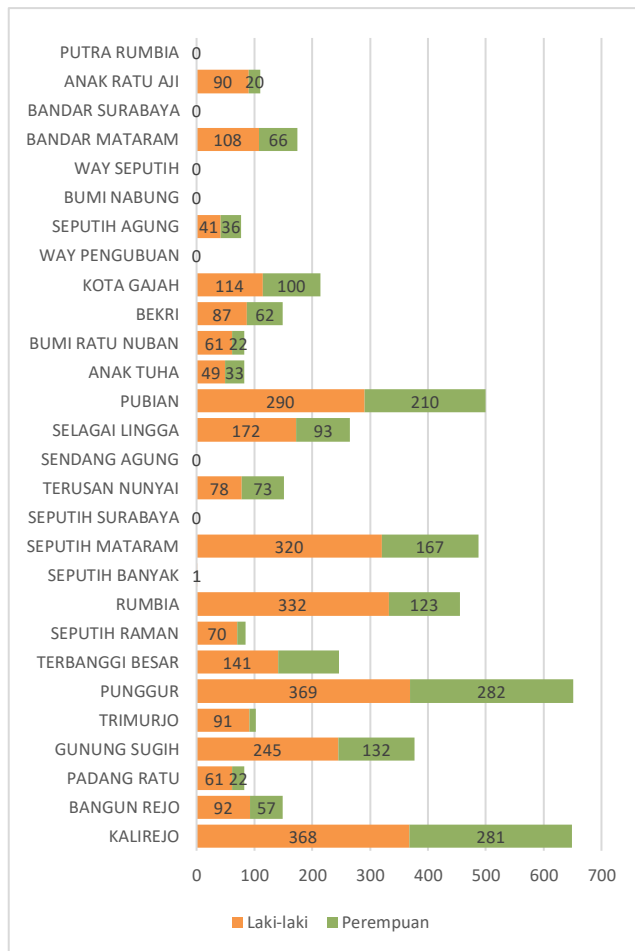
Grafik 156. Disparitas Gender Peserta pada Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

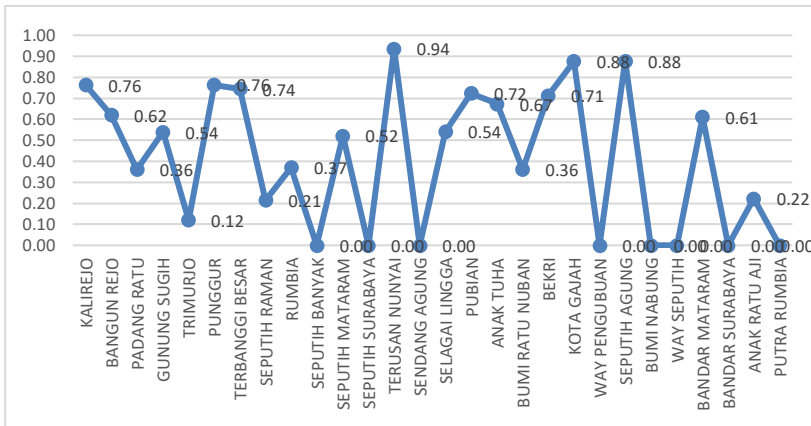
Grafik berikutnya merupakan data jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang PKBM di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang PKBM paling tinggi adalah Punggur dengan jumlah laki-laki sebanyak 369 orang dan Perempuan sebanyak 282 orang. Peringkat kedua, yaitu Kalirejo dengan jumlah laki-laki 368 orang dan perempuan berjumlah 281 orang. Ketiga, Pubian dengan jumlah laki-laki 290 orang dan perempuan 210 orang. Adapun jumlah peserta didik berdasarkan gender jenjang PKBM paling rendah adalah kecamatan Seputih Surabaya, Sendang Agung, Way Pengubuan, Bumi Nabung, Way Seputih, Bandar Surabaya, dan Putra Rumbia dengan jumlah laki-laki sebanyak 0 orang dan perempuan 0 orang di masing-masing kecamatan. Kedua, Seputih Banyak dengan jumlah laki-laki 1 orang dan perempuan 0 orang. Ketiga, Seputih Agung dengan jumlah laki-laki 41 orang dan perempuan 36 orang.

Grafik 157. Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik 158. Indeks Paritas Peserta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

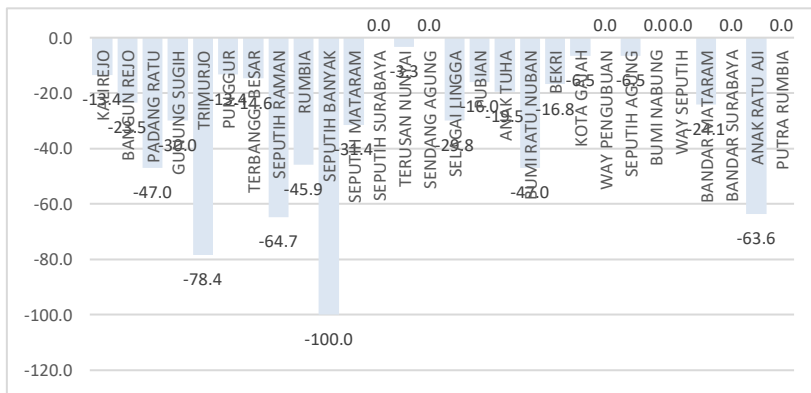


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Indeks Paritas diatas menunjukkan perbandingan nilai indikator di berbagai lokasi, hampir mendekati nilai 1,00 dengan kecamatan Kalirejpo yang menjadi nilai tertinggi mencapai 0,76. dan kecamatan Trimuro 0.12 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan lokasi lain, sehingga membutuhkan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan kondisi yang relatif merata, dengan hanya beberapa lokasi yang menjadi outlier.

Disparitas gender cenderung berfluktuasi dengan mayoritas mendekati dibawah nilai -100,0. Lokasi dengan performa terbaik adalah Seputih Matarm mencapai -100,0 , sementara nilai terendah kecamatan Sendang -,3 yang sedikit di bawahrata-rata.

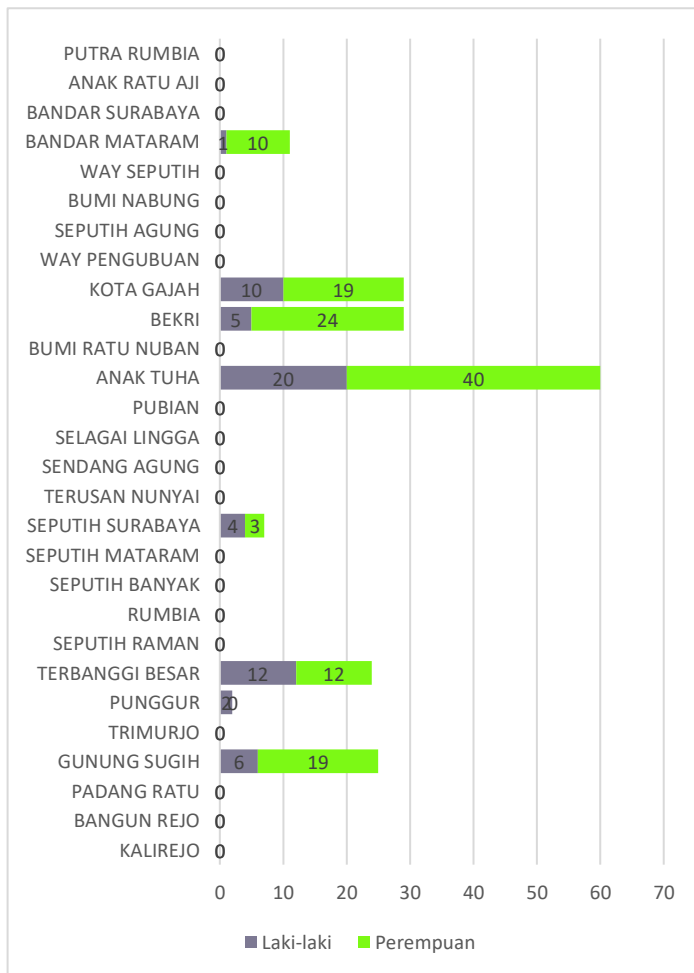
Grafik 159. Disparitas Gender di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Ida Kintamani (2008) menyebutkan bahwa perempuan sering kali menghadapi kendala akses pendidikan akibat faktor sosial dan budaya. Selain itu, GEA Hanin Nisacita (2019) menunjukkan bahwa meskipun kesenjangan gender dalam pendidikan formal berkurang, perempuan masih lebih jarang berpartisipasi dalam pendidikan informal dan pasar kerja. Faktor ini relevan dengan data Lampung Tengah, di mana dominasi perempuan dalam kursus di beberapa kecamatan mungkin mencerminkan peran domestik yang lebih menonjol atau peluang kerja yang terbatas bagi mereka. Jika dibandingkan, wilayah dengan jumlah peserta kursus tertinggi seperti Bumi Ratu Nuban sangat kontras dengan wilayah tanpa partisipasi seperti Kalirejo.

Grafik 160. Peserta Kursus

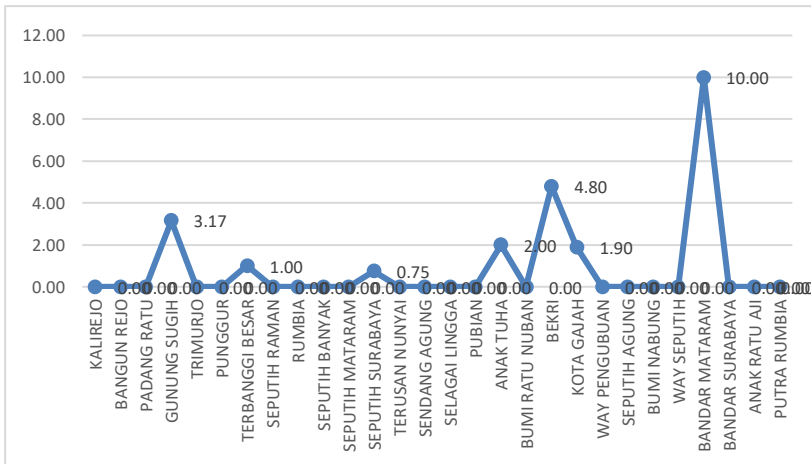


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik di atas menjelaskan jumlah peserta didik kursus berdasarkan gender di Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa jumlah perempuan jauh lebih dominan dibandingkan laki-laki. Kasus tertinggi terdapat di wilayah Bumi Ratu Nuban dengan

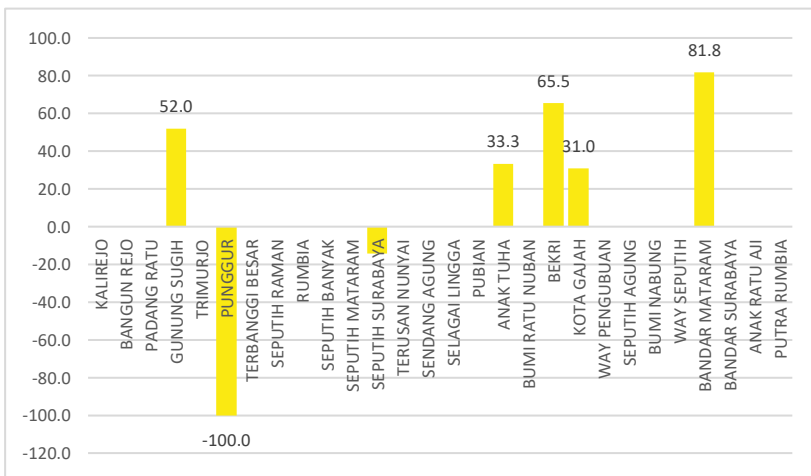
jumlah peserta perempuan sebanyak 40 orang dan 20 laki-laki. Sebaliknya, di beberapa kecamatan seperti Kalirejo dan Padang Ratu, tidak ditemukan peserta kursus baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan distribusi dan partisipasi pendidikan nonformal berdasarkan lokasi geografis.

Grafik 161. Indeks Paritas Kegiatan Kursus



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

Grafik 162. Disparitas Gender Kegiatan Kursus

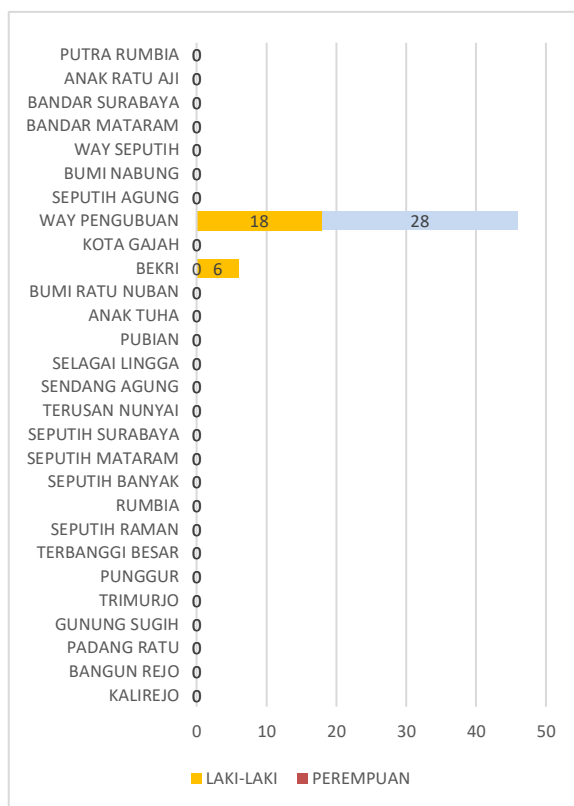


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Data grafik berikut menunjukkan jumlah peserta didik berdasarkan gender pada program TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa partisipasi perempuan lebih dominan di beberapa kecamatan, terutama di Way Pengubuan dengan 28 peserta perempuan dibandingkan dengan 18 laki-laki.

Kecamatan Bekri juga mencatat adanya partisipasi, namun dengan jumlah yang lebih kecil, yaitu 6 perempuan dan tanpa partisipasi laki-laki. Sebagian besar kecamatan lainnya, seperti Kalirejo, Trimurjo, dan Terusan Nunyai, tidak memiliki data peserta, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan rendahnya partisipasi atau kurangnya fasilitas pendidikan semacam ini di wilayah tersebut.

Grafik 163. Peserta Taman Pendidikan Al Quran (TPA)

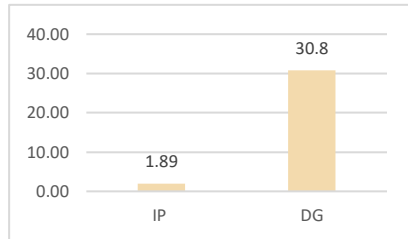


Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Kesenjangan ini mencerminkan tantangan dalam pemerataan pendidikan berbasis agama di wilayah pedesaan. Nisacita (2019) menyoroti pengaruh gender dan faktor ekonomi terhadap akses pendidikan. Perempuan cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk mengakses pendidikan formal, namun tampak lebih dominan di kegiatan nonformal, seperti TPA, karena peran budaya dan religius yang lebih terfokus pada mereka. Larashati (2022) mengungkapkan bahwa yang mengaitkan partisipasi perempuan dalam pendidikan nonformal dengan tanggung jawab domestik dan peran komunitas. Untuk meningkatkan partisipasi di wilayah dengan angka rendah, diperlukan pendekatan strategis, seperti penguatan infrastruktur pendidikan berbasis komunitas, pemberian insentif bagi keluarga untuk mendorong partisipasi laki-laki, dan program sosial yang merangkul kelompok masyarakat terpencil. Hal ini akan membantu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, baik secara gender.

Secara keseluruhan, indeks paritas sebesar 1.89 memperlihatkan kinerja perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki dengan keunggulan sebesar 30.8 persen (disparitas gender). Selengkapnya lihat grafik di bawah ini.

Grafik 164. Indeks Paritas dan Disparitas Gender pada Taman Pendidikan Al Quran.



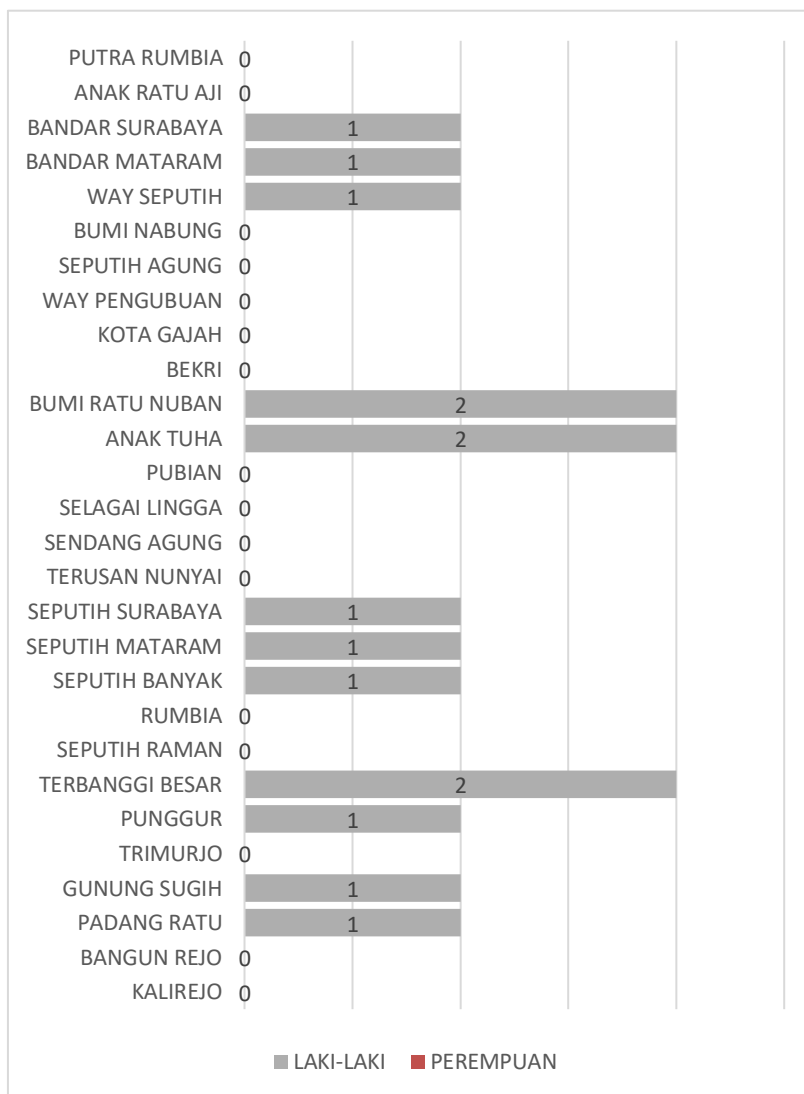
Sumber: diolah dari data sekunder, 2024

5) Kluster Perlindungan Khusus

Pada kluster perlindungan khusus ini, beberapa hak-hak anak antara lain perlindungan pada anak korban kekerasan dan penelantaran, perlindungan pada anak untuk dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA), perlindungan anak dari pornografi, NAPZA dan infeksi HIV/AIDS, perlindungan pada anak korban bencana dan konflik, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, hak anak korban jaringan terorisme, hak perlindungan pada anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Grafik berikut ini menunjukkan adanya representasi yang sangat terbatas, baik dari laki-laki maupun perempuan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Fakta bahwa hanya terdapat laki-laki di beberapa kecamatan saja yang tercatat, yaitu kecamatan Terbanggi Besar, Anak Tuha, dan Bumi Ratu Nuban dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 2 orang di masing-masing kecamatan tersebut. Peringkat kedua, kecamatan Padang Ratu, Gunung Sugih, Punggur, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Way Seputih, Bandar Mataram, dan Bandar Surabaya dengan jumlah anak laki-laki 1 orang di masing-masing kecamatan.

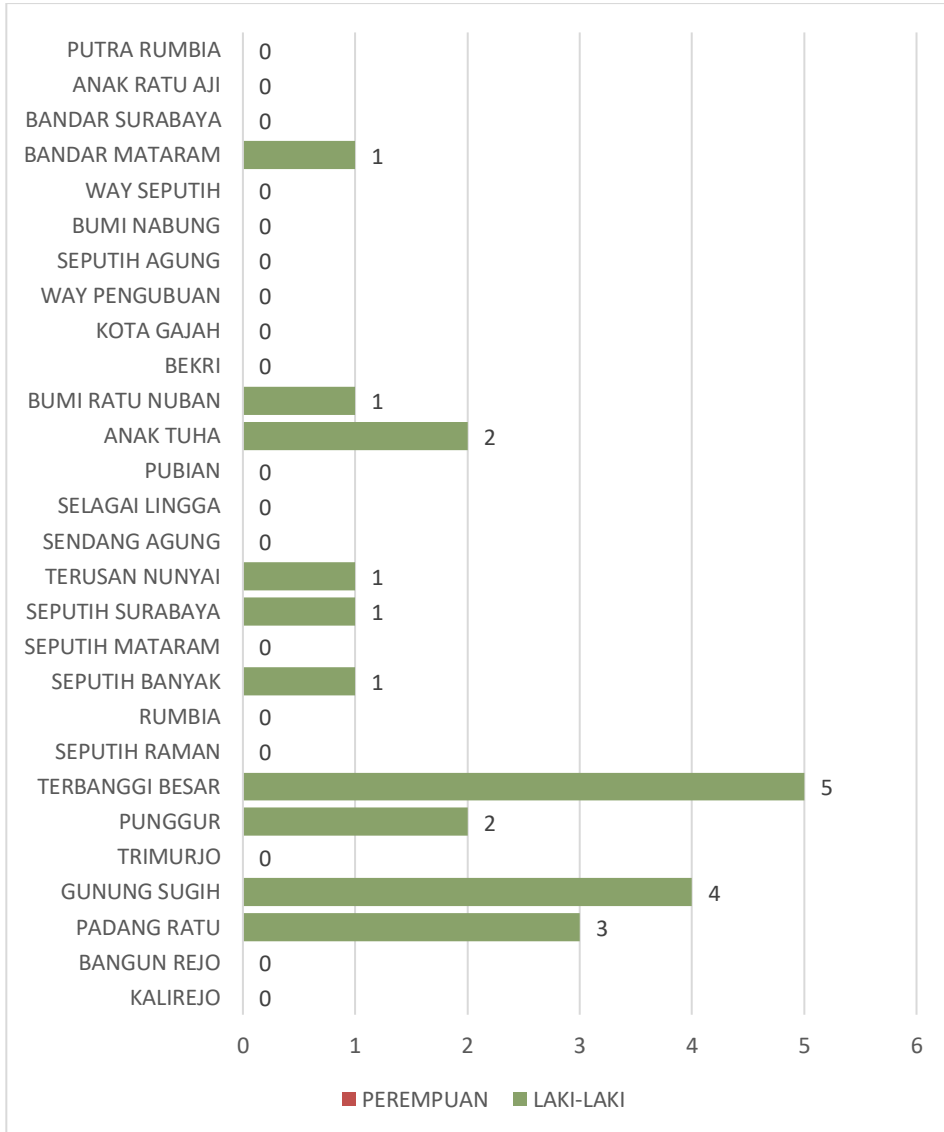
Grafik 165. Anak Berhadapan dengan Hukum



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Pada grafik berikut ini menggambarkan kondisi perkara hukum yang telah memasuki jenjang pengadilan. Di Kabupaten Lampung Tengah, tercatat terdapat 21 perkara hukum yang melibatkan anak, dengan presentase 100 % anak dengan jenis kelamin lak-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

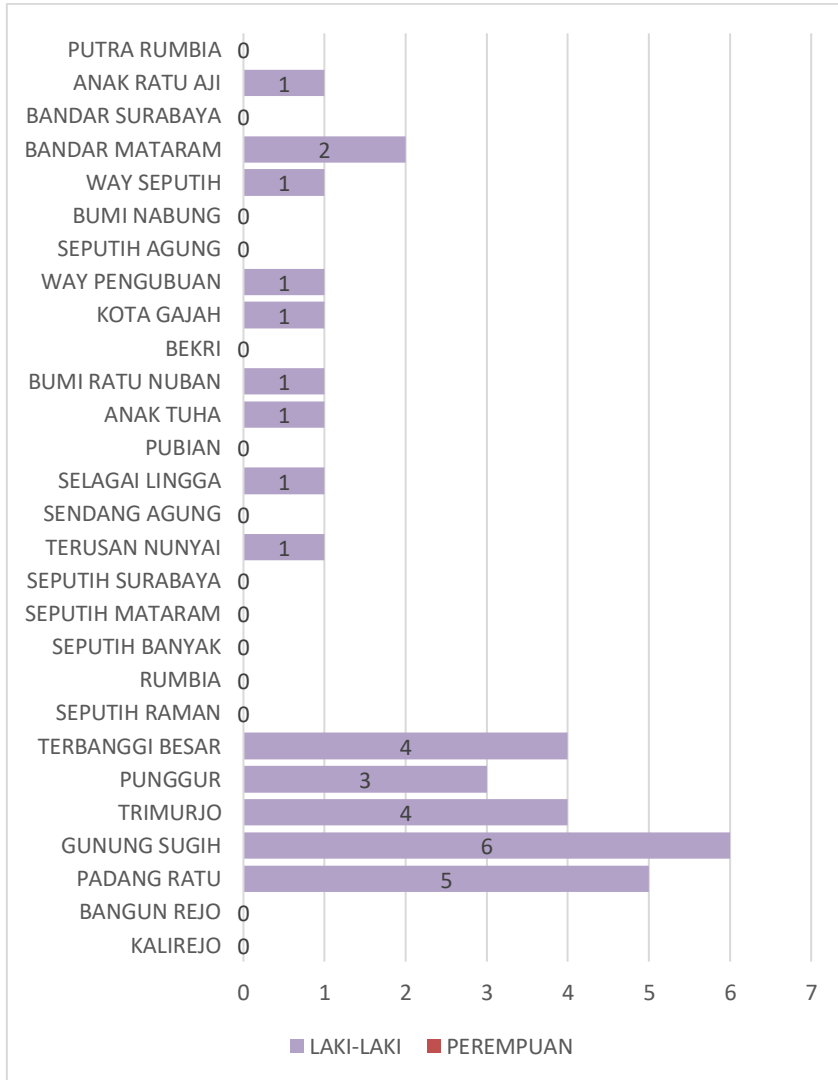
Grafik 166. Perkara Anak pada Pengadilan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Di tingkat Kejaksaan, tercatat 32 perkara yang melibatkan anak, dengan komposisi seluruhnya adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki. Daerah dengan perkara anak paling tinggi adalah Gunung Sugih (6 orang), Padang Ratu (5 orang), dan Terbanggi Besar serta Trimurjo dengan masing-masing perkara 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

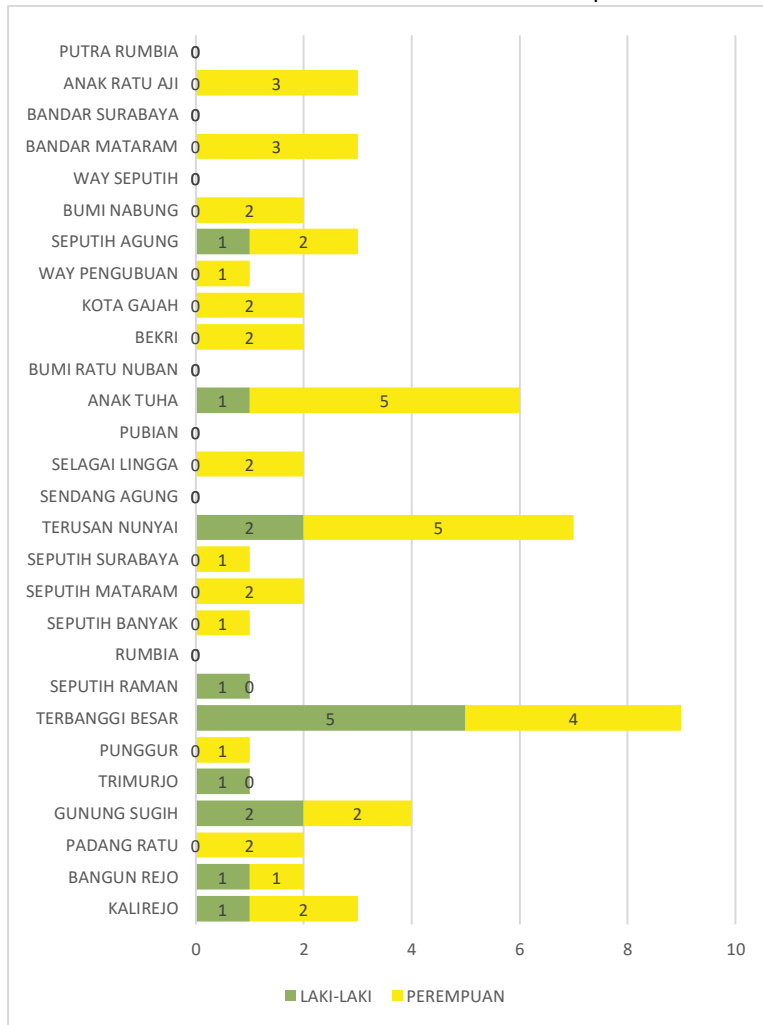
Grafik 167. Perkara Anak pada Kejaksaan



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

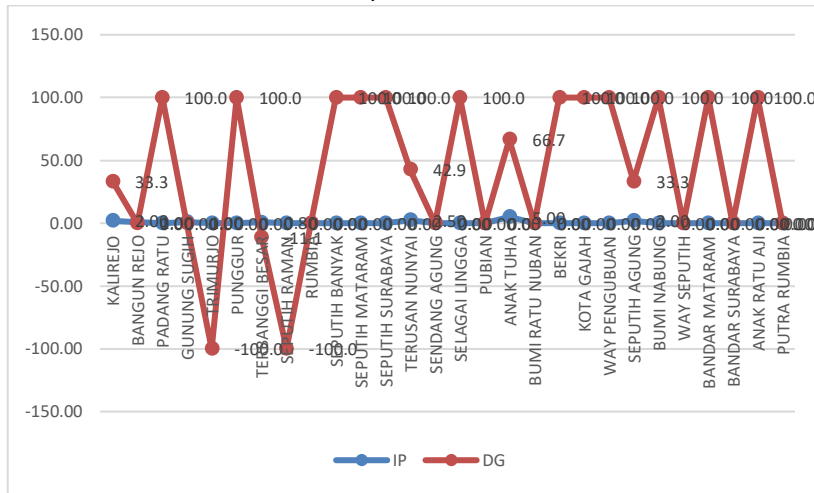
Grafik berikut menunjukkan jumlah korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 58 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan 43 orang. Terdapat 3 kecamatan dengan jumlah korban tertinggi, pertama kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah perempuan 4 orang dan laki-laki 5 orang. Kedua, kecamatan Terusan Nunyai dengan jumlah korban perempuan 5 orang dan korban laki-laki 2 orang. Ketiga, Anak Tuha dengan jumlah korban perempuan 5 orang dan laki-laki 1 orang.

Grafik 168. Korban Kekerasan terhadap Anak



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Grafik 169. Indeks Paritas dan Disparitas Gender Korban Kekerasan terhadap Anak



Sumber: diolah dari data sekunder, 2024.

Indek paritas dan disparitas gender menunjukkan bahwa kekerasan anak masih terjadi. Pada tindakan kekerasan terhadap anak menunjukkan perempuan memiliki indeks lebih tinggi yaitu 2.87 sedangkan kesenjangan (disparitas gender) menunjukkan angka 48,3 persen anak perempuan lebih tinggi menjadi korban kekerasan

BAB V

PENUTUP

Data bidang kependudukan, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan perangkat daerah, kesehatan, dan data khusus anak telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Meskipun tidak mampu mencakup seluruh aspek bidang pembangunan, namun data-data yang ada mampu memberikan gambaran pada kita semua untuk dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan dengan pengarusutamaan gender dan anak.

Terima kasih kepada seluruh dinas dan perangkat daerah terkait yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan berupa data terpilah gender, sehingga penulisan buku ini dapat terlaksana.

Semoga buku ini memberikan informasi yang dapat menjadi rujukan pengambilan berbagai keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R. P., & Wahyono, B. (2021). Mutu Pelayanan Kesehatan Setelah Persalinan Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Pelayanan Ibu Nifas. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(2), 282-290.
- Boniol, M., Mclsaac, M., Xu, L., Wuliji, T., Diallo, K., & Campbell, J. (2019). Gender equity in the health workforce: analysis of 104 countries (No. WHO/HIS/HWF/Gender/WP1/2019.1). World Health Organization.
- Farida, D., & Rahmadi, T. (2019). Faktor Determinan Pemanfaatan Tenaga Kesehatan dalam Persalinan di Wilayah Terpencil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 25-35. DOI: 10.21109/jkm.v14i1.2389.
- Gill, D. L., & Williams, L. (2017). *Psychology Of Women In Sport And Physical Activity*. Human Kinetics.
- Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA: FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 64-77.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Kintamani, Ida. (2008). *Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14 No. 75, 1069-1091.
- Larashati, Anisa, et al. (2022). *Analisis Faktor-faktor Pengaruh Rendahnya Partisipasi Pendidikan Nonformal di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Vol. 5 No. 2, 123-134.
- Lestari, N., & Adi, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Ibu Hamil dalam Program Imunisasi Tetanus Toxoid di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 45-54.
- Listyarini, N., & Poerwono, D. (2011). Faktor-Faktor Individual Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Pati Jawa Tengah Ke Malaysia (Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tayu) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Marlina, S., et al. (2023). *Gender Equality and Women's Representation in Indonesian Public Sector*. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*. Doi: 10.1016/j.jkpi.2023.01.001.
- Maryanto, E. P. (2021). Kepatuhan Ibu Hamil Terhadap Konsumsi Tablet Besi: Suatu Kajian Literature Review. *Syifa'medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 12(1), 1-10.
- Mufrikhah, S. (2020). KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: Analisis Kondisi Kultural Dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 47-66. DOI: 10.21580/Jpw.V2i2.8070 .
- Munawaroh, S., Wulandari, A., & Fitriani, S. (2021). *Peran Kader Posyandu Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat: Kajian Keterlibatan Gender*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-134.
- Muniroh, T., Widiastuti, N., & Anggraini, L. (2019). *Kesetaraan Gender Dalam Dunia Akademik Dan Penelitian Di Indonesia*. *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, 8(3), 123-140.
- Nisacita, GEA Hanin. (2019). *Analisis Pengaruh Kesenjangan Gender dalam Pendidikan dan Tenaga Kerja terhadap Peri Indonesia*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

- Nuraini, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Hamil di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-132.
- Nurhayati, S. (2021). *Kesenjangan Akses Pendidikan Anak Usia Dini: Faktor Ekonomi Dan Infrastruktur Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 45–60.
- Octavianti, M. (2016). Komunikasi nonverbal proksemik di rumah tidak layak huni. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 10-27.
- Purwanti, E., Santoso, D., & Hidayah, R. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kader Posyandu Di Desa XYZ*. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-59.
- Rahayu, T. (2021). *Analisis Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 35-48.
- Rahmawati, L., & Susanto, H. (2023). Peran Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa: Kajian terhadap Gender dan Efektivitas Program. *Jurnal Pembangunan Desa*, 12 (1), 85-100. DOI: 10.1234/jpd.v12i1.2023.
- Ridgeway, C. L. (2011). *Framed By Gender: How Gender Inequality Persists In The Modern World*. Oxford University Press.
- Saifullah, J. I., & Budiarti, W. (2023). Determinan Penggunaan Kontrasepsi Modern pada Pria Berstatus Kawin di Indonesia. *Jurnal Keluarga Berencana*, 8(2), 70-78.
- Sari, D., Utami, W., & Pratama, R. (2020). *Analisis Distribusi Siswa Dan Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Lampung Tengah*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 112-124.
- Sari, R., Prabowo, H., & Wijaya, A. (2019). Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Kunjungan Antenatal Care di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(4), 89-97.
- Setiawan, A. I. B. (2024). Analisis Akar Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling*, 79-87.
- Setiawan, D. (2020). "Disparitas Gender dalam Pendidikan Dasar: Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 45-56.
- Sjahriani, T., & Faridah, V. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. *Jurnal Kebidanan*, 5(2), 106-115.
- Suparno, Paul. (2001). *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ulama, E. K., Priandika, A. T., & Ariany, F. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sapi Siap Jual (Ternak Sapi Lembu Jaya Lestari Lampung Tengah) Menggunakan Metode Saw. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(2), 138-144.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Dampak Pernikahan Anak Di Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- UNESCO. (2021). *Women In Science: Closing The Gender Gap*. Paris: UNESCO Publishing.
- Yulianto, A. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Meningkatkan Kesadaran Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(3), 112-120.
- Yusoff, Y. M., & Lee, M. C. (2020). *Gender And Sports Coaching In Malaysia: Challenges And Prospects*. *Asian Social Science*, 16(6), 119-130.